



Jurnal Penelitian

POLITIK

Vol.18, No.2, Desember 2021

TREN KEMUNDURAN DEMOKRASI?

- Perbandingan (De)Konsolidasi Demokrasi:
Studi Penurunan Kualitas Demokrasi di Indonesia dan Filipina Pada Periode 2016-2020
- Kemunduran Demokrasi dan Kebebasan Pers di Asia Tenggara:
Refleksi dari Enam Negara
- Kegagalan Demokratisasi di Mesir Pasca-Arab Spring
- Kemunduran Demokrasi Tata Kelola SDA:
Penguatan Oligarki dan Pelemahan Partisipasi *Civil Society*
- *"Russian Propaganda" in the Context of 2019 Indonesian Presidential Election:
Politicization of Nationalistic Sentiments*
- Review Buku
Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Retorika di Asia Tenggara

Jurnal Penelitian Politik	Vol. 18	No. 2	Hlm. 125-221	Jakarta, Desember 2021	ISSN 1829-8001
------------------------------	---------	-------	--------------	---------------------------	-------------------



Jurnal Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2 Politik-LIPI) merupakan media pertukaran pemikiran mengenai masalah-masalah strategis yang terkait dengan bidang-bidang politik nasional, lokal, dan internasional; khususnya mencakup berbagai tema seperti demokratisasi, pemilihan umum, konflik, otonomi daerah, pertahanan dan keamanan, politik luar negeri dan diplomasi, dunia Islam serta isu-isu lain yang memiliki arti strategis bagi bangsa dan negara Indonesia.

P2 Politik-LIPI sebagai pusat penelitian milik pemerintah, dewasa ini dihadapkan pada tuntutan dan tantangan baru, baik yang bersifat akademik maupun praktis kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan persoalan dengan otonomi daerah, demokrasi, HAM dan posisi Indonesia dalam peredaran regional dan internasional. Secara akademik, P2 Politik-LIPI dituntut menghasilkan kajian-kajian unggul yang bisa bersaing dan menjadi rujukan ilmiah, baik pada tingkat nasional maupun internasional. Sementara secara moral, P2 Politik-LIPI dituntut untuk memberikan arah dan pencerahan bagi masyarakat dalam rangka membangun Indonesia baru yang rasional, adil, dan demokratis. Karena itu, kajian-kajian yang dilakukan tidak semata-mata berorientasi praksis kebijakan, tetapi juga pengembangan ilmu-ilmu pengetahuan sosial, khususnya perambatan konsep dan teori-teori baru ilmu politik, perbandingan politik, studi kawasan dan ilmu hubungan internasional yang memiliki kemampuan menjelaskan berbagai fenomena sosial-politik, baik lokal, nasional, regional maupun internasional.

Mitra Bestari

Prof. Dr. Firman Noor, M.A (*Ahli Kajian Pemikiran Politik, Pemilu dan Kepartaian*)
Prof. Dr. Tri Nuke Pudjiastuti, M.A (*Ahli Kajian Hubungan Internasional*)
Prof. Dr. Dewi Fortuna Anwar, M.A (*Ahli Kajian Hubungan Internasional*)
Prof. Dr. R. Siti Zuhro, M.A (*Ahli Kajian Otonomi Daerah dan Politik Lokal*)
Prof. Dr. Lili Romli (*Ahli Kajian Pemilu dan Kepartaian*)
Prof. Dr. Ikrar Nusa Bhakti (*Ahli Kajian Politik Internasional dan Keamanan*)
Dr. Siswanto (*Ahli Kajian Hubungan Internasional*)
Dr. Kurniawati Hastuti Dewi, S.I.P, M.A (Hons) (*Ahli Gender dan Politik*)
Dr. Sri Budi Eko Wardani, M.Si (*Ahli Kepemiluan dan Kepartaian*)
Dr. Yon Machmudi, M.A (*Ahli Studi Islam dan Timur Tengah*)
Dr. Adriana Elisabeth (*Ahli Kajian Hubungan Internasional*)
Drs. Hamdan Basyar, M.Si (*Ahli Studi Islam dan Timur Tengah*)
Athiqah Nur Alami, M.A (*Ahli Kajian Hubungan Internasional*)
Laksamana Madya TNI Dr. Amarulla Oktavian, S.T., M.Sc., D.E.S.D. (*Ahli Kajian Pertahanan dan Keamanan*)
Dr. Eko Priyo Purnomo (*Ahli Kajian Politik dan Ilmu Pemerintahan*)
Dr. Priyambudi Sulistiyanto (*Ahli Kajian Politik Asia Tenggara dan Indonesia*)
Prof. Xu Liping (*Ahli Kajian Politik Asia Tenggara dan Indonesia*)
Prof. Edward Aspinall (*Ahli Kajian Politik Asia Tenggara dan Indonesia*)
Prof. Ken Miichi (*Ahli Kajian Politik Islam dan Indonesia*)

**Penanggung Jawab
Pemimpin Redaksi**

Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI
Hayati Nufus, S.Hum., LL.M

Dewan Redaksi

Dr. Sri Nuryanti (*Ahli Kajian Kepartaian dan Pemilu*)
Dr. Dhurorudin Mashad (*Ahli Kajian Islam dan Timur Tengah*)
M. Nurhasim, S. IP, M. Si (*Ahli Kajian Pemilu dan Kepartaian*)
Dra. Awani Irewati, M.A (*Ahli Kajian ASEAN dan Perbatasan*)
Sandy Nur Ikfal R, M.Si.(Han) (*Ahli Kajian Hubungan Internasional dan Perbatasan*)

Sekretaris Redaksi

Dini Rahmiati, S.Sos., M.Si
Esty Ekawati, M.IP.
Tri Rainny Syafarani, S.Sos, M.A., M.SE
Wasisto Raharjo Jati, S.IP.
Putri Ariza Kristimanta, M.Si.(Han)

**Layouter
Produksi dan Sirkulasi
Alamat Redaksi**

Anggih Tangkas Wibowo, ST., MMSi
Adiyatnika, S.Kom
Pusat Penelitian Politik-LIPI, Widya Graha LIPI, Lantai III & XI
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 10 Jakarta Selatan 12710
Telp/Faks. (021) 520 7118, E-mail: penerbitan.p2p@gmail.com
Website: www.politik.lipi.go.id | <http://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp>

ISSN

p-: 1829-8001, e: 2502-7476
Terakreditasi Kemeristek Dikti Nomor 10/E/KPT/2019

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i–ii
Catatan Redaksi	iii–iv
Artikel	
• Perbandingan (De)Konsolidasi Demokrasi: Studi Penurunan Kualitas Demokrasi di Indonesia dan Filipina Pada Periode 2016-2020	125–140
<i>Damar Kristal</i>	
• Kemunduran Demokrasi dan Kebebasan Pers di Asia Tenggara: Refleksi dari Enam Negara	141–158
<i>M. Fajar Shodiq Ramadlan dan Romel Masykuri</i>	
• Kegagalan Demokratisasi di Mesir Pasca-Arab Spring	159–172
<i>Samir dan M. Hamdan Basyar</i>	
• Kemunduran Demokrasi Tata Kelola SDA: Penguatan Oligarki dan Pelemahan Partisipasi <i>Civil Society</i>	173–190
<i>Dini Suryani, Fathimah Fildzah Izzati, Imam Syafi'i, Pandu Yuhsina Adaba, Septi Satriani</i>	
• “Russian Propaganda” in the Context of 2019 Indonesian Presidential Election: Politicization of Nationalistic Sentiments	191–210
<i>Ahmad Nurcholis</i>	
• Review Buku Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Retorika di Asia Tenggara	211–218
<i>Pandu Prayoga</i>	
Tentang Penulis	219–221

CATATAN REDAKSI

Laporan yang dikeluarkan oleh The Economist Intelligence Unit (EIU) pada tahun 2020 menunjukkan adanya kualitas penurunan demokrasi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Hal yang sama juga ditemukan dalam Democracy Report 2021 yang dipublikasi oleh V-Dem Institute pada Maret 2021. Dalam kedua laporan tersebut ditunjukkan berbagai faktor yang menyebabkan penurunan kualitas demokrasi di berbagai negara, seperti penurunan kebebasan sipil, pers, keterlibatan militer dalam pemerintahan, dan sebagainya. Adanya penurunan kualitas demokrasi di berbagai negara ini menarik untuk dibahas lebih jauh secara akademik untuk melihat apa sebenarnya penyebab terjadinya tren ini, serta bagaimana perkembangannya ke depan. Hal ini menggugah redaksi untuk mengangkat judul “Tren Kemunduran Demokrasi?” sebagai tema dalam terbitan *Jurnal Penelitian Politik* Volume 18, No. 2 Tahun 2021. Edisi kali ini menyajikan lima artikel ilmiah dan satu review buku terkait dengan penurunan kualitas demokrasi di berbagai negara.

Artikel pertama ditulis oleh Damar Kristal dengan judul “**Perbandingan (De) Konsolidasi Demokrasi: Studi Penurunan Kualitas Demokrasi di Indonesia dan Filipina Pada Periode 2016-2020**”. Artikel ini mencoba membuat perbandingan penurunan kualitas demokrasi yang terjadi di Indonesia dan Filipina dalam kurun waktu lima tahun (2016-2020). Dengan menggunakan teori konsolidasi demokrasi dan teori populisme untuk menjelaskan faktor penyebab penurunan kualitas demokrasi, artikel ini menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang ada membuat proses konsolidasi demokrasi di kedua negara ini berubah menjadi proses (de)konsolidasi demokrasi.

Artikel kedua dengan judul “**Kemunduran Demokrasi dan Kebebasan Pers di Asia Tenggara: Refleksi Dari Enam Negara**” ditulis oleh M Fajar Shodiq Ramadlan dan

Romel Masykuri. Dalam artikel ini, penulis memaparkan bahwa tren kemunduran demokrasi secara global juga memberi dampak negatif pada kebebasan pers dan media, termasuk di negara-negara Asia Tenggara. Dengan membandingkan enam negara di Asia Tenggara, artikel ini memaparkan bahwa kondisi kebebasan pers dan media memiliki linieritas dengan tren penurunan demokrasi. Di sebagian besar negara Asia Tenggara, komitmen terhadap kebebasan pers umumnya dirusak oleh undang-undang dan beberapa regulasi yang memberi batasan, kontrol ketat, dan mengintimidasi organisasi media dan jurnalis.

Edisi kali ini tidak hanya membahas tentang penurunan kualitas demokrasi di negara-negara Asia Tenggara saja. Salah satu artikel yang dimuat dalam edisi ini dengan judul “**Kegagalan Demokratisasi di Mesir Pasca-Arab Spring**” mengulas dengan komprehensif penyebab gagalnya upaya demokratisasi di Mesir setelah terjadinya *Arab Spring*. Dalam artikel ini, Samir dan M. Hamdan Basyar memaparkan bahwa kegagalan demokrasi di Mesir disebabkan oleh adanya perpecahan elite politik Mesir yang melahirkan sentimen polarisasi, krisis ekonomi Mesir, dan dominasi kalangan militer dalam perpolitikan Mesir.

Kemunduran demokrasi tidak hanya berhubungan dengan partisipasi *civil society* dalam kepemiluan dan perumusan kebijakan publik saja. Aspek lain yang juga penting untuk dibahas adalah terkait dengan sudut pandang tata kelola Sumber Daya Alam (SDA) dan keterlibatan *civil society* di dalamnya. Melalui artikel berjudul “**Kemunduran Demokrasi Tata Kelola SDA: Penguatan Oligarki dan Pelemahan Partisipasi Civil Society**” Dini Suryani, dkk. menunjukkan bahwa penguatan oligarki menyempitkan ruang keterlibatan *civil society* dalam tata kelola SDA. Hal ini menyebabkan kebijakan tata kelola SDA justru meningkatkan potensi kerusakan lingkungan yang lebih parah.

Sementara itu, artikel kelima dengan judul “**Russian Propaganda’ in the Context of 2019 Indonesian Presidential Election: Politicization of Nationalistic Sentiments**” mencoba menganalisis tuduhan propaganda Rusia yang muncul sepanjang masa kampanye dalam Pemilu Serentak 2019 di Indonesia. Dalam tulisan ini, Ahmad Nurcholis memberikan gambaran bagaimana tuduhan atas “Propaganda Rusia” dalam pemilu Indonesia berpengaruh pada hubungan Indonesia dan Rusia.

Jurnal Penelitian Politik edisi kali ini ditutup dengan sebuah rewiu buku berjudul “**Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Retorika Di Asia Tenggara**” yang ditulis oleh Pandu Prayoga. Tulisan ini mengemukakan bahwa demokrasi dan hak asasi manusia (HAM) di ASEAN memiliki banyak wajah karena adanya perbedaan penafsiran dan lemahnya penerapan di lapangan. Beragamnya penafsiran mengenai demokrasi dan HAM disebabkan oleh beragamnya sistem politik pemerintahan di Asia Tenggara. Tulisan ini juga menyoroti perbedaan antara kesepakatan di tingkat ASEAN yang mendorong demokrasi dan HAM serta pelanggaran di tingkat domestik yang masih terjadi.

Redaksi mengucapkan terima kasih kepada segenap pihak yang telah berkontribusi hingga terbitnya *Jurnal Penelitian Politik* edisi kali ini, khususnya para penulis, mitra bestari, dewan redaksi, dan tim pengelola jurnal. Kami berharap hadirnya *Jurnal Penelitian Politik* edisi kali ini dapat berkontribusi bagi kajian politik dan dinamikanya di tengah terjadinya tren kemunduran demokrasi di berbagai belahan dunia. Pada akhirnya, kami mengucapkan selamat membaca.

Redaksi

DDC: 321.8
Damar Kristal

**PERBANDINGAN (DE)KONSOLIDASI
DEMOKRASI: STUDI PENURUNAN
KUALITAS DEMOKRASI DI INDONESIA
DAN FILIPINA PADA PERIODE 2016-2020**

Jurnal Penelitian Politik
Vol.18, No.2, Desember 2021, Hal. 125-140

Dalam lima tahun terakhir, lembaga pemeringkat indeks demokrasi Freedom House, The Economist Intelligence Unit's, dan Varieties of Democracy menampilkan data terjadinya penurunan kualitas demokrasi di dunia. Negara dengan demokrasi yang sudah mapan seperti Amerika tidak luput dari regresi demokrasi. Filipina dan Indonesia merupakan dua negara di Asia Tenggara yang mengalami penurunan kualitas demokrasi cukup signifikan pada tahun 2016 sampai 2020. Penelitian ini menggunakan teori konsolidasi demokrasi dan teori populisme untuk menjelaskan peran unsur-unsur konsolidasi demokrasi (masyarakat, elite, organisasi, dan *rule of law*) dan pengaruh populisme dalam fenomena penurunan kualitas demokrasi di Indonesia dan Filipina pada periode 2016-2020. Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa terjadi penurunan kualitas demokrasi di Indonesia dan Filipina pada periode tersebut. Proses konsolidasi demokrasi di dua negara ini berubah menjadi proses dekonsolidasi demokrasi. Elemen-elemen dalam konsolidasi demokrasi (masyarakat, elite, organisasi, dan *rule of law*) memiliki peran dalam terjadinya penurunan kualitas demokrasi di Indonesia dan Filipina. Walaupun terdapat perbedaan klasifikasi populisme, figure pemimpin populis di Filipina dan Indonesia memperparah penurunan kualitas demokrasi di dua negara ini sejak 2016 sampai 2020.

Kata kunci: dekonsolidasi demokrasi, Filipina, Indonesia, konsolidasi demokrasi, populisme

DDC: 321.8
M. Fajar Shodiq Ramadlan dan Romel Masykuri

**KEMUNDURAN DEMOKRASI DAN
KEBEBASAN PERS DI ASIA TENGGARA:
REFLEKSI DARI ENAM NEGARA**

Jurnal Penelitian Politik
Vol.18, No.2, Desember 2021, Hal. 141-158

Kebebasan pers dan perkembangan demokrasi memiliki jalinan intrinsik. Namun, tren kemunduran demokrasi secara global juga memberi dampak negatif pada kebebasan pers dan media, termasuk di Asia Tenggara. Skor indeks demokrasi di beberapa negara Asia Tenggara mengalami stagnasi dan cenderung menurun. Artikel ini memilih enam dari sebelas negara di Asia Tenggara sebagai obyek perbandingan, yakni Timor Leste, Indonesia, Filipina, Singapura, Malaysia, dan Thailand. Perbandingan dilakukan terhadap beberapa aspek kebebasan pers dan media di keenam negara yang dipilih menggunakan data survei yang diperoleh melalui V-Dem, Freedom House, dan Reporters Sans Frontières (RSF). Analisis deskriptif dilakukan melalui literatur terkait dengan kondisi demokrasi dan kebebasan pers di enam negara. Adapun aspek kebebasan pers dan media yang diperbandingkan meliputi upaya penyensoran dari pemerintah, gangguan terhadap jurnalis, bias media, korupsi media, dan swasensor media. Melalui perbandingan enam negara, secara umum terlihat bahwa kondisi kebebasan pers dan media memiliki linieritas dengan tren penurunan demokrasi. Di negara dengan penurunan skor demokrasi, skor kebebasan pers dan media juga mengalami

penurunan. Di sebagian besar negara Asia Tenggara, komitmen terhadap kebebasan pers umumnya dirusak oleh undang-undang dan beberapa regulasi yang memberi batasan, kontrol ketat, dan mengintimidasi organisasi media dan jurnalis. Praktik ini paling nyata merefleksikan kemunduran demokrasi di Asia Tenggara.

Kata kunci: kemunduran demokrasi, kebebasan pers, Asia Tenggara

DDC: 321.8

Samir dan M. Hamdan Basyar

KEGAGALAN DEMOKRATISASI DI MESIR PASCA-ARAB SPRING

Jurnal Penelitian Politik

Vol.18, No.2, Desember 2021, Hal. 159-172

Arab Spring memberikan efek domino terhadap stabilitas perpolitikan Mesir. Transisi politik yang terjadi setelah mundurnya Husni Mubarak dari kekuasaannya, tidak menunjukkan iklim demokrasi Mesir yang membaik. Terpilihnya Mursi dari kalangan warga sipil menjadi presiden secara demokratis, tidak membuat proses demokrasi di Mesir berjalan dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kegagalan demokrasi setelah *Arab Spring* dan mengulas dominasi militer dalam politik Mesir. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegagalan demokrasi di Mesir terjadi akibat perpecahan elite politik Mesir yang melahirkan sentimen polarisasi, krisis ekonomi Mesir, dan dominasi kalangan militer dalam perpolitikan Mesir yang memudahkan militer untuk melakukan kudeta. Dalam hal ini, militer tidak bisa dipisahkan perannya dalam perpolitikan nasional karena telah terbentuk tatanan istimewa yang memperkuat dominasi militer di Mesir.

Kata Kunci: *Arab Spring*, demokratisasi Mesir, kudeta militer, krisis ekonomi

DDC: 321.8

Dini Suryani, Fathimah Fildzah Izzati, Imam Syafi'i, Pandu Yuhsina Adaba, Septi Satriani

KEMUNDURAN DEMOKRASI TATA KELOLA SDA: PENGUATAN OLIGARKI DAN PELEMAHAN PARTISIPASI CIVIL SOCIETY

Jurnal Penelitian Politik

Vol.18, No.2, Desember 2021, Hal. 173-190

Proses demokratisasi berbanding lurus dengan partisipasi *civil society*. Sementara itu, penguatan oligarki berbanding lurus dengan pelemahan *civil society*. Selama ini sudah terdapat beberapa kajian mengenai kemunduran demokrasi berkaitan dengan partisipasi *civil society* di bidang pemilihan maupun perumusan kebijakan publik. Kajian ini melengkapi kajian-kajian tersebut dengan sudut pandang tata kelola Sumber Daya Alam (SDA). Bahwa, penguatan oligarki menyempitkan ruang keterlibatan *civil society* dalam tata kelola SDA menyebabkan kebijakan tata kelola SDA justru meningkatkan potensi kerusakan lingkungan lebih dalam. Selain itu, represi terhadap *civil society* yang memperjuangkan tata kelola SDA yang berkelanjutan banyak mengalami ancaman kekerasan dan kriminalisasi. Tulisan ini hendak menginvestigasi menurunnya kualitas demokrasi dalam tata kelola SDA di Indonesia dengan menganalisis hubungan antara menguatnya politik oligarki terhadap menyempitnya ruang demokrasi bagi *civil society*.

Kata Kunci: Demokrasi Tata Kelola SDA, Oligarki, *Civil Society*, Lingkungan

DDC: 324

Ahmad Nurcholis

“PROPAGANDA RUSIA” DALAM KONTEKS PILPRES 2019 DI INDONESIA: POLITISASI SENTIMEN NASIONALISTIK

Jurnal Penelitian Politik

Vol.18, No.2, Desember 2021, Hal. 191-210

Makalah ini menguji tuduhan propaganda Rusia yang muncul sepanjang masa kampanye dalam perhelatan pemilu serentak 2019 di Indonesia. Tuduhan tersebut dipicu panasnya tensi politik selama pemilu berlangsung. Dugaan adanya propaganda Rusia pertama kali dilontarkan oleh calon petahana, Jokowi, saat menanggapi banyaknya serangan hoax dan fitnah yang diproduksi kubu lawan untuk menyerang dirinya dalam memengaruhi opini pemilih. Tuduhan Jokowi ini membuat tensi politik semakin

panas. Bahkan kubu lawan menuntut Jokowi untuk meminta maaf kepada Pemerintah Rusia karena dianggap telah melontarkan pernyataan yang tidak berdasar fakta. Ketegangan semakin meningkat saat banyak media menyorot isu ini serta menyeret-nyeret perwakilan Rusia di Jakarta. Artikel ini akan menguji sejauh mana tuduhan propaganda Rusia yang muncul selama pemilu berlangsung memengaruhi hubungan antarkedua negara.

Kata Kunci: propaganda Rusia, Pemilu Presiden 2019, hoax, Jokowi

DDC: 321.8

Pandu Prayoga

REVIEW BUKU

**DEMOKRASI, HAK ASASI MANUSIA,
DAN RETORIKA DI ASIA TENGGARA**

Jurnal Penelitian Politik

Vol.18, No.2, Desember 2021, Hal. 211-218

Demokrasi dan hak asasi manusia (HAM) di ASEAN memiliki banyak wajah karena adanya perbedaan penafsiran dan lemahnya penerapan di lapangan. Beragamnya penafsiran mengenai demokrasi dan HAM disebabkan oleh beragamnya sistem politik pemerintahan di Asia Tenggara. Penegakan dan penghormatan terhadap HAM menjadi pekerjaan rumah yang terus mendapat sorotan internasional, baik di negara anggota yang demokratis maupun tidak. Tulisan ini menyoroti perbedaan antara kesepakatan di tingkat ASEAN yang mendorong demokrasi dan HAM serta pelanggaran di level domestik yang masih terjadi. Penulis buku berpendapat bahwa pengakuan atau legitimasi dari komunitas internasional penting agar ASEAN dapat menjadi bagian dari komunitas global. Selain itu, pemimpin kawasan memiliki kekuasaan dalam mendefinisikan nilai-nilai demokrasi dan ham menurut versinya. Bagaimanapun, tantangan ke depan bagi ASEAN yaitu bagaimana demokrasi dan HAM dapat fokus pada rakyat, dan bukan hanya sekedar retorika.

Kata Kunci: ASEAN, demokrasi, legitimasi, retorika, hak

DDC: 321.8

Damar Kristal

THE COMPARISON OF DEMOCRATIC (DE)CONSOLIDATION: THE STUDY OF DEMOCRATIC REGRESSION IN INDONESIA AND PHILIPPINES 2016-2020

Journal of Political Research

Vol.18, No.2, December 2021, Page 125-140

In the last five years, democracy index rating institutes such as Freedom House, The Economist Intelligence Unit, and Varieties of Democracy have provided data on the decline in the quality of democracy around the world. An established democracy like America is not immune from democratic regression. The Philippines and Indonesia are two countries in Southeast Asia that experienced a significant decline in the quality of democracy from 2016 to 2020. This study uses the theory of democratic consolidation and populism. This article analyzes the role of four elements in democratic consolidation (society, elite, organization, and the rule of law) and the influence of populism in the phenomenon of the declining quality of democracy in the two countries. There is a decline in the quality of democracy in both countries during the 2016-2020 period. The process of democratic consolidation has been turning into a cycle of democratic deconsolidation. Four key elements in the consolidation of democratic have a big role in declining in the quality of democracy in Indonesia and the Philippines. Although there are differences in the classification of populism, the figures of populist leaders in the Philippines and Indonesia have exacerbated the declining quality of democracy.

Keywords: *democratic consolidation, democratic deconsolidation, Indonesia, Philippines, populism*

DDC: 321.8

M. Fajar Shodiq Ramadlan and Romel Masykuri

DEMOCRATIC DECLINE AND FREEDOM OF THE PRESS IN SOUTHEAST ASIA: A REFLECTION FROM SIX COUNTRIES

Journal of Political Research

Vol.18, No.2, December 2021, Page 141-158

Freedom of the press and the development of democracy are intrinsically intertwined. However, the trend of democratic decline globally also negatively affected press and media freedom, including in Southeast Asia, where scores on the democracy index stagnated and tended to decline. This article selects six of the eleven countries in Southeast Asia as the object of comparison, namely Timor Leste, Indonesia, Philippines, Singapore, Malaysia, and Thailand. A comparison was made on several aspects of press and media freedom in the six selected countries using survey data obtained through V-Dem, Freedom House, and Reporters Sans Frontières (RSF). The descriptive analysis was conducted through literature related to the conditions of democracy and freedom of the press in six countries. The aspects of press and media freedom compared include government censorship efforts, harassment of journalists, media bias, media corrupt, and media self-censorship. Through a comparison of six countries, it generally reflects that the condition of press and media freedom has linearity with the trend of democratic decline. In countries with declining democracy scores, press and media freedom scores also decline. In most Southeast Asian countries, commitments to freedom of the press are generally undermined by laws and regulations that place restrictions, tight controls, and intimidation on media organizations and journalists. This practice

most clearly reflects the democratic decline in Southeast Asia.

Keywords: democratic decline, freedom of the press, Southeast Asia

DDC: 321.8

Samir dan M. Hamdan Basyar

THE FAILURE OF DEMOCRATIZATION IN EGYPT POST ARAB SPRING

Journal of Political Research

Vol.18, No.2, December 2021, Page 159-172

The Arab Spring had a domino effect on Egypt's political stability. The political transition that occurred after Hosni Mubarak's resignation from power did not indicate an improving Egyptian democratic climate. The election of Morsi from among civilians to become President democratically did not make the democratic process in Egypt run well. This study aims to analyze the failure of democracy after the Arab Spring and to review the dominance of the military in Egyptian politics. The results of this study indicate that the failure of democracy in Egypt occurred due to the division of the Egyptian political elite which gave birth to polarizing sentiments, the Egyptian economic crisis, and the dominance of the military in Egyptian politics which made it easier for the military to carry out a coup. In this case, the military cannot be separated from its role in national politics because a special order has been formed that strengthens the military domination in Egypt.

Keywords: Arab Spring, democracy, Egypt, military coup, economic crisis

DDC: 321.8

Dini Suryani, Fathimah Fildzah Izzati, Imam Syafi'i, Pandu Yuhsina Adaba, Septi Satriani

DEMOCRACY SETBACK IN NATURAL RESOURCE GOVERNANCE: OLIGARCHIC CONSOLIDATION AND THE DECLINING OF CIVIL SOCIETY PARTICIPATION

Journal of Political Research

Vol.18, No.2, December 2021, Page 173-190

The democratization process is directly proportional to the participation of civil society. Meanwhile, the strengthening of the oligarchy is directly proportional to the weakening of civil society. So far, there have been several studies on the decline of democracy related to the participation of civil society in the field of elections and the formulation of public policies. This study complements these studies from a natural resources governance perspective. The strengthening of the oligarchy narrows the space for civil society involvement in natural resource management, causing natural resource management policies to increase the potential for more serious environmental damage. In addition, the repression of civil society that fights for sustainable natural resource management has experienced many threats of violence and criminalization. This paper intends to investigate the declining quality of democracy in natural resource management in Indonesia by analyzing the relationship between the strengthening of oligarchic politics and the narrowing of democratic space for civil society.

Keywords: Democracy of Natural Resources Governance, Oligarchy, Civil Society, Environment

DDC: 324

Ahmad Nurcholis

"RUSSIAN PROPAGANDA" IN THE CONTEXT OF 2019 INDONESIAN PRESIDENTIAL ELECTION: POLITICIZATION OF NATIONALISTIC SENTIMENTS

Journal of Political Research

Vol.18, No.2, December 2021, Page 191-210

This paper examines Russian allegations of propaganda that emerged throughout the campaign period during the 2019 simultaneous elections in Indonesia. The accusation was triggered by the heat of political tension during the election. The allegations of "Russian Propaganda" were first raised by the potential incumbent Jokowi in responding to many hoaxes and slander attacks produced by the opponents to strike him in influencing voter opinion. Jokowi's accusation made political tension even

hotter. The opposing camp demands Jokowi to apologize to the Russian government for being considered to have made a statement not based on facts. Tension had increased when many media highlighted this issue and dragged Russian representatives in Jakarta. This article examines to what extent “Russian Propaganda” accusations emerged during the election affecting the two countries’ relations.

Keywords: Russian Propaganda, Indonesian Presidential Election, hoax, Jokowi

DDC: 321.8

Pandu Prayoga

**BOOK REVIEW
DEMOCRACY, RIGHTS AND RHETORIC
IN SOUTHEAST ASIA**

**Journal of Political Research
Vol.18, No.2, December 2021, Page 211-218**

Democracy and human rights in ASEAN have many faces due to different interpretations and lack of implementations. Various definitions of democracy and human rights are generated from several political systems in the Southeast Asia. International community is concerning how ASEAN member states could take responsibility in implementing and respecting human rights. This review shows the difference between upholding human rights agreement in the regional level and violating it in the domestic level. Such condition is driven by external regional legitimacy and defined by ASEAN’s leaders. However, the challenges of democracy and human rights norms in ASEAN are to serve people’s interests not just as a rhetoric.

Keywords: ASEAN, democracy, legitimacy, rhetoric, rights

**PERBANDINGAN (DE)KONSOLIDASI DEMOKRASI:
STUDI PENURUNAN KUALITAS DEMOKRASI DI INDONESIA DAN
FILIPINA PADA PERIODE 2016-2020**

***THE COMPARISON OF DEMOCRATIC (DE)CONSOLIDATION:
THE STUDY OF DEMOCRATIC REGRESSION IN INDONESIA AND
PHILIPPINES 2016-2020***

Damar Kristal

Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP)
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
Jl. Kertamukti No.5 Pisangan, Ciputat Timur 15419
E-mail: damar.kristal002@gmail.com

Diterima: 18 Juni 2021; direvisi 9 Agustus 2021; disetujui 27 November 2021

Abstract

In the last five years, democracy index rating institutes such as Freedom House, The Economist Intelligence Unit, and Varieties of Democracy have provided data on the decline in the quality of democracy around the world. An established democracy like America is not immune from democratic regression. The Philippines and Indonesia are two countries in Southeast Asia that experienced a significant decline in the quality of democracy from 2016 to 2020. This study uses the theory of democratic consolidation and populism. This article analyzes the role of four elements in democratic consolidation (society, elite, organization, and the rule of law) and the influence of populism in the phenomenon of the declining quality of democracy in the two countries. There is a decline in the quality of democracy in both countries during the 2016-2020 period. The process of democratic consolidation has been turning into a cycle of democratic deconsolidation. Four key elements in the consolidation of democratic have a big role in declining in the quality of democracy in Indonesia and the Philippines. Although there are differences in the classification of populism, the figures of populist leaders in the Philippines and Indonesia have exacerbated the declining quality of democracy.

Keywords: *democratic consolidation, democratic deconsolidation, Indonesia, Philippines, populism*

Abstrak

Dalam lima tahun terakhir, lembaga pemeringkat indeks demokrasi Freedom House, The Economist Intelligence Unit's, dan Varieties of Democracy menampilkan data terjadinya penurunan kualitas demokrasi di dunia. Negara dengan demokrasi yang sudah mapan seperti Amerika tidak luput dari regresi demokrasi. Filipina dan Indonesia merupakan dua negara di Asia Tenggara yang mengalami penurunan kualitas demokrasi cukup signifikan pada tahun 2016 sampai 2020. Penelitian ini menggunakan teori konsolidasi demokrasi dan teori populisme untuk menjelaskan peran unsur-unsur konsolidasi demokrasi (masyarakat, elite, organisasi, dan *rule of law*) dan pengaruh populisme dalam fenomena penurunan kualitas demokrasi di Indonesia dan Filipina pada periode 2016-2020. Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa terjadi penurunan kualitas demokrasi di Indonesia dan Filipina pada periode tersebut. Proses konsolidasi demokrasi di dua negara ini berubah menjadi proses dekonsolidasi demokrasi. Elemen-elemen dalam konsolidasi demokrasi (masyarakat, elite, organisasi, dan *rule of law*) memiliki peran dalam terjadinya penurunan kualitas demokrasi di Indonesia dan Filipina. Walaupun terdapat perbedaan klasifikasi populisme, figure pemimpin populis di Filipina dan Indonesia memperparah penurunan kualitas demokrasi di dua negara ini sejak 2016 sampai 2020.

Kata Kunci: dekonsolidasi demokrasi, Filipina, Indonesia, konsolidasi demokrasi, populisme

Pendahuluan

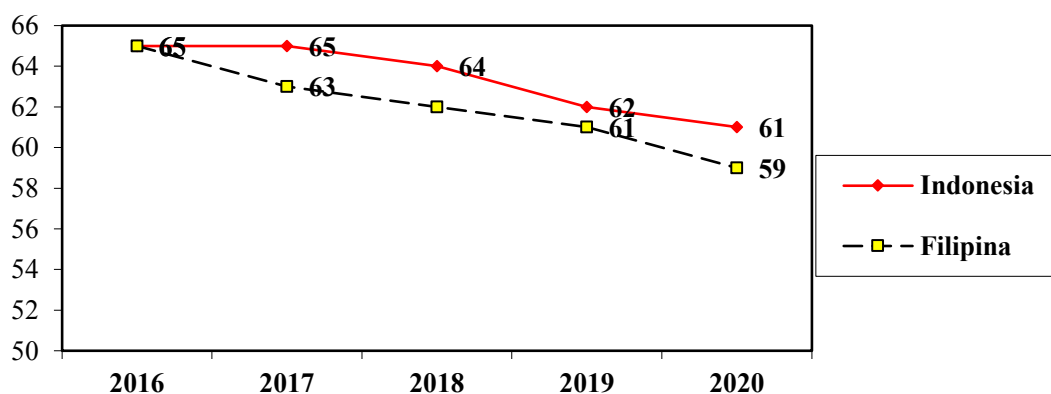
Sejak 2013 level demokrasi di Indonesia turun dari *free democracy* menjadi *partly free democracy*. Namun, penurunan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2016 sampai 2020. Penurunan yang signifikan ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga terjadi di Filipina. Banyak fenomena yang memengaruhi proses konsolidasi demokrasi di Indonesia dan Filipina.

Data dari Freedom House menunjukkan bahwa kedua negara ini memiliki indeks demokrasi yang hampir sama, hanya memiliki perbedaan skor 1 angka. Pada 2019 Indonesia meraih skor 62 dari 100. Sedangkan Filipina meraih skor 61 dari 100. Semakin tinggi skornya, maka indeks demokrasi suatu negara akan semakin baik. Namun, yang menjadi permasalahan saat ini adalah kedua negara ini hanya meraih predikat *partly free democracy* jika mengacu pada data Freedom House.

korupsi yang masih tinggi di masing-masing negara (Freedom House, 2020).

Dari tahun 2016 sampai 2020, yang menjadi permasalahan utama pada demokrasi di Filipina adalah hak politik dan kebebasan sipil. Belakangan ini pada masa kepemimpinan Presiden Rodrigo Duterte indeks demokrasi di Filipina kembali mengalami stagnasi dan penurunan. Hal ini karena diberlakukannya kebijakan Duterte untuk memerangi narkoba. Kebijakan tersebut mengakibatkan terjadinya aksi *vigilante* tembak di tempat terhadap terduga pengguna dan pengedar narkoba. Pada aspek pluralisme politik, Filipina mengalami kenaikan kekerasan terhadap pihak oposisi. Kekerasan ini terjadi dalam bentuk kriminalisasi dan penuntutan terhadap oposisi yang dilakukan oleh pihak pemerintah (Freedom House, 2020).

Dari data-data di atas, ada dua aspek yang mengalami penurunan. *Pertama*, aspek



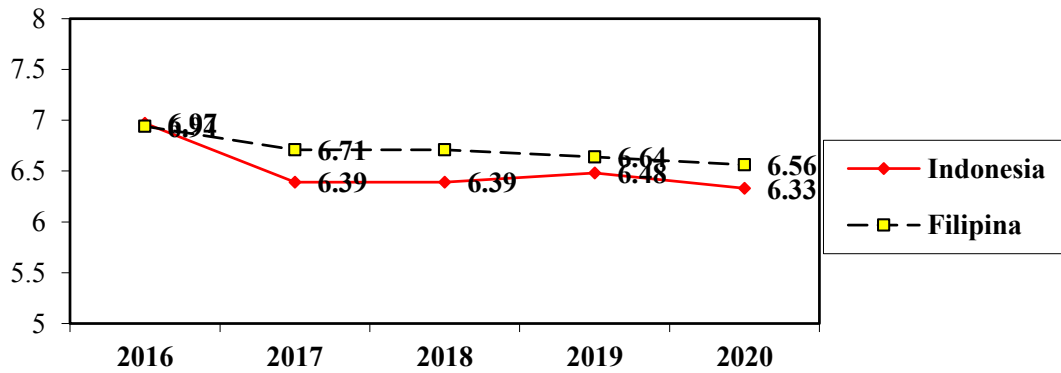
Sumber: Freedom House Indonesia & Philippines 2016-2020

Grafik 1. Kurva Indeks Demokrasi Freedom House Indonesia dan Filipina Periode 2016-2020

Indeks demokrasi yang diukur oleh Freedom House berasal dari indikator hak politik dan juga kebebasan sipil. Dari dua indikator tersebut yang menjadi permasalahan di Indonesia adalah kebebasan sipil. Indikator kebebasan sipil di Indonesia dalam lima tahun terakhir terus mengalami penurunan. Penurunan tersebut beriringan dengan naiknya kasus persekusi yang dilakukan kepada etnis minoritas dan kepercayaan minoritas. Pada aspek hukum, kebebasan untuk berpendapat dan beraspirasi juga semakin berat karena adanya pasal UU ITE (Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik). Selain itu, permasalahan yang sama yang juga dialami oleh Filipina adalah masalah

kebebasan yang terbagi menjadi dua, yaitu aspek hak politik dan aspek kebebasan sipil. *Kedua*, aspek peraturan dan juga regulasi. Ditinjau dari data-data yang ada, kedua aspek tersebut secara simultan mengalami penurunan dari 2016 sampai 2020. Dalam hal ini, konsolidasi demokrasi yang tidak stabil juga memengaruhi turunnya kedua aspek tersebut.

Selain lembaga Freedom House, unit kerja dari The Economist yaitu EIU (Economist Intelligence Unit) juga melakukan pengukuran indeks demokrasi di seluruh dunia. EIU merilis indeks demokrasi yang didasarkan dari lima hal yaitu proses elektoral dan pluralisme, kinerja



Sumber: The Economist Intelligent Unit Democracy Index

Grafik 2. Kurva Indeks Demokrasi The Economist Intelligence Unit's Indonesia dan Filipina Periode 2016-2020

pemerintah, partisipasi politik, budaya politik, dan kebebasan sipil (The Economist, 2019).

Data yang dirilis oleh EIU terbilang lebih dinamis dibandingkan dengan data yang dirilis oleh Freedom House. Dalam data EIU Indonesia dan Filipina mengalami dinamika yang lebih besar. Data EIU juga memiliki keterkaitan dengan konsolidasi demokrasi di dua negara tersebut, karena dalam beberapa pemaparan ditunjukkan bahwa penyebab turunnya indeks tersebut juga disebabkan oleh unsur-unsur dalam konsolidasi demokrasi yang tidak terintegrasi dengan baik. Dari data di atas, dapat dilihat bahwa tahun 2016 menandakan turunnya indeks demokrasi di Indonesia dan Filipina.

Untuk melengkapi data di atas, EIU juga merilis data indeks demokrasi dunia pada tahun 2020. Indonesia kembali mengalami penurunan skor dari yang semula adalah 6.48 menjadi 6.33. Skor tersebut merupakan yang terendah selama 13 tahun EIU merilis indeks demokrasi. Indonesia turun menjadi peringkat 65. Filipina juga mengalami hal yang sama, yaitu penurunan skor menjadi 6.56, dan penurunan peringkat menjadi 55 (The Economist, 2021).

Selain dua lembaga di atas, lembaga Varieties of Democracy (V-Dem) yang juga mengukur kualitas demokrasi di seluruh dunia memberikan data yang tidak jauh berbeda dengan data milik Freedom House dan EIU. Penurunan kualitas demokrasi yang terjadi di Filipina dan Indonesia berasal dari tiga aspek utama, yaitu demokrasi liberal, demokrasi elektoral, dan komponen partisipasi politik. Penurunan sudah

terjadi sejak tahun 2013, tetapi penurunan yang cukup signifikan terjadi sejak 2016 sampai 2020. Tiga aspek tersebut mengalami penurunan. Di Indonesia, penurunan yang cukup signifikan adalah aspek demokrasi liberal dan demokrasi elektoral, sedangkan di Filipina, semua aspek tersebut mengalami penurunan yang signifikan (V-Dem Institute, 2020).

Walaupun sudah lebih dari 30 tahun (Filipina) dan 20 tahun (Indonesia) terlepas dari genggaman pemerintah yang otoriter, demokrasi di Indonesia dan Filipina tidak terlepas dari bahaya. Dalam beberapa tahun terakhir banyak unsur yang menyebabkan demokrasi di kedua negara tersebut kembali terancam. Unsur-unsur konsolidasi demokrasi yang tidak terintegrasi mengubah proses konsolidasi menjadi dekonsolidasi demokrasi (V-Dem Institute, 2020).

Beberapa tahun belakangan ini sorotan yang muncul terkait indeks demokrasi di Indonesia dan Filipina adalah berhubungan dengan penurunan kualitas demokrasi di kedua negara yang ditengarai oleh presiden yang populis. Indonesia dengan Joko Widodo (Jokowi), dan Filipina dengan Duterte. Kebijakan-kebijakan yang dihasilkan dan diimplementasikan oleh Indonesia dan Filipina dianggap menjadi salah satu faktor yang menyebabkan indeks demokrasi masing-masing negara menurun. Kebijakan seperti UU ITE di Indonesia dan UU Bayanihan di Filipina membuat terjadinya regresi pada aspek kebebasan berekspresi. Selain itu, kebebasan dan independensi dari media terus tergerus dengan adanya pemusatan

kepemilikan dan intervensi kekuasaan. Di sisi lain, dalam lima tahun terakhir tidak ada kebijakan yang dihasilkan oleh kedua presiden untuk menindaklanjuti pelanggaran HAM masa lalu dan mencegah pelanggaran HAM yang akan datang. Oleh karena itu, baik Filipina maupun Indonesia sama-sama tidak mengalami kemajuan penegakan HAM dalam beberapa tahun terakhir (Yahya, 2020).

Di Indonesia, banyaknya tindakan dan aksi yang bersifat intoleran dan regulasi/kebijakan yang tidak pro terhadap kaum minoritas disinyalir menyumbang sebagian dari penyebab turunnya indeks demokrasi. Hal tersebut juga diperparah dengan munculnya RUU KUHP (Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) pada 2019 yang memantik demonstrasi besar-besaran dari kelompok mahasiswa sejak reformasi. Protes diajukan terhadap RUU KUHP karena ada banyak pasal yang dianggap melenceng, seperti revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi yang dapat membuat penindakan terhadap para koruptor menjadi tumpul (Idhom, 2019).

Sementara di Filipina, kebijakan tembak di tempat terhadap terduga pengedar dan pengguna narkoba merupakan contoh nyata terhadap penyebab turunnya indeks demokrasi di negara tersebut. Diungkapkan oleh mantan anggota DDS (Davao Death Squads) bahwa yang membuat dan mengorganisir DDS adalah Presiden Duterte sendiri. Pada kasus Duterte ini bagai dua sisi dalam satu koin. Di satu sisi, keamanan yang tercipta melalui kebijakan tembak di tempat bisa mengurangi atau menekan tindak kriminal, tetapi di lain sisi, kebijakan tersebut bertentangan dengan HAM. Presiden Duterte melanggar HAM karena pembentukan dan pengorganisir kelompok tersebut, pengadilan tingkat tinggi belum dapat memberikan sanksi kepada Presiden. Hal itu membuktikan bahwa perjuangan melalui institusi legal tidak cukup, oleh karena itu, perjuangan harus didukung oleh pergerakan dari bawah (Miller, 2018).

Dengan melihat latar belakang di atas, tulisan ini akan menganalisis lebih lanjut penurunan demokrasi di Indonesia dan Filipina

pada kurun waktu antara tahun 2016-2020. Penelitian ini menggunakan teori konsolidasi demokrasi dan teori populisme untuk menjelaskan peran unsur-unsur konsolidasi demokrasi, seperti masyarakat, elite, organisasi, dan *rule of law*, serta pengaruh populisme dalam fenomena penurunan kualitas demokrasi di kedua negara. Sebelum masuk pada pembahasan, terlebih dahulu akan dibahas mengenai teori konsolidasi demokrasi dan teori populisme.

Teori Konsolidasi Demokrasi dan Populisme

Menurut Larry Diamond, ada tiga indikator utama dalam konsolidasi demokrasi, yaitu masyarakat, elite, organisasi. Selain itu juga ada unsur penting lain, yaitu elemen *rule of law*. Keempat elemen penting ini diperlukan untuk saling berintegrasi dalam menciptakan demokrasi yang terkonsolidasi. Keempat elemen ini juga perlu memiliki preferensi utama, yaitu demokrasi merupakan sistem terbaik. Selain itu, proses konsolidasi demokrasi juga perlu dilakukan untuk menciptakan pemerintahan yang demokratis dan kuat setelah jatuhnya rezim otoriter. Unsur-unsur tersebut memiliki peranan penting untuk dapat mewujudkan hal tersebut (Diamond, 2003).

Lebih lanjut, Larry Diamond menjabarkan klasifikasi dari tiga indikator utama dalam konsolidasi demokrasi. Masyarakat, dalam hal ini adalah *ordinary citizens* atau masyarakat biasa. Elite dalam hal ini adalah pemimpin pemerintahan, pejabat pemerintahan, dan elite partai. Lalu yang dimaksud dengan organisasi merupakan partai politik dan institusi demokrasi (Diamond, 2003).

Sementara itu, terkait dengan teori populisme, Cass Mudde menekankan tiga poin penting, yaitu *anti-establishment*, otoriterisme, dan nativisme. Populisme dikenal sebagai sebuah filosofi yang menekankan kepercayaan yang bijaksana dan penilaian orang biasa terhadap pemerintah yang dianggap korup. Populisme merefleksikan sinisme dan juga kebencian yang mendalam terhadap pemerintah yang ada. Populisme juga

memiliki karakteristik yang condong terhadap pemerintahan yang ada. Selain itu, populis lebih menyukai bentuk-bentuk demokrasi mayoritas untuk mengekspresikan suara mereka, melalui *polling* opini, dan referendum daripada *check and balance* terhadap perlindungan kaum minoritas yang dimasukkan dalam demokrasi keterwakilan. Pada akhirnya, populisme lebih condong untuk menganut *mono-culturalism* daripada *multiculturalism* (Inglehart dan Pippa Norris, 2016).

Ada tiga aspek yang krusial dalam konsep populisme. *Pertama*, rakyat adalah segalanya, yang juga lebih menekankan perasaan sebagai komunitas kolektif. Sebaliknya, segregasi sosial-horisontal, dan pembelahan ideologi kanan-kiri kurang ditonjolkan. *Kedua*, kaum populis lebih menitikberatkan aspek pengkhianatan elite terhadap rakyat melalui modus korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan yang lainnya. *Ketiga*, kaum populis menuntut agar *primacy of the people* direstorasi melalui penempatan pemimpin kharismatik yang menyuarakan hati nurani rakyat (Muhtadi, 2019).

Permasalahan yang sering ditemukan pada pemimpin populis adalah mereka seringkali menganggap bahwa apa yang dilakukan merupakan keinginan dan kehendak rakyat. Sikap ini membawa bahaya laten bagi demokrasi, tidak hanya pada negara yang demokrasi sudah mapan, tapi juga di negara yang baru mengalami demokrasi. Dalam beberapa kasus seperti di Brazil dan Venezuela, pemimpin populis pada akhirnya membawa negara yang mereka pimpin menjadi lebih otoriter. Hal ini terlihat dari kebijakan-kebijakan yang dikembangkan dan diimplementasikan hanya untuk mendapatkan dukungan mayoritas, tanpa melihat urgensi dari kebijakan apa yang perlu dikembangkan dan diimplementasikan.

Elemen-elemen Konsolidasi dan Perannya dalam Penurunan Demokrasi di Indonesia dan Filipina

Tahun 2016 menandakan momen kemunduran demokrasi di berbagai negara. Berbagai

lembaga yang mengukur indeks demokrasi menyodorkan data yang memperlihatkan bahwa sebagian besar negara dengan sistem demokrasi sedang mengalami kemunduran. Tidak hanya dirasakan oleh negara-negara dunia ketiga, tetapi juga dirasakan oleh negara kampiun demokrasi yaitu Amerika. Dalam beberapa kasus, penurunan kualitas demokrasi di seluruh dunia memiliki kesamaan, seperti menurunnya aspek kebebasan sipil, munculnya pemimpin populis, dan melemahnya institusi demokrasi (The Economist, 2019).

Empat elemen dalam konsolidasi demokrasi, yaitu masyarakat, elite, organisasi, dan *rule of law* dianalisis pada bagian ini untuk mengetahui bagaimana peran semua elemen tersebut dalam mencapai proses konsolidasi. Selain itu, analisis juga dilakukan untuk mengetahui apakah keempat elemen tersebut memiliki peran dalam terjadinya penurunan kualitas demokrasi di Indonesia dan Filipina pada periode 2016 sampai 2020.

1. Masyarakat

Preferensi masyarakat terhadap demokrasi sebagai sistem yang paling baik dan rasa puas mereka terhadap kinerja demokrasi merupakan salah satu tolak ukur dari demokrasi yang terkonsolidasi. Di Filipina pada survei terakhir yang dilakukan Pew Study tahun 2019 menunjukkan ada sekitar 69% dari masyarakatnya yang puas dengan kinerja demokrasi. Sementara itu, ada 31% dari masyarakat yang merasa tidak puas (Viray, 2019). Survei lain yang dilakukan oleh Social Weather Station (SWS) pada 2018 menunjukkan ada 59% warga Filipina yang memiliki preferensi bahwa demokrasi merupakan sistem terbaik dari sistem lainnya, dan ada 20% dari masyarakat yang memilih sistem otoriter. Hasil survei yang dirilis oleh lembaga SWS menunjukkan adanya penurunan preferensi masyarakat Filipina terhadap demokrasi dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018. Di tahun 2016 ada 63% masyarakat yang memilih demokrasi sebagai sistem terbaik, dan hanya sekitar 17% masyarakat yang memilih sistem otoriter (Geronimo, 2018).

Di Indonesia, survei yang dilakukan dalam 15 tahun terakhir oleh beberapa lembaga seperti SMRC (Saiful Mujani Research and Consulting), Indikator Politik Indonesia, dan LSI (Lembaga Survei Indonesia) menunjukkan bahwa secara umum masyarakat Indonesia mendukung demokrasi sebagai sistem politik yang paling baik, walaupun dalam perjalanannya dukungan tersebut mengalami fluktuasi. Pada 2004, tingkat dukungan masyarakat mencapai 87.6%. Namun, pada 2010 turun menjadi 78%. Pada 2013, data tersebut mencapai titik terendah, yaitu hanya sekitar 58.1%. Survei terakhir yang dilakukan pada 2019 menunjukkan sekitar 78.1% masyarakat setuju bahwa demokrasi merupakan bentuk terbaik (Mujani, 2020).

Walaupun dukungan terhadap demokrasi di Filipina dan Indonesia terbilang tinggi, indikator masyarakat belum mampu mencapai konsolidasi demokrasi. Di Indonesia munculnya *intolerant democrat syndrome* pada akhir 2013 membuat tingginya penilaian masyarakat terhadap sistem demokrasi menjadi bias (Mujani, 2020). Hal ini karena tingginya angka penilaian bahwa demokrasi sebagai sistem yang paling baik berbanding terbalik dengan rendahnya angka toleransi politik. Jika melihat ke belakang, naiknya trend *intolerant democrat syndrome* juga bersamaan dengan berlangsungnya pemilihan presiden tahun 2014. Fenomena ini dapat membuat demokrasi tidak terkonsolidasi secara signifikan karena adanya hambatan dari toleransi politik. Sementara di Filipina, tren peningkatan fenomena *intolerant democrat syndrome* muncul bersamaan dengan berjalannya kebijakan *war on drugs*. Tingginya preferensi masyarakat Filipina terhadap demokrasi sebagai sistem terbaik berbanding terbalik dengan realita yang ada di lapangan yang menunjukkan banyaknya pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang paling dasar, yaitu hak untuk hidup akibat implementasi kebijakan *war on drugs*.

Dalam masyarakat, toleransi politik merupakan salah satu aspek penting untuk mencapai konsolidasi demokrasi. Dengan kata lain, semakin toleran masyarakat, maka akan semakin kuat preferensi mereka terhadap demokrasi. Preferensi ini merupakan tolok ukur

bagi konsolidasi demokrasi pada level sikap individual (Mujani, 2020).

Sejak 2016 terjadi polarisasi pada masyarakat Indonesia. Demonstrasi dilakukan oleh kelompok Islamis yang menuntut Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) diproses secara hukum karena dinilai telah menistakan agama Islam. Gerakan tersebut memberikan efek domino yang buruk bagi iklim toleransi Indonesia sejak 2016 dan bertahan sampai 2020. Jika merujuk data yang dikeluarkan oleh lembaga SMRC, kasus intoleransi di masyarakat telah terjadi dan mulai meningkat sejak 2010, yaitu pada saat rumah ibadah Ahmadiyah dibakar karena dianggap aliran sesat (Mietzner dan Muhtadi, 2016). Hal ini menunjukkan bahwa tren peningkatan fenomena *intolerant democrat syndrome* bukan baru terjadi pada tahun 2013 akhir, tetapi benih-benihnya telah tumbuh sejak 2010. Kasus intoleransi terhadap kelompok minoritas agama ataupun pandangan politik tidak dapat diselesaikan dalam waktu dekat. Perlu pendekatan-pendekatan khusus untuk menyelesaikan permasalahan yang semakin carut-marut ini.

Berbicara mengenai polarisasi di Filipina, berbeda dengan di Indonesia yang dalam lima tahun terakhir terjadi polarisasi yang cukup “merusak” kehidupan berdemokrasi, Filipina tidak memiliki gejala-gejala polarisasi tersebut. Beberapa ahli memaknai polarisasi yang merusak dalam kehidupan bermasyarakat saat menguatnya narasi “*kami*” versus “*mereka*” (Kenny, 2020). Selain itu, kriteria terjadinya polarisasi adalah saat masyarakat secara politik terbelah menjadi dua blok, yaitu blok pro-Duterte dan anti-Duterte.

Namun, satu dekade lalu, perlu diingat juga bahwa Filipina pernah mengalami fenomena yang dikenal dengan “*lost decade*” pada tahun 2001 sampai 2010. Selama satu dekade tersebut, demokrasi di Filipina mengalami kemunduran karena polarisasi yang terjadi antara *grandi* (oligarki) dan *popoli* (masyarakat kelas bawah). Konflik yang terjadi antara *grandi* dan *popoli* mengakibatkan terjadinya konflik kelas (Arugay dan Slater, 2019).

Sementara itu, isu kebebasan berpendapat dalam lima tahun terakhir di Indonesia mendapatkan rapor merah. Pasalnya, berdasarkan survei yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia (IPI) tentang “setuju atau tidak warga makin takut menyatakan pendapat”, ada 21,9% masyarakat sangat setuju. Selain itu, ada 47,7% masyarakat yang menjawab agak setuju (Pradipta, 2020). Hal ini berkaitan dengan adanya pasal UU ITE. Undang-Undang tersebut dianggap sebagai faktor signifikan yang mempengaruhi tingginya angka masyarakat yang merasa sulit untuk menyatakan pendapat dan kritik. Sejak 2016 sampai 2020, tercatat ada 216 kasus yang diproses sampai di ranah pengadilan. Namun, diperkirakan masih banyak data yang belum masuk karena banyaknya pelaporan. Seperti pada tahun 2019, diperkirakan ada sekitar 3000-an kasus yang menggunakan pasal UU ITE (SAFENet, 2019).

Di Filipina, kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam lima tahun terakhir mengalami kemunduran. Banyak lawan politik dan oposisi yang dituntut karena vokal dalam mengkritik pemerintahan Duterte. Seperti yang dialami oleh Senator Leila de Lima. Pada 2017 ia dituntut hukuman tiga tahun penjara karena kritiknya terhadap Duterte terkait dengan kebijakan *war on drugs*. Selanjutnya, pada 2018 Senator Antonio Trillanes IV juga dituntut karena kritiknya terhadap pemerintah. Kebebasan pers di Filipina juga memiliki catatan merah. Misalnya seperti media berita online Rappler yang dicabut izinnya oleh lembaga negara yang berkaitan dengan pers dengan dalih penyebaran *hate speech* dan berita palsu. Selain itu, pada Juni 2020, pimpinan eksekutif dari media Rappler, Maria Ressa, juga dituntut karena pencemaran nama baik dan ancaman penjara dengan hukuman maksimal enam tahun (Kenny, 2020). Kuatnya kontrol pemerintah Duterte terhadap aspek-aspek kebebasan menjadi salah satu penyebab kebebasan sipil di Filipina terus menurun dalam lima tahun terakhir sesuai dengan laporan dari Freedom House.

Pada 2020, dari data yang dirilis oleh lembaga Varieties of Democracy (V-Dem) menunjukkan bahwa Covid-19 memberikan

dampak negatif bagi negara demokrasi. Banyak negara yang memberlakukan keadaan darurat dan *lockdown* tanpa dukungan suka rela dari elemen masyarakat. Filipina mulai memberlakukan *lockdown* pada 12 Maret 2020. Pelanggaran HAM yang terus terjadi selama masa *lockdown* terus memberikan dampak negatif bagi kondisi demokrasi di Filipina. Dari laporan V-Dem diketahui bahwa kualitas demokrasi di beberapa negara, termasuk Filipina, akan mengalami penurunan yang signifikan pada masa pandemi Covid-19 (Luhmann et al, 2020).

Walaupun Indonesia tidak masuk dalam kategori penurunan yang cukup parah pada masa pandemi, Indonesia tetap mengalami penurunan kualitas demokrasi. Indonesia masuk dalam kategori *medium risk*, yang ditunjukkan dengan terjadinya pelanggaran dan penurunan standar demokrasi pada masa pandemi ini. Hal ini tentu berimplikasi pada kualitas demokrasi yang ada (Luhmann et al, 2020).

2. Elite

Data yang dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat demokrasi internasional Freedom House menunjukkan bahwa 25 dari 41 negara dengan demokrasi yang telah mapan mengalami resesi atau stagnasi demokrasi pada 2020. Indonesia termasuk salah satu negara yang mengalami resesi dan stagnasi demokrasi. Berbeda dari resesi demokrasi pada periode-periode sebelumnya yang penurunan index demokrasi dipengaruhi oleh peran militer, pada periode ini resesi dan stagnasi demokrasi disebabkan oleh pemimpin populis yang mendapat dukungan dari masyarakatnya (Muhtadi dan Muslim, 2020).

Di Filipina, Duterte terpilih secara demokratis melalui pemilu 2016. Walaupun terpilih secara demokratis, kualitas demokrasi di Filipina mulai mengalami penurunan sejak Duterte menjabat. Salah satu yang membuat kualitas demokrasi di Filipina menurun ditengarai oleh kebijakan *war on drugs*. Kebijakan tersebut merupakan cara yang digunakan Duterte dalam memberantas pengedar dan pengguna narkoba. Dari tahun 2016 sampai 2017, terhitung ada sekitar 7.025

orang yang telah meregang nyawa karena kebijakan kontroversial tersebut (Amnesty International UK, 2020).

Di satu sisi, angka peredaran narkoba masih terbilang tinggi. Walaupun di awal diberlakukannya kebijakan ini angka peredaran narkoba sempat turun, tetapi sampai tahun 2020, angka ini kembali seperti sedia kala. Hal ini karena target dari *war on drugs* adalah para pengedar dan pengguna kelas bawah, bukan bandar kelas atas. Oleh karena itu, permasalahan ini tidak kunjung hilang hingga saat ini. Selain itu, kebijakan ini juga menyebarkan teror dan ketakutan bagi masyarakat kelas bawah karena mereka dijadikan target oleh aparat penegak hukum. Di sisi lain, kebijakan ini memberikan implikasi positif terhadap menurunnya angka kriminal, dan mendapatkan persetujuan luas masyarakat Filipina. Hal ini terlihat dari tingginya *approval rating* terhadap Duterte.

Dalam kasus Filipina, terjadinya *executive aggrandizement* atau kemahakuasaan eksekutif membuat kualitas demokrasi menurun pada masa Duterte. Ia yang dalam hal ini adalah eksekutif memiliki peran yang sangat dominan pada lembaga politik lainnya (legislatif dan yudikatif). Dapat dikatakan bahwa pada pemerintahan Duterte tidak tercapai *checks and balances*. Pada akhirnya kebijakan yang ia buat dan hasilnya tidak hanya untuk publik, tapi juga untuk mendesain ulang institusi demokrasi.

Banyak faktor yang pada akhirnya membuat terjadinya fenomena *executive aggrandizement*. Di antaranya yaitu: masyarakat sipil yang lemah, banyak kelompok masyarakat sipil berpengaruh yang ditarik ke pemerintahan, masyarakat sipil yang kurang diberdayakan, serta masyarakat sipil yang lemah karena adanya kebiasaan atau *shifting* sehingga mereka sulit untuk menaruh perhatian khusus pada urusan-urusan publik/pemerintahan.

Hal ini sejalan dengan data yang dikeluarkan oleh lembaga *Varieties of Democracy* pada 2017. Data tersebut menunjukkan aspek *civil society* mengalami penurunan di Filipina. Penurunan aspek ini telah terjadi sejak 2013, tetapi penurunan yang cukup signifikan terjadi pada 2016. Hal ini terlihat dari tekanan pemerintah terhadap organisasi masyarakat

sipil. Penurunan tersebut mulai mencapai titik mengkhawatirkan bersamaan dengan naiknya Duterte menjadi presiden Filipina pada 2016 (Meckhova dan Pernes, 2019).

Sama halnya dengan fenomena *executive aggrandizement* yang terjadi di Filipina, di Indonesia, pada tahun 2017 pemerintahan Jokowi dianggap telah melakukan bentuk dari supermasi eksekutif. Misalnya, adanya pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), sebuah kelompok Islamis yang mempromosikan khilafah sebagai sistem politik (Mietzner, 2020). Perlu dicatat juga bahwa pembubaran kelompok HTI dilakukan tanpa adanya proses hukum. Hal tersebut dianggap membuat demokrasi di Indonesia mengalami kemunduran.

Pada September 2019 terjadi gerakan demonstrasi yang dilakukan oleh pelajar. Gerakan ini merupakan gerakan kelompok pelajar yang terbesar setelah 1998. Gerakan ini menantang pemerintahan Jokowi dan elite-elite politik lainnya. Di tengah-tengah tren polarisasi dalam masyarakat sipil, gerakan pelajar ini dapat dikatakan hadir di tengah-tengah untuk meredakan polarisasi dengan membuat *common enemy* yaitu para perancang undang-undang yang bermasalah.

Untuk meredam gerakan demonstrasi yang meluas ke daerah-daerah di pelosok negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pertemuan dengan tokoh-tokoh sosial. Dalam pertemuan tersebut pihak kementerian melakukan sosialisasi dengan para tokoh sosial untuk dapat mencegah pelajar turun melakukan aksi demonstrasi. Selain itu, pihak kementerian juga melakukan pertemuan dengan rektor-rector kampus di Indonesia untuk membahas hal yang sama (Mietzner, 2020).

Tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk melakukan intimidasi sistematis dianggap lebih efektif daripada kekerasan publik yang dilakukan aparat hukum terhadap para demonstran. Efektivitas tindakan tersebut terlihat dari menurunnya jumlah peserta demonstrasi secara drastis. Gerakan demonstrasi yang sebelumnya dilakukan secara nasional, pada bulan Oktober hanya tersisa segelintir kelompok demonstran di Jakarta dan Yogyakarta. Tindakan keras yang diambil oleh

pemerintahan Jokowi merupakan penindasan paling berat kepada gerakan pelajar sejak Reformasi 1998.

Selain fenomena *executive aggrandizement*, muncul pula fenomena *illiberal* demokrasi atau yang lebih dikenal dengan demokrasi kosong. Fenomena ini muncul karena pemimpin populis yang terpilih secara demokratis melalui pemilihan umum, pada masa pemerintahannya hanya tertarik pada demokrasi dalam pandangan elektoral. Artinya, aspek-aspek lain dalam demokrasi, seperti aspek kebebasan sipil dan kebebasan politik dikesampingkan. Di Filipina dan Indonesia, mayoritas elite lebih melihat demokrasi dari sudut pandang elektoral.

Di Filipina, hal ini terbukti dari beberapa kasus kriminalisasi yang dilakukan Duterte terhadap lawan politiknya. Pada 2017, senator terpilih Leila De Lima ditangkap oleh pihak berwajib karena kritiknya yang keras terhadap Duterte mengenai kebijakan *war on drugs* yang dijalankan (Regencia, 2019). Selain senator De Lima, Duterte juga melakukan penahanan terhadap senator Antonio Trillanes IV. Penangkapan Antonio juga ditengarai akibat kerasnya kritik yang selalu dilontarkan pada Duterte terkait kebijakan-kebijakan-kebijakan yang dijalankan (Hincks, 2018).

3. Organisasi

Adanya organisasi yang demokratis merupakan prasyarat untuk mencapai demokrasi yang terkonsolidasi. Tidak diragukan lagi bahwa organisasi seperti partai politik dan institusi demokrasi merupakan motor penggerak politik di suatu negara. Untuk mencapai institusi demokrasi yang ideal, ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi. Syarat tersebut seperti pemilu bebas adil, peran partai politik, dan peradilan yang independen.

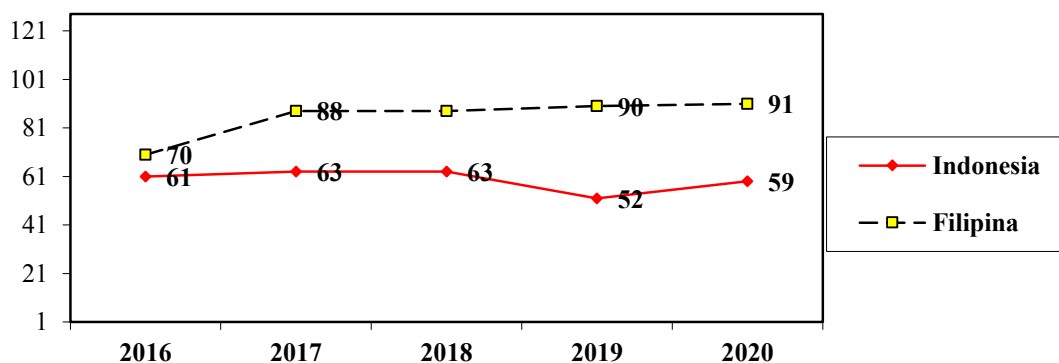
Di Filipina dalam lima tahun terakhir, syarat-syarat tersebut belum dapat terpenuhi. Seperti partai politik, idealnya mereka harus mandiri dan memiliki akar konstituen yang kuat. Namun, di Filipina partai politik hanya merupakan kendaraan elektoral para klan oligarki untuk dapat mencapai kekuasaan. Partai politik besar seperti Partai Nacionalista

merupakan kendaraan politik bagi Manuel Villar yang merupakan orang terkaya kedua di Filipina. Sementara itu, Partai Persatuan Nasional merupakan kendaraan politik Enrique Razon yang merupakan orang terkaya kelima di Filipina. Selain itu, ada Partai Nasionalis Koalisi Rakyat yang merupakan kendaraan bagi Eduardo Cojuangco Junior yang adalah orang terkaya keempat belas di Filipina, dan banyak contoh lainnya (Kenny, 2020).

Di Indonesia, para analis mengekspresikan kekhawatiran mereka terhadap rendahnya kualitas institusi demokrasi Indonesia yang ditandai dengan rendahnya institusionalisasi partai politik dan tingginya angka politik uang dalam pemilihan. Untuk meningkatkan kualitas institusi demokrasi, masyarakat perlu memantau institusi tersebut agar tercapainya *checks and balances*. Hal ini untuk menutup kesempatan bagi aktor dan elite untuk mencapai tujuan otoriter melalui institusi demokrasi yang dikuasainya (Fossati et al, 2021).

Dalam survei terakhir yang dilakukan oleh Indikator Politik pada Februari 2021 menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik di Indonesia sangat rendah. Partai politik hanya meraih skor 47,8%, jika dibandingkan dengan instansi dan lembaga negara lain seperti DPR, DPD, dan Polisi (Kumparan News, 2021).

4. Rule of Law



Sumber: World Justice Project (WJP), 2016-2020

Grafik 3. Kurva Peringkat *Rule of law* Indonesia dan Filipina Periode 2016-2020

Rule of Law merupakan unsur penting untuk mencapai demokrasi yang terkonsolidasi. Negara-negara yang dianggap telah mencapai demokrasi yang mapan memiliki *rule of law* yang kuat. Artinya, semua warga tidak dilihat latar belakangnya, dan semua memiliki tingkat yang sama di hadapan hukum.

Data yang dikeluarkan oleh WJP (World Justice Project), Lembaga yang rutin setiap tahunnya merilis index *rule of law* negara-negara di dunia memberikan data bahwa index *rule of law* di Filipina terus mengalami penurunan. Walaupun Filipina menjadi negara demokrasi tertua di Asia Tenggara, tidak menjamin kualitas *rule of law* negara tersebut baik. Peringkat index *rule of law* Filipina dapat dilihat pada Grafik 3.

Lembaga WJP menggarisbawahi tiga faktor utama yang menyebabkan kualitas *rule of law* Filipina terus mengalami penurunan dalam lima tahun terakhir. Tiga faktor tersebut adalah banyaknya pelanggaran hak-hak dasar, ketertiban dan keamanan, dan hukum pidana (World Justice Project, 2020).

Dari laporan WJP mengenai aspek hak-hak dasar seperti perlakuan yang adil dalam masyarakat, hak untuk hidup dan mendapat keamanan, dan hak untuk mendapatkan kelayakan hukum merupakan tiga aspek dalam hak-hak dasar yang memiliki skor paling rendah. Rendahnya skor dari masing-masing aspek berhubungan dengan kebijakan *war on drugs* yang dijalankan pemerintahan Duterte sejak 2016 sampai sekarang. Kebijakan tersebut dikatakan melanggar hampir seluruh hak dasar yang harus dimiliki oleh warga negara. Bahkan,

hak untuk hidup dan mendapatkan keamanan juga tidak dapat terpenuhi. Hal tersebut terbukti dari banyaknya jumlah korban jiwa akibat kebijakan *war on drugs* (World Justice Project, 2020).

Mengenai faktor ketertiban dan keamanan, meskipun pemerintahan Duterte terkenal dengan kondisi ketertiban dan keamanan yang baik, tetapi peringkat Filipina secara global yang paling tinggi hanya diraih pada 2016. Setelah itu, peringkat ketertiban dan keamanan kembali anjlok pada peringkat 107 dan terus mengalami penurunan dalam lima tahun terakhir. Kebijakan *war on drugs*, meskipun dianggap memiliki efek jera, tetapi efek tersebut hanya berlaku pada para pengedar dan pengguna narkoba. Bentuk kejahatan lainnya tetap memiliki tempat di dalam masyarakat dan secara umum data kriminalitas terus bertambah (World Justice Project, 2020).

Pada aspek terakhir, yaitu aspek hukum pidana, berdasarkan laporan WJP, beberapa unsur pada aspek ini juga mendapatkan “rapor merah” dalam lima tahun terakhir. Unsur-unsur seperti penindakan yang berdasarkan hukum, efektivitas investigasi, dan tidak adanya diskriminasi mendapatkan skor di bawah rata-rata. Filipina hanya meraih skor rata-rata sebesar 0.32 dalam aspek hukum pidana. Peringkat paling tinggi yang berhasil diraih Filipina adalah peringkat 84 dari 113 negara (World Justice Project, 2020).

Sementara di Indonesia, World Justice Project menunjukkan data yang sama mengkhawatirkannya dengan data di Filipina.

Peringkat tertinggi yang pernah diraih oleh Indonesia adalah peringkat ke-52. Ada banyak faktor yang memengaruhi indeks *rule of law* di Indonesia. World Justice Project menjabarkan dua faktor utama yang menyebabkan indeks *rule of law* di Indonesia tidak membaik dalam lima tahun terakhir yaitu tingginya angka korupsi, dan hukum perdata yang tidak memenuhi kriteria minimum (World Justice Project, 2020).

Data yang dikeluarkan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW), menunjukkan bahwa tren penindakan kasus korupsi sejak 2016 terus meningkat sampai 2018. Namun, pada 2019 dan 2020 tren peningkatan kasus tersebut justru berkurang drastis. Walaupun terjadi pengurangan kasus korupsi, data WJP menunjukkan bahwa skor dan peringkat korupsi di Indonesia tetap tinggi. Sampai 2020, Indonesia menduduki peringkat ke-92 negara paling korup di dunia (Alamsyah, 2020).

Berbicara mengenai hukum perdata, ada beberapa alasan mengapa indikator tersebut memengaruhi rendahnya peringkat dan kualitas *rule of law* di Indonesia. Beberapa aspek yang diukur dalam hukum perdata di Indonesia dianggap tidak memenuhi standar. Seperti aspek ketiadaan diskriminasi, ketiadaan korupsi, ketiadaan campur tangan pemerintah yang berlebihan dalam hukum, dan lainnya yang belum dapat dipenuhi. Pada aspek ketiadaan diskriminasi, dalam lima tahun terakhir dapat terlihat bahwa sangat banyak kasus hukum yang berbau diskriminasi pada kelompok minoritas, seperti kasus pembakaran tempat ibadah (World Justice Project, 2020).

Populisme dan Penurunan Kualitas Demokrasi di Indonesia dan Filipina

Dari penelitian yang dilakukan oleh The Atlantic sejak 1990 sampai 2018, ada lebih dari 30 negara demokrasi yang terjangkit populisme. Hasil dari penelitian tersebut juga mengindikasikan bahwa para pemimpin populis di setiap negara memiliki kemampuan dalam mempertahankan kekuasaan dan memberikan bahaya besar bagi kualitas demokrasi. Dalam satu dekade terakhir,

ada beberapa pemimpin populis yang namanya menjadi sorotan internasional seperti Bolsonaro (Brazil), Narendra Modi (India), Donal Trump (Amerika), Victor Orban (Hungaria), Joko Widodo (Indonesia), Rodrigo Duterte (Filipina), dan beberapa nama lainnya (Moouk dan Kyle, 2018). Pada bagian ini dilakukan analisis terhadap populisme dan penurunan kualitas demokrasi di Indonesia dan Filipina.

1. Jokowi dan Populisme Teknokrat

Figur Jokowi sangat lekat dengan populisme. Hal itu telah ada dan terbangun sejak ia maju sebagai calon Walikota Solo. Populisme Jokowi dibangun atas dasar kerakyatan. Ia berasal dari latar belakang keluarga kelas menengah dan hanya merupakan seorang anggota partai politik, bukan ketua umum partai politik. Selain itu, metode kampanye *blusukan* dengan turun langsung ke rakyat dan mengetahui problem sehari-hari yang dialami masyarakat dianggap menghilangkan kesan elite politik dan antek oligarki. Slogan kampanye “Jokowi adalah kita” berhasil mengantarkannya pada kemenangan pemilihan presiden 2014 (Sulistyo, 2017).

Mietzner menyebut Jokowi sebagai sosok populis teknokrat. Hal tersebut terlihat dari bagaimana Jokowi memprioritaskan sisi efisiensi dalam setiap kebijakannya, terutama pada kebijakan reformasi birokrasi yang dijalankannya. Selain itu, populisme teknokrat memiliki ciri utama yaitu peningkatan sesuatu, bukan mengganti dengan yang baru. Bisa dilihat dari banyak kebijakan-kebijakan sebelumnya yang tidak diganti, tetapi diperbarui pada pemerintahan Jokowi (Mietzner, 2015).

Populisme teknokrat Jokowi memiliki ciri khasnya sendiri, yaitu konsep keterbukaan. Ciri khas ini berhasil menggeser gaya politik lama yang terkesan eksklusif (Margiansyah, 2019). Gaya teknokrat Jokowi mengarahkannya pada kebijakan yang berorientasi pada pelayanan publik dan pembangunan ekonomi.

Tiga kebijakan populer Jokowi yang dianggap populis contohnya yaitu pengobatan gratis dan pendidikan terjangkau bagi masyarakat kelas bawah, serta kebijakan *developmentalisme* pembangunan infrastruktur. Beberapa ahli menilai populisme gaya Jokowi

berbeda dengan populisme lainnya. Ia tidak secara eksplisit menyerang kelompok elite yang dianggap sebagai kelompok yang korup, tetapi membuat gagasan reformasi birokrasi (Hara, 2017).

Populisme teknokrat Jokowi memiliki sifat yang pragmatis. Hal ini terlihat dari kebijakan yang dihasilkan selama masa pemerintahan Jokowi, yaitu kebijakan-kebijakan yang fokus pada perekonomian. Ekonomi merupakan hal yang sangat terkait dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Oleh karena itu, saat Jokowi memprioritaskan kebijakan ekonomi dari kebijakan lainnya, maka ia akan mendapatkan dukungan dari masyarakat.

Namun, hal itu membuat pengembangan nilai-nilai demokrasi seperti kebebasan sipil dan visi demokrasi menjadi tidak dapat terwujud. Jokowi menganggap bahwa pengembangan nilai dan visi demokrasi hanya dapat dinikmati beberapa kalangan saja. Secara garis besar ia ingin mendapatkan dukungan mayoritas. Oleh karena itu, beberapa lembaga yang mengukur indeks demokrasi memberikan catatan penting bahwa kebijakan yang hanya fokus pada pembangunan perekonomian dapat memberikan dampak negatif bagi demokrasi. Pembangunan yang terlalu fokus pada sisi perekonomian akan menyebabkan dikesampingkannya aspek-aspek lain. Selain itu, akan memperparah gap ekonomi antara kelas atas dan kelas bawah. Dalam perspektif jangka panjang, kebijakan ini nantinya justru hanya akan dinikmati oleh segelintir golongan saja. Dengan demikian akan semakin mengurangi kualitas demokrasi di Indonesia.

2. Duterte dan Populisme Penal

Duterte dikenal sebagai pemimpin populis dan *anti-establishment*. Pemimpin populis yang muncul sebelumnya adalah Estrada. Banyak ahli mengatakan bahwa akan terjadi fenomena "*illiberal democracy*" di bawah kepemimpinan Duterte. Hal tersebut karena sebelumnya Duterte sendiri telah menyampaikan pada rakyat Filipina untuk melupakan hukum dalam upaya memaksakan "ketertiban".

Berdasarkan hasil survei yang dikutip oleh Mark. R Thompson dalam artikelnya, hanya sekitar lima persen dari rakyat Filipina yang menolak kampanye melawan kriminalitas dan narkoba (Thompson, 2016). Isu kriminalitas sering digunakan oleh populis, sehingga mendapatkan nomenklatur tersendiri. Hal lain yang perlu digarisbawahi adalah dukungan terhadap Duterte datang dari kalangan kelas menengah yang khawatir terhadap rasa aman. Hal ini mengindikasikan terjadinya fenomena *penal populism* (Kenny, 2018).

Penal populism atau populisme Penal merupakan sebuah fenomena yang menunjukkan pemerintah mengambil kebijakan pemberian hukuman berat pada tindak kriminal atau hal lain yang berkaitan. Pengambilan kebijakan tersebut juga sejalan dengan tren masyarakat yang sedang resah dengan maraknya tingkat kriminalitas. Pengambilan kebijakan tersebut dilakukan semata hanya untuk mendapatkan simpati dan dukungan politis masyarakat kelas menengah (Anggara et al., 2019). Populisme Penal sangat identik dengan pemimpin kharismatik yang lebih mengandalkan norma legitimasi pemungutan suara di suatu daerah daripada aturan, institusi, dan prosedur yang diatur (Kenny, 2018).

Dapat terlihat dari kebijakan *war on drugs* yang dijalankan sejak awal kepemimpinan Duterte, selama masa kampanye politik Duterte kerap memanfaatkan isu keresahan masyarakat kelas menengah akan ketertiban dan keteraturan. Masalah utama yang dihadapi adalah maraknya narkoba dalam masyarakat. Kebijakan *war on drugs* adalah janji kampanye Duterte pertama yang dilaksanakan dan mendapat dukungan dari masyarakat secara luas di Filipina yang ditunjukkan dengan tingginya *approval rating* Duterte. Meskipun demikian, kebijakan ini justru menjadi bumerang terhadap kualitas demokrasi di Filipina sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Populisme Penal yang dilaksanakan Duterte justru menjadi salah satu faktor yang turut berperan dalam perburukan kualitas demokrasi di Filipina.

Penutup

Indonesia dan Filipina merupakan dua contoh kecil dari terjadinya fenomena regresi demokrasi di dunia. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa hal berikut. *Pertama*, proses konsolidasi demokrasi dalam lima tahun terakhir, baik di Indonesia maupun di Filipina, menghadapi beberapa kendala yang menyebabkan demokrasi tidak dapat terkonsolidasi. Elemen dalam konsolidasi demokrasi (masyarakat, elite, organisasi, dan *rule of law*) yang harusnya berintegrasi justru menunjukkan gejala yang bertolak belakang dan menghasilkan proses dekonsolidasi demokrasi.

Kedua, penurunan kualitas demokrasi di Indonesia dan Filipina memperlihatkan faktor-faktor yang hampir mirip, tetapi dengan gejala dan karakteristik yang sedikit berbeda. Pada elemen masyarakat, di Indonesia terjadi polarisasi yang memiliki efek domino sejak 2016 sampai 2020. Polarisasi tersebut membuat kualitas demokrasi pada level masyarakat mengalami kemunduran. Berbeda dengan Indonesia, Filipina tidak mengalami polarisasi di dalam masyarakatnya. Di sisi lain, terdapat persamaan yang menyebabkan penurunan kualitas demokrasi di Filipina dan Indonesia pada level masyarakat, yaitu turunnya indeks kebebasan sipil.

Elite di Indonesia dan Filipina dalam lima tahun terakhir berperan dalam terjadinya penurunan kualitas demokrasi. Munculnya fenomena *executive aggrandizement* di kedua negara membuat lembaga eksekutif lebih dominan dari lembaga-lembaga lain dan membuat hilangnya *checks and balances* dalam pemerintahan. Pada elemen organisasi, partai politik masih mendapatkan *rating* merah. Hal tersebut terlihat dari rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik di kedua negara. Pada elemen *rule of law*, kedua negara juga masih memiliki catatan merah. Lembaga World Justice Project memberikan *highlight* pada banyaknya aspek dalam *rule of law* di kedua negara yang perlu ditingkatkan untuk mencapai demokrasi yang terkonsolidasi.

Ketiga, pemimpin yang populis juga menjadi salah satu penyebab terjadinya fenomena regresi demokrasi di dunia, termasuk di Indonesia dan Filipina dalam lima tahun terakhir. Perlu ditekankan bahwa terdapat perbedaan klasifikasi populisme di kedua negara ini. Indonesia (Jokowi) dengan populisme teknokrat, dan Filipina (Duterte) dengan populisme penal. Secara garis besar, implikasi buruk dari pemimpin populis di kedua negara ini terlihat dari output dan kebijakan yang dihasilkan. Sebagian besar kebijakan yang dihasilkan hanya untuk mendapatkan simpati dan dukungan dari mayoritas masyarakat, yang pada akhirnya mengesampingkan nilai dan visi demokrasi. Hal tersebut membuat kualitas demokrasi di kedua negara ini turun.

Perlu kajian lebih lanjut untuk mempelajari interaksi dari banyak faktor dan proses seperti apa yang membuat penurunan kualitas terjadi. Ada beberapa kesamaan faktor yang menyebabkan penurunan kualitas demokrasi baik di Indonesia maupun di Filipina. Pertama adalah dominasi eksekutif, dalam hal ini respons presiden dalam bertindak dan menghadapi kritik. Mereka melihat kritik tersebut sebagai ancaman terhadap keamanan. Kedua, terkait persoalan kebebasan berekspresi yang dalam lima tahun terakhir mendapatkan tantangan yang hebat. Ketiga, isu populisme yang tidak kalah penting yang juga berperan dalam terjadinya penurunan kualitas demokrasi di Indonesia dan Filipina.

Daftar Pustaka

- Alamsyah, W. (2020). *Laporan Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester I 2020*. Indonesia Corruption Watch. <https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/200914-Laporan%20Tren%20Penindakan%20Kasus%20Korupsi%20SMT%20I%202020.pdf>, diakses pada tanggal 7 Maret 2021.
- Amnesty International UK. (18 Mei 2020). *More Than 7000 Killed in the Philippines in Six Months, as President Encourages Murder*. <https://www.amnesty.org.uk/philippines-president-duterte-war-on-drugs-thousands-killed>, diakses pada tanggal 26 Februari 2021.
- Anggara et al. (2019). *Kebangkitan Penal Populism di Indonesia: Catatan Situasi Reformasi Kebijakan Pidana di Indonesia Tahun 2018*. Institute for Criminal Justice Reform. https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2019/01/FINAL-LAPORAN-TAHUNAN-ICJR_14-JANUARI-2018.pdf, diakses pada tanggal 2 Maret 2021.
- Arugay, A., dan Dan Slater. (2019). Polarization Without Poles: Machiavellian Conflicts and the Philippines Lost Decade of Democracy, 2000-2010. *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 681(1).
- Croissant, A., dan Phillip Lorenz. (2018). *Comparative Politics of Southeast Asia an Introduction to Governments and Political Regimes*. Springer.
- Diamond, L. (2003). *Developing Democracy: Toward Consolidation*. IRE.
- Fossati, D., et al. (2021). Why democrats abandon democracy: Evidence from four survey experiments. *Party Politics*, XX(X), 1-13. doi:10.1177/1354068821992488.
- Freedom House. (2020). *Freedom In The World, Indonesia, 2020*. <https://freedomhouse.org/country/indonesia/freedom-world/2020>, diakses pada 12 Februari 2021.
- Freedom House. (2020). *Freedom In The World, Philippines, 2020*. <https://freedomhouse.org/country/philippines/freedom-world/2020>, diakses pada tanggal 12 Februari 2021.
- Geronimo, J. Y. (5 Oktober 2018). 84% of Filipinos Satisfied With How Democracy Works – SWS. *Rappler*. <https://www.rappler.com/nation/filipinos-satisfaction-democracy-sws-survey-september-2018>, diakses pada tanggal 1 Maret 2021.
- Hara, A. E. (2017). Populism in Indonesia and its Threats to Democracy. *Advances in Social Science, Education, and Humanities Research (ASSEHR)* 129.
- Hinks, J. (4 September 2018). Philippines President Rodrigo Duterte Has Ordered the Arrest of a Chief Political Opponent. *TIME*. <https://time.com/5385672/rodrigo-duterte-antonio-trillanes-arrest/>, diakses pada tanggal 23 Februari 2021.
- SAFENet. (14 November 2019). *Persoalan UU ITE dan Praktik Pelanggaran Hak Digital di Indonesia*. <https://id.safenet.or.id/wp-content/uploads/2019/11/Persoalan-UU-ITE-dan-Pelanggaran-Hak-Digital-SAFENet-2019.pdf>, diakses pada tanggal 24 Februari 2021.
- Idhom, A. M. (25 September 2019). Isi RUUKUHP dan Pasal Kontroversial Penyebab Demo Mahasiswa Meluas. *Tirto*. <https://tirto.id/isi-ruu-kuhp-dan-pasal-kontroversial-penyebab-demo-mahasiswa-meluas-eiFu>, diakses pada tanggal 25 Februari 2021.
- Kenny, P. D. (2018). *Populism in Southeast Asia*. Cambridge University Press.
- Kenny, P. D. (2020). *Why is There No Political Polarization In the Philippines?*. Carnegie Endowment for International Peace.
- Kumparan News. (8 Februari 2021). *Survei Indikator: DPR Lembaga Negara Paling tak Dipercaya Publik*. <https://kumparan.com/kumparannews/survei-indikator-dpr-lembaga-negara-paling-tak-dipercaya-publik-1v8VtbDtl2D/full>, diakses pada tanggal 8 Maret 2021.
- Margiansyah, D. (2019). Populisme di Indonesia Kontemporer: Transformasi Persaingan Populisme dan Konsekuensinya Dalam Dinamika Kontestasi Politik Menjelang Pemilu 2019. *Jurnal Penelitian Politik* 16(1), 1-107.
- Meckhova, V, dan Josefina Pernes. (2019). *Accountability in Southeast Asia & Southeast Africa*. The Varieties of Democracy Institute.
- Mietzner, M, dan Burhanuddin Muhtadi. (2018). Explaining the 2016 Islamist Mobilisation in Indonesia: Religious Intolerance, Militant Groups and the Politics of Accommodation. *Asian Studies Review* 42(3), 1-19.

- Mietzner, M. (2020). Source of Resistance to Democratic Decline: Indonesian Civil Society and Its Trials. *Journal Democratization* 28(1), 1-19.
- Mietzner, M. (2015). *Reinventing Asian Populism: Jokowi's Rise, Democracy, and political Contestation in Indonesia*. Institute of Southeast Asian Studies.
- Miller, J. (2018). *Duterte Harry: Fire and Fury in the Philippines*. Scribe Publications.
- Mouk, Y, dan Jordan Kyle. (26 Desember 2018). What Populists Do to Democracies. *The Atlantic*. <https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2018/12/hard-data-populism-bolsonaro-trump/578878/>, diakses pada tanggal 12 Februari 2021.
- Muhtadi, B, dan Kennedy Muslim. (4 Agustus 2020). *Populism, Islamism, and Democratic Decline in Indonesia*. , <https://www.mei.edu/publications/populism-islamism-and-democratic-decline-indonesia>, diakses pada tanggal 26 Februari 2021.
- Muhtadi, B. (2019). *Populisme Politik Identitas dan Dinamika Elektoral Mengurai Jalan Panjang Demokasi Prosedural*. Intrans Publishing.
- Mujani, S. (2020). Intolerant Democrat Syndrome: The Problem of Indonesian Democratic Consolidation. *Jurnal Politik* 8(1), 5-35.
- Pradipta, K. A. (29 Oktober 2020). Survei Indikator Politik: Masyarakat Makin Takut Menyatakan Pendapat. *Tempo*. <https://grafis.tempo.co/read/2288/survei-indikator-politik-masyarakat-makin-takut-menyatakan-pendapat>, diakses pada tanggal 5 Maret 2021.
- Qodari, M. (2010). The Professionalisation of Politics: The Growing Role of Polling Organisation and Political Consultants. Dalam Aspinall, E. dan M. Mietzner (eds.). *Problems of Democratisation in Indonesia: Elections, Institutions and Society*. ISEAS Publishing.
- Regencia, T. (25 Juni 2019). Duterte Attempting to 'Silence Political Opponents': Report. *Al Jazeera*. <https://www.aljazeera.com/news/2019/6/25/duterte-attempting-to-silence-political-opponents-report>, diakses pada tanggal 23 Februari 2021.
- Sulistyo, E. (31 Januari 2017). Populisme Jokowi. *Portal Resmi Kantor Staf Presiden*. <https://www.ksp.go.id/populisme-jokowi.html>, diakses pada tanggal 26 Februari 2021.
- The Economist. (2 Februari 2021). *Global Democracy Has a Very Bad Year*. <https://www.economist.com/graphic-detail/2021/02/02/global-democracy-has-a-very-bad-year>, diakses pada tanggal 10 Maret 2021.
- The Economist. (2020). *The Economist Intelligence Unit's Democracy Index 2019*. <https://infographics.economist.com/2020/democracy-index-2019/index.html>, diakses pada tanggal 12 Februari 2021.
- Thompson, M. R. (2016). Bloodied Democracy: Duterte and the Death of Liberal Reformism in the Philippines. *Journal of Current Southeast Asian Affairs* 35(3), 39-68.
- V-Dem Institute. (2020). *Democracy Report 2020: Autocratization Surges – Resistance Grows*. https://www.v-dem.net/media/filer_public/de/39/de39af54-0bc5-4421-89ae-fb20dcc53dba/democracy_report.pdf, diakses pada tanggal 10 Maret 2021.
- Viray, P. L. (30 April 2019). 69% of Filipinos Satisfied with Democracy – Pew Poll. *Philstar Global*. <https://www.philstar.com/headlines/2019/04/30/1913823/69-filipinos-satisfied-democracy-pew-poll>, diakses pada tanggal 1 Maret 2021.
- World Justice Project. (2020). *World Justice Project Rule of Law Index 2020*. https://worldjusticeproject.org/sites/default/files/documents/WJP-ROLI-2020-Online_0.pdf, diakses pada tanggal 13 Februari 2021.
- Yahya, A. N. (21 Mei 2020). Kualitas Demokrasi Indonesia Dinilai Cenderung Menurun ini Faktornya. *Kompas*. <https://nasional.kompas.com/read/2020/05/21/19501101/kualitas-demokrasi-indonesia-dinilai-cenderung-menurun-ini-faktornya?page=all>, diakses pada tanggal 25 Februari 2021.
- Ronald, F. I dan Pippa Norris. (2016). *Tump, Brexit, and the Rise of Populism: Economic Have-Nots and Cultural Backlash*. [Makalah dalam diskusi]. Roundtable on Rage Against the Machine: Populist Politics in the U.S.

KEMUNDURAN DEMOKRASI DAN KEBEBASAN PERS DI ASIA TENGGARA: REFLEKSI DARI ENAM NEGARA

DEMOCRATIC DECLINE AND FREEDOM OF THE PRESS IN SOUTHEAST ASIA: A REFLECTION FROM SIX COUNTRIES

M. Fajar Shodiq Ramadhan¹

Prodi Ilmu Politik, FISIP, Universitas Brawijaya
Jl. Veteran, Kota Malang, 65145
E-mail: fajarramadhan@ub.ac.id

Romel Masykuri

Prodi Ilmu Politik, FISIP, UIN Sunan Ampel
Jl. Ahmad Yani No.117, Kota Surabaya
E-mail: romel.masykuri@dlb.uinsby.ac.id

Diterima: 29 Juni 2021; direvisi 9 November 2021; disetujui 27 November 2021

Abstract

Freedom of the press and the development of democracy are intrinsically intertwined. However, the trend of democratic decline globally also negatively affected press and media freedom, including in Southeast Asia, where scores on the democracy index stagnated and tended to decline. This article selects six of the eleven countries in Southeast Asia as the object of comparison, namely Timor Leste, Indonesia, Philippines, Singapore, Malaysia, and Thailand. A comparison was made on several aspects of press and media freedom in the six selected countries using survey data obtained through V-Dem, Freedom House, and Reporters Sans Frontières (RSF). The descriptive analysis was conducted through literature related to the conditions of democracy and freedom of the press in six countries. The aspects of press and media freedom compared include government censorship efforts, harassment of journalists, media bias, media corrupt, and media self-censorship. Through a comparison of six countries, it generally reflects that the condition of press and media freedom has linearity with the trend of democratic decline. In countries with declining democracy scores, press and media freedom scores also decline. In most Southeast Asian countries, commitments to freedom of the press are generally undermined by laws and regulations that place restrictions, tight controls, and intimidation on media organizations and journalists. This practice most clearly reflects the democratic decline in Southeast Asia.

Keywords: *democratic decline, freedom of the press, Southeast Asia*

Abstrak

Kebebasan pers dan perkembangan demokrasi memiliki jalinan intrinsik. Namun, tren kemunduran demokrasi secara global juga memberi dampak negatif pada kebebasan pers dan media, termasuk di Asia Tenggara. Skor indeks demokrasi di beberapa negara Asia Tenggara mengalami stagnasi dan cenderung menurun. Artikel ini memilih enam dari sebelas negara di Asia Tenggara sebagai obyek perbandingan, yakni Timor Leste, Indonesia, Filipina, Singapura, Malaysia, dan Thailand. Perbandingan dilakukan terhadap beberapa aspek kebebasan pers dan media di keenam negara yang dipilih menggunakan data survei yang diperoleh melalui V-Dem, Freedom House, dan Reporters Sans Frontières (RSF). Analisis deskriptif dilakukan melalui literatur terkait dengan kondisi demokrasi dan kebebasan pers di enam negara. Adapun aspek kebebasan pers dan media yang diperbandingkan meliputi upaya penyensoran dari pemerintah, gangguan terhadap jurnalis, bias media, korupsi media, dan swasensor media. Melalui perbandingan enam negara, secara umum terlihat bahwa kondisi kebebasan pers dan media memiliki linieritas dengan tren penurunan demokrasi. Di negara dengan penurunan skor demokrasi, skor kebebasan pers dan media juga mengalami penurunan. Di sebagian besar negara Asia Tenggara, komitmen terhadap kebebasan

¹ Kontributor utama

pers umumnya dirusak oleh undang-undang dan beberapa regulasi yang memberi batasan, kontrol ketat, dan mengintimidasi organisasi media dan jurnalis. Praktik ini paling nyata merefleksikan kemunduran demokrasi di Asia Tenggara.

Kata Kunci: kemunduran demokrasi, kebebasan pers, Asia Tenggara

Pendahuluan

Kebebasan pers dan kemajuan demokrasi memiliki jalinan intrinsik. Selama bertahun-tahun, kemajuan demokrasi menunjukkan hubungan positif dengan kebebasan pers. Sebagai komponen penting kemajuan demokrasi, pers dan media yang bebas (serta berkapasitas dan berintegritas) diyakini dapat berperan mengungkap fakta dan kebenaran (Howard, 2019). Di samping itu, pers dan media yang bebas juga dapat memberi informasi kepada warga negara atau konstituen sehingga turut memperkuat demokrasi (Trappel and Tomaz, 2021).

Dalam masyarakat demokratis, pers dan media dianggap sebagai kekuatan keempat – setelah eksekutif, legislatif dan yudikatif. Kualitas demokrasi salah satunya bertumpu pada warga negara atau pemilih yang memiliki informasi yang baik dan memadai, salah satunya dari lembaga media yang kredibel dan independen. Pers juga dinilai menjalankan peran-peran yang mendukung akuntabilitas, transparansi, partisipasi dan inklusi dalam proses demokrasi. Lebih jauh, pers dan media diyakini menjadi institusi yang dapat melakukan *checks and balances* dan berperan sebagai *watchdog* (Deane, 2015).

Tren perubahan karena globalisasi, teknologi-teknologi baru, revolusi digital, meluasnya informasi dan meningkatnya autokrasi, memberi dampak yang negatif pada kualitas demokrasi dan kebebasan pers secara global. Berbagai aktor melihat peluang yang dihadirkan oleh perubahan yang meluas tersebut dan berdampak pada kondisi demokrasi. Beberapa rezim di sebagian negara yang menunjukkan kemunduran demokrasi, memanfaatkan lingkungan media untuk menyebarkan disinformasi, memicu polarisasi, dan mengeksploitasi kerentanan demokrasi.

Bahkan, negara-negara otoriter mengerahkan sumber daya untuk membatasi, menyensor, dan memanipulasi informasi. Adanya upaya pembatasan dan pengawasan terhadap pers dan media, dinilai memiliki efek negatif pada kebebasan berekspresi di negara-negara demokrasi dan rezim otoriter.

Pers dan media sering menjadi fokus utama serangan oleh para pemimpin politik yang berupaya secara sistematis melemahkan kebebasan demokratis untuk memegang kendali lebih kuat. Dalam beberapa kasus, pengikisan ruang untuk hak bersuara yang independen menjadi indikasi awal upaya pelemahan lembaga-lembaga demokrasi lainnya. Autokrasi cenderung menggunakan pers dan media, serta menganggap sensor dan penekanan terhadap media merupakan komponen yang melekat (Stier, 2015). Meskipun pers tidak selalu menjadi institusi pertama yang diserang ketika kepemimpinan suatu negara berubah menjadi anti-demokrasi, represi terhadap pers dan media yang bebas merupakan indikasi kuat bahwa hak-hak politik dan kebebasan sipil lainnya berada dalam bahaya.

Data Freedom House menunjukkan bahwa kebebasan pers merosot hampir di seluruh dunia selama satu dekade terakhir. Di antara negara-negara yang termasuk kategori bebas dalam laporan Freedom House pada 2019 lalu, 19 persen (16 negara) telah mengalami penurunan skor kebebasan pers selama lima tahun terakhir (Repucci, 2019). Masalah ini muncul seiring dengan menguatnya populisme sayap kanan, yang merusak kebebasan dasar di banyak negara demokratis. Para pemimpin populis menampilkan diri mereka sebagai pembela mayoritas yang selama ini dirugikan oleh sistem, mengklaim bertindak atas kepentingan bersama menurut apa yang mereka definisikan, serta mengesampingkan

prinsip-prinsip demokrasi seperti kebebasan pers, transparansi, dan akuntabilitas.

Dalam konteks Asia Tenggara, ancaman terhadap kebebasan pers memiliki kecenderungan untuk terjadi. Meskipun negara-negara Asia Tenggara berada pada berbagai tahap perkembangan demokrasi, salah satu hal tampak jelas dalam laporan Freedom House adalah tren secara global menunjukkan kemunduran demokrasi dan kebebasan. Artikel ini berupaya memahami kemunduran demokrasi dan keterkaitannya dengan perkembangan kebebasan pers dan media dalam lingkup Asia Tenggara.

digunakan adalah data survei yang diperoleh dan diolah oleh V-Dem, Freedom House, dan Reporters Sans Frontières (RSF).² Sementara uraian deskriptif diperoleh melalui penelusuran literatur terkait dengan kondisi demokrasi dan kebebasan pers di enam negara. Artikel ini dibagi menjadi empat bagian, yakni penjelasan tentang kemunduran demokrasi, kondisi demokrasi di enam negara, perbandingan beberapa aspek terkait kebebasan pers dan media, serta kondisi kebebasan pers dan media di enam negara Asia Tenggara.

Tabel 1. Skor Kebebasan Negara-Negara Asia Tenggara

Negara	Skor Global Freedom (Total Score)					Skor Total Rata-Rata (5 tahun)
	2017	2018	2019	2020	2021	
Timor Leste	65	69	70	71	72	69.4
Indonesia	65	64	62	61	59	62.2
Filipina	63	62	61	59	56	60.2
Singapura	51	52	51	50	48	50.4
Malaysia	44	45	52	52	51	48.8
Thailand	32	31	30	32	30	31
Myanmar	32	31	30	30	28	30.2
Brunei Darussalam	29	28	29	28	28	28.4
Kamboja	31	30	26	25	24	27.2
Vietnam	20	20	20	20	19	19.8
Laos	12	12	14	14	13	13

Sumber: (Freedom House, 2020)

Artikel ini memilih enam dari sebelas negara di Asia Tenggara sebagai obyek perbandingan. Penentuan pilihan enam negara berdasarkan rata-rata total skor selama lima tahun terakhir Global Freedom Score (Freedom House) yang diperoleh negara-negara di Asia Tenggara. Dari rata-rata skor selama lima tahun terakhir, enam negara dengan total rata-rata skor tertinggi adalah Timor Leste, Indonesia, Filipina, Singapura, Malaysia, dan Thailand (Tabel 1).

Artikel ini melakukan perbandingan terhadap beberapa aspek kebebasan pers dan media di keenam negara yang dipilih. Data yang

² Data survei dari Freedom House dipilih karena fokus mereka terhadap aspek kebebasan, di mana kebebasan pers merupakan salah satu elemen penting yang juga menjadi perhatian mereka. Namun, karena data dari Freedom House masih bersifat umum, penulis melengkapi dengan data V-Dem yang menyediakan data lebih kompleks – sebagian data dari V-Dem yang berkenaan dengan kebebasan pers dan media digunakan dalam tulisan ini. Sementara data dari RSF – lembaga yang fokus memberikan perhatian terhadap kebebasan pers – dipilih sebagai data pendukung untuk melihat kondisi kebebasan pers dalam rentang waktu dan negara yang dipilih.

Kemunduran Demokrasi dan Kebebasan Pers

Dibandingkan dengan awal tahun 2000, berbagai pandangan terhadap perkembangan demokrasi saat ini menjadi lebih pesimis. Selama beberapa dekade, demokrasi diyakini menuju pada kondisi terkonsolidasi. Akan tetapi, perkembangan demokrasi selama masa transisi tidak selalu linier. Negara-negara yang umumnya dipandang sebagai negara dengan demokrasi terkonsolidasi ternyata juga mengalami pengikisan, kemerosotan atau kemunduran demokrasi.

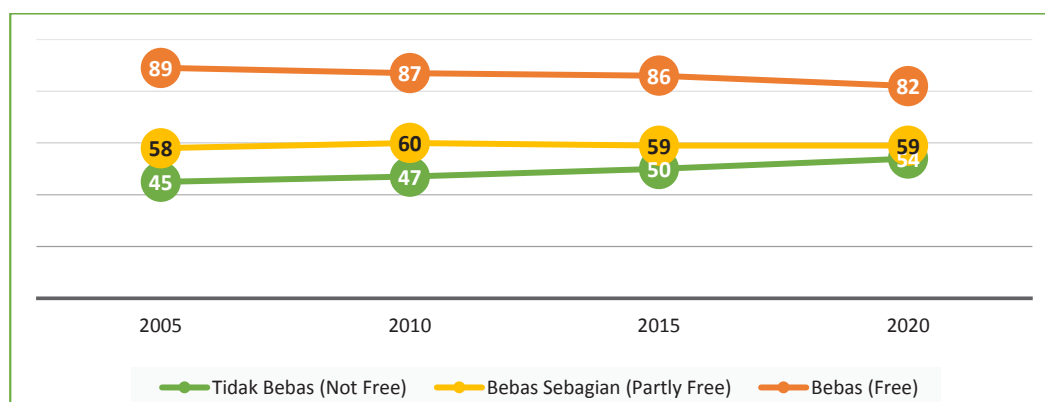
Terdapat berbagai istilah untuk menyebut fenomena kemunduran demokrasi, di antaranya *democratic regression* (Diamond, 2020), *democratic recession* (Levitsky & Way, 2015), *democratic backsliding* (Bermeo, 2016) serta beberapa istilah lainnya. Berbagai definisi tersebut merujuk pada penjelasan bahwa kemunduran demokrasi dapat dipahami sebagai penurunan kualitas demokrasi secara bertahap, yang mengakibatkan sebuah negara kehilangan kualitas demokrasinya, dan menuju pada ciri rezim autokrasi dan otoriter. Seperti yang dijelaskan oleh Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt (2018), sulit untuk menentukan satu momen spesifik yang menunjukkan pemerintah tidak lagi demokratis, mengingat bahwa proses penurunan tersebut bermanifestasi secara perlahan, serta terjadi dalam langkah-langkah yang nyaris tidak tampak.

Secara umum, kemunduran demokrasi disebabkan karena melemahnya institusi politik yang menopang sistem demokrasi di suatu

negara, seperti pemilu yang kurang kompetitif – tanpa sepenuhnya merusak mekanisme pemilu; pembatasan partisipasi – tanpa menghapus hak pilih sebagai aspek pembentuk dan justifikasi demokrasi; serta melemahnya akuntabilitas dengan mereduksi norma pertanggungjawaban dan hukuman kepada pejabat publik (Waldner & Lust, 2018). Kemunduran demokrasi bahkan juga dapat terjadi atas inisiasi pemimpin berkuasa yang dipilih secara demokratis, yang kemudian menjelma menjadi pemimpin dan pemerintahan otoriter. Mereka menggunakan mekanisme hukum (yang seolah-olah memberi legitimasi) untuk tujuan anti-demokrasi. Berbeda halnya dengan kudeta klasik yang menggunakan cara menggulingkan pemerintahan, pelemahan pada demokrasi modern justru berupaya memperlemah sistem demokratis dengan memanipulasinya (Bermeo, 2016).

Levitsky dan Ziblatt (2018) menjelaskan empat ciri utama dari perilaku otoriter yang melemahkan demokrasi, yakni: penolakan (atau pelemahan) komitmen terhadap aturan main demokrasi; penyangkalan legitimasi terhadap oposisi atau lawan politik; mentoleransi atau justru mendorong kekerasan; serta adanya kesiapan untuk membatasi kebebasan sipil dan lawan politik – termasuk pers dan media.

Demokrasi kian menghadapi tantangan dari dalam ketika para pemimpin politik yang terpilih lebih memanfaatkan mekanisme prosedural untuk melegitimasi tindakan anti-demokrasi dengan beragam narasi, misalnya, atas nama stabilitas dan keadilan. Praktik ini secara mudah terefleksi dari praktik manipulasi hukum seperti undang-undang pencemaran nama baik; undang-



Sumber: (Freedom House, 2020)

Grafik 1. Tren Perkembangan Demokrasi Global 2005-2020

undang terorisme; undang-undang penghinaan; dan jenis regulasi lain, yang digunakan untuk mendiskreditkan lawan politik, serta penggunaan retorika demokrasi sebagai pengalih perhatian terhadap praktik anti-demokrasi. Komponen penting demokrasi lainnya seperti pelanggaran hak individu dan kebebasan berekspresi juga mengalami ancaman secara langsung.

Meksi gelombang demokratisasi ketiga, yang dimulai pada pertengahan 1970-an, telah mengubah struktur politik formal yang ada di sebagian besar negara, proses demokratisasi tidak selalu linier. Hanya sejumlah kecil negara yang telah mengalami transisi menuju demokrasi yang berhasil membangun rezim demokrasi yang terkonsolidasi dan berfungsi. Catatan Freedom House di banyak negara, justru menunjukkan lebih tercipta autokrasi daripada demokrasi.

Freedom House mencatat bahwa kemunduran demokrasi dalam rentang waktu jangka panjang semakin mengglobal. Secara statistik, pada tahun 2020 negara-negara yang berjuang menjadi negara demokrasi dan negara-negara di bawah otoritarianisme, menyumbang lebih banyak penurunan status demokrasi secara global. Proporsi negara-negara tidak bebas (*not free*) tahun 2020 adalah yang tertinggi dalam 15 tahun terakhir. Rata-rata, skor negara-negara tidak bebas mengalami penurunan sekitar 15 persen. Namun, pada saat yang sama, jumlah negara di seluruh dunia yang memperoleh peningkatan skor untuk tahun 2020 adalah yang terendah sejak tahun 2005 (Repucci & Slipowitz, 2021). Hal ini merefleksikan bahwa prospek perubahan tren penurunan demokrasi secara global lebih menantang daripada sebelumnya.

Meningkatnya autokrasi, salah satunya ditandai dengan menurunnya kebebasan, termasuk dalam hal kebebasan pers. Kebebasan pers dan media didefinisikan sebagai sejauh mana setiap negara memberi ruang terhadap aliran berita dan informasi secara bebas di masyarakat, yang bergantung pada: (1) sejauh mana campur tangan politik, misalnya, melalui ada tidaknya intimidasi, penyensoran, atau cara-cara pemaksaan (lingkungan politik); (2) sarana konstitusional dan regulasi (lingkungan

hukum); dan (3) independensi keputusan redaksional dari kepentingan komersial atau pribadi (lingkungan ekonomi) (Freedom House, 2020; McQuail, 1987). Jaminan kebebasan berekspresi dan informasi diakui sebagai hak asasi manusia dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang diterima dan diumumkan oleh PBB pada tahun 1948. Dalam deklarasi tersebut dinyatakan bahwa kebebasan pers adalah hak universal, melindungi penyebaran “informasi dan gagasan melalui media apapun dan tanpa memandang batas”. Secara *de facto*, prinsip-prinsip ini sering kali dilanggar oleh pemerintah di sebagian negara.

Di masa lalu, otoritarianisme secara terang-terangan menggunakan kontrol langsung atas sumber informasi dan menekan media dalam penyebaran informasi. Berita dan informasi yang dianggap “subversif” dan yang dipandang “berbahaya” oleh para diktator, sebagian besar telah mengalami penyensoran. Bahkan sampai pada tahap pelarangan penerbitan/penyiaran. Sementara itu, kecenderungan autokrat saat ini, menggunakan mode penyensoran yang berbeda. Menutup media secara semena-mena adalah pilihan terakhir para autokrat baru, karena hal tersebut dapat memberikan kesan buruk bahwa penguasa bertindak melawan hukum.

Para autokrat baru lebih banyak menyediakan instrumen hukum, dengan menerbitkan regulasi baru berkenaan dengan media dan informasi. Regulasi tersebut menjadi instrumen penekan terhadap institusi pers dan media, menjadikan pengaturan penyebaran informasi lebih ketat, dengan ciri redaksi regulasi yang sengaja dibuat samar. Regulasi yang digunakan para aktor politik, terutama penguasa, biasanya berbentuk regulasi anti-terorisme, anti-penyebaran rumor, dan perlindungan privasi. Hal ini sejalan dengan temuan kunci Freedom House yang menyatakan bahwa demokrasi secara umum sedang mengalami penurunan kebebasan sipil dan hak-hak politik. Kondisi demikian menjadikan pers yang bebas sulit diterima begitu saja, bahkan ketika pemerintahan demokratis telah berjalan selama beberapa dekade.

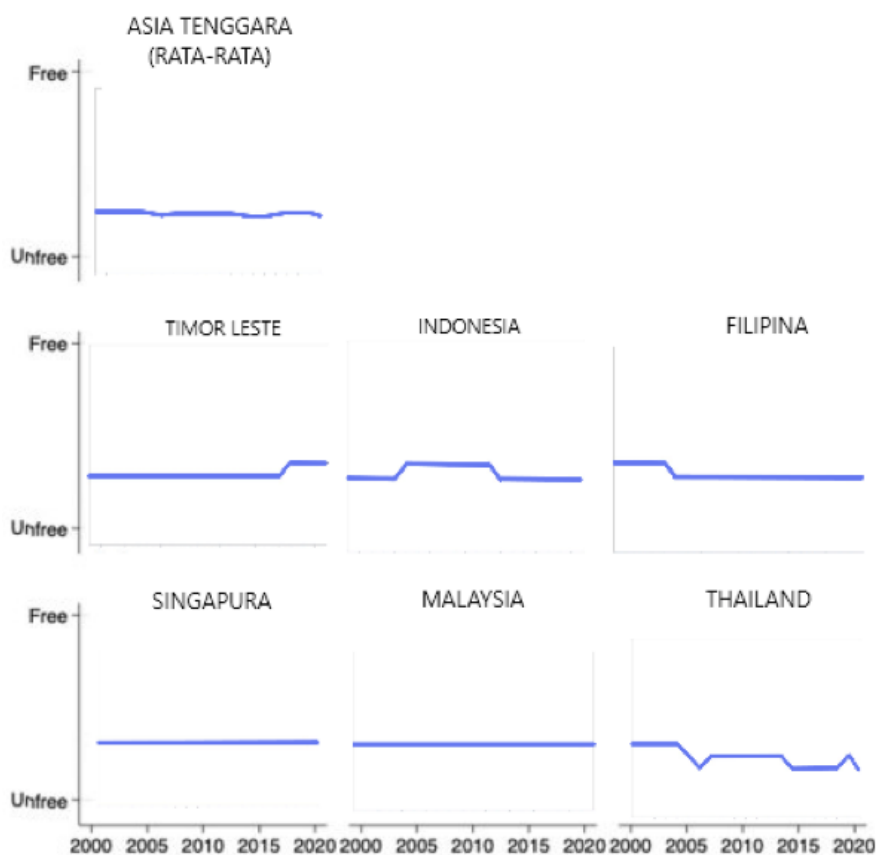
Kondisi Kebebasan di Enam Negara Asia Tenggara: Stagnasi dan Kemunduran

Jika mengamati data Freedom House tentang status kebebasan, tampak bahwa kecenderungan demokrasi di Asia Tenggara berada pada kondisi stagnan. Sebagian besar negara tetap stagnan, berada dalam kondisi “*partly free*” (bebas sebagian) dan “*not free*” (tidak bebas) dalam kurun waktu 20 tahun – termasuk enam negara yang menjadi obyek dalam artikel ini. Hal ini menunjukkan bahwa di satu sisi perkembangan demokrasi berjalan secara bertahap, tetapi mengalami kemunduran kembali dalam hal kebebasan (Indonesia, Filipina, Thailand). Di sisi lain, terdapat negara yang mengalami stagnasi kondisi kebebasan dalam kurun waktu yang panjang (Malaysia dan Singapura). Hanya Timor Leste yang perkembangan kebebasannya mengalami tren positif (Grafik 2).

Dalam kurun tahun 2010 hingga 2020, Freedom House mencatat aspek kebebasan di enam negara Asia Tenggara tersebut secara

umum berada dalam kondisi bebas sebagian (*partly free*) dan kecenderungan mengalami stagnasi dan penurunan. Timor Leste mengalami peningkatan status menjadi bebas (*free*) sejak tahun 2017, sedangkan Thailand mengalami status kebebasan yang memburuk menjadi tidak bebas (*not free*) sejak tahun 2014 (Tabel 2).

Freedom House mencatat bahwa aspek kebebasan di Indonesia terus menurun sejak 2013, dari status bebas (*free*) menjadi bebas sebagian (*partly free*). Kekhawatiran dan gejala kemunduran demokrasi di Indonesia tampak pada beberapa hal. Menajamnya polarisasi sejak tahun 2014 hingga 2019, baik yang terjadi pada pemilu presiden, maupun pemilihan kepala daerah (Warburton, 2020), pengawasan terhadap aktivitas media sosial, pembubaran organisasi, intimidasi terhadap aktivis NGO (*Non-Governmental Organization*) menjadi indikator menurunnya kebebasan di Indonesia. Laporan Freedom House (2014) bahkan mencatat menurunnya kualitas demokrasi di Indonesia disebabkan karena terbitnya regulasi yang dianggap samar, multi-tafsir,



Sumber: (Freedom House, 2020)

Grafik 2. Perkembangan Status Demokrasi di Enam Negara

Tabel 2. Perkembangan Status Kebebasan Enam Negara 2010-2020³

Negara	Status Kebebasan (Tahun)											Tren
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Indonesia	F	F	F	PF	PF	PF	PF	PF	PF	PF	PF	Menurun
Malaysia	PF	PF	PF	PF	PF	PF	PF	PF	PF	PF	PF	Stagnan
Filipina	PF	PF	PF	PF	PF	PF	PF	PF	PF	PF	PF	Stagnan
Singapura	PF	PF	PF	PF	PF	PF	PF	PF	PF	PF	PF	Stagnan
Thailand	PF	PF	PF	PF	NF	NF	NF	NF	NF	PF	NF	Menurun
Timor Leste	PF	PF	PF	PF	PF	PF	PF	F	F	F	F	Meningkat

Sumber: (Freedom House, 2020)

Keterangan: F (*Free/Bebas*), PF (*Partly Free/Bebas Sebagian*), NF (*Not Free/Tidak Bebas*). Status ini merupakan kombinasi skor keseluruhan yang dibuat oleh Freeom House yang diberikan untuk klasifikasi kebebasan sipil.

atau “pasal karet” dengan pelarangan-pelarangan – termasuk di dalamnya istilah “ujaran kebencian”, “anti-pancasila”, atau “anti pemerintah” – yang dapat menjadi alat manipulasi politik, rawan disalahgunakan dan dinilai mengganggu kebebasan, baik kebebasan berpendapat maupun pers dan media.

Di Malaysia, harapan menguatnya demokrasi muncul ketika koalisi oposisi memenangkan pemilu pada Mei 2018 lalu. Kemenangan pertama oposisi setelah lebih dari 60 tahun pemerintahan dikuasai oleh Barisan Nasional (BN) pimpinan United Malays National Organization (UMNO). Kemenangan tersebut justru bertolak belakang dengan tren global demokrasi yang tengah diuji oleh populisme. Transisi pimpinan pasca 2018 sebenarnya tidak

sepenuhnya membawa perubahan signifikan pada konstelasi elite penguasa di Malaysia. Di samping itu, perubahan politik juga masih belum sepenuhnya menghapus regulasi dan undang-undang yang mengganggu berjalannya demokrasi. Setidaknya beberapa regulasi seperti: *the Official Secrets Act (OSA)*, *the Sedition Act 1948*, *the Communications and Multimedia Act (CMA)*, *Printing Presses and Publications Act 1984*, dan regulasi lain yang dinilai potensial membatasi kebebasan. Kondisi demokrasi di Malaysia masih dinilai rentan dan belum banyak mengalami perubahan yang lebih baik. Selama satu dekade sejak 2010, kondisi kebebasan di Malaysia masuk dalam kategori bebas sebagian (*partly free*).

Sementara itu, kondisi kebebasan dan demokrasi di Filipina berjalan sangat rumit. Dalam sejarahnya, Filipina tidak lepas dari berbagai kasus kekerasan, teror, kriminalitas, korupsi, persekusi, narkoba, dan persoalan sosial politik lain. Kondisi demikian memberi dukungan pada figur yang dinilai mampu membawa pesan terhadap anti-kriminalitas dan menciptakan stabilitas. Maka, pada pemilu 2016, terpilihlah Rodrigo Duterte sebagai presiden Filipina (Aminuddin, 2020). Gaya kepemimpinan yang personalistik, karakteristik otoriter, dan upaya menindas oposisi, serta mengabaikan mekanisme *check and balances*, membawa kekhawatiran menurunnya demokrasi di Filipina lebih dalam. Di bawah kepemimpinannya, atas nama perang melawan narkoba, hak asasi dan kebebasan sipil menurun

³ Untuk setiap negara dan wilayah, Freedom House menganalisis proses pemilu, pluralisme dan partisipasi politik, fungsi pemerintah, kebebasan berekspresi dan berkeyakinan, hak berserikat dan berorganisasi, supremasi hukum, serta otonomi pribadi dan hak individu. Status ini masing-masing mencakup klasifikasi yang luas dari skor yang tersedia. Negara atau wilayah dalam satu kategori, dapat saja memiliki situasi hak asasi manusia yang sangat berbeda. Misalnya, mereka yang berada di ujung bawah kategori Bebas (*Free/F*) tidak berarti bahwa suatu negara atau wilayah menikmati kebebasan yang sempurna atau tidak memiliki masalah serius, hanya saja ia menikmati kebebasan yang relatif lebih banyak daripada yang diberi peringkat Bebas Sebagian (*Partly Free/PF*) atau Tidak Bebas (*Not Free/NF*). Penjelasan metodologi oleh Freedom House dapat dilihat pada: <https://freedomhouse.org/reports/freedom-world/freedom-world-research-methodology>

secara dramatis, meningkatkan pengaruh politik polisi dan militer, serta mendorong persekusi dan tindakan main hakim oleh masyarakat. Freedom House mencatat kondisi demokrasi di Filipina selama sepuluh tahun stagnan pada kategori bebas sebagian (*partly free*).

Adapun di Singapura, demokrasi kerap berkutut dengan persoalan pemilu yang dinilai tidak bebas dan adil. Mekanisme dan institusi penyelenggara pemilu kerap dinilai tidak independen dan bersekongkol untuk menguntungkan partai berkuasa. Undang-Undang dan regulasi yang dinilai represif digunakan untuk membatasi oposisi, mengendalikan kebebasan sipil dan mengontrol media. Praktik demokrasi prosedural berjalan, tetapi persoalan mendasar terkait demokrasi masih menjadi masalah. Meski konstitusi negara memberi hak berserikat dan berkumpul, tetapi hak-hak tersebut faktanya memperoleh pembatasan. Undang-Undang Ketertiban Umum 2010, salah satunya, memberi hak bagi polisi untuk melarang seseorang atau kelompok untuk berkumpul. Seperti halnya Malaysia, ada banyak regulasi yang secara gamblang membatasi kebebasan, seperti *Internal Security Act*, *Sedition Act*, *Public Order Act* dan beberapa undang-undang serta regulasi lain. Freedom House mencatat bahwa tidak ada perubahan yang signifikan dalam perkembangan demokrasi di Singapura. Dalam satu dekade, status kebebasan di Singapura adalah bebas sebagian (*partly free*).

Sementara untuk Thailand, indeks demokrasinya juga terus mengalami penurunan. Sejak 2014 hingga 2020, kondisi kebebasan Thailand adalah tidak bebas (*not free*) – dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang bebas sebagian (*party free*). Sejarah demokrasi di Thailand didominasi oleh kontrol kuat autokratis atas politik, ekonomi, dan masyarakat. *The National Council for Peace and Order* (NCPO) Thailand memonopoli penggunaan kekuatan atas nama ketertiban dan stabilitas. NCPO bahkan melakukan intervensi determinan dalam proses politik seperti pemilu, aktivisme sipil, dan kebebasan pers. Persoalan yang sama seperti di Indonesia, Malaysia dan Singapura, yakni adanya regulasi yang multitafsir dan

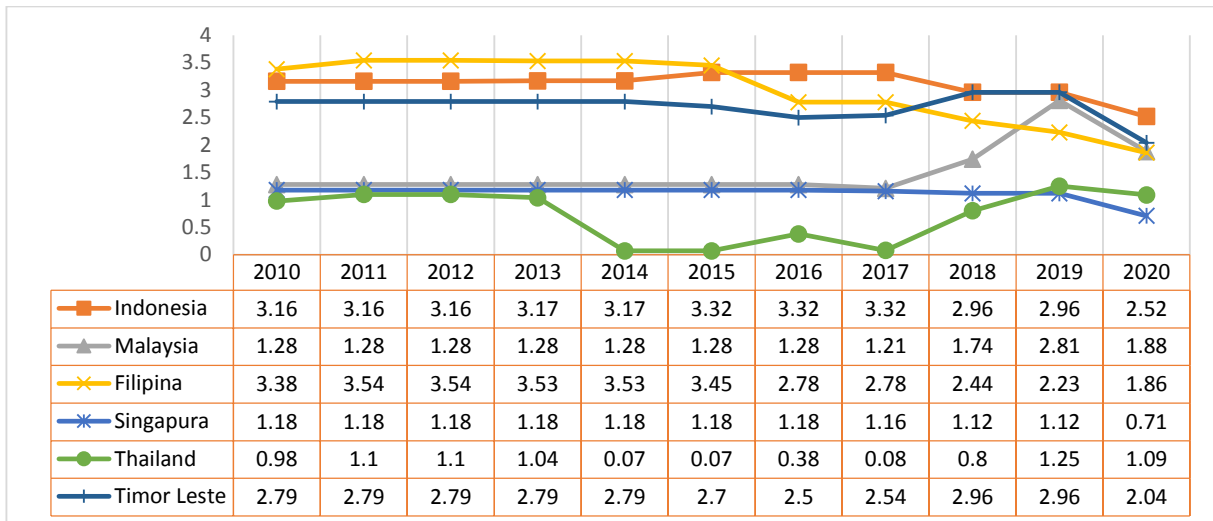
mengancam kebebasan sipil, menjadi salah satu faktor yang menjadikan kondisi demokrasi di Thailand terus merosot.

Dibandingkan dengan lima negara lain, Timor Leste menjadi negara yang mengalami perkembangan demokrasi yang cukup baik. Dalam satu dekade, status kebebasan di Timor Leste masuk dalam kategori bebas (*free*) – meningkat dibandingkan sebelumnya yang berstatus bebas sebagian (*partly free*). Meski demikian, demokrasi di Timor Leste bukan berarti tanpa persoalan. Kebebasan sipil diterima secara umum. Namun, *Penal Code* (di Indonesia seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHPP) memuat pasal tentang informasi palsu dan fitnah, yang menciptakan kekhawatiran pembatasan kebebasan dan mundurnya demokrasi. Secara umum, ujian yang dihadapi oleh Timor Leste dalam pembangunan demokrasi adalah bekerjanya institusi-institusi demokrasi dan stabilitas sistem politik.

Di luar enam negara yang dibahas dalam tulisan ini, kondisi demokrasi di lima negara lain di Asia Tenggara jauh lebih mengkhawatirkan. Bangkitnya populisme, sentralisasi kekuasaan di tangan pemerintahan berkuasa, kudeta militer, menguatnya politik identitas, serta upaya-upaya membatasi kebebasan, mewarnai kondisi demokrasi di Asia Tenggara secara umum. Hanya Timor Leste yang empat tahun terakhir hingga 2020 tengah menikmati kenaikan status kebebasan, meski kekhawatiran terjadinya kemunduran juga turut menyertai.

Kondisi Kebebasan Pers: Perbandingan Beberapa Aspek di Enam Negara

Begitu banyak aspek dan faktor terkait kebebasan pers dan media. Beberapa aspek dapat diamati melalui data berdasarkan data survei. Sementara beberapa aspek lain memerlukan uraian yang mendalam. Artikel ini mengambil aspek-aspek berdasarkan data survei terkait kebebasan pers dan media yang disajikan oleh V-Dem Institute. Terdapat lima aspek yang merefleksikan aspek-aspek penting kondisi di beberapa negara untuk dibandingkan.



Sumber: V-Dem Dataset v10 (Coppedge, M., et al., 2020)

Grafik 3. Aspek Upaya Penyensoran dari Pemerintah di Enam Negara⁴

Aspek pertama adalah upaya penyensoran oleh pemerintah yang berkuasa (Grafik 3). Aspek ini menunjukkan adanya upaya dari pemerintahan untuk mengintervensi pemberitaan atau konten media. Upaya penyensoran dapat memiliki beragam bentuk, dalam bentuk tidak langsung misalnya, yang mencakup adanya tindakan pemberian izin atau frekuensi siaran yang bermotif politik, menarik dukungan keuangan, upaya mempengaruhi percetakan dan jaringan distribusi, pemberian syarat izin penerbitan media yang memberatkan, adanya tarif yang tinggi, serta tindakan penyupaan. Bentuk lain adalah penyensoran langsung seperti mencabut izin penerbitan dan penyiaran, atau intimidasi terhadap organisasi media dan jurnalis atau pekerja media.

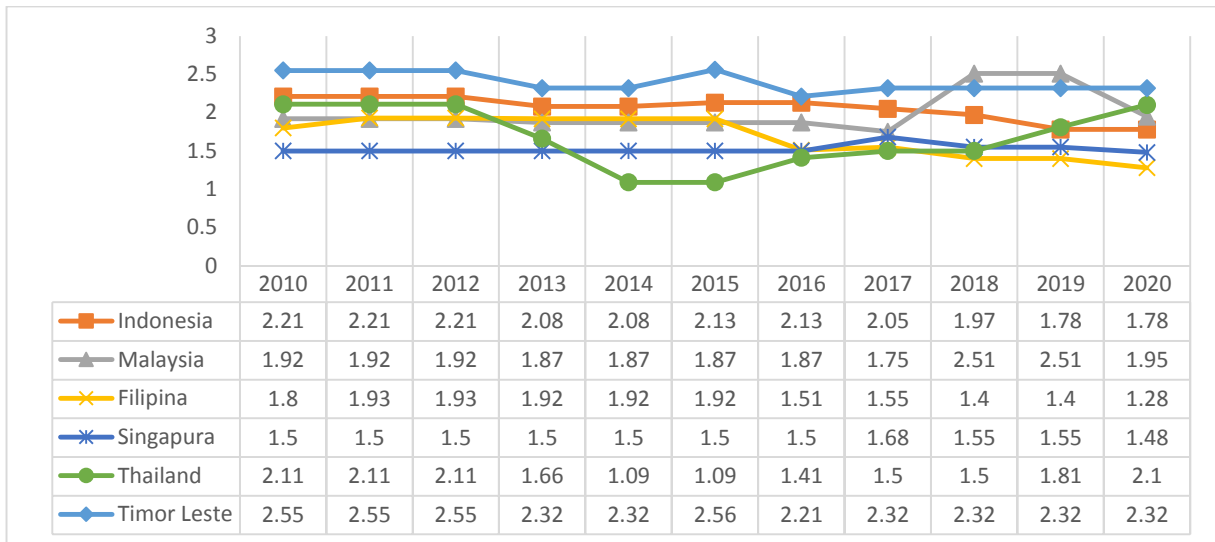
Dari enam negara, dalam satu dekade, upaya penyensoran paling buruk secara konsisten terlihat di Singapura dan Thailand. Singapura menjadi negara dengan skor paling

buruk (mendekati 0). Fenomena penyensoran paling jelas tampak dari keberadaan *Infocomm Media Development Authority* (IMDA) yang memiliki kekuasaan untuk menyensor berbagai bentuk konten jurnalistik. Tuntutan pencemaran nama baik dianggap hal biasa dan terkadang disertai dengan tuduhan penghasutan yang dapat dihukum hingga tujuh tahun penjara.

Malaysia, sempat mengalami kondisi lebih baik di tahun 2019 dalam aspek penyensoran, tetapi kembali memperoleh skor yang rendah di tahun 2020. Namun demikian, jika melihat tren keseluruhan, keenam negara sama-sama mengalami penurunan skor yang menunjukkan adanya upaya kuat penyensoran oleh pemerintah. Sekalipun Indonesia dan Filipina selama 2010-2015 memiliki tren yang positif, pada akhirnya juga mengalami penurunan skor sejak 2016. Artinya, hampir di enam negara dengan indeks demokrasi yang lebih baik di Asia Tenggara, menghadapi masalah yang sama, yaitu pemerintah semakin kuat melakukan intervensi dalam kontrol dan sensor media. Hal ini linier dengan menurunnya kualitas demokrasi dan kebebasan di hampir keenam negara (kecuali Timor Leste) yang juga mengalami kemunduran demokrasi. Kondisi lebih buruk terjadi di lima negara lain di Asia Tenggara yang memiliki skor kebebasan rendah.

Kedua, aspek gangguan terhadap jurnalis atau pekerja media (Grafik 4). Aspek ini menunjukkan apakah terjadi kekerasan terhadap

⁴ Skor dalam aspek ini dibagi dalam beberapa kategori: Skor 0 (paling buruk): menunjukkan adanya upaya penyensoran (dari rezim) yang bersifat langsung dan rutin. Skor 1: adanya upaya menyensor secara tidak langsung tetapi bersifat rutin. Skor 2: upaya penyensoran bersifat langsung tetapi terbatas pada masalah-masalah yang sangat sensitif. Skor 3: upaya penyensoran bersifat tidak langsung dan terbatas pada isu-isu yang sangat sensitif. Skor 4: pemerintah jarang mencoba menyensor media besar dengan cara apapun, dan ketika terdapat upaya tersebut, pejabat yang bertanggung jawab biasanya dihukum.



Sumber: V-Dem Dataset v10 (Coppedge, M., et al., 2020)

Grafik 4. Aspek Gangguan terhadap Jurnalis di Enam Negara⁵

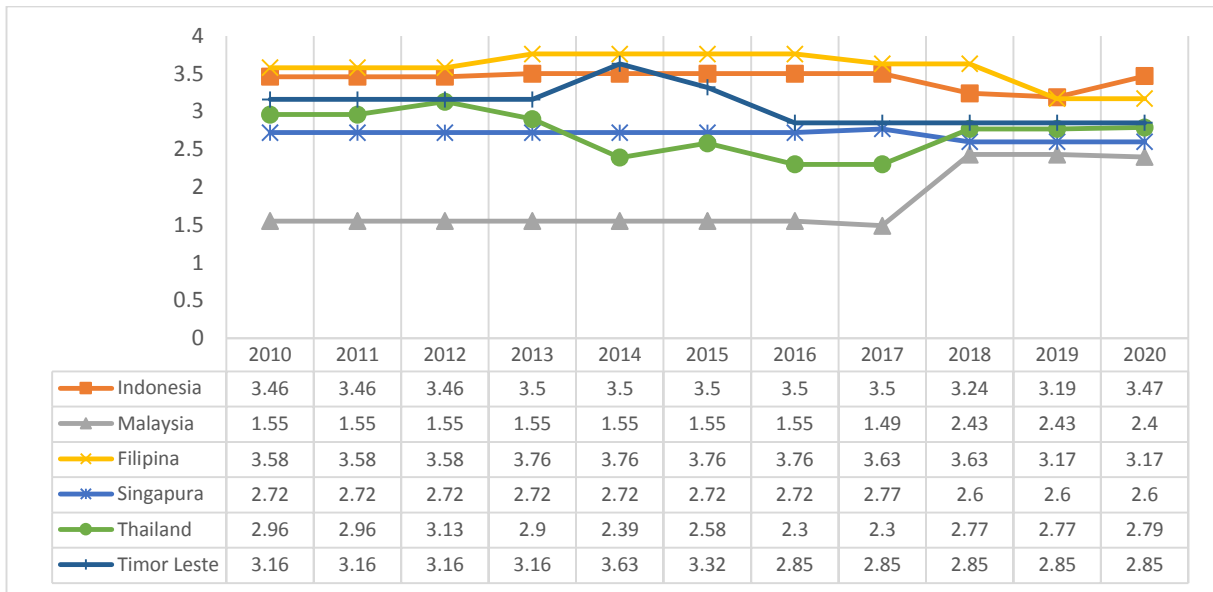
individu jurnalis atau pekerja media. Tindak kekerasan dapat terjadi dalam berbagai macam bentuk, seperti intimidasi, fitnah, penangkapan, penahanan, pemukulan, atau pembunuhan oleh aktor pemerintah atau non-pemerintah (kelompok kekerasan, simpatisan partai, dan sebagainya).

Selama 10 tahun (2011-2020), skor pada aspek gangguan terhadap jurnalis di enam negara berkisar antara 1 hingga 2,5. Tidak ada satu pun negara dengan skor 3 dan 4. Artinya, praktik gangguan terhadap jurnalis kerap terjadi di enam negara. Singapura adalah negara dengan gangguan terhadap pekerja jurnalistik tertinggi. Selama 10 tahun, Singapura berada pada kisaran skor 1,5. Malaysia yang sempat memiliki skor 2,5 di tahun 2019, turun kembali pada tahun 2020 (1,95). Meski grafis menunjukkan angka yang fluktuatif di tiap negara, bahkan Thailand mengalami tren meningkat selama dua tahun, tetapi secara umum dapat disimpulkan masih terdapat gangguan kepada jurnalis atau pekerja media.

⁵Skor dalam aspek ini dibagi dalam beberapa kategori: Skor 0: Tidak ada jurnalis yang berani terlibat dalam kegiatan jurnalistik yang akan menyinggung aktor berpengaruh karena diganggu atau tindakan lain yang lebih buruk pasti akan terjadi. Skor 1: Beberapa jurnalis terkadang menyinggung aktor berpengaruh, tetapi mereka hampir selalu diganggu atau lebih buruk dan akhirnya dipaksa untuk berhenti. Skor 2: Beberapa jurnalis yang menyinggung aktor kuat dipaksa untuk berhenti tetapi yang lain berhasil

Aspek ketiga berkaitan dengan kebebasan pers dan media adalah bias media – terhadap partai atau kandidat oposisi (Grafik 5). Bias media dapat dipahami sebagai pemberitaan yang dibelokkan atau disimpangkan, dipilah, dimanipulasi, didistorsi, atau dicampur dengan pandangan subyektif jurnalis atau produser (termasuk editor, redaktur, bahkan pemilik media). Istilah “bias media” menyiratkan bias yang bertentangan dengan standar dan etika jurnalisisme.

Berbeda halnya dengan dua aspek sebelumnya, aspek ketiga (dan aspek berikutnya, yang dibandingkan dalam artikel ini) terjadi bukan hanya karena faktor eksternal media atau jurnalis, tetapi juga disebabkan karena faktor internal di dalam media (seperti rutinitas media, kualitas dan kepentingan jurnalis, kepentingan ekonomi-politik media, serta keberpihakan dan kedekatan dengan partai atau elite politik tertentu karena motif yang bisa beragam). Meski bias media dapat berkenaan dengan berbagai macam isu, data V-Dem dalam aspek ini secara spesifik terkait dengan melanjutkan praktik jurnalisisme secara bebas untuk jangka waktu yang lama. Skor 3: Jarang ada jurnalis yang diganggu karena menyinggung aktor berpengaruh, dan jika ini terjadi, mereka yang bertanggung jawab atas pelecehan tersebut akan diidentifikasi dan dihukum. Skor 4: Jurnalis tidak pernah diganggu oleh pemerintah atau aktor non-pemerintah yang berkuasa saat terlibat dalam kegiatan jurnalistik yang sah.



Sumber: V-Dem Dataset v10 (Coppedge, M., et al., 2020)

Grafik 5. Bias Media di Enam Negara⁶

bagaimana media melakukan pemberitaan yang tidak memihak dan proporsional, baik kepada kelompok penguasa maupun oposisi.

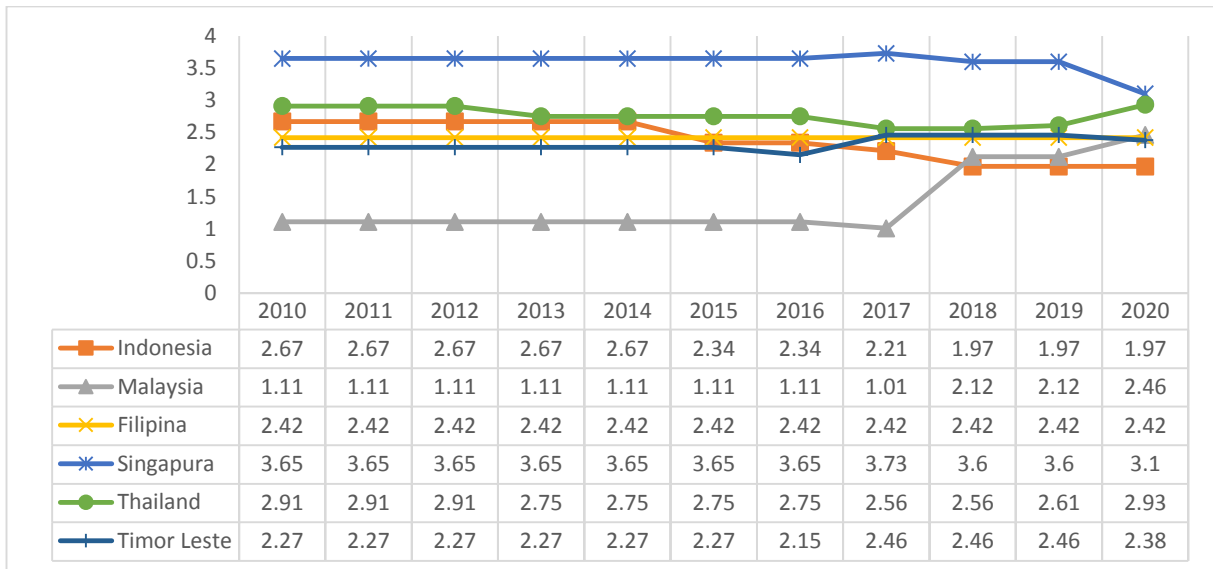
Selama tahun 2015 hingga 2020, dari enam negara yang dibahas dalam tulisan ini, hanya Indonesia dan Filipina yang memiliki skor di atas 3. Artinya, pemberitaan media di dua negara tersebut masih relatif berimbang antara partai atau kandidat pendukung pemerintah dengan oposisi, meskipun mungkin saja porsi pemberitaan terhadap kelompok pemerintah cenderung lebih banyak. Sementara pada empat

negara lain, pemberitaan media masih dinilai bias dan condong kepada partai atau kandidat pemerintah. Timor Leste masih memiliki skor di atas 3 hingga tahun 2015, kemudian pada tahun 2016 hingga 2020 menurun hingga berada pada skor 2,85.

Dalam penjelasannya, V-Dem memberi catatan perlunya kehati-hatian dalam melihat pergeseran skor pada aspek bias media, terutama berkenaan dengan momen pemilu di setiap negara. Pemberitaan media, seperti di Indonesia, misalnya, dipengaruhi oleh berbagai faktor berkaitan dengan pemberitaan kepada pemerintah dan oposisi oleh media yang menjadi partisan. Konstelasi media pendukung pemerintah dan oposisi, atau kepada kandidat presiden tertentu, juga berpotensi menciptakan bias. Media kerap kali terjebak pada tarik-menarik kepentingan ekonomi politik, kebutuhan untuk memperoleh modal melalui investasi dan iklan, serta kepentingan pemilik media beserta jaringan bisnisnya, yang mengarahkan media untuk cenderung memproduksi berita bias.

Aspek keempat adalah *media corrupt* atau korupsi media (Grafik 6). Praktik ini biasanya melibatkan penerimaan pembayaran atau imbalan tertentu baik langsung atau tidak langsung (finansial atau bentuk lain) untuk meliput (atau tidak meliput) berita tertentu, atau untuk mengubah pemberitaan untuk

⁶ Skor dalam aspek ini dibagi dalam beberapa kategori: Skor 0: Media cetak dan siaran hanya meliput partai atau kandidat dalam pemerintahan (resmi dan yang berkuasa), atau tidak memiliki liputan politik, atau tidak ada partai atau kandidat oposisi untuk diliput. Skor 1: Media cetak dan siaran tidak hanya meliput partai atau kandidat pemerintah tetapi semua partai atau kandidat oposisi hanya menerima liputan negatif. Skor 2: Media cetak dan penyiaran meliput beberapa partai atau kandidat oposisi kurang lebih secara tidak memihak, tetapi mereka hanya memberikan liputan negatif atau tidak sama sekali kepada setidaknya satu partai atau kandidat yang layak diberitakan. Skor 3: Media cetak dan penyiaran meliput partai atau kandidat oposisi kurang lebih secara tidak memihak, tetapi mereka memberikan liputan yang berlebihan kepada partai atau kandidat yang memerintah. Skor 4: Media cetak dan penyiaran meliput semua partai dan kandidat yang layak diberitakan kurang lebih secara tidak memihak dan proporsional dengan kelayakan berita mereka.



Sumber: V-Dem Dataset v10 (Coppedge, M., et al., 2020)

Grafik 6. Aspek Korupsi Media di Enam Negara⁷

tujuan tertentu, seperti membentuk opini atau menyesatkan khalayak.

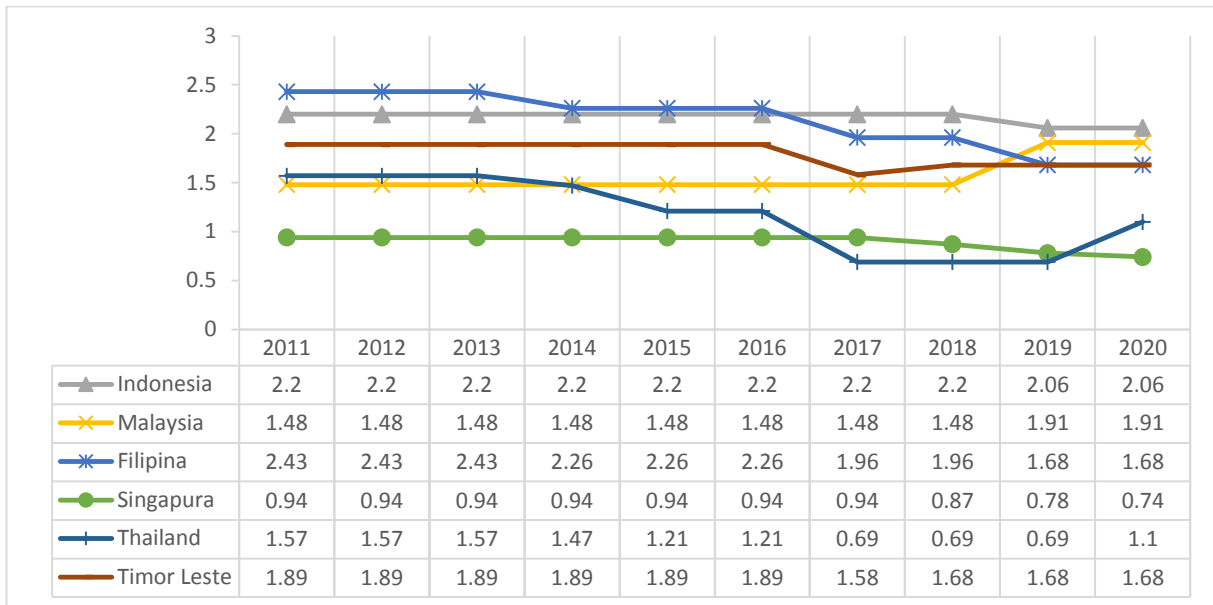
Aspek yang mengejutkan dalam perbandingan terhadap enam negara adalah korupsi media. Singapura adalah negara dengan skor tertinggi jika melihat rata-rata skor dalam kurun waktu 5 dan 10 tahun terakhir hingga tahun 2020. Meski cenderung menurun, skor Singapura bahkan masih lebih baik dibandingkan dengan negara lain di Asia Tenggara. Malaysia memiliki skor yang mencolok dengan skor pada aspek korupsi media cenderung naik sejak tahun 2018, dibanding tahun sebelumnya yang stagnan di angka 1. Sementara Indonesia menjadi negara dengan skor yang terus turun semenjak tahun 2017. Selama tahun 2017 hingga 2020, skornya semakin memburuk di bawah angka 2. Tiga negara lain, Filipina, Thailand dan Timor Leste, relatif berada pada angka yang tidak banyak berubah selama 10 tahun.

⁷ Skor dalam aspek ini dibagi dalam beberapa kategori: Skor 0: Media sangat diarahkan oleh pemerintah sehingga pembayaran semacam itu tidak diperlukan untuk memastikan liputan pro-pemerintah atau tidak efektif dalam menghasilkan liputan anti-pemerintah. Skor 1: Jurnalis, penerbit, dan penyiar secara rutin mengubah liputan berita dengan imbalan pembayaran. Skor 2: Adalah umum, tetapi tidak rutin, bagi jurnalis, penerbit, dan penyiar untuk mengubah liputan berita dengan imbalan pembayaran. Skor 3: Tidaklah normal bagi jurnalis, penerbit, dan penyiar untuk mengubah liputan berita dengan imbalan pembayaran, tetapi itu terjadi

Secara umum, sebagian besar enam negara ini berada pada kisaran skor 2-3. Artinya, sebagian besar di antara negara tersebut, aktivitas mengubah berita oleh jurnalis, penerbit dan penyiar dengan imbalan dan pembayaran tertentu masih terjadi secara umum. Ada berbagai alasan mengapa praktik korupsi media dapat terjadi, seperti persoalan norma dan nilai dalam organisasi media untuk menjaga integritas dan kualitas pemberitaan, upah pekerja media yang masih tergolong rendah, serta kepentingan lain yang mendorong praktik korupsi media (Yang, 2021).

Aspek kelima adalah swasensor (*self-censorship*) atau sensor mandiri oleh media (Grafik 7). Berbeda dengan upaya sensor oleh pemerintah, swasensor dilakukan atas inisiatif sendiri oleh pekerja media, jurnalis, atau organisasi media tanpa tekanan terbuka dari pihak atau otoritas tertentu. Meski dapat mencakup isu-isu yang luas karena berkaitan dengan etika atau norma tertentu, namun aspek swasensor dalam hal ini fokus pada ada tidaknya tindakan penyensoran diri di kalangan jurnalis ketika meliput isu-isu yang dianggap sensitif secara politik oleh pemerintah.

sesekali, tanpa ada yang dihukum. Skor 4: Jurnalis, penerbit, dan penyiar jarang mengubah liputan berita dengan imbalan pembayaran, dan jika diketahui, seseorang dapat dihukum.



Sumber: V-Dem Dataset v10 (Coppedge, M., et al., 2020)

Grafik 7. Aspek Swasensor oleh Media di Enam Negara ⁸

Data V-Dem menunjukkan bahwa praktik swasensor kerap terjadi hampir di keenam negara. Indonesia menjadi negara dengan skor tertinggi dalam kurun waktu lima dan sepuluh tahun terakhir hingga tahun 2020 – meskipun tren sejak 2018 menunjukkan skor yang menurun. Dengan skor di kisaran angka 2, di Indonesia terjadi swasensor, tetapi berada pada isu-isu yang dianggap sangat sensitif. Sementara lima negara lain, berada di bawah angka 2 dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Skor terendah adalah Singapura dan Thailand. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir skor keduanya berada di bawah angka 1. Hal ini menunjukkan adanya swasensor oleh media yang dilakukan secara umum di negara-negara tersebut. Di Singapura, swasensor dilakukan bisa jadi karena afiliasi pemilik media dengan pemerintah, sedangkan di Thailand swasensor menjadi strategi bertahan agar terus eksis karena adanya tekanan dari pemerintah.

⁸ Skor dalam aspek ini dibagi dalam beberapa kategori: Skor 0: Swasensor bersifat lengkap dan menyeluruh. Skor 1: Swasensor bersifat umum tetapi tidak lengkap dan menyeluruh. Skor 2: Terdapat swasensor pada beberapa isu politik yang sangat sensitif tetapi tidak pada isu-isu yang cukup sensitif. Skor 3: Ada sedikit atau tidak ada swasensor di kalangan jurnalis.

Meski seolah tidak terdapat tekanan terbuka, tetapi media di kedua negara cukup berhati-hati dalam melakukan pemberitaan yang dianggap provokatif – disebabkan adanya regulasi atau undang-undang tertentu yang dapat mencabut izin operasi institusi pers dan media (Fong, 2015). Begitu juga di Filipina, skor pada aspek ini menurun sejak 2016, swasensor juga dilakukan karena adanya regulasi yang mengancam eksistensi dan pekerja media. Praktik swasensor mungkin juga dapat dibaca sebagai upaya bertahan agar institusi media tetap dapat melakukan aktivitas produksi berita, serta menghindari ancaman atau upaya pembubaran organisasi media oleh pemerintah atas nama undang-undang.

Kemunduran Kebebasan Pers di Asia Tenggara

Guna melihat bagaimana kondisi kebebasan pers dan media secara umum di keenam negara, dapat dilihat melalui peringkat yang disusun oleh RSF terhadap 180 negara di dunia (Tabel 3). Di antara enam negara, Timor Leste menjadi negara dengan peringkat tertinggi di antara lima negara lain, yang selama lima tahun terakhir (2016-2020) berada pada kisaran rangking RSF 78-99 dari 180 negara. Hal ini selaras jika melihat data V-Dem terkait aspek

Tabel 3. Peringkat Kebebasan Pers di Enam Negara terhadap 180 Negara

Negara	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Timor Leste	90	77	103	99	98	95	84	78
Malaysia	145	147	147	146	144	145	123	101
Indonesia	139	132	138	130	124	124	124	119
Filipina	147	149	141	138	127	133	134	136
Thailand	135	130	134	136	142	140	136	140
Singapura	149	150	153	154	151	151	151	158

Sumber: (RSF, 2020)

upaya penyensoran oleh pemerintah dan aspek gangguan terhadap jurnalis di Timor Leste yang memiliki skor relatif lebih baik dibandingkan lima negara lain.

Sementara lima negara lain berada pada kisaran peringkat 130-158 dari 180 negara selama kurun waktu lima tahun. Indonesia menjadi negara yang memiliki peringkat tertinggi kedua setelah Timor Leste, dengan peringkat yang mengalami kenaikan sejak 2016 dan berada pada peringkat 119 di tahun 2020. Adapun Malaysia mengalami kenaikan peringkat sejak tahun 2018. Pada tahun 2020 Malaysia berada pada peringkat 101 – peringkat yang bahkan lebih baik daripada Indonesia pada tahun tersebut. Meski demikian, kekhawatiran terhadap kebebasan pers dan media bukan berarti tanpa ancaman. Malaysia dan Indonesia masih memiliki regulasi dan undang-undang yang memberi ruang untuk menekan pers dan media.

Dari keenam negara, Singapura, Filipina dan Thailand menjadi contoh paling negatif dalam hal kebebasan pers dan media. Kebebasan pers memang dijamin oleh konstitusi ketiga negara tersebut. Namun, dalam praktiknya, terdapat pembatasan dan kontrol terhadap media secara ketat oleh rezim berkuasa. Singapura adalah negara dengan peringkat terendah, yaitu berada pada peringkat 158 di tahun 2020. Kondisi ini juga linier dengan aspek upaya penyensoran oleh pemerintah dan aspek gangguan terhadap jurnalis di tiga negara tersebut. Kenaikan dan penurunan peringkat ini memang tidak memberikan gambaran yang lebih

detail seperti halnya lima aspek sebelumnya, tetapi dapat menggambarkan kenaikan dan penurunan kondisi kebebasan pers suatu negara dibandingkan dengan negara yang lain.

Thailand dan Filipina dalam catatan RSF dan Freedom House dinilai sebagai tempat yang berbahaya bagi jurnalis. Dalam sejarahnya, Filipina menjadi salah satu negara dengan jumlah jurnalis terbunuh paling tinggi (Høiby & Ottosen, 2019). Hal ini juga tampak pada skor pada aspek gangguan terhadap jurnalis yang menempatkan Filipina sebagai negara dengan skor terendah dibandingkan lima negara lain. Sementara di Thailand, pemerintah semakin represif terhadap kritik yang ditujukan kepada pemerintah dan kerajaan. Tindakan kritik oleh pers dan kelompok oposisi, dibalas dengan penangkapan dan hukuman yang difasilitasi oleh beberapa undang-undang dan regulasi yang memberi ruang bagi pemerintah melakukan tindakan anti-demokrasi.

Kebebasan pers di Asia Tenggara mengalami pukulan dalam lima tahun terakhir jika melihat bagaimana skor terkait kebebasan pers yang cenderung mengalami penurunan dan stagnan berada pada skor yang rendah. Menurunnya kebebasan pers menjadi salah satu tanda kemunduran demokrasi di kawasan Asia Tenggara secara umum (kecuali Timor Leste yang memiliki kondisi lebih baik dalam beberapa aspek dibandingkan dengan lima negara lain).

Mayoritas pemerintah dan rezim di enam negara memiliki peluang dan potensi melakukan penekanan terhadap kebebasan pers

dan media. Pers di sebagian besar negara-negara di Asia Tenggara, di bawah pemerintahan yang tidak demokratis, “dipaksa” berperan sebagai pendukung *status quo*. Mempertimbangkan peran pers dan media juga berfungsi mengkonstruksi keadaan perkembangan politik negara, mayoritas organisasi media di Asia Tenggara, Malaysia, Filipina, Singapura (begitu juga Brunei, Kamboja, Laos dan Myanmar – negara yang tidak diteliti dalam artikel ini), terpaksa bertindak sebagai agen stabilitas bagi *status quo* karena pemerintah benar-benar berkuasa atas sebagian besar organisasi pers dan media.

Hanya Indonesia dan Timor Leste yang memberikan ruang bagi organisasi pers dan media untuk dapat bertindak juga sebagai agen pengekan yang turut mengawasi proses politik. Sementara organisasi pers dan media di Thailand, masih dapat memainkan peran sebagai agen perubahan yang dapat mempengaruhi opini publik untuk menciptakan instabilitas politik dan pergantian perdana menteri dan kabinet. Meski demikian, dengan mempertimbangkan kehadiran undang-undang dan regulasi yang dapat menjadi senjata pengekan pers, serta masih adanya gangguan terhadap organisasi dan pekerja media, lanskap kebebasan pers di Asia Tenggara masih berpotensi menjadi sangat dinamis.

Di luar aspek upaya sensor oleh pemerintah dan gangguan terhadap jurnalis, aspek bias media terhadap pemerintah dan oposisi, korupsi media, serta swasensor juga mengganggu kebebasan pers di Asia Tenggara. Meski dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor penyebab dominan yang berbeda di tiap negara, tetapi faktor internal ini juga tak lepas dari hubungan antara kekuasaan dengan pers dan media. Di Indonesia, misalnya, fenomena konglomerasi media dengan kepemilikan media besar yang berpusat hanya pada beberapa konglomerat, menjadikan media mudah menjadi partisan partai atau kandidat tertentu ketika pemilu (Tapsell, 2017). Bukan hanya keterkaitan dengan pemilik media, terdapat pula hubungan mutualisme antara jurnalis dengan pejabat pemerintahan, misalnya ketika seorang jurnalis memperoleh imbalan dan keuntungan

tertentu dari pemerintah melalui tulisan atau pemberitaannya. Pola hubungan antara pemilik media dan jurnalis dengan pemerintah, serta partai atau kandidat tersebut, mendorong media untuk memilah apa yang diberitakan dan tidak, mendorong media untuk melakukan bias, swasensor, dan korupsi.

Di negara dengan lingkungan yang sulit bagi jurnalis, dengan potensi ancaman terhadap organisasi dan pekerja media, seperti yang terjadi di Filipina, cenderung memicu kecemasan dan mendorong swasensor. Para jurnalis tahu di mana dan kapan mereka tidak boleh melewati “batas” dan “ikut campur”, baik terhadap pemerintah, orang-orang kuat, kelompok masyarakat atau perusahaan tertentu. Perlu kehati-hatian untuk memilah apa yang boleh dan tidak boleh dilaporkan. Di Indonesia, kondisi ini masih dapat ditemui di level lokal pada kejadian yang dilaporkan Asosiasi Jurnalis Independen tentang intimidasi terhadap jurnalis (Ramadhan, 2019; Wijayanto & Hasfi, 2021).

Namun, jika organisasi dan pekerja media harus selalu mempertimbangkan setiap konsekuensi dari apa yang mereka beritakan, hal tersebut dapat mengubah secara radikal peran substantif mereka dalam demokrasi. Jurnalis dan media harus mempertimbangkan tidak hanya bagaimana sebuah berita dapat dipublikasikan, tetapi juga cara bagaimana berita ditafsirkan oleh pembaca. Pertimbangan-pertimbangan tersebut mendorong praktik swasensor dan bias media yang lebih besar.

Di sebagian besar negara di Asia Tenggara, komitmen terhadap kebebasan pers umumnya dirusak oleh undang-undang dan beberapa regulasi yang justru memberi batasan, kontrol ketat, dan intimidatif, baik terhadap organisasi maupun pekerja media. Undang-undang dan regulasi ini biasanya memiliki redaksi yang samar dan multitafsir – di Indonesia diistilahkan dengan “pasal karet”. Praktik ini paling nyata merefleksikan kemunduran demokrasi di Asia Tenggara – bahkan di enam negara yang diteliti pada artikel ini yang memiliki skor kebebasan tertinggi di antara negara-negara lain di kawasan yang sama.

Penutup

Dari lima aspek yang dijelaskan sebelumnya, dapat dilihat bahwa kondisi menurunnya demokrasi sejalan dengan memburuknya kebebasan sipil. Di negara dengan skor demokrasi yang rendah dan persoalan kebebasan sipil yang buruk, juga memiliki kebebasan pers dan media yang tidak cukup baik. Secara umum, Asia Tenggara tidak pernah menjadi kawasan yang mudah bagi organisasi dan pekerja media. Timor Leste, Indonesia dan Malaysia memiliki kondisi yang lebih baik dibandingkan tiga negara lain. Namun, kekhawatiran menurunnya kebebasan pers juga cukup terbuka mengingat masih ada regulasi yang memberikan ruang bagi pemerintah yang berkuasa untuk melakukan pembatasan dan kontrol terhadap kebebasan pers. Sementara Thailand, Filipina dan Singapura, masih dalam kondisi kebebasan pers yang buruk mengingat kondisi demokrasi juga mengalami stagnasi dan kemunduran. Di luar enam negara yang dibandingkan, Asia Tenggara memiliki negara lain yang dinilai sangat represif, yakni Laos, Vietnam, Kamboja dan Myanmar, yang oleh Freedom House digolongkan dalam kategori “tidak bebas” (*not free*) dalam hal kebebasan pers.

Tentu saja analisis dalam artikel ini masih memiliki keterbatasan dan peluang untuk dikembangkan. Riset dengan tema sejenis masih dapat dikembangkan lebih luas, misalnya, dengan membandingkan semua negara di Asia Tenggara, atau menggunakan aspek serta variabel yang lebih beragam. Terutama dalam aspek-aspek yang lebih spesifik seperti konglomerasi media, oligarki media, dan hubungan media dengan pemerintah yang berkuasa. Di samping itu, kebebasan internet dan tumbuhnya media sosial, yang juga menjadi perhatian oleh lembaga pemeringkat demokrasi seperti Freedom House, dapat menjadi aspek lain yang dapat menunjukkan keterkaitan antara demokrasi dengan kebebasan pers dan media.

Daftar Pustaka

- Aminuddin, M. F. (2020). Populist Promises, Democratic Fissures: Indonesia and the Philippines. *Global Asia*, 15, (1). https://globalasia.org/v15no1/cover/populist-promises-democratic-fissures-indonesia-and-the-philippines_m-faishal-aminuddin.
- Bermeo, N. (2016). On Democratic Backsliding. *Journal of Democracy*, (1), 5-19, doi:10.1353/jod.2016.0012.
- Coppedge, M., et al. (2020). V-Dem Dataset v10. Varieties of Democracy (V-Dem) Project. <https://doi.org/10.23696/vdemds20>.
- Deane, J. (2015). Media and communication in governance: It's time for a rethink. Dalam *A governance practitioner's notebook: Alternative ideas and approaches* (eds. A. Whaites et al.). OECD – DAC.
- Diamond, L. (2020). Democratic Regression in Comparative Perspective: Scope, Methods, and Causes. *Democratization* 28(1), 22-42. DOI: 10.1080/13510347.2020.1807517.
- Fong, S. Y. (2015). Censorship as Performance: A Case of Singapore Media Production. Dalam *Media, Margins and Popular Culture*. (hlm. 202-215). Palgrave Macmillan.
- Freedom House. (2014). *Freedom in the World 2014*. Rowman & Littlefield.
- Freedom House. (2020). *Freedom in the World*. Diakses dari <https://freedomhouse.org/report/freedom-world>.
- Høiby, M., & Ottosen, R. (2019). Journalism under pressure in conflict zones: A study of journalists and editors in seven countries. *Media, War & Conflict*, 12(1), 69–86. <https://doi.org/10.1177/1750635217728092>.
- Howard, M. E. (2019). *How Journalists and The Public Shape Our Democracy From Social Media And “Fake News” To Reporting Just The Facts*. Georgia Humanities Council
- Levitsky, S. & Way, L. (2015). The Myth of Democratic Recession. *Journal of Democracy* 26(1), 45-58. doi:10.1353/jod.2015.0007.
- Levitsky, S. & Ziblatt, D. (2018). *How Democracies Die*. Crown.
- McQuail, D. (1987). *Mass communication theory: An introduction*. Sage Publications, Inc.

- Ramadhan, M. F. S. (2019). Perkembangan Demokrasi dan Paradoks Kebebasan Pers di Indonesia: Tantangan dan Hambatan dalam Relasi antara Pers dengan Negara. Dalam Ramadhan, M F S. dkk, *Media, Kebudayaan dan Demokrasi: Dinamika dan Tantangannya di Indonesia Kontemporer* (hlm. 1-35). UB Press.
- Reporters Without Borders. (2020). *2020 World Press Freedom Index*. France: RSF. <https://rsf.org/en/ranking/2020>.
- Repucci, S. (2019). Freedom and the Media: A Downward Spiral. Freedom House. <https://freedomhouse.org/report/freedom-and-media/2019/media-freedom-downward-spiral>.
- Repucci, S. & Slipowitz, A. (2021). *Freedom in the World 2021: Democracy Under Siege*. Freedom House. <https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2021/democracy-under-siege>.
- Stier, S. (2015). Democracy, autocracy and the news: the impact of regime type on media freedom. *Democratization*, 22(7), 1273-1295. DOI: 10.1080/13510347.2014.964643.
- Tapsell, R. (2017). *Kuasa Media di Indonesia: Kaum Oligarki, Warga, dan Revolusi Digital*. Marjin Kiri.
- Trappel J. & Tomaz T. (2021) Democratic performance of news media Dimensions and indicators for comparative studies. Dalam Josef Trappel & Tales Tomaz (Eds). *The Media for Democracy Monitor 2021*. Vol. 1. Nordicom University of Gothenburg.
- Waldner, D. & Lust, E. (2018). Unwelcome change: Coming to terms with democratic backsliding. *Annual Review of Political Science*, 21(1), 93-113, <https://doi.org/10.1146/annurev-polisci-050517-114628>.
- Warburton, E. (2020). Deepening Polarization and Democratic Decline in Indonesia. Dalam Carothers, T. & O'Donohue, A. *Political Polarization in South and Southeast Asia: Old Division, New Dangers* (hlm. 25-40). Carnegie Endowment for International Peace.
- Wijayanto & Hasfi, N. (2021). Kebebasan Pers dalam Ancaman: Indonesia setelah Dua Dekade Reformasi Politik. Dalam Aminuddin M. F & Prasetyawan, W. *Pasang Surut Demokrasi: Refleksi Politik Indonesia 1999-2019* (hlm. 103-138). LP3ES.
- Yang, A., (2012). Assessing Global Inequality of Bribery for News Coverage: A CrossNational Study. *Mass Communication and Society* 15(2), 201-224. doi: 10.1080/15205436.2011.566826

KEGAGALAN DEMOKRATISASI DI MESIR PASCA-ARAB SPRING¹

THE FAILURE OF DEMOCRATIZATION IN EGYPT POST ARAB SPRING

Samir

Program Studi Kajian Wilayah Timur Tengah dan Islam, SKSG Universitas Indonesia
Jl. Salemba Raya No.4, RW.5, Kenari, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, 10430
E-mail: samir.muhammad17@gmail.com

M. Hamdan Basyar

Pusat Riset Politik- Badan Riset dan Inovasi Nasional
Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 10 Jakarta Selatan
E-mail: hbasyar@gmail.com

Diterima: 2 September 2021; direvisi 10 Oktober 2021; disetujui 27 November 2021

Abstract

The Arab Spring had a domino effect on Egypt's political stability. The political transition that occurred after Hosni Mubarak's resignation from power did not indicate an improving Egyptian democratic climate. The election of Morsi from among civilians to become President democratically did not make the democratic process in Egypt run well. This study aims to analyze the failure of democracy after the Arab Spring and to review the dominance of the military in Egyptian politics. The results of this study indicate that the failure of democracy in Egypt occurred due to the division of the Egyptian political elite which gave birth to polarizing sentiments, the Egyptian economic crisis, and the dominance of the military in Egyptian politics which made it easier for the military to carry out a coup. In this case, the military cannot be separated from its role in national politics because a special order has been formed that strengthens the military domination in Egypt.

Keywords: Arab Spring, democracy, Egypt, military coup, economic crisis

Abstrak

Arab Spring memberikan efek domino terhadap stabilitas perpolitikan Mesir. Transisi politik yang terjadi setelah mundurnya Husni Mubarak dari kekuasaannya, tidak menunjukkan iklim demokrasi Mesir yang membaik. Terpilihnya Mursi dari kalangan warga sipil menjadi presiden secara demokratis, tidak membuat proses demokrasi di Mesir berjalan dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kegagalan demokrasi setelah *Arab Spring* dan mengulas dominasi militer dalam politik Mesir. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegagalan demokrasi di Mesir terjadi akibat perpecahan elite politik Mesir yang melahirkan sentimen polarisasi, krisis ekonomi Mesir, dan dominasi kalangan militer dalam perpolitikan Mesir yang memudahkan militer untuk melakukan kudeta. Dalam hal ini, militer tidak bisa dipisahkan perannya dalam perpolitikan nasional karena telah terbentuk tatanan istimewa yang memperkuat dominasi militer di Mesir.

Kata Kunci : Arab Spring, demokratisasi Mesir, kudeta militer, krisis ekonomi

¹ Semua penulis adalah kontributor utama dalam artikel ini.

Pendahuluan

Arab Spring (Musim Semi Arab atau dalam Bahasa Arab disebut dengan *ats-Tsaurat al-Arabiyyah* - Revolusi Arab) merupakan gelombang gerakan perlawanan oleh rakyat pro-demokrasi yang menuntut perubahan politik di kawasan Timur Tengah (Machmudi, 2021). Gerakan ini merupakan bentuk protes dan tuntutan rakyat dengan harapan akan mampu mengubah tatanan menuju masyarakat dan bangsa yang ideal. Gerakan ini juga diharapkan dapat mengubah kondisi yang terjadi akibat pengekangan kebebasan rakyat oleh kekuasaan otoriter, serta adanya kesenjangan sosial antara penguasa yang hidup penuh kemewahan dan rakyat yang miskin (Sahide, 2015).

Gerakan yang awalnya dilihat sebagai langkah demokratisasi di Timur Tengah ini, pada akhirnya tidak melahirkan era baru negara demokratis yang diharapkan mampu memberi ruang terhadap berbagai partisipasi politik di dunia Arab secara terbuka. Sebagian besar rezim-rezim baru yang terbentuk setelah revolusi Arab ini cenderung kembali ke sifat asalnya, yaitu rezim otoritarian. Kegagalan *Arab Spring* dalam menumbuhkan sistem demokrasi di Timur Tengah merupakan sebuah fenomena penolakan, yakni pada hakikatnya dunia Arab secara politik dan budaya lebih sulit untuk menerima demokrasi.

Kekuasaan yang bersifat otoriter dan praktik politik yang telah mengakar di Timur Tengah tidak serta merta dapat diubah melalui jalur revolusi. Jika negara tersebut memiliki peran kekuatan elite tunggal yang dominan, maka akan terjadi penguasaan terhadap rakyat. Jika tidak, kekuatan politik bersifat lebih merata sehingga aktor-aktor politik cenderung saling menguasai satu sama lain dalam konflik sipil yang berkepanjangan dan berdarah (Wahyudi et al, 2020).

Rentetan Peristiwa Arab Spring di Timur Tengah ini diawali oleh seorang pedagang kaki lima di Tunisia yang dikenal dengan Mohamed Bouazizi yang melakukan protes dengan membakar dirinya. Aksi ini muncul akibat kekesalannya setelah adanya penyitaan barang dagangan, pelecehan, serta penghinaan yang

dilakukan seorang pejabat kota dan ajudannya kepada Bouazizi. Pada 4 Januari 2011 Bouazizi akhirnya meninggal dunia.

Kematian Bouazizi ini memicu demonstrasi besar-besaran yang mampu menjatuhkan rezim Presiden Tunisia, Zine El Abidine Ben Ali, pada 14 Januari 2011. Demonstrasi ini merupakan titik awal apa yang disebut dengan Revolusi Melati Tunisia yang kemudian berkembang menjadi *Arab Spring* (Cruz, 2007). Gelombang revolusi ini memberi efek domino terhadap beberapa negara di Timur Tengah, salah satunya ialah Mesir yang menyebabkan jatuhnya rezim Husni Mubarak. Rezim Husni Mubarak yang telah berkuasa cukup lama di Mesir akhirnya tumbang pada Februari 2011. Turunnya Mubarak memberikan udara segar terhadap ruang perpolitikan Mesir untuk berubah (Wahyudi et al, 2020).

Terpilihnya Mursi sebagai presiden kelima, telah menandai era baru politik dan pemerintahan negara Mesir tersebut. Pemilihan presiden Mesir diadakan pada tanggal 16 Juni 2012. Terdapat 13 kandidat presiden hingga akhirnya tersisa dua nama yaitu Muhammad Mursi dan Ahmad Syafiq. Nama Ahmad Syafiq memang selalu menjadi kontroversi di tengah panasnya temperatur pemilu presiden Mesir. Sejak awal dia mencalonkan diri, tidak sedikit orang yang menentang pencalonannya. Pasalnya, dia dicap sebagai bagian dari rezim Husni Mubarak yang merupakan Perdana Menteri terakhir rezim itu. Bahkan ketika undang-undang isolasi politik terhadap mantan rezim Mubarak disahkan pun, ternyata nama Ahmad Syafiq masih dapat bercokol di daftar kandidat presiden (Hidriyah, 2012).

Untuk pertama kalinya Mesir memiliki seorang pemimpin dari kalangan sipil yang dipilih melalui pemilihan umum secara bebas dan demokratis. Kesuksesan Mursi terpilih menjadi presiden Mesir mengalahkan Ahmad Syafiq, tentunya tidak terlepas dari dukungan Ikhwanul Muslimin. Hal ini merupakan babak baru demokratisasi Mesir setelah pengunduran Presiden Husni Mubarak dari kekuasaannya yang diawali dengan aksi demonstrasi besar-besaran yang memakan banyak korban jiwa.

Setelah satu tahun kepemimpinannya, Mursi pun dengan cepat kehilangan dukungannya di dalam negeri, sehingga dia berhasil dikudeta oleh pihak Militer Mesir. Rupanya masa depan demokrasi di Mesir kian suram hingga pada akhirnya transisi politik demokrasi Mesir yang sedang dibangun harus mengalami kemunduran. Kudeta merupakan preseden buruk bagi iklim demokrasi yang sedang dibangun.

Oleh karena itu, menarik untuk menelaah kembali kondisi yang terjadi di Mesir yang menunjukkan fenomena seorang pemimpin yang terpilih secara sah dan demokratis, tetapi pada akhirnya dikudeta militer. Dalam konteks tersebut, tulisan ini bermaksud untuk membahas mengapa Mesir gagal melakukan demokratisasi setelah *Arab Spring* dan mengapa militer masih terus mendominasi perpolitikan di Mesir.

Perjalanan Demokrasi Mesir

Mesir meraih kemerdekaan dari pendudukan Inggris pada tahun 1922. Sejak saat itu, mereka menata kehidupan politiknya. Pada tahun 1923, Konstitusi Mesir menerapkan sistem parlementer. Kondisi ini memungkinkan warga sipil memiliki kebebasan yang luas (Dunne & Hamzawy, 2008). Akan tetapi, nampaknya pengaruh kolonialisme Inggris masih membekas pada masalah ekonomi dan sosial Mesir, sehingga Mesir belum sepenuhnya menjadi negara merdeka. Situasi ini menyebabkan kudeta yang dipelopori oleh Perwira Gerakan bebas melawan rezim monarki, Gamel Abdul Nasser pada tahun 1952. Sejak saat itu, Mesir dipimpin oleh para penguasa dengan latar belakang militer (Hassan, 2010). Di bawah kekuasaan Gamal Abdul Nasser, perkembangan demokratisasi kerap kali bergesekan dengan kebijakan Nasser yang membatasi pengembangan elemen dasar demokrasi. Nasser menerapkan sistem politik sosialis yang cenderung menganut aliran kiri dan menghapus pluralisme politik yang berkembang di era monarki sebelumnya. Nasser juga memberlakukan sistem politik satu partai dengan pembubaran parlemen dan melarang keberadaan kelompok oposisi, baik Islamis maupun kelompok kiri. Secara tidak

langsung kebijakan tersebut menunjukkan bahwa Nasser memperoleh seluruh kekuasaan eksekutif dan menjadikannya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di Mesir (Selim, 2015). Setelah kematian Nasser, kepemimpinan Mesir digantikan oleh Anwar Sadat. Dalam kepemimpinannya, Anwar Sadat mengubah kebijakan politik, ekonomi, dan luar negeri Mesir ke arah liberal yang tentunya berlawanan dengan kepemimpinan sebelumnya.

Salah satu kebijakan liberalisasi Anwar Sadat ialah *Infitah* (pintu terbuka) yang dicanangkan untuk meningkatkan investasi asing. Dengan demikian, di bawah kepemimpinan Sadat, liberalisasi ekonomi erat kaitannya dengan pergeseran politik luar negeri Mesir, dari Uni Soviet ke Amerika Serikat. Akibat pergeseran kebijakan luar negeri Mesir dari Timur ke Barat memaksa Mesir untuk mempertimbangkan kembali keterbukaannya terhadap demokratisasi karena Amerika sendiri menganut agenda demokrasi. Untuk meningkatkan liberalisasi politik, Sadat berupaya memperkenalkan sistem multi partai. Hal itu ditandai dengan terbitnya UU 40/1977 yang menjadi landasan didirikannya lima partai politik: Partai Sosial Liberal (*Hizb Al-Ahrar AL-Isytirakiyyin*) berdiri mewakili ideologi kanan, Partai Uni Nasional Progresif (*Hizb AL-Tajammu Al-Wathani Al-Thaqaddumi Al-Wahdawi*) mewakili aliran kiri, Partai Buruh (*Hizb Amal*), Partai Wafd Baru (*Hizb Al-Wafd AL-jadid*) dan Partai Sosialis Mesir (*Hizb AL-Misr*) yang mewakili paham sentris.

Dalam perpolitikannya, Sadat terus melakukan upaya mempertahankan kekuasaannya. Dia membentuk partai baru yang bernama Partai Nasional Demokratik (*Hizb Al-Wathani Al-Dimuqrati- NDP*) untuk memperkuat kepemimpinannya (Alfian & Syamsudin, 1988). Pemerintahan Sadat rupanya tidak jauh berbeda dari Nasser yang merupakan pendahulunya. Melalui kebijakannya, Sadat memutuskan untuk mengurangi peran oposisi, partai individu, dan media dengan mengeluarkan sejumlah dekrit pembatasan dan represi (Selim, 2015). Alasan pergeseran politik ini merupakan langkah yang melatarbelakangi awal kepemimpinan Sadat di Mesir. Pada

awalnya Sadat membutuhkan legitimasi politik dalam negeri untuk mengatasi setiap masalah dalam negerinya terkait ketidakstabilan politik, sehingga dia merubah citranya dari seorang yang otoriter menjadi pemimpin yang demokratis, meskipun ia menyadari bahwa hal tersebut merupakan tantangan sulit baginya. Bahkan, ia harus mengatasi masalah serius yang berkaitan dengan kondisi ekonomi dan keamanan Mesir yang mengalami penurunan. Kondisi tersebut menyebabkan Anwar Sadat berperilaku serupa dengan Nasser, yakni kembali sebagai pemimpin yang otoriter. Kondisi domestik Mesir semakin parah ketika diputuskan sebuah kebijakan pengurangan subsidi yang memicu demonstrasi besar-besaran dan kerusuhan di kota-kota Mesir pada tahun 1977. Protes massal tersebut memakan 79 korban jiwa, 1.000 luka-luka dan 1.250 orang dipenjara (Yumitro & Estriani, 2017).

Pada 6 Oktober 1981 dalam suatu parade militer di Kairo, Sadat terbunuh oleh simpatisan *Al-Jihad* yang berhasil menyusup ke dalam Angkatan Militer Mesir. *Al-Jihad* ini merupakan kelompok radikal dan fundamentalis yang memiliki luka dan dendam mendalam terhadap langkah politik yang dilakukan Anwar Sadat. Ada ribuan aktivis, baik dari kalangan partai politik, maupun organisasi keagamaan yang dipenjara oleh Sadat. Mereka protes dan menolak perjanjian *Camp David* antara Israel dengan Mesir pada tahun 1979. Tarek Al-Zumur dan pelaku utama pembunuhan, Khaled Islambuli merupakan anggota kelompok *Al-Jihad* yang mendalangi pembunuhan Anwar Sadat ketika sedang melakukan parade militer pada tahun 1981. Sadat terbunuh dengan cara yang sebelumnya belum pernah terjadi. Peristiwa tragis ini menggemparkan Mesir. Bahkan, seluruh dunia tersentak akan aksi berdarah tersebut (Kahana & Stivi-Kerbis, 2014).

Setelah terbunuhnya Sadat oleh simpatisan *Al-Jihad*, estafet kursi kepemimpinan Mesir pindah ke tangan Husni Mubarak. Dia menerapkan kebijakan yang berorientasi pemulihan stabilitas. Dengan cara ini, Husni Mubarak membebaskan tahanan politik dan menyerukan rekonsiliasi nasional di antara

lawan politik. Dia juga memberikan kebebasan yang lebih luas kepada pers, mengizinkan pendirian partai politik (Selim, 2015).

Pada masa kepemimpinan Mubarak, dibentuk sebuah Dewan Agung Militer (*Supreme Council of The Armed Forces-SCAF*). Militer memiliki kedudukan khusus dalam pemerintahannya. Partai Nasional Demokrat (NDP) menjadi partai penguasa di bawah kepemimpinan Mubarak. Dalam kiprahnya, NDP tidak terlepas dari peran militer yang mendukung penuh setiap kebijakan Mubarak. Selain militer, unsur lain yang sangat berpengaruh dalam perpolitikan Mesir adalah kelompok sekuler-liberal. Kelompok ini memiliki basis kalangan menengah atas dan terpelajar. Beberapa tokoh dalam kelompok ini memiliki kedudukan penting dalam pemerintahan.

Namun, meski terdapat beberapa elemen demokrasi elektoral yang ditemukan dalam kepemimpinannya, terdapat beberapa faktor yang justru menghambat transisi demokrasi selama pemerintahannya, seperti lemahnya partai oposisi dan masyarakat sipil, sulitnya menyelesaikan transisi damai, korupsi yang merajalela, kebijakan deliberalisasi, dan ancaman balasan.

Penggambaran demokrasi elektoral Mubarak merupakan tampilan dari otoritarianisme di era demokratisasi. Dalam artian, di tengah tuntutan rakyat serta tekanan internasional yang sangat besar agar negara ini semakin dekat dengan demokrasi, rezim otoriter di Mesir menggunakan sistem pemilu sebagai tameng dalam sistem negara yang mengedepankan proses konsolidasi demokrasi, meskipun kenyataannya sangat berbeda. Dalam kasus ini, partai yang berkuasa yakni NDP mempertahankan hegemoninya di sebagian besar pemilihan parlemen Mesir. Dengan demikian, strategi NDP dan Mubarak tidak terlepas dari represi, patronase, dan kontrol media oleh rezim Mubarak (Yumitro & Estriani, 2017).

Ketika Mubarak dilengserkan dari kursi kepresidenan Mesir, kekuasaan politik diserahkan kepada *Supreme Council of the Armed Forces* (SCAF). Dengan penyerahan ini,

SCAF memiliki peran utama dalam perpolitikan Mesir pada masa transisi. Perpindahan kekuasaan eksekutif ke tangan elite militer atau SCAF, menimbulkan keraguan dari pihak demonstran atas komitmen SCAF terhadap demokrasi. Unjuk rasa kian memanas, menuntut SCAF untuk tidak terlibat dalam perpolitikan Mesir dan segera menyelenggarakan pemilu (KomNasKDM, 2014). Untuk memperkuat posisinya, SCAF membuat amandemen terbatas pada Konstitusi Mesir, 30 Maret 2011. Mengingat pentingnya demokratisasi di Mesir, masyarakat nasional maupun internasional, mendesak SCAF untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat Mesir sendiri dalam menyelesaikan permasalahan kepemimpinan politik mereka. Dengan desakan itu, diadakanlah pemilihan umum (pemilu) untuk anggota parlemen. Setelah terpilih perwakilan rakyat di parlemen, kemudian diadakan pemilihan umum Presiden Mesir.

Dinamika Politik Mesir di bawah Pemerintahan Presiden Mursi

Setelah kepemimpinan Mubarak, Mesir memulai demokratisasi melalui pemilihan umum (pemilu) parlemen. Pemilu parlemen tersebut diselenggarakan dalam tiga tahap, yaitu pada tanggal 28 November 2011, 14 Desember 2011, dan 3 Januari 2012 (sekitar enam pekan). Pada pemilu tersebut, pemenangnya adalah Partai Kebebasan dan Keadilan (*Freedom and Justice Party* - FJP) yang berafiliasi pada gerakan Ikhwanul Muslimin (IM). Akan tetapi, parlemen hasil pemilu itu dibubarkan oleh SCAF, 16 Juni 2012. Pembubaran parlemen dilakukan setelah Mahkamah Konstitusi Agung (*Al Mahkama Al Dustūrīya El 'Ulyā* - *Supreme Constitutional Court* - SCC) pada tanggal 14 Juni 2012 menyatakan bahwa pemilu anggota parlemen tersebut melanggar undang-undang dasar.

Kemudian, pada pemilu presiden Mesir tahun 2012, Mohammad Mursi dapat mengalahkan kandidat lain, yaitu Ahmad Shafiq. Pada mulanya, kemenangan Mursi ini dianggap akan memberi titik terang bagi rakyat Mesir untuk mendorong keberhasilan transisi

demokrasi pertama setelah *Arab Spring* 2011.

Akan tetapi, tampaknya Mesir harus mengalami dinamika politik yang lebih rumit. Demokratisasi yang diharapkan dapat berkembang, setelah lengsernya Husni Mubarak, tampaknya tidak sepenuhnya terealisasi. Presiden Mursi harus menghadapi berbagai masalah ekonomi, politik, dan sosial yang merupakan peninggalan rezim Mubarak. Tidak hanya sebatas tuntutan rakyat yang harus dihadapinya, tetapi ia juga harus berhadapan dengan sistem yang masih bercokol di birokrasi negara oleh pendahulunya, yakni rezim Mubarak yang telah mengakar kuat di ranah politik, ekonomi, dan sosial Mesir yang dikenal dengan sistem "*deep state*" atau dalam bahasa Arab disebut (*Daulat al-Umqi*). *Deep State* merupakan sebuah sistem kekuasaan yang dijalankan dan diawasi oleh sekelompok utama yang terdiri dari empat unsur: militer, tokoh berpengaruh, pemilik modal, ditambah dengan media massa. Secara umum *deep state* dipahami sebagai sistem yang cenderung memiliki karakter totaliter, tidak menerima adanya kelompok oposisi (Mushlih & Hurriyah, 2016; Kartini, 2015).

Pergulatan kepemimpinan politik Mesir tidak kunjung reda. Panggung perpolitikan Mesir diperburuk dengan fragmentasi antara kelompok-kelompok revolusioner yang memiliki *background* sekuler dengan kelompok Islam. Sejak awal ketika Mursi berkuasa, polarisasi politik di kalangan elit Mesir bermunculan dan menjadi salah satu tantangan utama bagi kebijakan Mursi.

Awal dilantikannya Mursi pada 30 Juni 2012 sebagai presiden, langkah pertama yang ia lakukan adalah mengeluarkan dekret untuk menghidupkan kembali posisi parlemen (*Majlis As-Sha'ab*) yang dianggap inkonstitusional oleh *Supreme Constitutional Court* (SCC) pada 14 Juni 2012, SCC merupakan Mahkamah Agung Konstitusional Mesir dan kemudian dibubarkan oleh SCAF pada 16 Juni 2012. Langkah tersebut dilakukan Mursi agar anggota parlemen dapat kembali melakukan sidang. Selain itu, Mursi juga melalui Dekret Presidennya menyatakan bahwa akan mengadakan pemilihan umum dalam waktu 60 hari setelah pembuatan

konstitusi baru diselesaikan oleh Dewan Konstituante yang beranggotakan 100 orang. Tugas Dewan Konstituante adalah merancang konstitusi baru dalam jangka waktu 6 bulan. Namun, langkah tersebut ditolak dan dianggap tidak sah oleh SCC. Mahkamah Konstitusi Mesir menyatakan bahwa tidak ada banding terkait keputusan pembubaran anggota parlemen. Mursi diperingatkan secara tegas oleh Mahkamah Konstitusi Mesir bahwa langkah yang diambilnya tidak sah dan jika meneruskan kebijakannya maka dianggap sebuah tindakan pelanggaran hukum. Dalam merespon dekret ini, SCAF mengadakan pertemuan darurat yang keterangan hasil pertemuannya tidak dibagikan ke publik (BBC, 2012). Kemudian Mursi melalui wewenangnya mengeluarkan dekret yang berisi empat pasal, bertujuan untuk meredam kekuasaan kalangan militer. Berbagai upaya nampaknya dijalankan Mursi untuk mengontrol kalangan militer dalam kekuasaannya, dimulai dari pembatalan kekuasaan legislatif yang berada di tangan SCAF, hingga mengganti Kepala SCAF, Jenderal Thontowi pada tanggal 12 Agustus 2012 (Wahyudi et al, 2020).

Upaya tersebut tidak menjadikan kedudukan dan kekuasaan Mursi aman dari berbagai ancaman. Kondisi perumusan konstitusi yang tidak menemui titik temu ini direspons oleh Mursi dengan Dekret Presiden pada tanggal 22 November 2012. Dekret tersebut cenderung memberikan kekuasaan tanpa batas terhadap kekuasaan Mursi di Mesir. Alasan Mursi mengeluarkan dekret tersebut ialah untuk mengantisipasi upaya Dewan Konstituante yang sedang menyusun konstitusi baru karena lembaga tersebut kemungkinan besar dapat dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi atau SCC dan anggotanya dapat diklaim sebagai inkonstitusional (Kirkpatrick & Sheikh, 2012). Dekret tersebut memicu protes rakyat, termasuk kelompok liberal yang sebelumnya memilih diam kembali ikut bersuara secara lantang. Tempat historis revolusioner, yakni lapangan Tahrir kembali digunakan sebagai tempat unjuk rasa. Para unjuk rasa menuntut Mursi untuk mencabut dekret yang dianggap otoriter.

Di tengah ketegangan tersebut, Dewan Konstituante yang secara umum didominasi

oleh kelompok Islam telah selesai menyiapkan draft konstitusi yang kemudian siap untuk direferendum. Namun, gabungan oposisi Mursi yang disebut dengan *National Salvation Front* (NSF) merespons hal ini dengan melakukan kampanye penolakan untuk memilih ‘tidak’ dalam referendum konstitusi. *NSF* merupakan gabungan kekuatan kelompok sekuler yang merasa dikhianati oleh militer dan Ikhwanul Muslimin (IM), yang kemudian menjadi oposisi politik utama Mursi di Mesir. Meskipun demikian, hal tersebut tidak berpengaruh besar terhadap hasil referendum, karena draft konstitusi baru berhasil disepakati dan ditandatangani oleh Presiden Mursi pada 26 Desember 2012 (Ramly & Irenewaty, 2015; Brown, 2013).

Upaya Mursi untuk referendum tampaknya tidak mengurangi intensitas aksi para pendemo. Dalam hal ini Mursi mengeluarkan dekret yang berisi pencabutan dekret sebelumnya. *NSF* merasa bahwa rancangan konstitusi baru hanya menguntungkan kelompok-kelompok partai Islam yang didominasi oleh IM (Stein, 2012). Meskipun dekret dinyatakan dicabut, aksi protes terus berlanjut. Sejak itu, perpecahan dan polarisasi rakyat Mesir semakin parah. Hal ini kian merusak proses transisi demokrasi di Mesir.

Momentum peringatan satu tahun kekuasaan Presiden Mursi pada tahun 2013 dijadikan sebagai celah bagi kaum oposisi untuk terus berusaha mengacaukan kekuasaan Presiden Mursi dan melakukan perlawanan terhadap penguasa. Kondisi yang semakin kacau menyebabkan lahirnya sebuah gerakan protes terhadap pemerintah dan meminta Mursi untuk turun dari jabatannya sebagai presiden dengan menggulirkan petisi untuk menggulingkan Mursi. Gerakan ini disebut *Tamarod* (pembangkangan).

Lapangan Tahrir kembali memanas dan dijadikan panggung demonstrasi dari kedua kubu baik dari kubu anti penguasa dengan kubu pro-penguasa. Kedua kubu saling menyuarakan secara lantang bahwa posisi mereka adalah benar serta mewakili keseluruhan masyarakat Mesir. Kondisi ini dijadikan sebagai momentum bagi kalangan elite militer untuk kembali masuk ke

dunia politik Mesir. Dengan kondisi Mesir yang semakin rusuh ditambah anggapan kalangan militer bahwa Mursi tidak sanggup mengatasi gejolak pemerintahan, maka pada 1 Juli 2013, militer mengeluarkan ultimatum kepada Mursi untuk segera menyelesaikan masalah politik di Mesir dalam kurun waktu 48 jam. Dengan cara ini, militer mengancam akan melakukan intervensi apabila Mursi tidak memenuhi tuntutan. Berdasarkan hal ini, Mursi yang merasa dipilih sebagai presiden yang sah dan demokratis tentu menolak keras ultimatum tersebut. Akhirnya, militer melancarkan ultimatumnya dengan mengambil alih kekuasaan Mursi pada 3 Juli 2013 malam. Kudeta militer ini berhasil mengakhiri kekuasaan Presiden Mursi yang dipilih secara demokratis dan berujung menjadikan Mursi dan aparatnya menjadi tahanan militer (Basyar, 2015).

Setelah militer berkuasa kembali dalam perpolitikan Mesir, keterlibatan masyarakat dalam pemilu secara keseluruhan diatur sesuai dengan kepentingan militer. Konstitusi Mesir yang disahkan pada tahun 2014 sangat menguntungkan kelompok militer, karena merekalah yang memiliki kekuasaan tertinggi setelah tergulingnya Mursi dari kursi pemerintahan.

Pada pemilu tahun 2014 Mantan Panglima Angkatan Bersenjata Mesir yang dikenal dengan Jenderal Abdul Fattah Al-Sisi ini berhasil memenangkan pemilihan presiden secara mutlak. Kemudian, pemerintah Mesir menetapkan organisasi Ikhwanul Muslimin (IM) sebagai organisasi terlarang. Al-Sisi berhasil memperoleh suara terbanyak semenjak pencalonan, sebab dia dipandang sebagai sosok yang mampu mengatasi stabilitas politik di Mesir. Terpilihnya Al-Sisi menjadi presiden menandai kalangan militer kembali mendominasi di dunia politik Mesir. Al-Sisi semakin mancapkan tongkat kekuasaannya setelah kembali memenangi pemilu yang diselenggarakan pada tahun 2018. Dengan demikian Al-Sisi memperoleh legitimasi kuat bagi kekuasaannya (Economist, 2018).

Faktor-faktor yang mendorong kegagalan Mesir melakukan demokrasi pasca-*Arab Spring*

Demokratisasi membutuhkan perjuangan dari semua elemen bangsa. Ada yang berhasil menjadi negara demokratis. Namun, ada juga negara yang mengalami kegagalan dalam berdemokrasi. Kegagalan dalam upaya mewujudkan proses demokratisasi di Mesir pasca-*Arab Spring* tidak hanya sebatas dilihat dari peran militer yang sangat kuat dan dominan dalam perpolitikan dalam negeri Mesir. Namun, terdapat beberapa faktor lain yang mendorong kegagalan Mesir dalam mewujudkan demokrasi pasca-*Arab Spring*.

Fragmentasi Kelompok Elite Politik

Kegagalan demokrasi yang terjadi di Mesir dilatarbelakangi oleh perpecahan elite politik di masa transisi Presiden Mursi. Hal ini terlihat dari gagalnya kesepakatan antar-elite politik terkait pembagian kekuasaan di Mesir, serta drama perpolitikan yang terus berlanjut. Perpecahan yang dimaksud adalah tidak ada kesepakatan dan kesepakatan yang sah antara kelompok Islam dengan kelompok liberal-sekuler untuk mempertahankan pemerintahan Presiden Mursi dari kalangan warga sipil yang terpilih secara demokratis. Keduanya memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam dinamika perpolitikan Mesir. Hal ini kemudian mengakibatkan terjadinya perpecahan di Mesir yang membuat kondisi negara menjadi tidak stabil.

Mesir merupakan tempat berkembangnya berbagai gerakan dan organisasi Islam. Hal ini merujuk kepada negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Kiprah kelompok gerakan Islam mulai terlihat setelah tumbang rezim Husni Mubarak yang mulai berperan dalam kancah politik praktis. Kelompok Islam yang dimaksud adalah Ikhwanul Muslimin, yang mendirikan Partai Kebebasan dan Keadilan (*Freedom and Justice Party* - FJP) dan berhasil meraih suara terbanyak dalam pemilu parlemen. Adapun kelompok Islam lainnya yang dikenal dengan kelompok Salafi berhasil

mendirikan partai *An-Nur* dan institusi Al-Azhar yang hingga kini memiliki peran sentral dalam hubungan agama dan negara (Ghafur, 2014).

Kekuatan Islam muncul semenjak pemerintahan Anwar Sadat. Nilai-nilai Islamisme tidak terbatas hanya pada sosial-politik saja, tetapi telah masuk dalam ranah aparatur negara. Baik Sadat maupun Husni Mubarak kerap kali menggunakan simbol-simbol keagamaan untuk mempertahankan legitimasi kekuasaannya. Perkembangan kekuatan politik Islam ini membuat sebagian besar kelompok liberal sekuler khawatir atas kebangkitan Islam yang dijadikan sebagai ancaman atas dasar-dasar kebebasan dan kewarganegaraan yang tertera dalam konstitusi Mesir. Dominasi kelompok kekuatan politik Islam ini dianggap sebagai kerawanan bagi keberlangsungan demokrasi Mesir. Akibatnya, dinamika perpolitikan Mesir kerap kali diwarnai dengan persaingan terbuka dan perebutan pengaruh antara kalangan Islam dengan liberal-sekuler yang semakin menguncup dalam dekade terakhir ini.

Perpecahan elite politik Mesir yang tak dapat diselesaikan ini disebabkan oleh gagalnya sebuah koalisi penghalau kekuatan rezim Mubarak yang bersepakat mencegah kemenangan Ahmed Shafiq. Momen ini tidak dimanfaatkan oleh Mursi sebagai presiden terpilih Mesir dengan baik. Penolakan Mursi terhadap koalisi tersebut disebabkan oleh perbedaan ideologis dalam perumusan sebuah konstitusi Mesir. Selain itu, perpecahan muncul karena dominasi kelompok IM dalam Dewan Konstituante yang memiliki prinsip menolak nilai-nilai Barat dan sekularisme. Sementara kelompok Salafi dalam keterlibatannya memiliki kepentingan untuk menerapkan nilai-nilai syariat Islam sebagai hukum dalam bernegara. Sikap kedua kelompok tersebut berdampak signifikan pada proses perumusan konstitusi yang menjadi sulit. Hal ini menunjukkan bahwa lemahnya komitmen elite politik tersebut untuk melakukan konsolidasi serta koalisi yang menyebabkan hilangnya nilai-nilai demokrasi yang akan dicapai (Wangke, 2014).

Dalam konteks demokrasi Mesir, polarisasi yang terjadi antara kelompok

Islam dan kelompok liberal-sekuler membuat stabilitas politik dalam negeri Mesir bergejolak. Perselisihan ini semakin memburuk disusul dengan sikap kelompok sekuler yang menjadi anti penguasa (Mursi). Alhasil, koalisi yang telah dibentuk pun terpecah belah dan menjadi lemah. Dengan demikian, perselisihan ini merupakan faktor penentu dalam kegagalan demokrasi Mesir. Dalam hal ini perselisihan dua kelompok tersebut, tentunya tidak terlepas dari pengaruh peran SCAF sebagai pihak yang memegang kendali di masa transisi. Semestinya, hal tersebut dapat dihilangkan apabila kelompok elite politik yang mencuat setelah pemilu mampu bersatu untuk menciptakan kestabilan politik. Ada semacam *power sharing* yang mengakomodir berbagai kepentingan politik di sana. Dengan demikian, militer tidak akan memiliki celah untuk merebut kekuasaan dari rezim sipil yang berhasil dan memiliki legitimasi yang kuat. Mereka cenderung mampu melakukan intervensi dalam ranah politik ketika kelemahan dan perpecahan terjadi pada kalangan politik sipil dan partai politik (Diamond & Marc, 2001). Hal ini mencerminkan perilaku elite politik yang tidak tunduk pada demokrasi. Dengan demikian, maka terjadi sebuah kemunduran demokrasi yang sedang berlangsung di Mesir.

Krisis Ekonomi

Keadaan ekonomi yang stabil dan sejahtera merupakan kriteria pencapaian yang sangat utama dalam suatu pemerintahan. Pemerintah dianggap sebagai aktor yang paling bertanggung jawab atas kemajuan dan berkembangnya ekonomi secara pesat. Hal ini tentunya sangat berkaitan dengan motif militer yang akan melaksanakan kudeta apabila laju ekonomi cenderung rendah, kemudian akan mengakibatkan kegaduhan dan unjuk rasa pada masyarakat yang berpengaruh pada stabilitas negara secara signifikan. Kemunduran ekonomi yang disebabkan oleh pemerintah akan menimbulkan kegeraman dan memperkuat anggapan militer dapat mengambil peran sebagai penentu kebijakan yang berhubungan dengan ekonomi untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat.

Di masa pemerintahan Mursi, Mesir mengalami kesenjangan sosial yang cukup tajam. Kesenjangan ini terjadi akibat dari pertumbuhan ekonomi dan perubahan sosial yang sangat cepat. Kondisi ekonomi Mesir telah memburuk sejak di bawah kepemimpinan Husni Mubarak. Setelah lengsernya Husni Mubarak yang kemudian digantikan dengan Mursi, harus berhadapan dengan krisis keuangan negara. Krisis keuangan tersebut merupakan dampak dari penyusutan sektor wisata akibat ketidakstabilan politik. Kondisi ekonomi diperburuk dengan kurangnya minat investor terhadap Mesir dan harga pangan yang melambung tinggi. Kelompok militer di Mesir memiliki fungsi rangkap menjaga stabilitas politik negara. Setiap kali ada perubahan pemimpin baru, kelompok militer memiliki kesempatan untuk merebut kekuasaan, karena hampir 5-40% sektor perekonomian di Mesir dikelola dan dikuasai oleh militer.

Alun-alun Tahrir menjadi tempat bagi rakyat untuk menuntut soal kesejahteraan ekonominya. Sejak tahun 2010, tercatat bahwa angka pengangguran di Mesir mengalami kenaikan, dari 9% menjadi 12,7% pada tahun 2011. Berdasarkan persentase klasifikasi pengangguran yang terjadi di Mesir, sebanyak 80% dari jumlah pengangguran berasal dari kalangan remaja. Indeks penilaian ekonomi Mesir kian memburuk. Prediksi Lembaga Keuangan Internasional (International Monetary Fund, IMF) yang menyatakan ekonomi Mesir tumbuh sekitar 2% pada tahun 2013 merupakan fase pertumbuhan ekonomi paling lambat semenjak 1992. Akibat besarnya utang luar negeri, Mesir mengalami inflasi yang tinggi dan termasuk pertumbuhan dengan ekonomi paling lambat di antara negara-negara di Timur Tengah (Sahasrad, 2014). Penurunan pertumbuhan ekonomi tersebut sangat berdampak pada tingkat pengangguran dan kemiskinan di Mesir.

Berdasarkan data di atas, stabilitas politik negara akan bergantung pada stabilitas ekonomi. Stabilitas ekonomi merupakan faktor penentu dalam keberlangsungan demokrasi di Mesir. Tuntutan rakyat terhadap kesejahteraan kepada Presiden Mursi memicu demonstrasi besar-besaran di berbagai tempat. Mursi dianggap gagal

dalam membangun stabilitas perekonomian dan kesejahteraan rakyat Mesir. Kegagalan tersebut dijadikan senjata oleh kalangan oposisi Mursi untuk menentang pemerintahannya, bahkan melengserkan kekuasaannya melalui kudeta militer. Hal terpenting dari revolusi setelah lengsernya Husni Mubarak ialah pemulihan ekonomi dan peningkatan proses demokrasi di Mesir. Namun, pada realitanya karakter pemerintahan Mursi tidak jauh berbeda dengan pendahulunya, rezim Mubarak.

Kudeta Militer

Dalam negara demokratis, militer tidak terlibat langsung dalam politik praktis. Kualitas demokrasi menjadi turun, bila peran aktif militer semakin menguat dalam peran sipil (Nordinger, 1990). Potret perpolitikan Mesir di bawah pemerintahan Mursi mengalami kekacauan dengan merambahnya protes-protes rakyat terhadap Dekret Presiden 22 November 2012 di beberapa daerah. Kondisi itu membuat pemerintahan semakin buruk dan memicu militer untuk mengambil langkah dalam mengamankan negara. Ini merupakan titik awal yang dimanfaatkan militer untuk melakukan intervensi politik di tengah kekisruhan.

Dari segala runtutan kegagalan pemerintahan Mursi untuk mengatasi kekisruhan, nampaknya kalangan militer menganggap Mursi tidak mampu membendung dan mengatasi kekacauan tersebut. Oleh karena itu, pada tanggal 1 Juli 2013 tepat pada pukul 16.30 waktu Mesir, militer memberi ultimatum pada Presiden Mursi untuk menuntaskan masalah politik Mesir dalam waktu 48 jam. Mursi menolak tuntutan militer, sebab ia merasa memiliki legitimasi kekuasaan yang dipilih oleh rakyat secara sah dan demokratis. Akibat penolakan tuntutan militer oleh Mursi, maka militer melancarkan intervensinya untuk menggulingkan kekuasaan Mursi. Kudeta tersebut dilandasi dengan *roadmap* masa depan Mesir yang dibahas pada pertemuan antara Al-Sisi dengan tokoh-tokoh politik oposisi Mursi.

Kudeta yang mengakhiri kekuasaan Mursi menandai gagalnya demokrasi Mesir. Pasalnya, Mursi merupakan presiden terpilih pertama

pada masa transisi, dan pemerintahan Mursi pada awalnya muncul sebagai harapan baru demokrasi bagi Mesir. Akan tetapi, situasi politik Mesir di bawah pemerintahan Mursi ternyata tidak kunjung membaik. Apabila merujuk pada konstitusi yang berlaku saat itu, kalangan militer tidak memiliki wewenang untuk terlibat dalam kegiatan politik praktis Mesir. Tugas mereka adalah sebagai komponen utama negara yang menjaga stabilitas dan keamanan negara, bahkan posisi panglima tertinggi mereka berada di bawah presiden.

Dalam bentuk apapun, kudeta dinisbatkan sebagai bentuk pengingkaran dari proses demokratisasi yang sedang tumbuh di kedaulatan Mesir setelah Revolusi 11 Februari 2011. Militer telah merenggut seluruh nilai-nilai dan proses demokrasi di Mesir. Rakyat Mesir harus menelan pahitnya kehilangan kesempatan untuk mengekspresikan kebebasan melalui demokrasi yang sehat. Masyarakat Mesir harus kembali membangun proses-proses demokrasi dari dasar.

Seharusnya di setiap negara yang menganut sistem demokrasi, semua kalangan harus menjadi jagapati atas terselenggaranya demokratisasi. Lemahnya kekuasaan eksekutif serta keselarasan kepentingan militer untuk kepentingan pribadinya, pemerintahan akan berubah menjadi rezim militer karena perwira militer sendiri yang merampas kekuasaan dari rezim sebelumnya. Kudeta ini menyebabkan Mesir masuk dalam pusaran konflik perang saudara, dan meningkatnya aksi terorisme secara masif (Wahyudi et al, 2020).

Hal ini menunjukkan lunturnya demokrasi di Mesir dengan nuansa parlemen yang tidak demokratis, pemerintah dan presiden hanya sebatas representasi badan eksekutif semata, bukan lagi sebagai pilar utama dalam sistem politik yang fungsional.

Dominasi Militer dalam Politik Mesir

Kalangan militer selalu memiliki peranan aktif dalam sejarah perpolitikan Mesir. Bahkan perkembangan demokratisasi Mesir tidak

terlepas dari pengaruh besar militer sejak runtuhnya sistem monarki pada tahun 1952. Keterlibatan militer di Mesir diawali dengan tergabungnya para petinggi militer dalam sebuah organisasi penggulingan rezim Raja Farouk tahun 1952, yang dikenal dengan Organisasi Perwira Bebas (*Free Officer*). Peristiwa tersebut merupakan titik krusial Mesir didominasi oleh kekuatan militer dan presiden yang memiliki latar belakang militer yang melekat hingga jatuhnya rezim Mubarak pada tahun 2011 (Dam, 2001).

Di era pemerintahan Nasser, Mesir digambarkan sebagai masyarakat militer, karena mudahnya keterlibatan militer dalam administrasi Nasser. Di luar itu, Nasser banyak melibatkan militer di berbagai negara dengan proyek ekonomi raksasa. Dalam kepemimpinannya, Nasser membentuk sebuah partai yang sebagian besar didominasi kalangan militer, partai ini disebut Partai Kemerdekaan yang memiliki tujuan untuk menyebarkan propaganda dan ideologi tentara pada masyarakat untuk memperoleh legitimasi dari warga sipil. Masyarakat Mesir digiring untuk tunduk dan mendukung kepemimpinan Nasser, jika tidak, maka mereka akan memperoleh tindakan politik dari penguasa militer Mesir.

Berbeda pada masa pemerintahan Sadat, meskipun depolitisasi militer dilakukan oleh Sadat dalam kebijakannya, tetapi militer masih memiliki hak istimewa dan memberi kekuasaan untuk mengembangkan ekonomi-militer sebagai bentuk timbal balik atas dukungan rezimnya. Diperkirakan militer telah sukses mengendalikan sekitar 40% dari total ekonomi Mesir yang berasal dari perusahaan bisnis, terlebih bantuan dana sebesar \$1,3 miliar dari militer AS setiap tahunnya sejak Sadat menandatangani perjanjian *Camp David* pada 1979 (Pappalarado, 2011). Di masa rezim Mubarak, kedudukan militer semakin kuat di Mesir. Militer diberikan banyak hak istimewa, tidak hanya sebatas dalam bidang politik, tetapi juga di bidang ekonomi. Sejak saat itulah militer secara terbuka membangun kekuasaannya yang dikenal dengan perumpamaan “negara di atas negara”, yang berdampak signifikan pada struktur ekonomi dan sosial di Mesir (Kunahyono, 2013).

Di tengah polarisasi serta perpecahan yang mendalam di masa pemerintahan Mursi, militer memanfaatkan momentum untuk kembali bermain dalam perpolitikan Mesir. Di tengah protes massa yang menuntut pengunduran Mursi dari kursi pemerintahannya, di langit kota Mesir nampaknya terlihat sebuah pesawat militer terbang di atas kerumunan massa dan menjatuhkan bendera Mesir sebagai tanda bahwa militer memihak rakyat Mesir. Hingga pada akhirnya Mursi berhasil digulingkan dari kursi kekuasaannya setelah rangkaian skenario yang dibangun oleh militer.

Militer kemudian menunjuk Adly Mansour, kepala Mahkamah Konstitusi tertinggi Mesir sebagai presiden sementara sampai disusun suatu konstitusi baru dan terlaksana pemilihan umum. Mansour kemudian membentuk sebuah kabinet yang sebagian besar terdiri dari pendukung rezim Mubarak dan pensiunan Jenderal Militer. Penunjukan tersebut berdasarkan peta jalan politik yang dirancang oleh militer untuk memperkuat kedudukannya. Setelah militer kembali menguasai politik Mesir, seluruh partisipasi masyarakat dalam pemilu diatur sesuai dengan kepentingan militer. Hal itu dapat dipahami bahwa mereka berhasil memenangkan perpolitikan di Mesir dengan mengambil alih kekuasaan Presiden Mursi.

Adly Mansour menyelenggarakan pemilu presiden pada tahun 2014. Pemilu tersebut dimenangkan oleh tokoh militer pelaku kudeta pada mantan Presiden Mursi, yaitu Jenderal Abdul Fattah Al-Sisi. Dengan demikian, prospek demokrasi Mesir dipertanyakan. Artinya, Mesir masih berada di bawah bayang-bayang elite penguasa lama yang didominasi oleh militer. Bayangan rezim lama inilah yang menyebabkan cacatnya proses demokratisasi di Mesir pasca-*Arab Spring*. Dalam hal ini, militer dan elite penguasa lama masih mempertahankan posisinya di hati rakyat Mesir. Ini bukan hanya karena militer memiliki sejarah panjang dalam melindungi negara, tetapi demonstran anti-Mursi berupaya untuk tidak menjadikan seorang pemimpin Mesir yang Islamis. Mereka juga khawatir dengan gerakan IM yang dianggap akan mengubah sistem negara menjadi Islamis seperti halnya revolusi Iran tahun 1979 (Al-Amin, 2013; Yumitro & Estriani, 2017).

Berdasarkan penjelasan di atas, jelas bahwa militer Mesir memiliki koneksi yang kuat dan mendalam dalam bidang politik dan ekonomi, terlebih memiliki hubungan erat dengan aktor eksternal bersama dengan elite penguasa Mesir. Oleh karena itu, kegagalan demokrasi terjadi pada Mesir akibat peran militer secara mendalam pada politik praktis di Mesir.

Demokrasi hanya sebatas tameng dalam praktiknya. Al-Sisi mengklaim bahwa Mesir merupakan negara demokrasi, tetapi dalam praktiknya, untuk mempertahankan kekuasaannya, Al-Sisi tidak pernah menunjuk warga sipil tanpa latar belakang militer sebagai pemegang kekuasaan utama Mesir. Al-Sisi banyak membuat skenario dengan karakteristik sistem demokrasi agar terlihat demokratis.

Penutup

Sejarah perjalanan demokrasi di Mesir terlihat banyak dinodai oleh elite politik yang berkuasa. Transisi politik di Mesir pasca-*Arab Spring* rupanya tidak membawa dampak baik bagi masa depan demokrasi Mesir. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan gagalannya penanaman demokrasi Mesir pasca-*Arab Spring*. **Pertama**, keengganan elite politik untuk bersatu dalam mewujudkan pemerintahan yang sehat dan demokratis. Menguatnya hubungan yang tidak harmonis antara kubu liberal-sekuler dengan kelompok Islam yang kemudian memicu terjadinya sentimen polarisasi. Hal ini yang kemudian menjadikan kondisi negara Mesir jauh dari kondisi stabil, sehingga keberlangsungan demokrasi Mesir kerap kali diwarnai persaingan terbuka dan perebutan pengaruh antara kedua kubu. **Kedua**, kemerosotan ekonomi merupakan faktor penentu dalam stabilitas suatu pemerintahan. Pasca-*Arab Spring*, Mesir mengalami kemunduran ekonomi yang cukup tajam, kesenjangan sosial semakin meningkat tajam, sehingga menimbulkan kegaduhan di berbagai daerah. Masyarakat Mesir menuntut kesejahteraan, ditambah dengan harga pangan yang mengalami kenaikan cukup tinggi. Dengan demikian stabilitas politik negara akan sangat bergantung pada stabilitas ekonomi yang sangat berdampak pada keberlangsungan proses

demokrasi. **Ketiga**, adanya kudeta militer yang berhasil menggulingkan kekuasaan rezim Mursi yang terpilih secara demokratis. Peristiwa ini tentunya telah merusak upaya dalam mewujudkan prinsip-prinsip demokrasi bagi negara yang menjalankan sistem yang demokratis. Kudeta dianggap sebagai pengkhianatan terhadap demokrasi karena berupa tindakan yang ilegal, merampas secara paksa kekuasaan yang terpilih melalui pemilihan umum yang sah.

Selain itu, kalangan militer selalu memiliki kedudukan dan hak istimewa di Mesir. Tatanan ini telah melekat dan terbentuk oleh pemimpin-pemimpin terdahulu Mesir sejak runtuhnya sistem Monarki pada tahun 1952. Militer memiliki wewenang dalam mengembangkan sebagian besar ekonomi Mesir. Hal ini menunjukkan bahwa Militer di Mesir memiliki interelasi yang intern dalam bidang politik dan ekonomi. Oleh karena itu, tatanan ini membuat peran militer tidak dapat dipisahkan dari politik nasional Mesir.

Daftar Pustaka

- Al-Amin, E. (19 Juli 2013). *The Grand Scam: Spinning Egypt's Military Coup Counter*. <http://www.counterpunch.org/2013/07/19/the-grand-scam-spinning-egypts-military-coup/>, diakses pada 18 Juli 2021.
- Alfian, & Syamsudin, N. (1988). *Masa Depan Kehidupan Politik Indonesia*. Rajawali.
- Basyar, M. H. (2015). *Pertarungan dalam berdemokrasi: Politik di Mesir, Turki, dan Israel*. UI Press.
- BBC. (8 Juli 2012). *Egyptian President Mursi reverses parliament dissolution*. <https://www.bbc.com/news/world-middle-east-18761403>, diakses pada 17 Juli 2021.
- Brown, N. J. (2013). Islam and Politics in the New Egypt. *Carnegie Endowment for International Peace*, 12.
- Cruz, G. (2007). Only a day in Tunisia. *Cruise Travel Magazine*, 32.
- Diamond, L., & Marc, F. P. (2001). *Hubungan Sipil Militer dan Konsolidasi Demokrasi*. PT Raja Grafindo Persada.
- Dunne, M., & Hamzawy, A. (2008). The Ups and Downs of Political Reform in Egypt. *Carnegie Endowment for International Peace*.
- Economist, T. (30 Maret 2018). *Abdel-Fattah Al-Sisi wins a second term in Egypt.*, <https://www.economist.com/middle-east-and-africa/2018/03/30/abdel-fattah-al-sisi-wins-a-second-term-in-egypt>, diakses pada 18 Juli 2021.
- Ghafur, M. F. (2014). Agama dan Demokrasi: Munculnya kekuatan Politik Islam di Tunisia, Mesir, dan Libya. *Jurnal Penelitian Politik*.
- Hassan, M. H. (2010). State versus society in Egypt: Consolidating democracy or upgrading autocracy. *African Journal of Political Science and International Relations*, 319-320.
- Hidriyah, S. (2012). Terpilihnya Muhammad Mursi dan Babak baru Demokrasi di Mesir. *Info Singkat Hubungan Internasional*.
- Kahana, E., & Stivi-Kerbis, S. (2014). The Assassination of Anwar Al-Sadat: An Intelligence Failure. *International Journal of Intelligence and Counter Intelligence*, 183-185.
- Kartini, I. (2015). Kegagalan Empat Negara Arab dan Keberhasilan Indonesia dalam masa Transisi Demokrasi. *Jurnal Hubungan Internasional*, 53.
- Kirkpatrick, D. D., & Sheikh, M. E. (2012, November 23). *Citing Deadlock, Egypt's Leader Seizes New Power and Plans Mubarak Retrial*. <https://www.nytimes.com/2012/11/23/world/middleeast/egypts-president-mursi-gives-himself-new-powers.html>, diakses pada 17 Juli 2021.
- KomNasKDM. (2014). *Buku Putih: Tragedi kemanusiaan Pasca Kudeta Militer di Mesir*. KomNasKDM.
- Kuncahyono, T. (2013). *Tahrir Square: jantung Revolusi Mesir*. Kompas.
- Dam, S. (2001). *Militer dan Demokratisasi di Nigeria, Mesir dan Afrika Selatan*. P2P-LIPI.
- Machmudi, Y. (2021). *Timur Tengah dalam Sorotan: Dinamika Timur Tengah dalam perspektif Indonesia*. Bumi Aksara.
- Mushlih, A., & Hurriyah. (2016). Aktor Politik dan Gagalnya Transisi Demokrasi Mesir tahun 2011-2013. *Politik 2*, 51.

- Nordinger, E. A. (1990). *Militer dalam Politik: Kudeta dan Pemerintahan*. Rineka Cipta.
- Pappalarado, J. (2011, Februari 2). *Analysis: Dissecting America and Egypt's Military Relationship*. <http://www.popularmechanics.com/technology/military/news/dissecting-america-and-egyptsmilitary-relationship-5168761>, diakses pada 18 Juli 2021.
- Ramly, L. N., & Irenewaty, R. T. (2015). Kebijakan Politik Muhammad Mursi sebagai Presiden Mesir (2012-2013). *SOCIA Jurnal Ilmu Sosial*, 95.
- Sahide, A. (2015). The Arab Spring: Membaca Kronologi dan Faktor Penyebabnya. *Jurnal Hubungan Internasional, Vol. 4*, 121.
- Sahasrad, H. (2014). Pergolakan Mesir: Dari Revolusi ke Transisi Demokrasi. *Konfrontasi Jurnal: Culture, Economy, and social changes*, 47.
- Selim, G. M. (2015). *The International Dimensions of Democratization in Egypt*. Springer.
- Stein, E. (2012). After the Arab Spring: power shift in the Middle East?: revolutionary Egypt: promises and perils. *The London School of Economics and Political Science*, 24.
- Wahyudi, N., Basyar, M., Mashad, D., & Ghafur, M. F. (2020). *Many faces of Political Islam in the Middle East: Arah Baru Gerakan Politik Islam Pasca-Arab Spring*. LIPI Press.
- Wangke, H. (2014). Masyarakat Sipil dan Transisi Demokrasi di Timur Tengah”, Info Singkat Hubungan Internasional. *Info Singkat Hubungan Internasional*, 7.
- Yumitro, G., & Estriani, H. N. (2017). The Quo Vadis of Democratization in Post-Egypt Arab Spring. *CIRR*, 169.
- Yumitro, G., & Estriani, H. N. (2017). The Quo Vadis of Democratization in Post-Egypt Arab Spring. *CIRR*, 181.

**KEMUNDURAN DEMOKRASI TATA KELOLA SDA:
PENGUATAN OLIGARKI DAN PELEMAHAN PARTISIPASI
CIVIL SOCIETY**

**DEMOCRACY SETBACK IN NATURAL RESOURCE GOVERNANCE:
OLIGARCHIC CONSOLIDATION AND THE DECLINING
OF CIVIL SOCIETY PARTICIPATION**

**Dini Suryani, Fathimah Fildzah Izzati, Imam Syafi'i, Pandu Yuhsina Adaba,
Septi Satriani¹**

Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional
Jln. Jend. Gatot Subroto Kav. 10, Jakarta

E-mail: dini012@brin.go.id; fildzah.izzati@gmail.com; imamsyafii.sej07@gmail.com;
pandu.yuhsina81@gmail.com; septisatriani@gmail.com

Diterima: 30 Juni 2021; direvisi 14 Oktober 2021; disetujui 27 November 2021

Abstract

The democratization process is directly proportional to the participation of civil society. Meanwhile, the strengthening of the oligarchy is directly proportional to the weakening of civil society. So far, there have been several studies on the decline of democracy related to the participation of civil society in the field of elections and the formulation of public policies. This study complements these studies from a natural resources governance perspective. The strengthening of the oligarchy narrows the space for civil society involvement in natural resource management, causing natural resource management policies to increase the potential for more serious environmental damage. In addition, the repression of civil society that fights for sustainable natural resource management has experienced many threats of violence and criminalization. This paper intends to investigate the declining quality of democracy in natural resource management in Indonesia by analyzing the relationship between the strengthening of oligarchic politics and the narrowing of democratic space for civil society.

Keywords: *Democracy of Natural Resources Governance, Oligarchy, Civil Society, Environment*

Abstrak

Proses demokratisasi berbanding lurus dengan partisipasi *civil society*. Sementara itu, penguatan oligarki berbanding lurus dengan pelemahan *civil society*. Selama ini sudah terdapat beberapa kajian mengenai kemunduran demokrasi berkaitan dengan partisipasi *civil society* di bidang pemilihan maupun perumusan kebijakan publik. Kajian ini melengkapi kajian-kajian tersebut dengan sudut pandang tata kelola Sumber Daya Alam (SDA). Bahwa, penguatan oligarki menyempitkan ruang keterlibatan *civil society* dalam tata kelola SDA menyebabkan kebijakan tata kelola SDA justru meningkatkan potensi kerusakan lingkungan lebih dalam. Selain itu, represi terhadap *civil society* yang memperjuangkan tata kelola SDA yang berkelanjutan banyak mengalami ancaman kekerasan dan kriminalisasi. Tulisan ini hendak menginvestigasi menurunnya kualitas demokrasi dalam tata kelola SDA di Indonesia dengan menganalisis hubungan antara menguatnya politik oligarki terhadap menyempitnya ruang demokrasi bagi *civil society*.

Kata Kunci : Demokrasi Tata Kelola SDA, Oligarki, *Civil Society*, Lingkungan

¹ Semua penulis adalah kontributor utama

Pendahuluan

Berdasarkan catatan Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), hingga 2017, sekitar 44 persen dari luas kepulauan dan daratan Indonesia telah dikuasai oleh pemilik konsesi pertambangan (BBC, 2017). Sampai dengan bulan Juni 2020, Jatam mencatat ada 1.034 unit izin pinjam pakai kawasan hutan yang tersebar di berbagai wilayah dengan luas total setara dua kali lipat luas kabupaten Bogor (Jatam, 2020). Akibatnya, kawasan hutan lindung kian terancam dan berbagai Daerah Aliran Sungai (DAS) pun semakin mengalami kerusakan parah. Di Samarinda, Kalimantan Timur, di mana 17 persen dari wilayah kota telah menjadi wilayah tambang batu bara, terdapat 48 titik banjir yang merendam sekitar 17.485 rumah warga pada 2019 (Mongabay, 2020). Alih fungsi lahan pertanian mengakibatkan semakin banyak petani kehilangan akses terhadap tanah (KPA, 2020a). Berbagai kerusakan lingkungan tersebut berdampak pada kerusakan ekosistem alam dan kehidupan manusia. Meminjam istilah sarjana Marxian, Foster, sebagaimana dikutip oleh Saito (2017, h. 11), keretakan metabolik atau *metabolic rift* adalah istilah yang tepat untuk menggambarkan berbagai kerusakan yang terjadi dan merupakan masalah serius.

Perspektif, prioritas-prioritas, serta cara-cara pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) penting untuk dilihat secara lebih mendalam guna menganalisis penyebab dari berbagai kerusakan tersebut. Analisis mengenai posisi dan peran dari para penyelenggara negara, swasta, dan masyarakat dalam mengelola SDA menjadi kuncinya. Sudut pandang penyelenggara negara sejalan dengan swasta dalam melihat SDA sebagai sumber ekonomi. Prioritas pengelolaan SDA pemerintah sebagai fasilitator swasta dalam mengeksplorasi SDA demi meningkatkan profit menentukan bagaimana alam dikelola. Lebih jauh, perspektif dan prioritas-prioritas tersebut juga berdampak pada keberlangsungan metabolisme alam secara umum.

Tulisan ini berpendapat bahwa perspektif, prioritas, dan sudut pandang dalam pengelolaan SDA di Indonesia dipengaruhi oleh kelompok oligarki yang semakin menguat. Hal ini berdampak buruk pada kualitas demokrasi dalam

pengelolaan SDA. Padahal, demokrasi dalam pengelolaan SDA menjadi salah satu faktor penting yang menentukan bagaimana perspektif dan prioritas-prioritas dalam tata kelola SDA dibentuk dan diciptakan. Demokrasi dalam pengelolaan SDA sangat penting karena turut menentukan lanskap metabolisme alam yang dihasilkan serta bagaimana dampaknya pada kehidupan manusia. Cara pengelolaan SDA yang demokratis seharusnya bukan hanya ditentukan pemerintah dan swasta, tetapi juga publik dengan mengutamakan kepentingan hajat hidup orang banyak, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945. Artinya, inklusifitas aktor akan sangat menentukan kualitas demokrasi dalam tata kelola SDA. Tulisan ini secara lebih jauh berargumen bahwa penguatan oligarki di Indonesia telah menyebabkan pelemahan *civil society* yang merupakan elemen penting dari demokratisasi tata kelola SDA.

Artikel ini ditulis berdasarkan riset dengan metode kualitatif. Data primer diperoleh dengan wawancara di lapangan maupun dalam jaringan (*online*). Data sekunder didapatkan melalui studi pustaka. Artikel disajikan dalam tujuh bagian. Bagian pertama adalah pendahuluan dan bagian kedua adalah mengenai konseptualisasi demokrasi, *civil society* dan oligarki dalam tata kelola SDA yang dimaksud dalam riset ini. Selanjutnya, bagian ketiga membahas mengenai penguatan oligarki, diikuti dengan bagian keempat yang menjelaskan soal pelemahan *civil society*. Bagian kelima menjelaskan soal dampak buruknya demokrasi tata kelola SDA, dan sebelum kesimpulan, diberikan pemaparan soal UU Cipta Kerja sebagai manifestasi penguatan oligarki sekaligus pelemahan *civil society*, serta bagaimana pengaruhnya terhadap demokrasi tata kelola SDA.

Demokrasi, *Civil Society*, dan Oligarki dalam Tata Kelola SDA

Sebagai salah satu hal yang paling banyak dikaji, konsepsi mengenai demokrasi diinterpretasikan secara beragam. Salah satu definisi yang cukup umum dan netral adalah yang ditawarkan oleh Uhlin (1993) yang mengartikan demokrasi sebagai *'people's rule based in popular*

control and political equality'. Senada dengan demokrasi, *civil society* juga dimaknai secara beragam. Salah satu definisi yang banyak dipakai dikemukakan oleh Diamond (1999) yaitu '*a realm of organised social life that is open, voluntary, self-generating, at least partially self-supporting, autonomous from the state and bound by legal order or set of shared rules*'. Definisi serupa ditawarkan oleh Alagappa (2004) yang juga mendefinisikan *civil society* sebagai sebuah '*realm*' atau arena yang berada di antara negara, kelompok politik (*political society*), pasar, dan masyarakat umum.

Di kalangan sarjana Indonesia, konsep *civil society* juga banyak dibahas. Sujatmiko (2003) mengklasifikasi kajian mengenai *civil society* dalam tiga kelompok berdasarkan aspek relasinya dengan aktor lain. Kelompok pertama menekankan pada aspek horizontal yang menekankan peran *civil society* sebagai suplemen bagi negara (Beitinger-Lee, 2010; Sujatmiko 2003). Akar dari konsep ini adalah sejarah Islam yang melihat pengaturan sosial yang dibuat di Kota Madinah oleh Nabi Muhammad (Madjid, 2001). Berdasarkan konsepsi ini, dalam Bahasa Indonesia, *civil society* sering diartikan sebagai '*masyarakat madani*'. Kelompok kedua menekankan pada aspek vertikal yang di dalamnya *civil society* berada pada posisi independen untuk mengimbangi kekuatan politik negara (Dhakidae, 1999; Rasyid, 1997; Azra, 2003; Hikam, 1999; Prasetyo & Munhanif, 2002). Dalam kelompok ini istilah *civil society* diartikan sebagai '*masyarakat sipil*'. Kelompok ketiga diajukan oleh Sujatmiko (2003) yaitu kombinasi antara horizontal maupun vertikal. Menurutnya, *civil society* di Indonesia harus dilihat dari kedua sisi, baik relasinya secara vertikal dengan negara, maupun secara horizontal soal bagaimana pengaruhnya terhadap proses demokratisasi di masyarakat. Merujuk pada studi Sujatmiko, dalam kajian ini terma *civil society* tidak diartikan sebagai masyarakat madani atau masyarakat sipil.

Dalam demokrasi keterlibatan masyarakat merupakan hal yang esensial (Alagappa, 2004). Meski ada beberapa kajian yang menyatakan bahwa kehadiran *civil society* tidak secara langsung dapat mendukung demokrasi (Haynes,

1997; Brysk, 2000; Valenzuela, 2004), tetapi studi Tusalem (2007) patut mendapat perhatian. Tusalem (2007) memeriksa lebih dari 60 negara yang mengalami gelombang ketiga demokratisasi. Ia menyimpulkan bahwa kekuatan *civil society* di masa pra-transisi demokrasi dan soliditas di masa pasca-transisi demokrasi telah memainkan peranan penting dalam mengembangkan kebebasan politik dan sipil di antara warga negara. Sejalan dengan pendapat tersebut, Alagappa (2004) mengemukakan empat hal bagaimana *civil society* dapat mendukung demokrasi, yaitu: 1) menyediakan infrastruktur sosial untuk demokrasi; 2) membatasi, melawan, dan menahan kekuatan negara dan pasar; 3) menjadi *backup* atau sumber daya tambahan apabila negara dan pasar mengalami kegagalan; 4) melakukan pendalaman demokrasi dengan merawat norma demokrasi dan kewarganegaraan.

Sejalan dengan keterkaitan antara demokrasi dan *civil society* di atas, dalam demokrasi tata kelola SDA, masyarakat juga memegang peranan penting. Borrás dan Franco (2008) memaknai demokrasi dalam tata kelola SDA sebagai proses politik yang dikontestasikan oleh banyak aktor, baik negara maupun masyarakat untuk mengontrol sifat, kecepatan, tingkat dan arah akses, serta kontrol atas pemanfaatan sumber daya alam. Sementara aktor negara jelas memiliki kuasa untuk menentukan kebijakan tata kelola SDA, dalam definisi di atas, Borrás dan Franco (2008) menggarisbawahi soal keterlibatan masyarakat. Keterlibatan masyarakat yang optimal dalam tata kelola SDA akan menjamin hak-hak masyarakat untuk menggunakan dan menikmati hasil pemanfaatan SDA, dan akan mengurangi konflik, baik horizontal maupun vertikal. Senada dengan itu, Overland (2018) melihat keberadaan *civil society* dalam melakukan kontrol dan pengawasan terhadap tata kelola SDA merupakan hal yang krusial.

Di lain pihak, oligarki berada di posisi yang beseberangan dengan demokrasi. Oligarki dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai '*pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang yang berkuasa dari golongan atau kelompok tertentu*'. Ketika

demokrasi menekankan soal kedaulatan dan peranan penting masyarakat, oligarki lebih mengacu pada kekuasaan yang dimiliki oleh segelintir orang atau kelompok tertentu. Sarjana utama yang mengemukakan soal konsep oligarki dalam studi politik Indonesia adalah Robison dan Hadiz (2004, 2014). Mereka menjelaskan politik Indonesia sebagai *'system of power relations that enables the concentration of wealthy and authority and its collective defence'* (Robison & Hadiz, 2014). Sarjana lain yang juga membahas tentang oligarki adalah Winters (2011) yang mendefinisikan oligarki sebagai *'actors who command and control massive concentrations of material resources that can be deployed to defend or enhance their personal wealth or exclusive social position [through a system of] the politics of wealth defence by materially endowed'* (Winters, 2011).

Meskipun definisi di atas sama-sama mendiskusikan oligarki, terdapat perbedaan dalam kedua definisi tersebut. Robison dan Hadiz menekankan fusi antara penumpukan kekayaan dan kekuasaan politik, sedangkan definisi yang ditawarkan oleh Winter lebih berfokus pada aktor (Ford & Pepinsky, 2014). Namun, keduanya sama-sama menekankan bahwa proses demokratisasi di Indonesia tidak membuat oligarki kehilangan kontrolnya dan tetap memegang peranan kunci.

Tendensi utama kepentingan politik oligarki untuk mempertahankan kekayaan yang terkonsentrasi menempatkan para oligark sebagai pihak yang menganggap demokrasi sebagai ancaman (Winters, 2013). Dalam hal ini, publik secara umum dianggap sebagai ancaman sehingga hampir selalu ditempatkan sebagai pihak pasif. Publik diarahkan untuk menerima seluruh hasil kebijakan yang dibuat oleh para penguasa bersama pebisnis dan direpresi ketika melakukan perlawanan. Dalam konteks tata kelola SDA, Bachriadi (2012) melihat bahwa sebagai konsekuensi dari menguatnya karakter neo-liberal negara, dominasi kelompok oligarki akan meminggirkan peran dan hak masyarakat dalam pengelolaan SDA.

Menguatnya Kelompok Oligarki di Sektor Sumber Daya Alam

Di masa Orde Baru, sektor SDA merupakan pilar penopang rezim, khususnya pada sektor minyak, gas, pertambangan, dan kehutanan (Tadjoeddin, 2007). Akibat monopoli kekuasaan yang dijalankan, tidak heran apabila sektor-sektor tersebut dikuasai oleh orang-orang dekat Presiden Suharto. Dengan kata lain, Suharto membangun jaringan oligarkinya terutama pada sektor SDA. Gellert (2005) misalnya mencatat mengenai sektor kehutanan (kayu) yang dikuasai oleh orang-orang dekat Suharto seperti Bob Hasan, Parjogo Pangestu, dan Eka Tjipta Widjaja. Suharto juga memberikan kuasa kepemilikan dan operasional pada perusahaan-perusahaan yang dipimpin oleh keluarganya. Hal yang sama terjadi pula di sektor SDA lainnya. Suharto bahkan menjadikan Bob Hasan sebagai Menteri Perdagangan dan Perindustrian di akhir masa Orde Baru (Maret-Mei 1998).

Penguasaan sumber ekonomi-politik yang tumpang tindih semacam ini tetap bertahan pasca-Orde Baru. Hal ini dikarenakan kelompok oligark memiliki kekuatan *'immunity to change'* (Hadiz, 2003; 2013; Robison dan Hadiz, 2004; Winters, 2014). Aktor bisa jadi berubah (dan/ atau bertambah) akibat dinamika perubahan politik yang terjadi seperti adanya desentralisasi dan kebijakan-kebijakan baru, tetapi pola perburuan rente yang terjadi di era Orde Baru tetap terjadi hingga saat ini.

Perburuan rente yang terjadi di Indonesia tampak jelas dalam indeks *The Crony Capitalism Index* yang dikeluarkan oleh The Economist. Indeks tersebut menilai seberapa banyak kebijakan negara yang dibuat untuk menguntungkan pengusaha atau dengan kata lain disebut dengan perburuan rente. Pada tahun 2016, Indonesia berada di peringkat ke 7 dunia setelah berada di peringkat 8 pada tahun 2014. Sebagian sektor yang termasuk dalam indeks tersebut adalah sektor SDA, yaitu batu bara, kelapa sawit, kayu, serta minyak dan gas (The Economist, 2016). Dalam sistem kroni, pertumbuhan ekonomi bisa jadi terus meningkat, tetapi ketimpangan semakin melebar. Ketimpangan ini tampak dalam penguasaan

dan pemanfaatan sektor-sektor SDA. Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNP-SDA) yang dibentuk oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat bahwa di sektor perkebunan sawit, sebesar 2.535.495 hektar lahan dikuasai oleh 10 perusahaan besar, sedangkan 4.756.272 hektar dikuasai oleh 2,1 juta pekebun rakyat. Pada sektor tambang mineral dan batu bara, Kontrak Karya (KK) yang terbit ada sebanyak 32 usaha yang rata-rata memiliki 40.753 hektar/KK. Khusus pada penambangan batu bara, Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) diberikan kepada 26 usaha dengan luas rata-rata 28.575 hektar/usaha. Sangat jauh apabila dibandingkan dengan 171 Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dengan luas masing-masing 3,2 hektar dan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) yang terbit untuk 5.589 usaha yang rata-rata memiliki 3.245 hektar/ IUP. Di sektor kehutanan tidak jauh berbeda situasinya, perusahaan besar menguasai 40.463.103 hektar, dan masyarakat sebanyak 1.748.931 hektar (KPK, 2019). Ketimpangan ini menunjukkan potret oligarki yang nyata bahwa penguasaan SDA didominasi oleh sedikit kelompok dibanding masyarakat secara keseluruhan.

Dalam situasi menguatnya dominasi kepentingan politik oligarki, penguasaan instrumen-instrumen negara menjadi salah satu pola operasi terpenting. Jabatan-jabatan strategis yang bisa memengaruhi dan bahkan menentukan kebijakan publik dikuasai secara langsung maupun tidak langsung. Selain melalui partai politik, para oligark bersama para pebisnis sering kali terlibat dalam proses politik elektoral dengan mendanai kandidat-kandidat eksekutif maupun legislatif secara langsung. Konsekuensinya, kandidat-kandidat yang terpilih cenderung melindungi kepentingan kelompok bisnis-politik yang mendukungnya (Rahmawati, 2015; lihat juga Aspinall & Berenschot, 2019). Situasi ini menjadikan para pejabat di posisi-posisi strategis berada di bawah kepentingan oligarki. Di sisi lain, para pejabat yang ingin melanggengkan kekuasaannya sering kali memilih untuk berkongsi dengan kelompok bisnis demi mewujudkan agendanya tersebut.

Menguatnya politik oligarki berbanding lurus dengan penguatan relasi bisnis dan politik yang menunjukkan kepentingan aktor-aktor bisnis menjadi agenda politik yang dominan. Dalam situasi ini, proses pembentukan kebijakan publik tidak dapat dilepaskan dari negosiasi kepentingan antaraktor bisnis yang berusaha mendesak kepentingannya dengan menunggangi agenda-agenda pemerintah (Samsuddin *et. al.*, 2018). Dalam situasi ini, sulit untuk membedakan antara aktor politik dengan aktor bisnis karena keduanya seringkali bertukar peran.

Pelemahan *Civil Society* dalam Demokratisasi Tata Kelola Sumber Daya Alam

Salah satu indikator penting dalam menilai demokratisasi tata kelola SDA adalah dengan melihat bagaimana partisipasi *civil society*. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) memberikan peluang pada masyarakat luas dalam hal pengawasan dan penyusunan tata ruang. Sebagai instrumen hukum, UUPPLH mengupayakan penguatan demokrasi lingkungan. Penguatan demokrasi ini dapat dilakukan melalui peningkatan akses informasi, partisipasi publik, akses keadilan serta penguatan hak-hak masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam UUPPLH ini, masyarakat memiliki hak subjektif atas lingkungan hidup sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang menjamin, menghormati, memenuhi, dan melindunginya hak atas lingkungan hidup yang meliputi akses terhadap informasi, partisipasi publik, dan keadilan atas untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat (Subagiyo, 2014).

Secara khusus UUPPLH mengatur mengenai partisipasi masyarakat adat dalam pengelolaan SDA pada Pasal 1 ayat (31) yang menyebutkan bahwa "*masyarakat hukum adat atau masyarakat adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena*

adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum". Lebih lanjut undang-undang ini memberikan tugas dan wewenang kepada pemerintah daerah agar menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Artinya, keberadaan masyarakat adat sebagai salah satu pemangku kepentingan dalam pengelolaan SDA diakui dalam UU.

Pada level internasional, United Nations Declaration on The Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP), dalam artikel 8 menyatakan bahwa negara harus menyediakan mekanisme yang efektif untuk pencegahan dan perbaikan dari setiap tindakan yang memiliki tujuan atau akibat terhadap perampasan tanah, wilayah, dan sumber daya dari masyarakat adat (UN, 2018). Pengakuan terhadap hak atas tanah yang secara tradisional telah ditempati oleh masyarakat adat juga dilakukan oleh International Labour Organization (ILO). Dalam konvensinya Nomor 169 Tahun 1989 mengenai Masyarakat Hukum Adat, ILO mengakui bahwa tanah yang selama ini didiami oleh penduduk asli dan masyarakat adat dan dikelola sesuai dengan praktik adat tradisi mereka untuk diwariskan kepada generasi mendatang adalah tanah milik masyarakat adat. Untuk itu, segala pemanfaatan atas tanah tersebut harus melalui konsultasi, tidak menutup ruang bagi partisipasi, harus menyesuaikan dengan identifikasi kebutuhan masyarakat adat serta dilengkapi dengan analisis dampak dan manfaat atas penggunaan tanah masyarakat adat tersebut (ILO, 2003).

Pada tataran empiris, pelibatan masyarakat dalam pengelolaan SDA tidak selalu berjalan mulus. Hasil riset Tim Kajian SDA LIPI (2014-2019) menyimpulkan bahwa dalam konteks tata kelola SDA di daerah, masyarakat sangat termarginalkan. Hasil riset tersebut menemukan ada dua hal yang menjadi akar persoalan buruknya tata kelola SDA di daerah. Pertama, minimnya akses informasi yang dimiliki warga, dan kedua minimnya keterlibatan

publik dalam pengambilan keputusan (Adaba et al, 2021). Misalnya yang terjadi di Lambu, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB). Warga sekitar tidak mengetahui bahwa daerah sekitarnya akan dijadikan wilayah operasi tambang. Bahkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bima tidak tahunenahu ihwal adanya tambang di Lambu. Akhirnya terjadi konflik yang berujung pada pembakaran kantor camat Lambu (Permana, 2016). Contoh lainnya, keterlibatan publik dalam pengelolaan SDA yang minim terjadi di Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah. Adanya relasi asimetris antara perusahaan perkebunan (korporasi) dan birokrat negara dengan masyarakat, dalam hal ini masyarakat adat Dayak Misik telah menyebabkan pecahnya konflik perkebunan di daerah tersebut (Syafi'i, 2016). Dengan kata lain, kajian Tim Kajian SDA LIPI menemukan bahwa hampir tidak ada rekognisi bagi masyarakat dalam pengelolaan SDA.

Masyarakat adat secara umum memang termarginalisasi dalam tata kelola SDA (Suryani, 2016). Data serupa juga didapatkan oleh riset lapangan Tim Masyarakat Sipil P2P LIPI/ Pusat Riset Politik BRIN (2021), terkait dengan kasus yang dialami oleh masyarakat adat Sedulur Sikep. Kelompok adat ini harus menghadapi pembangunan beberapa pabrik semen di Pegunungan Kendeng Utara yang membentang lintas provinsi yaitu Jawa Tengah dan Jawa Timur.² Sebagaimana kelompok masyarakat adat lain, Sedulur Sikep Samin memiliki pandangan tersendiri mengenai lingkungan hidup. Mereka memanfaatkan alam dengan secukupnya saja dan jauh dari

² Sedulur Sikep Samin adalah masyarakat yang menganut ajaran yang dikenalkan oleh Raden Kohar yang lahir di Desa Pliso Kadhiren, Kecamatan Randublatung, Blora pada tahun 1859. Raden Kohar yang memiliki nama lain Samin Surosentiko ini ditangkap oleh Pemerintah Hindia Belanda karena menolak untuk mengikuti kerja paksa, membayar cukai dan menyerahkan hasil pertanian ke lumbung desa kepada Pemerintah Hindia Belanda. Penolakan ini didasarkan pada sikap eksploitatif yang dilakukan oleh penjajah dan kerakusan birokrat penjajahan Belanda terhadap mereka (G, tokoh adat Sedulur Sikep Samin, wawancara oleh tim penulis di Blora, 10 Juni 2021).

kata eksploitasi. Tanah bagi mereka adalah seperti ibu sendiri, yang memberi penghidupan. Oleh karena itu, tanah harus diperlakukan dengan sebaik-baiknya dalam aktivitas mereka sebagai petani tradisional. Masyarakat adat Sedulur Sikep Samin berpandangan bahwa habis atau tidanya alam dan isinya tergantung pada pemakainya (Utomo, 2020). Sedulur Sikep Samin mengedepankan harmonisasi dan saling ketergantungan antara manusia dengan lingkungan alam yang berwujud seperti tanah, hutan, batu, air, gunung, binatang, dan lain-lain. Keberlanjutan hidup manusia dipahami sebagai keberlanjutan kelestarian lingkungan, sehingga ketika lingkungan alam mengalami kerusakan, ini adalah pertanda dari kehancuran hidup manusia. Oleh karena itu, keberadaan pihak lain yang ingin mengeksploitasi alam yang mereka diami tanpa melibatkan mereka akan menjadi pukulan keras bagi kelompok ini. Kesempatan mereka untuk terlibat dalam pengelolaan SDA yang sesuai dengan nilai yang diyakini akan hilang, diikuti dengan kerusakan sumber penghidupan mereka.

Pelaksanaan pembangunan pabrik semen oleh PT Semen Indonesia di pegunungan Kendeng tersebut tidak melalui Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang seharusnya. Sedulur Sikep Samin menuntut agar dilakukan penelitian dan kajian ulang atas pembangunan beberapa pabrik semen tersebut. Selama menunggu kajian dan penelitian ulang, masyarakat adat Sedulur Sikep Samin meminta pembangunan pabrik semen dihentikan. Tuntutan dari masyarakat adat Sedulur Sikep Samin ini direspon dengan intimidasi yang dilakukan oleh banyak preman bayaran kepada G, tokoh adat Sedulur Sikep Samin dan beberapa warga petani yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Petani Pegunungan Kendeng (JMPPK). Dalam pertemuan dengan Gubernur Jawa Tengah, Bibit Waluyo, menurut G, sudah disepakati bahwa semua proses pembangunan pabrik semen dihentikan sampai proses penelitian dan kajian yang melibatkan masyarakat adat Sedulur Sikep Samin selesai dilaksanakan. Hal inilah yang dijadikan dasar oleh masyarakat adat Sedulur Sikep Samin untuk menghadang truk milik Perusahaan Semen Indonesia yang akan meneruskan proses

pembangunan pabrik semen tersebut. Kejadian ini berbuntut pada terjadinya konflik dan menyebabkan sembilan warga petani Sedulur Sikep Samin dikriminalisasi dan dipenjara selama beberapa bulan (G, tokoh adat Sedulur Sikep Samin, wawancara oleh tim penulis di Blora, 10 Juni 2021). Hal ini jelas melanggar Konvensi ILO Nomor 169 Tahun 1989 yang meletakkan partisipasi sebagai prinsip dasar konvensi atas pengakuan hak bagi masyarakat adat.

Dalam konvensi ILO tersebut dengan jelas diatur bahwa masyarakat adat memiliki hak untuk terlibat dalam setiap proyek, kebijakan, dan program yang dilakukan oleh negara. Partisipasi dijamin dan diperbolehkan selama proses perancangan kebijakan, program, ataupun proyek sampai dengan proses implementasi dan evaluasi. Masyarakat adat berhak untuk berpartisipasi di semua tingkatan pembuatan keputusan baik di level lokal, nasional, hingga regional. Partisipasi dilakukan melalui badan perwakilan tradisional dari masyarakat adat sendiri dan tidak melalui struktur yang berlaku di luar komunitas masyarakat adat (ILO, 2003). Artinya, masyarakat adat Sedulur Sikep Samin sudah benar meminta kajian dan penelitian ulang terhadap AMDAL pembangunan pabrik semen. Namun, berdasarkan penuturan dari G, yang terjadi justru negara tidak menjamin hal tersebut dan berpihak pada investor dan pemilik pabrik semen. Masyarakat yang meminta pembangunan pabrik semen dihentikan justru harus berujung di balik jeruji besi. Lebih parahnya lagi, negara yang telah menyediakan instrumen bagi Masyarakat Adat Sedulur Sikep Samin untuk mencari keadilan melalui jalur hukum di Mahkamah Agung harus mengalami kekecewaan manakala Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tetap memberikan izin lingkungan padahal masyarakat adat Sedulur Sikep Samin telah memenangkan gugatan penghentian pembangunan pabrik semen.

Kejadian sebagaimana dialami aktivis JMPPK dan masyarakat Sedulur Sikep merupakan contoh bagaimana partisipasi masyarakat sipil justru dipandang sebagai gangguan terhadap investasi. Suara kritis dari para aktivis dan pemerhati lingkungan dihadapi

secara represif. Sepanjang tahun 2019, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) mencatat bahwa ada 27 kasus kekerasan yang dialami oleh 128 individu dan 50 kelompok aktivis pembela Hak Asasi Manusia (HAM) atas Lingkungan (ELSAM, 2020). Kekerasan yang dialami oleh para aktivis lingkungan itu terjadi di beberapa sektor yaitu agraria (17,63 persen), pertambangan (6,22 persen), infrastruktur (3,11 persen) dan pariwisata (1,4 persen) (ELSAM, 2020).

Adapun bentuk kekerasan yang dialami adalah intimidasi, penangkapan, penahanan, serangan fisik, perusakan, perampasan tanah, hingga pembunuhan. Pelaku kekerasan tersebut antara lain adalah aktor non-negara dan aktor negara. Aktor non negara antara lain perusahaan (31 persen) dan tenaga keamanan perusahaan (2 persen). Sementara aktor negara yang menjadi pelaku kekerasan terhadap aktivis lingkungan adalah polisi (26 persen), TNI (10 persen), Satpol PP (5 persen), dan pejabat negara (3 persen) (ELSAM, 2020). Hal yang menarik adalah meski aktor negara bukan merupakan aktor dominan yang melakukan kekerasan dalam kasus konflik agraria dan lingkungan, tetapi terjadi peningkatan yang cukup signifikan terkait dengan pelaku kekerasan yang berasal dari aktor negara. Peningkatan keterlibatan aktor negara ini tampak apabila membandingkan kekerasan yang terjadi di periode Presiden Joko Widodo (2014-2019) dengan periode kepresidenan sebelumnya yaitu di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2009-2014). Menurut ELSAM, hal ini terjadi karena adanya kebijakan ekonomi yang pro-pemodal dan dipadukan dengan pendekatan keamanan yang militeristik yang dijalankan oleh rezim Joko Widodo. Kriminalisasi dan kekerasan yang dialami oleh para aktivis *civil society* ini harus dilihat sebagai upaya untuk melemahkan partisipasi masyarakat dalam tata kelola SDA.

Dampak Buruk Tata Kelola Sumber Daya Alam yang Tidak Demokratis

Dikuasainya instrumen-instrumen negara oleh kekuatan oligarki membuat prioritas-prioritas serta agenda-agenda tata kelola

SDA cenderung dikuasai oleh kepentingan kelompok ini. Konsekuensinya, operasi kapital di industri ekstraktif hampir selalu dilakukan dengan mengabaikan batas-batas daya dukung lingkungan. Banyak wilayah yang tadinya merupakan hutan primer mendapatkan tekanan ekologis yang sangat besar. Operasi kapital ini juga hampir selalu mengabaikan keberadaan sumber-sumber penghidupan penting masyarakat yang harus dilestarikan (Magdoff & Foster, 2018). Oleh karena itu, alih fungsi kawasan hutan, perampasan tanah, degradasi kualitas lingkungan hidup, dan berbagai problem konflik agraria tidak dapat dilepaskan dari fakta penguasaan instrumen negara oleh kekuatan oligarki (Cahyono, *et al.*, 2020). Pendekatan ini dikenal dengan istilah *debottlenecking*, yaitu suatu paket kebijakan ramah investor yang menghilangkan berbagai bentuk hambatan investasi dengan mengabaikan hak masyarakat dan kualitas lingkungan (Safitri, 2014). Dari penjelasan tersebut, secara umum terdapat dua dampak buruk dari mundurnya demokrasi tata kelola SDA. Pertama, meningkatnya konflik agraria, dan kedua, meningkatnya kerusakan lingkungan. Kedua hal tersebut dibahas secara berturut-turut pada bagian ini.

a. Meningkatnya Konflik Agraria

Tidak terlibatnya masyarakat dalam pengelolaan SDA berakibat pada penolakan dan berujung pada konflik agraria. Sebagaimana yang ditulis oleh Noer Fauzi Rachman, seorang sarjana *cum* aktivis dalam bidang ekologi politik, yang memaknai bahwa konflik agraria adalah konflik yang berpotensi muncul karena ada dominasi dan ekspansi badan usaha, baik dalam industri perkebunan, ekstraktif, kehutanan, ataupun konservasi yang didukung oleh instrumentasi lembaga pemerintahan melalui rezim pemberian hak/ijin atas tanah (Rachman, 2013). Tidak ada entitas masyarakat dalam pengertian mengenai konflik agraria tersebut, karena termarginalisasi oleh dominasi negara dan kekuatan oligarki. Dominasi dan ekspansi usaha ini seringkali berawal dari alih fungsi lahan pertanian milik masyarakat yang berubah menjadi lahan industri ekstraktif, pembangunan infrastruktur, properti, dan lain sebagainya karena industri-industri itu lebih padat modal dan mengundang investasi

Tabel 1. Luas Lahan Pertanian Indonesia (2014-2018)

No	Jenis Lahan	Tahun					Pertumbuhan (%)
		2014	2015	2016	2017	2018	
1	Sawah	8.111.593	8.092.907	8.187.734	8.164.045	7.105.145	-12,97
2	Tegal/ Kebun	12.033.776	11.861.676	11.539.826	11.704.769	11.697.807	-0.06
3.	Ladang/ Huma	5.036.409	5.190.378	5.074.223	5.248.488	5.256.223	0.15
4.	Lahan yang sementara tidak diusahakan	11.713.317	12.340.270	11.941.741	12.168.012	10.770.888	-11.48

Sumber: Kementerian Pertanian (2019)

Dalam Tabel 1, tampak bahwa lahan pertanian Indonesia mengalami pengurangan yang cukup signifikan. Alih fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian adalah salah satu penyebab dari konflik agraria (Nurdin, 2018).

Letusan konflik agraria di Indonesia sendiri selalu mencapai ratusan kasus dan melibatkan ratusan ribu hingga jutaan hektar tanah dan ratusan ribu kepala keluarga (KK) sebagaimana yang terlihat dalam Tabel 2.

(2013) menyebut konflik agraria dan SDA di Indonesia sebagai sesuatu yang bersifat “kronis, sistemik, dan meluas”. Salah satu penyebabnya adalah tereksklusinya masyarakat dari tanah atau wilayah kelola atau SDA yang masuk ke dalam konsesi badan usaha konsesi, baik itu di bidang, produksi, ekstraksi, maupun konservasi. Konsesi dan izin itu diberikan oleh pejabat publik, baik dari Kementerian Kehutanan ESDM, Kepala BPN, maupun Gubernur dan Bupati yang memasukkan wilayah kelola

Tabel 2. Konflik Agraria dari Tahun ke Tahun (2015-2020)

Tahun	Kasus	Lahan (ha)	Warga Terlibat (KK)
2015	252	400.430	208.714
2016	450	1.265.027	86.745
2017	659	520.491,87	
2018	410	807.177,613	87.568
2019	279	734.239,3	109.042
2020	241	625.273	135.332

Sumber: KPA (2019 dan 2020)

Dari tahun ke tahun, konflik agraria didominasi oleh sektor industri ekstraktif, yaitu perkebunan dan kehutanan. Di tahun 2020, secara mayoritas konflik perkebunan dan kehutanan adalah yang terjadi di perkebunan sawit (101 kasus) dan Hutan Tanaman Industri (HTI) (34 kasus). Penyebab terbesar ketiga selain perkebunan dan kehutanan adalah infrastruktur yang didominasi oleh konflik yang disebabkan oleh klaim aset pemerintah (8 kasus) (KPA, 2020).

Dari Tabel 2 tampak bahwa konflik agraria di Indonesia tidak pernah mengalami pengurangan kasus secara signifikan. Rachman

SDA/tanah yang berada dalam kepemilikan sekelompok masyarakat. Eksklusi ini kemudian berdampak pada perlawanan masyarakat akibat hilangnya sumber penghidupan yang berujung pada meletusnya konflik agraria. (Rachman, 2013).

Salah satu akar masalah yang paling penting dari konflik atas tanah dan wilayah kelola SDA adalah tidak adanya kebijakan yang memberikan kepastian kepada masyarakat mengenai akses atas tanah atau wilayah kelola SDA (Rachman, 2013). Meskipun misalnya UU N0 32/2009 memberikan hak partisipasi bagi warga untuk turut mengawasi dan menyusun tata

ruang, tetap ada jurang antara aturan yang ada (*das sollen*) dengan kenyataan (*das sein*) yang terjadi. Khusus terkait masyarakat adat, bahkan ada pasal dalam UU No 32/2009 yang secara khusus memberikan hak terhadap tanah dan wilayah kelola sebagaimana yang telah dibahas di bagian sebelumnya, tetapi konflik atas tanah adat tetap sering terjadi. Hal ini karena hukum adat yang berlaku diabaikan. Menurut Rachman (2013) akar masalah yang tidak kalah pentingnya adalah semakin besarnya ketimpangan kepemilikan, dan penguasaan tanah oleh kelompok oligarki dibanding masyarakat kebanyakan sebagaimana yang sudah dibahas pada bagian sebelumnya.

b. Meningkatnya Kerusakan Lingkungan

Salah satu yang pasti terjadi dalam meningkatnya aktivitas alih fungsi lahan akibat ekspansi kapital adalah potensi krisis ekologi di wilayah-wilayah yang selama ini terbebani oleh berbagai perizinan investasi industri ekstraktif. Secara bersamaan, kebijakan perlindungan lingkungan semakin lemah. Sebagai konsekuensi kemudahan investasi demi kepentingan ekonomi, kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan yang menurun seringkali meningkatkan intensitas kejadian bencana.

Cara pandang yang menempatkan bentang alam sebagai koridor ekonomi dan investasi swasta sebagai hal yang utama membahayakan kepentingan rakyat. Berbagai kebijakan kemudian disusun untuk menghilangkan hambatan investasi sehingga pola-pola kepemilikan, penguasaan, dan akses pemanfaatan SDA dibentuk berdasarkan kepentingan pasar. Melalui industri ekstraktif, ekspansi kapital menyebabkan hilangnya tanah dan sumber *livelihood* masyarakat. Terjadi marginalisasi, dan kerusakan lingkungan yang berujung pada konflik yang melibatkan masyarakat dan korporasi (Tadjoeddin, 2007). Ekspansi *capital* ekstraktif yang tak terkontrol dengan baik meningkatkan kerentanan lingkungan akibat deforestasi hutan alam yang berkorelasi kuat dengan bencana alam yang semakin sering terjadi (Magdoff dan Foster, 2018).

Forest Watch Indonesia (FWI) menyebutkan bahwa sejarah kehutanan Indonesia adalah sejarah deforestasi. FWI menyebutkan laju deforestasi di Indonesia di tahun 1970-an mencapai 300.000 ha/ tahun, meningkat menjadi 1 juta ha/ tahun di tahun 1990an. Dalam rentang waktu antara tahun 1996-2000, deforestasi hutan alam di Indonesia mencapai 2 juta ha/ tahun (FWI, 2018). Hal ini tidak dapat dilepaskan dari munculnya Indonesia sebagai salah satu negara eksportir kayu terbesar sejak tahun 1960an. Komersialisasi hutan terutama di wilayah-wilayah luar Jawa telah meningkatkan aktivitas pembukaan lahan baru dengan skala besar.

Diversifikasi komoditas selain minyak turut andil menciptakan percepatan deforestasi hutan di Indonesia melalui perluasan area pertambangan dan perkebunan besar. Praktik penyediaan lahan untuk aktivitas ekstraktif ini seringkali dilakukan dengan skema Hak Guna Usaha (HGU), Hak Pengusahaan Hutan (HPH), Hutan Tanaman Industri (HTI), dan atau penguasaan tanah-tanah pertambangan melalui konsesi pertambangan kontrak karya. Menurut catatan CIFOR (1997), hingga tahun 1996 saja, terdapat 445 pemegang hak pengusahaan hutan (HPH) yang meliputi penguasaan area seluas 54.060.599 ha (CIFOR, 1997). Konsesi HPH ini berbanding lurus dengan peningkatan laju deforestasi di Indonesia (Hidayat, 2011). Sementara itu, konsesi HTI yang pada awalnya diarahkan untuk merehabilitasi kawasan serta mengurangi ketergantungan industri terhadap hutan alam, justru ikut andil dalam laju deforestasi karena banyak izin konsesi HTI justru berada di kawasan hutan alam. Catatan FWI menyebutkan HTI telah menyumbang 10 persen deforestasi dalam rentang waktu 2009-2013 (FWI, 2014).

Hingga tahun 2017, dominasi penguasaan ruang oleh industri ekstraktif sangat besar. WALHI menyebutkan bahwa lahan seluas 159.178.237 ha sudah dikuasai oleh korporasi melalui izin investasi dalam bentuk izin minyak dan gas, izin pertambangan, izin kehutanan, dan izin perkebunan (WALHI, 2018). Perluasan industri ekstraktif awalnya dianggap sebagai jalan keluar terhadap problem perekonomian

sebuah negara karena mampu menyerap banyak tenaga kerja (Colchestester et. al., 2006). Pada kenyataannya hal ini justru memunculkan darurat ekologis yang mendesak untuk segera diselesaikan. WALHI (2018) menyebutkan bahwa darurat ekologis di Indonesia merupakan akumulasi buruknya tata kelola SDA akibat dominasi penguasaan ruang, konflik SDA (kekerasan dan kriminalisasi), bencana ekologis, pencemaran, fatalis kebijakan reklamasi, dan ambiguitas penegakan hukum.

Masifnya penguasaan lahan oleh korporasi tentunya memberikan dampak langsung terhadap laju deforestasi. FWI (2018) menyebutkan deforestasi terjadi akibat pembukaan hutan dan panen kayu yang dilakukan secara masif di wilayah-wilayah yang sudah terbebani oleh perizinan industri ekstraktif. FWI memaparkan bahwa hilangnya tutupan hutan, terutama di wilayah Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi dalam rentang waktu antara 1985-1997 sebagian besar disebabkan oleh aktivitas perkebunan. Laporan tersebut juga menggambarkan bahwa dalam rentang waktu 2009-2013, setiap tahunnya hutan Indonesia menghilang seluas 1,13 juta ha (FWI, 2018).

Permana (2020) menyebutkan beberapa kajian telah membuktikan bahwa rutinitas bencana asap akibat kebakaran hutan dan atau banjir disebabkan oleh masifnya alih fungsi lahan untuk kepentingan industri ekstraktif dan atau urbanisasi. Dalam beberapa tahun terakhir berbagai sarjana sudah mulai menggeser paradigma bahwa bencana alam seperti banjir, tanah longsor maupun kekeringan tidak melulu disebabkan oleh ulah alam, melainkan ada kontribusi manusia di dalamnya. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dari 1 Januari 2020 hingga 31 Desember 2020 terdapat 2.952 bencana. Bencana yang terjadi di Indonesia didominasi oleh bencana banjir dengan jumlah 1.080 kasus, tanah longsor 577, karhutla 326, kekeringan 29, puting beliung 880, abrasi dan gelombang pasang 36, gempa bumi 16, dan kekeringan 29 (BNPB, 2020). Bencana banjir di Indonesia mengalami peningkatan jumlah lebih tinggi dibanding bencana banjir tahun sebelumnya yang berjumlah 784 pada tahun 2019 (BNPB, 2019).

Bencana banjir ini masih terjadi di awal tahun 2021. Banjir berturut-turut terjadi sejak awal hingga pertengahan Februari dan melanda beberapa daerah di Indonesia. Bencana banjir di Aceh Timur (1 Januari), Bener Meriah (17 Januari), Kolaka Utara Sulawesi Utara (2 Januari), Sidoarjo (7 Januari), Sampang (8 Januari), Jombang (1 Januari), Jember (14 Januari), Kepulauan Riau (10 Januari), Solok Sumatra Barat (12 Januari), Halmahera Maluku Utara (16 Januari), Nunukan (17 Januari), Sumedang (9 Januari dan 7 Februari), Tasikmalaya (14 Januari), Indramayu (15 Januari), Polewali Mandar (14 Januari), Pulau Bawean Gresik (12 Januari), Kepulauan Bangka Belitung (13 Januari), Kalimantan Selatan (14 Januari), Kalimantan Barat (14 Januari), Jakarta (6-7 Februari), Pekalongan (6 Februari), dan Semarang (6 Februari).³

Dalam analisis yang dikeluarkan oleh Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional (LAPAN) dikatakan bahwa banjir terjadi karena adanya penyempitan kawasan hutan selama sepuluh tahun terakhir di mana hutan adalah alat penyerap alami air dari alam (Satriani, 2021). Penyempitan kawasan hutan ini tidak lepas dari ulah para politisi di daerah atau dengan kata lain, kelompok oligarki. Analisis menarik dari Jaringan Advokasi Tambang bahwa bencana yang terjadi di Indonesia tidak lepas dari momen politik elektoral. Jatam sendiri telah mengumpulkan data bahwa kasus kepala daerah yang tertangkap KPK tidak jarang terkait dengan perizinan SDA. Kasus Annas Maamun Gubernur Riau yang memengaruhi beberapa PNS untuk merevisi alih fungsi hutan di Provinsi Riau pada tahun 2014, kasus suap Rachmat Yasin Bupati Bogor yang menerima hadiah atas pemberian rekomendasi tukar menukar kawasan hutan di Kabupaten Bogor, maupun kasus Bupati Toli-

³ Data diolah dari berbagai sumber berita di media. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-56007558>. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210117154511-20-594834/deretan-wilayah-ri-diterjang-banjir-bandang-awal-2021>. <https://makassar.sindonews.com/read/415448/710/januari-april-2021-bencana-alam-di-indonesia-didominasi-banjir-1619921122>. <https://www.kompas.com/tren/read/2021/01/06/070500865/5-daerah-yang-dilanda-banjir-pada-awal-2021-mana-saja-?page=all>.

Toli Saleh Batilan terkait alih fungsi hutan pada Januari 2017 (M, Jaringan Advokasi Tambang, 6 November 2021).

Politisi lain yang juga melakukan praktik yang sama adalah Bupati Kutai Kertanegara Rita Widyasari yang menjadi Bupati 2010-2015 dan 2016-2021. Rita Widyasari adalah anak dari Syaukani Hasan Rais, mantan Bupati Kutai Kertanegara periode 1999-2004 dan 2005-2010. Namun, baru setahun menjabat sebagai Bupati Kutai Kertanegara, pada tahun 2006 Syaukani Hasan Rais ditangkap KPK dengan tuduhan korupsi bandara Loa Kulu. Jejak korupsi ini menurun ke Rita yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada tahun 2018 dalam kasus dugaan korupsi pemberian izin lokasi perkebunan kelapa sawit. Pada masa kepemimpinannya, Rita mengeluarkan 625 izin pertambangan di Kutai Kertanegara dan menjadikan kabupaten ini sebagai kabupaten dengan jumlah izin pertambangan terbesar di Provinsi Kalimantan Timur⁴. Banyak perusahaan batu bara yang melanggar hukum dan tidak memenuhi kewajiban untuk menutup lubang hasil tambang yang ditinggalkannya. Lubang-lubang ini telah merenggut setidaknya 27 korban jiwa. Rita sendiri adalah pemilik dari PT Sinar Kumala Naga yang diduga melakukan penambangan batu bara dan meninggalkan lubang sebanyak 15 buah. Sebagaimana karakteristik utama pada kelompok oligarki, keluarga Rita yaitu ibu dan adiknya berturut-turut menjadi pemegang saham terbesar dan komisaris dari perusahaan tersebut (Jong, 2017).

Banyaknya pembukaan lahan sawit dan pemberian izin tambang membuat Kutai Kertanegara menjadi satu dari sekian daerah yang mengalami bencana banjir langganan. Pada 11 Februari 2020 banjir merendam Desa Lamin Telihan dan Desa Lamin Pulut di Kecamatan Kenohan. Berdasarkan informasi dari Camat Kenohan, dua desa tersebut adalah dua desa

⁴ Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh pemerintah terdapat 1.430 pemegang izin pertambangan di Provinsi Kalimantan Timur dengan 820 perusahaan pemegang izin eksplorasi dan sisanya izin beroperasi. Secara keseluruhan perusahaan-perusahaan ini memiliki konsensi seluas 5,13 juta hektar atau lebih dari 40 persen total luas lahan di Provinsi Kalimantan Timur (Jong, 2017).

yang selalu dilanda banjir ketika mengalami hujan deras. Menurut Camat Kenohan, banjir tersebut terjadi karena adanya lahan perkebunan kelapa sawit di wilayah tersebut (Daton, 2020).

Dari sedikit contoh kasus di atas dapat disimpulkan bahwa bencana alam, terutama banjir, tidak selalu hadir karena faktor alam semata, melainkan akibat buruknya demokrasi tata kelola SDA. Elite politik yang mengeluarkan berbagai izin lingkungan untuk pembukaan lahan sawit maupun tambang untuk pihak swasta menyebabkan terjadinya kerusakan ekologi dan menyebabkan banjir. Keputusan pemberian izin semacam ini hampir pasti tidak melibatkan elemen masyarakat, selain menjadikan mereka korban dari dampak kerusakan lingkungan yang terjadi.

UU Cipta Kerja sebagai Fasilitator Mundurnya Demokratisasi Tata Kelola SDA

Bagian sebelumnya telah menjelaskan bagaimana demokrasi tata kelola SDA menjadi berjalan mundur akibat menguatnya oligarki. Penguatan oligarki telah melemahkan *civil society* dan pada akhirnya menimbulkan beberapa dampak buruk seperti maraknya konflik agraria dan kerusakan lingkungan. Salah satu indikator penting lain dari semakin menurunnya kualitas demokrasi tata kelola SDA ialah disahkannya *Omnibus Law* Undang-Undang Cipta Kerja (selanjutnya disebut dengan UU Ciptaker) pada 5 Oktober 2020 lalu. Peraturan ini mengundang perlawanan dari sejumlah pihak, termasuk *civil society* karena dinilai hanya akan menguntungkan oligarki.

Sebelum disahkan, sempat beredar luas beberapa versi draf RUU yang meresahkan masyarakat karena setidaknya ada 12 problem termasuk sentralisasi tata kelola SDA oleh kelompok bisnis dan oligark (FRI, 2020). Menjelang pengesahan, draf versi terakhir pun muncul. Dalam draf tersebut, pasal-pasal yang menguntungkan pengusaha mendominasi, seperti penghapusan royalti bagi pengusaha batu bara yang menghasilkan nilai tambah bagi produk, kewenangan menerbitkan izin prinsip

serta soal penataan ruang, dan beberapa syarat investasi lain yang diambil alih pemerintah pusat dari pemerintah daerah (ICW 2020). Daya tawar pemerintah daerah pun semakin melemah.

Setelah pengesahan, terdapat beberapa substansi dalam UU Ciptaker yang mendukung pengusaha. Misalnya Pasal 123 mengenai percepatan pengadaan tanah dengan memasukkan kawasan hulu hilir industri minyak gas, kawasan industri, kawasan ekonomi khusus (KEK), kawasan pariwisata, kawasan ketahanan pangan, dan kawasan pengembangan teknologi ke dalam kategori kepentingan umum agar semakin mudah prosesnya. Padahal, kawasan-kawasan tersebut bisa jadi tidak untuk kepentingan umum, tetapi kepentingan perusahaan. Hal yang menarik adalah pasal yang merupakan perubahan dari UU No 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah ini juga mencantumkan bahwa pengadaan tanah kurang dari lima hektar tidak memerlukan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL). Secara proses bisnis ini cukup efisien, tetapi tidak mendukung dalam upaya pelestarian lingkungan.

UU Ciptaker jelas memberikan berbagai kelonggaran kepada para pengusaha terkait persyaratan perlindungan lingkungan hidup. Misalnya, melemahkan beberapa regulasi yang menjamin perlindungan lingkungan yang di dalamnya memuat perubahan izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan sebagai prasyarat investasi (ICEL, 2020). Pada saat yang sama, beberapa proyek strategis pemerintah telah menabrak rencana tata ruang dan tata wilayah nasional yang telah disusun dengan pertimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Dengan disahkannya UU Ciptaker, kekuatan oligarki yang sudah ada semakin menguat melalui penyederhanaan perizinan agar investasi lebih mudah dan menjadi prioritas. Tumpang tindih peraturan terkait tata kelola SDA yang telah ada sebelumnya (Rahmi, Mushawirya, dan Nuriyatman, 2021) dijadikan dalih dengan mengabaikan akar masalah sesungguhnya, yakni degradasi terhadap Undang-Undang No. 5/1960 tentang Pokok Agraria (Sumardjono, 2020).

Terkait partisipasi masyarakat, *Omnibus Law* UU Cipta Kerja No 11 Tahun 2020 menjadi penanda baru dalam pengelolaan SDA di Indonesia. Ketika pada periode sebelumnya partisipasi masyarakat dalam tata kelola SDA diakomodasi dalam peraturan perundangan (meskipun pada praktiknya tidak, sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian pelemahan *civil society*), tetapi UU No 11/2020 justru menjadi ‘fasilitator’ peminggiran hak warga untuk terlibat. Dalam UU No 11/2020 Pasal 25 dikatakan bahwa masyarakat yang dapat mengajukan keberatan adalah masyarakat yang terkena dampak langsung yang relevan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan. Padahal, dalam Pasal 25 Undang-Undang No 32/2009 tentang PPLH yang menjadi dasar perubahan, siapa pun anggota masyarakat, baik yang terdampak langsung atau tidak langsung, yang terpengaruh AMDAL, serta pemerhati lingkungan dapat mengajukan protes dan gugatan. Hal ini tentu saja akan merugikan hak masyarakat terhadap pengelolaan sumber daya alam (Firmansyah, Sinaga, & Aisyah, 2020), dan secara langsung terjadi penyempitan ruang keterlibatan (Tirto. id, 2020). Dalam hal ini, Iwan Nurdin dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menyebut situasi ini sebagai “*shrinking civic space*” atau mengecilnya ruang warga negara (Nurdin, 2020).

UU Ciptaker yang sejak awal disebut sebagai “cacat prosedural” karena tidak melibatkan masyarakat dalam perumusannya, bahkan sulit bagi masyarakat untuk sekadar mengakses naskah akademik ataupun draf RUU (FRI, 2020), semakin memperparah situasi yang selama ini telah dialami masyarakat. Konflik agraria yang memiliki kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun, dengan adanya UU Ciptaker, tren peningkatannya akan berpotensi lebih besar sebagai akibat dari kemudahan pengadaan tanah untuk usaha. Jika sebelum ada UU Ciptaker saja lingkungan sudah rusak, padahal ada syarat AMDAL, tidak begitu sulit membayangkan bagaimana jadinya jika peraturan itu justru dihapus. Terlebih, ada pembatasan hanya kelompok masyarakat yang terdampak langsung yang boleh mengajukan protes dan gugatan.

Dari penjelasan tersebut tampak bahwa UU No 11/2020 tentang Cipta Kerja tidak hanya melemahkan *civil society*, tetapi juga melemahkan proses demokratisasi sumber daya alam. Demokratisasi sumber daya alam mengharuskan adanya interaksi antara negara 'from above' dan masyarakat 'from below' yang bisa jadi memiliki agenda berbeda, bahkan berseberangan, tetapi memiliki komitmen untuk menciptakan kebijakan pertanahan yang *pro-poor* dan mendorong demokratisasi negara dan masyarakat secara umum (Borras & Franco, 2008). Kehadiran UU No 11/2020 telah menutup ruang deliberatif yang dibutuhkan untuk mendorong demokratisasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan demokratisasi Indonesia secara umum.

Penutup

Artikel ini telah menjelaskan bahwa penguatan politik oligarki telah melemahkan kualitas demokrasi karena menyebabkan semakin menyempitnya ruang partisipasi bagi kelompok *civil society*, khususnya dalam tata kelola SDA. Menyempitnya ruang partisipasi *civil society* ini menyebabkan kontrol mereka atas kebijakan dan tata kelola SDA semakin lemah. Konsekuensi dari memburuknya demokrasi tata kelola SDA yang mengeksklusi *civil society* adalah intensitas konflik agraria dan kerusakan lingkungan yang semakin meningkat. Lebih jauh, artikel ini juga membahas secara khusus UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, terutama bagaimana kaitannya dengan pelemahan proses demokrasi dalam tata kelola SDA.

Daftar Pustaka

- Adaba, P., et al(eds.) (2021). *Potret Kapasitas Pemda dalam Pengelolaan SDA: Penyusunan Model dan Uji Coba Instrumen Indeks di Kab. Klungkung, Kab. Banyuwangi, dan Kab. Boalemo*. Kanisius.
- Alagappa, M. (2004). Civil Society and Political Change: An Analytical Framework. Dalam M. Alagappa (Ed.), *Civil Society and Political Change in Asia: Expanding and Contracting Democratic Space* (hlm. 25-57). Stanford University Press.
- Aspinall, E. & Berenschot, W. (2019). *Democracy for Sale: Pemilu, Klientelisme, dan Negara di Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia & KITLV-Leiden.
- Azra, A. (2003). 'Civil Society' dan Demokratisasi di Indonesia: Transisi Selama dan Setelah Presiden Abdurrahman Wahid. Dalam Burhanuddin (Ed.), *Mencari Akar Kultural Civil Society di Indonesia* (hlm. 57-75). INCIS.
- Bachriadi, Dianto (eds). (2012). *Dari Lokal ke Nasional Kembali Ke Lokal: Perjuangan Hak Atas Tanah di Indonesia*. ARC Books.
- Amindoni, A. (12 Desember 2017), 'Merugikan negara,' ribuan izin tambang di Indonesia akan diblokir," <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42308353>.
- Beitinger-Lee, V. (2010). (Un)Civil Society and Political Change in Indonesia: A Contested Arena. Routledge.
- BNPB, "Informasi Grafis Bencana 2019", <https://bnpb.go.id/infografis/kejadian-bencana-tahun-2019>, diakses pada 24 Juni 2021.
- Borras, S. M., & Franco, J. C. (2008). *Democratic Land Governance and Some Policy Recommendations*. United Nations Development Program.
- Brysk, A. (2000). Democratizing Civil Society in Latin America. *Journal of Democracy*, 11(3), 151-165.
- Cahyono, E., et al.(2020). Resolusi Konflik Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam: Lintasan Gagasan, Praktik, dan Bentang Masalah, *Jurnal Antikorupsi Integritas*, 5 (2-2), 75-92.
- CIFOR. (1997). Laju dan Penyebab Deforestasi di Indonesia: Penelaahan Kerancuan dan Penyelesaiannya. *OCCASIONAL PAPER*, 9 (I).

- Colchestester, M. et.al.. (2006). *Promised Land: Palm Oil and Land Acquisition in Indonesia-Implications for local communities and indigenous peoples*. Forest People Programme dan Perkumpulan Sawit Watch .
- Daton, Z (2020). "Puluhan Rumah Dua Desa di Kutai Kartanegara Terendam Banjir," <https://regional.kompas.com/read/2020/11/03/12541551/puluhan-rumah-dua-desa-di-kutai-kartanegara-terendam-banjir>.
- Dhakidae, D. (1999). Masyarakat Madani dalam Era Transisi di Indonesia. Dalam M. D. Ridwan & A. Gunawan (Eds.), *Demokratisasi Kekuasaan: Wacana Ekonomi dan Moral untuk Membangun Indonesia Baru* (hlm. 205-214). Lembaga Studi Agama dan Filsafat.
- Diamond, L. (1999). *Developing Democracy Toward Consolidation*. John Hopkins University Press.
- ELSAM. (2020). *Menatap Tahun-tahun Penuh Marabahaya: Laporan Situasi Pembela HAM atas Lingkungan Tahun 2019*. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat.
- Firmansyah, A. T., et al.. (2020). Hilangnya sendi demokrasi dan otonomi daerah melalui korpotokrasi RUU Omnibus Law. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 3(2), 132-140.
- Ford, M., & Pepinsky, T. (2014). Introduction: Beyond Oligarchy?. Dalam M. Ford & T. Pepinsky (Eds.), *Beyond Oligarchy: Wealth, Power and Contemporary Indonesian Politics* (hlm. 1-10). Cornell University.
- FRI. (2020). *Kertas Posisi Fraksi Rakyat Indonesia: 12 Alasan Menolak Omnibus Law RUU Cilaka (#Cilaka12)*. <https://igj.or.id/wp-content/uploads/2020/01/12-ALASAN-MENOLAK-OMNIBUS-LAW-RUU-CILAKA.pdf>, diakses pada 28 Juni 2021.
- FWI. (2014). *Potret Keadaan Hutan Indonesia Tahun 2009-2013*. Forest Watch Indonesia.
- FWI. (2018). *Deforestasi Tanpa Henti: Potret Deforestasi di Sumatera Utara, Kalimantan Timur, dan Maluku Utara*. Forest Watch Indonesia.
- Gellert, P.K (2005) Oligarchy in the Timber Markets of Indonesia: From Apkindo to IBRA to the Future of the Forests. Dalam B. Resosudarmo (ed.), *The Politics and Economics of Indonesia's Natural Resources*, (hlm. 145-161).
- Hadiz, V. (2003). 'Reorganizing Political Power in Indonesia: A Reconsideration of so-called 'Democratic Transitions''. *The Pacific Review* 16 (4), 591-611.
- Hadiz, V. (2013). 'The Rise of Capital and the Necessity of Political Economy'. *Journal of Contemporary Asia* 43 (2), 208-225.
- Haynes, J. (1997). *Democracy and Civil Society in the Third World: Politics and New Political Movement*. Polity Press.
- Hidayat, H. (2011). *Politik Lingkungan: Pengelolaan Hutan Masa Orde Baru dan Reformasi*. Yayasan Pustaka Obor.
- Hikam, M. A. S. (1999). *Politik Kewarganegaraan: Landasan Demokratisasi Indonesia*. Erlangga.
- ICEL (6 Oktober 2020), "Berbagai Problematika dalam UU Cipta Kerja Sektor Lingkungan dan Sumber Daya Alam: Seri Analisis Indonesian Center for Environmental Law," <https://icel.or.id/wp-content/uploads/ICEL-SERI-ANALISIS-UU-CIPTA-KERJA-SEKTOR-LH-DAN-SDA-compressed.pdf>, diakses pada 25 Juni 2021.
- ICW (2020), "Pengesahan UU Cipta Kerja: Rentetan Upaya Oligarki Membajak Kebijakan Publik: Catatan Indonesia Corruption Watch 2020," https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Catatan%20ICW_UU%20Cipta%20Kerja_pdf.pdf, diakses pada 23 Juni 2021.
- ILO. (2003). *Konvensi ILO No 169 Tahun 1989 mengenai Masyarakat Hukum Adat*. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_141867.pdf, diakses pada Juni 2021.
- Jatam. (2020). *2020 Adalah Tahun Panen Ijon Politik Tambang, Kriminalisasi hingga Berujung Bencana*, <https://www.jatam.org/2020-adalah-tahun-panen-ijon-politik-tambang-kriminalisasi-hingga-berujung-bencana>, diakses pada 25 Juni 2021.
- Jong, H. (2017), "Queen of Coal named corruption suspect in Indonesia", <https://news.mongabay.com/2017/10/queen-of-coal-named-corruption-suspect-in-indonesia/>, diakses pada 23 Juni 2021
- Kementerian Pertanian. (2019). *Statistik Pertanian 2019*. Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

- KPA. (2020). *Catatan Akhir Tahun 2020 Konsorsium Pembaruan Agraria: Pandemi Covid-19 dan Perampasan Tanah Berskala Besar*. Konsorsium Pembaruan Agraria.
- KPK RI. (2019). "Nota Sintesis : Evaluasi Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam 2018", <https://www.kpk.go.id/images/pdf/LITBANG/Nota-Sintesis-Evaluasi-GNPSDA-KPK-2018-Final.pdf>, diakses pada 12 Agustus 2021
- Madjid, N. (2001). Kebebasan dan Supremasi Hukum, Dua Asas Masyarakat Madani. Dalam S. Sularto (Ed.), *Masyarakat Warga dan Pergulatan Demokrasi* (hlm. 43-54). Penerbit Buku Kompas.
- Magdoff, F & Foster, JB (2018), *Lingkungan Hidup dan Kapitalisme, Sebuah Pengantar* Marjin Kiri.
- Syahni, D., (14 Januari 2020), 'Jatam: Batubara masih jadi lokomotif, Oligarki terus bayangi sektor tambang,' <https://www.mongabay.co.id/2020/01/14/batubara-masih-jadi-lokomotif-oligarki-terus-bayangi-sektor-tambang/>, diakses pada 25 Juni 2021.
- Nurdin, I. (9 November 2020). Demokrasi dan Pengelolaan Sumber Daya Alam (Dokumen Presentasi pada FGD "Peran Masyarakat Sipil dalam Pemberdayaan Masyarakat Menuju Demokrasi Substansial" yang dilaksanakan oleh Tim Kajian Masyarakat Sipil Pusat Penelitian Politik LIPI, tidak diterbitkan).
- Nurdin, M. (2018). Akar Konflik Pertanahan di Indonesia. *Jurnal Hukum Positum*, 2(3), 126-141.
- Overland, Indra (2018). *Public Brainpower: Civil Society and Natural Resource Management*. Palgrave Macmillan.
- Permana, Y (2020). Pendekatan Ekonomi-Politik dan Mitigasi Bencana Asap di Masa Pandemi, <https://www.mongabay.co.id/2020/05/28/pendekatan-ekonomi-politik-dan-mitigasi-bencana-asap-di-masa-pandemi/>, diakses pada 23 Juni 2021
- Permana, Y. (2016). Mungkinkah Demokratisasi Sumber Daya Alam?, <http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-1/politik-lokal/1082-mungkinkah-demokratisasi-pengelolaan-sumber-daya-alam>, diakses pada 25 Juni 2021
- Prasetyo, H., & Munhanif, A. (2002). *Islam and Civil Society: Pandangan Muslim Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama and PPIM-IAIN.
- Rachman, N. F. (2013). Rantai Penjelaras Konflik-konflik Agraria yang Kronis, Sistemik dan Meluas di Indonesia. *Bhumi*, 12(37), 1-14.
- Rahmawati, D (2015), Demokrasi Dalam Genggaman Para Pemburu Rente (Studi Kasus Asahan Sumatera Utara), *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol 1, (2). <https://doi.org/10.14710/jiip.v1i2.1623>
- Rahmi, E. & Mushawirya, R, & Nuriyatman, E. (2021) Prospektif Omnibus Law Bidang Sumber Daya Alam, *Bina Hukum Lingkungan* 15(2),. 304-318.
- Rasyid, M. R. (1997). Perkembangan Pemikiran tentang Masyarakat Kewargaan: Tinjauan Teoretik. *Jurnal Ilmu Politik*, 17, 3-11
- Robison, R., & Hadiz, V. (2004). *Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in An Age of Markets*. Routledge.
- Robison, R., & Hadiz, V. (2014). The Political Economy of Oligarchy and the Reorganisation of Power in Indonesia. Dalam M. Ford & T. Pepinsky (Eds.), *Beyond Oligarchy: Wealth, Power and Contemporary Indonesian Politics* (hlm. 35-56). Cornell University.
- Safitri, H (2014). *Debottlenecking dalam Kebijakan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan dan Ekonomi Indonesia*.ARC Books.
- Saito, K. (2017). *Capital, Nature, and the Unfinished Critique of Political Economy: Karl Marx's Ecosocialism*. Monthly Review Press.
- Samsuddin, H & Gunawan, C.I & Sasmito, C. (2019), Membongkar Relasi Kekuasaan Oligarki di Kota Batu: Studi Kasus Penyalahgunaan Kekuasaan dalam Pemberian Keringanan Pajak dan Korupsi Kebijakan PT BWR, *Jurnal Ilmu Administrasi*, XVI Vol. 16 (2). DOI: <https://doi.org/10.31113/jia.v16i2.511>
- Satriani, S (2021). Bencana: Bukan Sekedar Fenomena Alam. *Nawala Lestari: Memperkuat Peran Civil Society dalam Tata Kelola Sumber Daya Alam* 1 (1), 2.
- Subagiyo, H. (ed.), (2014). *Anotasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Indonesia Center for Environmental Law/ICEL..

- Sujatmiko, I. G. (2003). Wacana 'Civil Society' di Indonesia. Dalam Burhanuddin (Ed.). *Mencari Akar Kultural Civil Society di Indonesia* (hlm. 40-56). INCIS.
- Sumardjono, M. (22 Februari 2020). RUU Cipta Kerja dan Pertanahan. Kompas.
- Suryani, Dini (2016). Structural Violation of Indigenous Human Rights in Indonesia: A Case Study of Merauke Integrated Food and Energy Estate (Mifee) in Papua, *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 18 (1), hlm. 97-108.
- Tadjoeddin, M. Z. (2007). *A Future Resource Curse in Indonesia: The Political Economy of Natural Resources, Conflict and Develoement*. Oxford: Crise Working Paper No. 35
- The Economist. (2016). The Crony Capitalism Index, https://infographics.economist.com/2016/Cronyism_index/.
- Tirto.id. (7 Oktober 2020). *Protes Omnibus Diabaikan: Hilangnya Gugatan Izin Lingkungan ke PTUN*. <https://tirto.id/protes-omnibus-diabaikan-hilangnya-gugatan-izin-lingkungan-ke-ptun-f5E1>, diakses pada 23 Juni 2021
- Tusalem, R. (2007). A Boon or a Bane? The Role of Civil Society in Third- and Fourth-Wave Democracies. *International Political Science Review*, 28(3), 361-386.
- Uhin, A. (1993). *Indonesian and 'The Third Wave of Democratisation': The Indonesian Prodemocracy Movement in a Changing World*. St. Martin's Press.
- UN. (2018). *United Nations Declaration on The Rights of Indigenous Peoples*. Retrieved June 2021, https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/wp-content/uploads/sites/19/2018/11/UNDRIP_E_web.pdf, diakses pada 25 Juni 2021
- Utomo, L. (2020). Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat Kendeng dalam Menjaga Keseimbangan Lingkungan Hidup di Tengah Pandemi Covid 19. Dalam Hermansyah (Ed.), *Bunga Rampai Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA): Peranan Masyarakat Hukum Adat Dalam Menjaga Keseimbangan Alam Ditengah Pandemi Covid 19* (hlm. 29-58). Penerbit LSHI.
- Valenzuela, A. (2004). Latin American Presidencies Interrupted. *Journal of Democracy*, 15(4), 5-19.
- WALHI. (2018). "Masa Depan Keadalian Ekologis di Tahun Politik". *Dokumen Peluncuran Tinjauan Lingkungan Hidup 2018*. WALHI
- Winters, J. (2011). *Oligarchy*. Cambridge University Press
- Winters, J. (2013), Oligarchy and Democracy in Indonesia, *Indonesia*, 96, Special Issue: Wealth, Power, and Contemporary Indonesian Politics (October 2013), . 11-33.
- Winters, J. (2014). Oligarchy and Democracy in Indonesia. Dalam M. Ford & T. Pepinsky (Eds.), *Beyond Oligarchy: Wealth, Power and Contemporary Indonesian Politics* (hlm. 11-33). Cornell University Press.

**“RUSSIAN PROPAGANDA” IN THE CONTEXT OF 2019
INDONESIAN PRESIDENTIAL ELECTION:
POLITICIZATION OF NATIONALISTIC SENTIMENTS**

**“PROPAGANDA RUSIA” DALAM KONTEKS PILPRES 2019
DI INDONESIA: POLITISASI SENTIMEN NASIONALISTIK**

Ahmad Nurcholis

Dosen Hubungan Internasional UIN Raden Intan Lampung
Jl. Letnan Kolonel H Jl. Endro Suratmin, Sukarame,
Kec. Sukarame, Kota Bandar Lampung, Lampung 35131
E-mail: ahmad.nurcholis68@gmail.com

Diterima: 4 November 2021; direvisi 17 November 2021; disetujui 27 November 2021

Abstrak

Makalah ini menguji tuduhan propaganda Rusia yang muncul sepanjang masa kampanye dalam perhelatan pemilu serentak 2019 di Indonesia. Tuduhan tersebut dipicu panasnya tensi politik selama pemilu berlangsung. Dugaan adanya propaganda Rusia pertama kali dilontarkan oleh calon petahana, Jokowi, saat menanggapi banyaknya serangan hoax dan fitnah yang diproduksi kubu lawan untuk menyerang dirinya dalam memengaruhi opini pemilih. Tuduhan Jokowi ini membuat tensi politik semakin panas. Bahkan kubu lawan menuntut Jokowi untuk meminta maaf kepada Pemerintah Rusia karena dianggap telah melontarkan pernyataan yang tidak berdasar fakta. Ketegangan semakin meningkat saat banyak media menyorot isu ini serta menyeret-nyeret perwakilan Rusia di Jakarta. Artikel ini akan menguji sejauh mana tuduhan propaganda Rusia yang muncul selama pemilu berlangsung memengaruhi hubungan antarkedua negara.

Kata Kunci: propaganda Rusia, Pemilu Presiden 2019, hoax, Jokowi

Abstract

This paper examines Russian allegations of propaganda that emerged throughout the campaign period during the 2019 simultaneous elections in Indonesia. The accusation was triggered by the heat of political tension during the election. The allegations of “Russian Propaganda” were first raised by the potential incumbent Jokowi in responding to many hoaxes and slander attacks produced by the opponents to strike him in influencing voter opinion. Jokowi’s accusation made political tension even hotter. The opposing camp demands Jokowi to apologize to the Russian government for being considered to have made a statement not based on facts. Tension had increased when many media highlighted this issue and dragged Russian representatives in Jakarta. This article examines to what extent “Russian Propaganda” accusations emerged during the election affecting the two countries’ relations.

Keywords: Russian Propaganda, Indonesian Presidential Election, hoax, Jokowi

Introduction

Simultaneous elections in Indonesia just ended in December 2020. It is called as simultaneous because this election is different from the polls that have been held before. These polls carry out for all levels of government, both at the district-provincial and national levels, to vote legislators and presidents in one day. Because of the density and brevity of time, many international monitoring institutions consider Indonesia's simultaneous election the most complex election that has been organized worldwide (CNN Indonesia, 2019). Compared to elections run in other major democracies countries, referring to the size of the country and population, such as India and USA, Indonesia election is unlike. Despite having almost a population as large, India elections last for one month, longer than Indonesia (Biswas, 2014). While the elections in America use Electronic Machine Voting system (brace) (Lin & Espinoza, 2006) so that the implementation is more efficient and modern than the elections in Indonesia, which still uses ballots.

The complex implementation of simultaneous elections in Indonesia resulted in many Polling Station Working Committee (KPPS) passing. According to data released by the Indonesian General Election Commission (KPU), the number of election officers or KPPS officers who died until April 29, 2019, was 311 people (Faridz et al., 2019). However, the number continues to increase to 440 people until May 4, 2019 (Astuti, 2019). The cause of death is primarily due to fatigue. With a high portion of the workload with the implementation of elections at all levels, the polling organizers are required to complete the ballot counting task in just one day. Many of them worked long hours, even overnight, until the next day. Overall, the system of simultaneous elections in Indonesia has been praised, but it is also criticized and encouraged to review the system for future elections.

In this paper, the mechanism of electoral work in Indonesia will not explain in detail, although several interesting issues can be elaborated, especially in the third-largest democratic country in the world. This paper

will only further highlight the electoral tensions that potentially impact the relations between Indonesia and Russia.

Election in Indonesia: An Overview

Elections, wherever they are, indeed bring warm tension to the dimensions of domestic politics and foreign policy. Even not a few of the election issues often attract intervention from other countries to get involved. The allegation of involvement of foreign countries, especially superpower countries, over the election results that run in a country was explained by Dov H. Levin. According to Levin, from 1946 through 2000, the US and the Soviet Union had been involved in one of the nine competitive elections held (Levin, 2016). Interestingly, the intervention was carried out not only through covert and confidential interventions but also operated openly. Indeed, Levin sees this overt intervention provides many benefits for candidates since overt intervening is usually done by considering the minimum risk conditions. As he said, "*I also show that overt interventions are usually more effective than covert interventions*" (Levin, 2016).

In addition, Levin also explained two conditions where significant force interventions usually occur. First, large powers will be involved if certain candidates and parties threaten their interests. Second, the existence of domestic actors who are willing to work together on the mission of the intervention (Levin, 2016). Unfortunately, any intervention performed by superpower countries could harm democracy in a country. The intervention is not suitable for continuing the post-election democracy because the state is in a foreign grip, so the democratic institutions do not work effectively. Interventions damage the joints of democracy, although the intervention is intended to change the regime to be more democratic (Levin, 2019).

In the account of Daniel Corstange and Nikolay Marinov (2012), *Taking Sides in Other People's Elections: The Polarizing Effect of Foreign Intervention*, they detail the involvement of countries such as the US, Iran, Saudi Arabia, and Syria in an attempt of their

influence in the elections at Iraq and Lebanon, or Russia suspected of involvement in electoral interference in Georgia and Ukraine, and allegations of US involvement in elections in Latin America (Corstange & Marinov, 2012). The entanglement of foreign countries in the elections in the other country is commonly aimed at strengthening or opening new alliances with candidates they are supporting until new government policies benefit the intervening state. According to Corstange and Marinov, there are many ways foreign countries do in influencing elections in a country, as they said,

“...including help with campaign logistics via funding and expertise, attempts to swing the vote directly through threats of sanctions or promises of aid, or even corrupting the electoral process itself by ignoring or contributing to abuses by their protégés” (Corstange & Marinov, 2012).

In addition, there is also a paper written by Michael Tomz and Jessica L. P. Weeks (2018) entitled *Public Opinion and Foreign Electoral Intervention* which explains that foreign country intervention impacts voter opinion. Foreign intervention can also exacerbate the friction between partisan voters and reduce trust in democratic institutions (Tomz & Weeks, 2018). This analysis is based on their latest highlights in the US elections a few years ago that many people suspected Russian involvement in influencing the election results. This news had shocked the world and invited reactions from many politicians and academics from both countries.

By presenting several pieces of literature related to foreign countries' involvement in electoral at several countries, this paper does not intend to lead the opinion that the same issue/problem happens in the Indonesia elections. This paper cannot prove through valid facts or official documents that Russia was involved in the recent Indonesian elections. Although the “Russian Propaganda” appears in electoral discourse in Indonesia, it does not mean Russia has been de facto involved in its electoral intervention. This paper wants to examine whether Joko Widodo's (Jokowi) statement about «Russian Propaganda» to accuse the

opposing camp in his campaign strategy has implications for Indonesia and Russia's relations. Jokowi's statement has become big news in the Indonesian media and has invited reactions to many people, particularly the Russian ambassador in Jakarta.

However, it should be noted, even long before Jokowi accused the opposing camp of using “Russian Propaganda”, the polarization of the emergence of Russian-related discourses was often made by several politicians in both camps. For example, the feud between the two politicians, Fadli Zon and Tsamara Amany, each representing the opposing camp and incumbent, debate about the ideal type of Indonesian leader in the future by referring to President Putin as a barometer. Alternatively, the hashtag «#cyberMuslimRussian» has recently been echoed by one of the supporters of the opposing camp and has become a trending topic on all social media platforms. This hashtag is a cyber campaign movement aimed at Muslim hackers in Russia to help monitor the course of the online vote-counting recapitulation process being run by the Indonesia election commission (KPU), where these supporters suspect indications of KPU's non-neutrality in favor of potential incumbents.

With reference to the above events, the discourse on «Russia» became a hot topic and was often politicized between time intervals both before and after the election. By taking into account the responses of Indonesia and Russia regarding this issue, this paper will examine does this issue cause Indonesian-Russian relations to be increasingly close or far. Another question is whether Jokowi's statement on “Russian Propaganda” will be a bad precedent for future relations between the two countries after the General Election Commission officially declared the election's winner. To answer these questions, this paper will be divided into several sections. The first part of this paper explains the political landscape and interest groups that fought in the 2019 simultaneous elections in Indonesia. The second part will explain the emergence of allegations of potential incumbents regarding “Russian Propaganda” and the origin of this term. The third part will

explain the history and dynamics of Indonesian-Russian relations both in global, regional, and bilateral political settings. The fourth part will examine whether these allegations impact Indonesian-Russian relations.

Indonesian Political Dynamics 2019

Approximately two years since the Jakarta governor election in 2017 is over, political tension in Indonesia is still more or less hot until 2019. Elections or regional head elections in DKI Jakarta are in the spotlight and are a melting pot for Indonesia's political landscape in the following years. The issue of religion became the best-selling issue in the contestation to reap voters in DKI Jakarta. Mosques are widely used as a place of political campaign for one of the candidate pairs. Therefore, the Jakarta regional election is arguably the starting point for the rise of Islamic populism and identity politics in Indonesia.

The election of the Jakarta governor has indeed produced an extreme dichotomy between nationalist voters and conservative Muslim voters. The nationalist voters consist of moderate Muslims, ethnic Chinese, and followers of minority religions, while many conservative Muslims are filled with hardliners, anti-tolerance, and some of them are against the Pancasila (the official ideology of the Indonesian people).¹ This dichotomy persisted until the presidential election in 2019. The background of the rise of Islamic populism in Indonesia can be traced to when Ahok, one of China's ethnic minorities who successfully led Jakarta, advanced again in the contestation of the gubernatorial elections in 2017. Regrettably, Ahok's success in building Jakarta was not accompanied by success embrace conservative Islamic groups.

¹ Pancasila is an Indonesian nation ideology consisting of five basic principles: 1) Believe in one supreme God, 2) Justice and civilized humanity, 3) The unity of Indonesia, 4) Democracy led by understanding wisdom among honorable representatives from the parliament house, 5) Social justice for all of the people of Indonesia.

Amid his candidacy as governor of Jakarta, Ahok was accused of blasphemy against Islam. This refers to the videotape that allegedly insulted the Quran verse Al-Maidah verse 51, which he did in 2016. This video was viral, circulating amid the tumultuous campaign period of the Jakarta governor's election, and succeeded in undermining Ahok's voice in the election. Several large conservative Islamic organizations such as the FPI did not stop carrying out demonstrations demanding Ahok be punished. This action attracted millions of people, not only conservative Muslim masses in the capital but also a mass of conservative Muslims from various regions throughout Indonesia. Millions of mass gathering and demonstrating in the heart of the capital city of Jakarta continuously. The protests they carry out are often held on Friday because the day is considered a glorious day for Muslims. From a series of actions executed, the "212 Islamic Defending Action" was the most phenomenal for the number of participants was claimed by the GNPf MUI (MUI Fatwa National Guard Movement), one of the action coordinating organizations, reaching seven million participants (Fransiska, 2016). This action became the second historic protest after the demonstration of President Soeharto's decline in 1998. The case ensnared him made Ahok lose the election and was sentenced guilty and must be imprisoned. According to Vedi Hadiz, an Indonesian scholar, the rise of Islamic populism in the Jakarta Pilkada was triggered by Ahok's personification of three important issues: the ethnic Tionghoa, religious opponents, and infidels (Garadian, 2017).

Two years later, after the Jakarta elections, in 2019, Indonesia was again confronted with the presidential election. The format of the election this time is different from the prior elections. The presidential election in 2019 was held simultaneously with the election of legislative candidates at all levels of government, both district, provincial and national, and regional legislative elections. The camp fought in the 2019 elections was a rematch of the 2014 election competition. However, with the pair of vice-presidential candidates, each had changed. If Jokowi paired with Jusuf Kalla in the previous election, in the 2019 election, he

was accompanied by Ma'ruf Amin, one of the leading Islamic scholars. Prabowo Subianto, who was previously accompanied by Hatta Radjasa, is now paired with Sandiaga Uno, one of the young wealthy businessmen as his deputy.

As with the 2014 presidential election, religious sentiments, identity politics, and nationalism continue to circulate even more rapidly in the 2019 elections. Various slander and hoax news attack both sides milling about on various social media platforms such as Facebook, Twitter, Instagram, and WhatsApp.

While news hoaxes inside the sentiment issue of religion and identity politics have been explained, the hoax alludes to nationalistic sentiments also sells well in leading public opinion. For example, the issue of the rise communist party and the issue of foreign powers' support often attack Jokowi rather than his rival. Even this has been an old issue since the 2014 election, Jokowi is often associated with the rise of communism and foreign stooges. Political opponents continuously played these issues until Jokowi served as president. Therefore, when compared, slander and hoax news directed to Jokowi can be said to have a far more significant political impact than his challenger, Prabowo Subianto. It has a significant impact because the slander was undertaken repeatedly and had begun since his leadership as president or before the political season began. These hoax news more or less influenced the perception of voters towards him. As for news of hoaxes and political attacks on Prabowo Subianto began to be crowded only during the political campaign.

Some configurations of slander and lie attacks directed to Jokowi as a whole include: Jokowi a foreign stooge, Jokowi a communist, Jokowi pro legalizing free sex, Jokowi will abolish religious lessons from the education curriculum, Jokowi pro legalize same-sex marriage, and Jokowi will ban the "adzan", calling to Muslim prayer (Tanjung, 2019). The frame of attack towards Jokowi is more dimensionless in religious sentiment than nationalistic sentiments. In comparison, the attacks launched on Prabowo Subianto revolved more around the issues of human rights violations that Prabowo had carried out

in the past. As a former soldier of the Republic of Indonesia, Prabowo allegedly kidnapped several activists during the May 1998 riots.

However, if it is examined comprehensively, religious sentiment remains above the sentiment of nationalism. I argue there are two important factors why religious sentiments sell well in the 2019 elections compared to nationalist sentiments, regardless of the dominance of Muslim voters in Indonesia. However, this does not mean the sentiments of nationalism do not sell at all in Indonesian elections. The sentiments of nationalism are still selling well, but the flow is not as easy as the religious sentiment. The reason is, first, this is the aftermath of the Jakarta Pilkada (regional election), which has just ended a few years ago, and second, the emergence of perceptions in some Indonesian Islamic circles that the Jokowi government is against Islam. This perception refers to the banning of hardline Islamic organizations such as Hizbut-Tahrir Indonesia², and the widespread perception of attempts to criminalize ulama by the government, referring to the case of Habib Rizieq³, an influential elite in the organization of the Islamic Defenders Front, who is currently becoming a fugitive of Indonesian police due to his central role in mobilizing the demonstrators in "the 212 action".

Therefore, voter convergence in the 2019 election remains the same, referring to two large voter groups, between nationalists on Jokowi's side and conservative Muslims on Prabowo's side. This reason then became Jokowi's consideration to collaborate with prominent Islamic leader Ma'ruf Amin to accompany him. The urge to appoint Maruf Amin as his deputy was because Ma'ruf's position was considered capable of reducing the vile slander with religious nuances towards Jokowi. Since Ma'ruf Amin himself is one of the crucial figures

² An Islamic organization that has international affiliation in various countries and aspires to replace the democratic system with the Islamic caliphate system.

³ Habib Rizieq is one of the most influential people in the organization of the Islamic Defenders Front, a conservative Islamic organization that aims to save the dignity of Muslims and uphold the amar maruf nahi munkar (Tirto.id, 2016).

to defend Islam 212. Although Jokowi was rumored to be appointing Mahfud MD, one of the moderate Muslims, prominent legal experts, and political activists as his representatives, the plan failed to be realized.

“Russian Propaganda” in the Context of Indonesian Election

The emergence of “Russian Propaganda” accusations in the context of Indonesia elections was first raised by candidate incumbent Jokowi while touring several locations in mass pockets in several cities in Indonesia. He pointed out the successful team of Prabowo Subianto using “Russian Propaganda” in their campaign strategy. This accusation became a scene in various media reports and made domestic political tension hotter. This is because the public space is now filled with the suspicion that foreign forces are playing and involved in supporting the opposing team. Whether Jokowi’s winning team takes this accusation into account, we will examine it later based on several facts found.

However, the public’s suspicion of this accusation did not stand alone. Other accusations reinforce these allegations, such as Prabowo’s team used the same political consultant as Donald Trump and a political strategist from Russia who worked for his team. Such accusations have more or less succeeded in constructing public perceptions, as the case of Russian involvement in US elections has also recently occurred. The people’s memory regarding the case is still warm and has not disappeared. Apart from the truth of the allegations, this paper argues that Jokowi’s team allegations are intended to fortify Jokowi’s patriotic and nationalistic feelings which are often attacked, as well as to fight the stamp of “foreign stooge” on him.

Jokowi’s accusations and his team, which triggered the emergence of public prejudice over Russian interference in politics in Indonesia, seemed very reasonable. Since a similar case is still warm, it has become a scene and has just been experienced by American elections a few years ago. Many American politicians at that time suspected Russia was involved in winning

the elected president, Donald Trump. According to a Reuters / Ipsos poll survey, as many as 55 percent of American adults, including 51 percent of the Republicans and 65 percent of Democrats, believe Russia is involved in the succession efforts of leadership in America (Wise, 2016). With this fact, it is only natural that the alleged interference of Russia in the presidential election returned to the elections in Indonesia, especially when connecting this moment with the fact that Indonesia’s economic development is getting better. Not to mention that Indonesia is predicted to be ranked fourth globally as the biggest producer of GDP in 2050 based on the calculation method of Purchasing Power Parity under China, India, and America (PwC, 2017) and Indonesia’s central role in ASEAN and the Asia-Pacific region. With this background, it is not impossible for Indonesia to become an object of various interests and foreign powers to interfere.

It seems normal if a country with abundant natural wealth will always be the target of domination by superpower countries. One of these can be viewed from the writings of John Perkins (2005), *Confessions of an Economic Hit* which tells how the US is involved in mastering natural resources in other countries through various means, notably, if the country is politically unstable. Although Indonesia has succeeded in passing through periods of political transition towards a democratic state, starting with the reformation in 1998, the process of democratic consolidation in Indonesia is still tinged with bursts of political sentiment by utilizing ethnic and religious issues. Trauma and imagination of Indonesia’s break up into small countries like the Soviet Union in the past are still envisaged. Since the initial days of reform, many regions have wanted to break away from the Republic of Indonesia. In this crisis period, Indonesia loses Timor Leste, which has successfully separated itself and is now a sovereign country.

The issue of “Russian Propaganda” thrown by Jokowi has added to this concern. Nevertheless, Jokowi’s statement does seem ambiguous. On the one hand, Jokowi’s government had a lot of cooperation and

close relations with the Russian government, such as purchasing 11 Sukhoi aircraft through national commodity barter (Erdianto, 2017). It does not make sense if Jokowi attacks his political opponents to sacrifice his interests in such cooperation. The most logical answer is that Jokowi wants to portray himself as a true nationalist patriotic while accompanying opinions that the opposing party is in the opposite position. So far, Jokowi has often been accused of being exposed to hoaxes that doubt his nationalistic attitude. These allegations, for example, Jokowi, a foreign stooge (accomplice of a foreign party), and Jokowi are Chinese henchmen, are intended to cover up the disappointment of some Indonesians for the rise of Chinese investors and workers who fulfill Indonesian employment field. Videos related to Chinese workers working in Indonesia are increasingly afloat and are a hot conversation among the people. Not a few residents were provoked and agreed that Jokowi was a Chinese stooge.

For this reason, this section will give a brief explanation to answer at least two of these questions: why is Jokowi dragging “Russian Propaganda” to describe the opposing team’s campaign strategy? Is this just a statement of spontaneity without intention or fruit of the mature political calculations of Jokowi’s winning team?

Based on research in various prominent media reports in Indonesia, Jokowi’s accusations against Prabowo Subianto regarding “Russian Propaganda” have been echoed twice. It was first stated when he attended the campaign agenda in Surabaya, East Java, on February 2, 2019. In front of his supporters, Jokowi said,

“The problem is, there is a successful team that prepares propaganda, which is called Russian propaganda, which always bursts out slander, false blast, hoax bursts, this must be immediately corrected by you all as intellectuals” (Bhaskara, 2019).

This statement is followed by the second statement on February 3, 2019. When attending a camping activity in Karang Anyer, Central Java, Jokowi said,

“..... as I said, Russian propaganda theory is like that. Spouting falsehood as much as possible, spouting as many lies as possible, spouting hoaxes as much as possible so that the people, the community becomes doubtful” (Saleh et al., 2019).

Although Jokowi does not explicitly mention the Prabowo camp in his statement, it leads to them because this election leaves only two candidate pairs who fight.

A few days later, Jokowi’s accusations became a wild ball rolling in the middle of public opinion and used by his political opponents to counterattack and fight the Indonesian government with the Russian government. Various responses arrived from the Russian embassy in Indonesia, academics, to politicians’ debates in both camps. Although later, there was a clarification after a while, both from Jokowi and the Jokowi winning team. They realized the statement could disrupt relations between the two countries. Therefore, Jokowi hastily clarified that the statement was not intended to accuse Russian involvement in the political process in Indonesia. Jokowi explained that the term “Russian Propaganda” which he addressed to his political opponents, was purely referring to the discourse of academic theory in a paper entitled *The Russian “Firehose of Falsehood” Propaganda Model: Why It Might Work and Options to Counter It*. The paper was published by RAND Corporation, a think tank institution and global policy analyst in the US (CNN Indonesia, 2019).

According to Jokowi, the paper describes the community’s psychological condition, which in the end will believe in slander and lies because it is carried out continuously, constantly, and for a long time. What Jokowi delivered was based on facts. Refers to a survey released by SMRC (Saeful Mujani Research Consultant), a credible political consulting institution in Indonesia, in 2017, out of 1,220 respondents who were used as survey samples, 5.1 percent (Taufiqqurahman, 2017) of them believed that Jokowi had links with the Indonesian Communist Party or PKI⁴

⁴The Indonesian Communist Party or PKI is one of the oldest and largest parties of its time. Being the largest communist party in the world after the communist

(although in fact, the PKI has become a banned party in Indonesia). Meanwhile, based on a survey conducted by Indo Barometer through a sample survey of 1,200 respondents spread across 34 provinces in Indonesia between 6 to February 12, 2019, found at least 10.9 percent of the community believed and 51.1 percent did not believe that Jokowi was a foreign stooge (Putra, 2019). Although the two surveys above show a not too significant number, these issues remain dangerous if they are not taken seriously.

Thus, even though it is true Jokowi's statement did not intend to attract Russia in domestic political contestation, as he stated: *"Again, this is not our country's business, Indonesia and Russia. No. I am with President Putin very, very well connected"* (Jordan, 2019), then why did Jokowi put the risk on his attitude. Despite no specific terminology from the statement that directly indicates Moscow's involvement in the case of politics in Indonesia, the meaning of "Russian Propaganda" remains terrible. It is interpreted as a strategy to attack and bring down political opponents in devious ways. However, as mentioned earlier, based on the facts and various lies directed at Jokowi, this attitude was taken by Jokowi to guard his nationalistic sentiments. Jokowi wants to be portrayed as a true nationalist. Jokowi is not a foreign stooge, but instead, on the contrary.

This is confirmed by other facts, such as allegations concerning the opposing team using foreign consultants as a political think tank. As alleged by Ace Hasan Syadzily, the spokesman for Jokowi's winning team, he accused Prabowo-Sandiaga of using political consultancy that Donald Trump has been used. He also suspected that the opposing team used political consultants from Russia, *"Besides using foreign consultants who also won Donald Trump, there was strong suspicion that candidate pair 02 also uses foreign consultants from Russia"* (Retaduari, 2019). Alternatively, the imputation of Benny

party in the Soviet Union and China. In the 1955 elections, the PKI was ranked fourth as the largest mass party in Indonesia respectively after the PNI Party, Masyumi Party, and NU Party. Unfortunately, during the New Order under Soeharto's leadership, this party began to be banned and many of their members were killed by the regime.

Ramdhani, Director of the National Campaign Team, who pointed out the number of hoaxes in the current election because the opposing team used the same political consultant as the Donald Trump so that the phenomenon of hoax attacks in Indonesia was almost similar as the US presidential election several years ago (JawaPos.com, 2018).

Although all of these allegations are limited, the accusation the Prabowo team is using a political consultant Donald Trump is reinforced by the fact that Prabowo once delivered a political slogan «make Indonesia great again,» alike with Donald Trump's political slogan at a national working meeting in an Islamic organization. Prabowo argued that long before Trump popularized the concept, he had already had the notion of a glorious Indonesia:

"The idea of restoring the glory of Indonesia is not spontaneity has emerged lately. Long before US President Donald Trump popularized the slogan "Make America Great Again", (thank God as part of the struggle for ideas and thoughts) I had written that thought into a book that I titled "Return Indonesia" in 2004 and "Rebuild Indonesia Raya" in 2007/2008. A lot of thought and enthusiasm is based on a spirit that has been embedded since 73 years ago when the nation's founders formulated the ideals of Indonesian independence. And the dream is very expensive, redeemed with blood and tears" (Ibrahim, 2018).

I argue the accusation of "Russian Propaganda" to the opposing team is a strategy to shift the issue of the Jokowi team to keep the hoax from smelling foreign sentiments against him. Evidently, after this news was exciting, there were talks between representatives of the two governments. The talks between the two parties between the representatives of the Indonesian government and the Russian embassy implied that Jokowi's seriousness in his statement was not intended to damage relations between the two countries that were so good (Jaramaya, 2019). Indeed, days after Jokowi issued "Russian Propaganda" terms, the resistance from the opponents was getting louder. Saleh Daulay, a politician and one of the Prabowo team debaters, demanded Jokowi apologize to the Russian government.

“At this point, the National Campaign Team (Jokowi) should apologize. Apologize to Russia and, of course, also apologize to the BPN Team (Prabowo Team). This contestation must be properly guarded and dignified. Not recriminating without basis and valid proof” (Retaduari, 2019).

The Russian embassy in Jakarta also undertook the response. The Russian ambassador in Indonesia, Lyudmila Georgievna Vorobieva, expressed disappointment and strongly rejected Jokowi’s “Russian Propaganda” terms. In a statement of her position, she said: “We underline that Russia’s principal position is not to intervene in domestic affairs and electoral processes in foreign countries, including Indonesia, which is our close friend and important partner (Nurita, 2019).” She also argued that “Russian Propaganda” was only political engineering made by America.

The “Russian Propaganda” meant by Jokowi indeed refers to the RAND Corporation article. This article explains that “Russian Propaganda” is a way to influence the target with a variety of confusing things, so the target unconsciously acts according to the will and interests of the propagandist. This method was launched by the Soviet Union during the cold war and again modified by Russia when it annexed the Crimea peninsula in 2014. This propaganda is known as “the firehose of falsehood” and has two essential things. First, the number of channels (media) and messages is unstoppable, and secondly, the lies are displayed vulgarly without cover. In the contemporary era, this propaganda has four characteristics: 1). High-volume and multichannel, 2). Rapid, continuous, and repetitive, 3). Lacks commitment to objective reality, 4). Lacks commitment to consistency (Paul & Matthews, 2016). The nature of propaganda like this is indeed difficult to stop, and even a statement appeared in that paper: “*don’t expect to counter the firehose of falsehood with the squirt gun of truth*” (Paul & Matthews, 2016). However, as written in the paper, there is still a way to stop it all. As quoted from Lewandowsky’s writing, these methods include (1) warnings at the time of initial exposure to misinformation, (2) repetition of the retraction or refutation, and (3)

corrections that provide an alternative story to help fill the resulting gap in understanding when false “facts” are removed (Paul & Matthews, 2016).

Long Days Before “Russian Propaganda” Issues

Although Jokowi’s statement did not significantly impact the relations between the two countries, the Russian ambassador says Russian-Indonesian relations were fine. This was confirmed after clarification from both Jokowi himself and after talks between official representatives of the Indonesian government and the Russian embassy as well as also reported by one of the Indonesian media, Republika, who stated,

“Vorobieva understands, the condition of every country that will hold elections is always heating up, and can trigger emotions. Thus many words may be wrong” (Jaramaya, 2019).

However, in the future, crucial issues involving relations between countries should be avoided in political campaigns to gain votes from the masses because the case of “Russian Propaganda” is not the first case in the context of Indonesian politics that sparked the reaction of the Russian government.

A similar case occurred on 30 March 2018 during a debate between politicians from both camps before the election occurred. The case began when Fadli Zon, a Gerindra Party politician and one of Prabowo’s trusted people, updated his Twitter status:

“If you want to get up and prosper, Indonesia needs a leader like Vladimir Putin: brave, visionary, intelligent, authoritative, not a lot of debt, no ‘planga-plongo’” (Rochmanuddin, 2018).

This status was directed to President Jokowi. The term «planga-plongo» is a shot that is often used by the opposition to insinuate the Jokowi leadership style, which is not as fragile as the presidents who come from the military world as the previous president, Susilo Bambang Yudhoyono. Jokowi himself is a civilian, a former wood furniture entrepreneur with a brilliant political career.

Fadli Zon's satire was answered by Jokowi's political sympathizer and politician of the Indonesian Solidarity Party, Tsamara Amany. In a short video, Tsamara revealed,

"Putin is not an example for a good leader. He silenced opposition and the press in Russia. In Russia, there is no freedom of aspiration like in Indonesia. Even there, corrupt practices are left unchecked. If we look at the corruption perception index, Indonesia is far above Russia. Well, if you already know that, are you sure that such people could be used as leadership standards? If you ask me, I do not want such a leader in Indonesia" (Ariefana & Raharjo, 2018).

The debate grew hot and received a response from Russian state media and the Russian ambassador in Indonesia. Even the threat of worsening bilateral relations between the two countries is spread on mass media news. Gerindra Party politician, Sudaryono, the government opposition party, asked Jokowi through the foreign ministry to reprimand PSI for apologizing to the Russian government and Putin (JawaPos.com, 2018).

Tsamara's statement also drew a response from the Russian government media, Russia Beyond The Headlines Indonesia (RBTH Indonesia), a media controlled by the Kremlin that aims to provide a comprehensive understanding of Russia to the world (Dzaki, 2018). The media commented on Tsamara's statement and called her a superficial politician:

"We think there is a misunderstanding here about your knowledge of politics and even the press system in Russia. This is very unfortunate. We don't defend anyone, including Fadli Zon or even President Putin. However, your statement about our country, that in Russia there is no freedom of aspiration like in Indonesia, this shows the shallowness of insight. Your statement is also very unfortunate because the relationship between the two countries is very good. You might disagree with Fadli Zon, but your statement as a young politician really shows immaturity. We think you need more research about our country. If there are Indonesian politicians who idolize our leaders, what can we do? Clearly, you can always also discuss with us, the Russian Embassy in Indonesia or the Russian Cultural Center to know more about our country. About

corruption, there is corruption in Russia, and yes, big - that's true. Our rating is below Indonesia, that is also true. However, that does not mean we do not fight corruption and just leave it as you say. Did you know in Russia there were mass arrests of officials during post-Soviet history? Russia has sentenced 8,800 Russian civil servants to corruption cases (within one year). Many? Yes, of course. But that does not mean we allow it at all. We see, you have a career that is on the rise. Therefore, we hope you can be wiser in the future when commenting on other countries, especially if your knowledge of the country is very minimal" (Ariefana & Raharjo, 2018).

Tsamara insisted that her statement was based on facts. According to her, the data was taken from credible institutions, such as The Economist and Transparency International (Putranto, 2018). Finally, RBTH Indonesia asked the Russian ambassador to invite Tsamara to hold a joint dialogue and clarify her statement at a press conference, but she could not attend (Putranto, 2018). The second meeting took place on April 11, 2018, where the representative of the Russian embassy, Sergey Drobyshevskiy, came directly to the office of the Indonesian Solidarity Party. According to Sergey, the polemic involving Tsamara and Russia was only a misunderstanding. The real polemic occurred between PSI and Fadli Zon. Russia did not interfere in this matter.

"In my opinion, I do not want to make political comments in Indonesia, as Tsamara has said it is a matter of word play between PSI and Gerindra. So it's certain that the name of my president (Putin) is very exploited, not only in Indonesia, but in other countries" (Irwinsyah et al., 2018).

Although tension can be managed well, such matters can be a bad precedent for the relations between Indonesia and Russia in the future. Given that the relationship between the two governments is getting better and better in all aspects, of course, above statements can ignite a fire in the chaff that could impact the deterioration of relations between the two countries.

History of Indonesian-Russian Relations

Indonesia-Russia relations are intertwined since Russia was still under the Soviet Union. The relationship between them was extraordinary. The Soviet Union was the first country to oppose the Dutch occupation after Indonesia claimed its independence in the UN session in 1946 (Sandi, 2014). The Soviet Union's condemnation of the Dutch violating the constitutional rights of Indonesian independence received support from many countries. Similar criticism then began to arrive from various countries such as India under the command of Jawaharlal Nehru and several other countries (Hartanto, 2016). Finally, the last round of Dutch colonization of Indonesia ended in 1949 through tough negotiations known as "round table conferences" (Pratama, 2018).

The history of the Soviet-Indonesian diplomatic relations was officially opened in 1950, a few months after Soviet Union foreign minister Andrei Vyshinsky sent a telegram to the Indonesian Prime Minister, Mohammad Hatta. The contents of the telegram are as follows:

"On behalf of the government of the Soviet Union, I kindly inform you, since the recognition of the sovereignty of the Republic of Indonesia on December 27, 1949, in The Hague, the Dutch government decided to recognize the sovereignty and independence of the Republic of Indonesia and establish diplomatic relations with Indonesia" (Isnaeni, 2010).

Hatta answered the telegram on February 3, 1950, one day before the cabinet meeting was held to discuss the letter. The principal of the Hatta reply was that Indonesia was ready to establish diplomatic relations with the Soviet Union (Isnaeni, 2010).

"Judging appropriately by the decision, I, on behalf of the Government of the Republic of Indonesia United with great respect, informed that we valued the recognition highly. My government is always open to the start of talks on the realization of diplomatic relations" (Sandi, 2014).

The recognition of the Soviet Union for Indonesian independence became a news

headline in various media in Indonesia (Sandi, 2014). The correspondence between the two countries was intensified to ensure the placement of representatives of diplomats in each country. On February 15, 1950, the Soviet Union government sent a telegram again:

"There are two ways to hold talks, namely whether you send your representatives, or we send our representatives to you. We agree with both ways and we want to know which is more pleasing to you? Our party agreed to both."

The telegram was then answered by Hatta:

"with satisfaction, we conveyed that we accepted your proposal. We will send our representatives to hold negotiations. Regarding the date and composition of the delegation, we will notify you later by telegram" (Sandi, 2014).

The establishment of diplomatic relations further strengthens the cooperation ties between the two countries in all conditions. The familiarity of the two countries can also be seen through a photo depicting Soekarno, the President of Indonesia, and Nikita Khrushchev, the President of the Soviet Union, smoking together. In the photo, Sukarno appeared to be thrusting the fire of his cigarette into Khrushchev's cigarette. Even at one time, Khrushchev and his group had spent two weeks visiting Indonesia. Khrushchev went to visit various cities in Indonesia such as Jakarta, Bogor, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, and Bali (Maulida, 2018).

The intimacy of Soekarno and Khrushchev also manifests in various collaborations. As a strong country, the Soviet Union helped Indonesia with the war equipment. Until the 1960s, Indonesia was still trying to liberate West Irian from the grip of the Netherlands. The Netherlands still did not recognize West Irian as a part of Indonesia's territories. In order to end the Dutch occupation of Irian, President Soekarno requested support from Nikita Khrushchev to free West Irian. Most of the Indonesian war equipment at that time arrived from the Soviet Union, including one cruiser, 14 destroyers, eight diving anti-patrol boats, 20 missile ships, several motorized torpedo boats, and Meriam boats, several armored vehicles

and amphibians, helicopter, and Tupolev Tu-16 bombers equipped with the AS-1 Kennel / KS-1 Kome anti-missile missile (Haryadi, 2017).

With the modern war equipment from the Soviet Union, Indonesia's confidence in facing Dutch confrontation is increasing, but this also resulted in increased tensions between Indonesia and the Netherlands, such as the war in the Arafura Sea between the two navies. Seeing the heated situation and the political closeness between Indonesia and the Soviet Union, as well as the emergence of fears of a bigger war, the US under John Kennedy finally pressured the Netherlands to end its colonialization in West Irian (Danudoro, 2016) and hand over West Irian affairs to the UN Assembly. This Soviet military assistance has also made Indonesia the most important and strongest military force in Southeast Asia (Danudoro, 2016).

Two factors affect the intimate relationship between the Soviet Union and Indonesia at that time. First, Soekarno's ideological orientation was more left-leaning since he was anti-colonialism, imperialism, and capitalism. Second, the existence of PKI (Communist Party of Indonesia). PKI has a special relationship with the Kremlin and a massive mass. Furthermore, PKI is the third-largest communist party in the world after the communist party of the Soviet Union and the Communist Party of China (Heriyanto, 2017). These two factors made Indonesian-Soviet union relations had become more fluid.

Unfortunately, this relationship ended after Suharto ousted Sukarno from the presidency, which was preceded by a series of issues of the coup. The PKI was accused of being behind the incident. Moscow reacted by criticizing the PKI because it was considered to become too pro-Beijing, leaning more towards Mao Zedong's ideas than Marxist-Leninist ideas and notions (Danudoro, 2016). Soeharto, who took power, carried out the cleansing of people who were considered members of the communists since 1965. He carried out massacres of PKI members. After that, relations with the Soviets were frozen. New relations were opened in 1990 after communists collapsed in the Soviet Union. Indonesia's relations with Russia only

began to increase again during the time of President Megawati. In Megawati's period, Indonesia made a massive purchase of two Sukhoi Suu-27SK fighter jets, two SU-30MK versions, and two Mi-35 helicopters (Mantolas, 2016). The reason for buying warplanes from Russia was because Indonesia experienced an arms embargo by the United States from 1995 to 2005 (Sofwan, 2018). The US considered Indonesia had committed human rights violations during the Santa Cruz massacre in East Timor in November 1991, so Russia was another choice to keep modernizing Indonesian combat equipment (Buszynski, 2006).

Megawati's period became a turning point for Indonesia-Russia relations. Various steps in political, economic, military, and security cooperation were run (Yustiningrum, 2011). Furthermore, the relations between the two countries have increased during the presidency of Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), where the two countries collaborate in the defense and economic fields. The trade balance between the two countries in 2005 reached 680 million US dollars, up from the original 480 million US dollars in 2004. President SBY also encouraged Russian entrepreneurs to invest in Indonesia (Mantolas, 2016). SBY and Putin's closeness was also recorded when SBY welcomed Putin with guitar passages and the 61st happy birthday song at the 2013 APEC Summit in Bali (Detik News, 2013).

During President Jokowi's period, the cooperation between Indonesia and Russia was increasingly opened in all sectors. According to the trading volume in 2017, the figure reached 2.5 billion US dollars. Moreover, Jokowi announced that the figure would increase to US \$ 5 billion in 2020. Jokowi also asked Putin's support to help Indonesia export crude palm oil (CPO), which is often viewed negatively by the European Union (Farras, 2018). In addition, Russia also committed to investing 25 billion US dollars in Indonesia (Berita Moneter, 2019).

Since 2010, Russia has had a clear commitment to Asian countries, especially Southeast Asia, after China. Under Putin, Russia declared "Turn to the East," which essentially wanted to be more intimate in carrying out

economic, political, and security cooperation with countries in the region. There are several factors why Russia took this step. Apart from the relations with the West that were heating up due to the annexation of Crimea by Moscow, which resulting in the economic sanctions by the US and the European Union, Asia is considered a strategic economic region with rapid development (Storey, 2015). However, this pivot to the Asia Pacific is not a new thing in Russian foreign policy, this has long been confirmed in the speech of Mikhael Gorbachev at “Vladivostok” in 1986:

“The Soviet Union is also an Asian and Pacific country ... We are ready to expand our ties with Indonesia ... the Philippines, Thailand, Malaysia, Singapore, [and] Brunei ... all young and independent participants in the political life of the region” (Tsvetov, 2016).

In addition, the focus on the Asia-Pacific is also another way for Russia to remain aligned as an influential country amid the acceleration of the countries in the region as the center of the economy and global security (Mankoff, 2015).

Impact of “Russian Propaganda”

Looking at the close relations between Indonesia and Russia, it is unfortunate if the relationship suddenly breaks down due to trivial negligence. The issue of accusations of Russian involvement in Indonesian elections triggered by Jokowi’s multi-interpretation statement certainly has harmed Russia’s image globally. Moreover, similar issues are still warm in memory when US elections took place several years ago. So far, there has been no significant reaction from the Putin government. However, if a similar incident continues, there is a possibility that Russia will take more decisive action.

This paper argues that the Russian government takes no decisive step because Russia still considers Indonesia an influential country in the Asia-Pacific region. This is primarily when referring to Russia’s relations with the West and some EU countries that are unstable after the Crimea case, as described above. Therefore, Russia needs to maintain harmony with the Asia-Pacific countries,

especially Indonesia, to maintain its image as a superpower country, after China and USA. Igniting the flames of hostility with Indonesia will further complicate Russia’s image in global political relations. Let alone the Asia-Pacific region is currently the most developed economic region in the world and is predicted to become the most critical zone in the future. In this sense, leaving this region will further harm Russia.

Regarding “Russian Propaganda” issue, Jokowi himself said his relationship with Putin was still good, *“I have a very good relationship with President Putin”* (Indopos, 2019). Besides, the response of the Russian embassy in Jakarta did not apply it as a serious matter. Although the Russian ambassador stressed the need for caution from the political elite when addressing issues relating to other countries,

“I think this issue will not affect bilateral relations (both countries), I hope so. So far, the relations between the two countries have been very good, and I don’t see the reason for this relationship going in the opposite direction, We think this problem is over. Everything is clear. We will not take any official steps after this” (Indopos, 2019).

According to information from the Indonesian ambassador in Russia, Wahid Supriyadi, Putin is still planning his visit to Indonesia in 2019. This agenda was a reciprocal visit when Jokowi visited Russia in 2016. Regarding Putin’s arrival in Indonesia, it had been planned for a long time but was postponed several times. As Supriyadi said

“there are no obstacles, it is only a matter of time. They also understand that we are in a general election period. In fact (Putin’s visit) there will be something big, including improving relations to strategic relations” (Maulana, 2019).

Although the issue of “Russian Propaganda” did not have a significant impact on relations between the two countries, it was different from what happened in the domestic political situation. The practice of throwing negative issues or black campaigns at each other - not even just a matter of the “Russian Propaganda”- has persisted until the election is over. As a result, the political polarization

of the two camps has unavoidable escalated. Furthermore, such negative campaigns still exist even after the new government comes to power. The grudges between the camps seem to be ingrained. Hatred is already stuck and difficult to recover. The election candidacy that only provides two rivalries holds harmful excesses that were previously unimaginable. For that matter, the tendency of campaigning in the election frame, which only provides two candidates, is indeed more dominated by negative campaigns than campaigns for competing programs and comprehensive policies. The rules that minimized the occurrence of negative campaigns were ignored due to the heated tension consequence that comes from only two-way rivalry. The sharp picture of the rivalry was recorded, for example, when the KPU announced the winner of the history of the first simultaneous general election held. At the end of the recapitulation of the vote count, Prabowo's camp rejected the official results announced by the KPU. They consider that there has been a structured, systematic, and massive fraud in the election's implementation, so it is difficult to accept defeat gracefully.

Once again, the 2019 election still has enormous homework for Indonesia's democratic journey ahead. It is not only the issue of the readiness of the election infrastructure from a not simultaneous to simultaneous transition that has resulted in the death of much electoral personnel, but also other substantial issues in order to minimize sharp frictions through negative campaigns which, if left unchecked, could disrupt the nation's integration. Moreover, the power of politics is very vulnerable to being manipulated by certain political elites. This image of a friction-laden identity political rivalry will persist in the future if the KPU, Bawaslu, and other election officials are not firm in taking action against all harmful campaigning practices that occur, especially if the election stage is only filled with two competing candidates.

Conclusion

The history of foreign countries' involvement in interfering with the elections in certain countries is a common phenomenon that has occurred since the cold war era. The reasons behind it are also varied, starting from the struggle for influence to the spread of ideology. In the context of the Indonesian presidential elections in 2019, we have witnessed a similar issue. The suspicion of the community suddenly appeared to indicate the existence of foreign support involvement in the pair side of Prabowo Subianto - Sandiaga Uno. This foreign country referred to point to Russia. It began after Jokowi, the strongest candidate for presidential candidates, accused the opposing team, Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, of using "Russian Propaganda" in their campaign strategy. This accusation refers to the rampant lies that filled the social media room during the election campaign in Indonesia. Jokowi's statement was motivated by his feeling of becoming a victim of the scattered hoax waves launched by the opposing team. Since the 2014 election, Jokowi has often been associated with hoax news about the rise of communism and foreign henchmen. Political opponents continuously played these issues until Jokowi served as president.

The Jokowi's interpretation of "Russian Propaganda" became ambiguous in public as they assumed Russia was involved in Indonesia's election. Moreover, the public's suspicion of this accusation did not stand alone. These allegations were also reinforced by other accusations, such as Prabowo's team used the same political consultant as Donald Trump, and there was a political strategist from Russia who worked for his team. Several politicians in Jokowi's camp stated these indictments. Such accusations have more or less succeeded in constructing public perceptions, as the case of Russian complicity in US elections has also recently occurred. The people's memory regarding the case is still warm and has not disappeared. Ultimately, the degree of public trust in allegations of Russian intervention is increasing.

Ultimately, this accusation received a strong reaction from Russian representatives in Jakarta. Jokowi then clarified that his

statement about “Russian Propaganda” was purely pointing to academic discourse, referring to a paper issued by the RAND Corporation entitled *The Russian “Firehose of Falsehood” Propaganda Model: Why It Might Work and Options to Counter It*. According to Jokowi, the paper describes the community’s psychological condition, which in the end will believe in slander, falsehood, and lies because it is carried out continuously, constantly, and for a long time. He said,

“... as I said, Russian propaganda theory like that. Spout falsehood as much as possible, spout as many lies as possible, spout hoaxes as much as possible so that the people, public becomes doubtful” (Saleh et al., 2019).

Conforming to this statement is a paper written by Christopher Paul and Miriam Matthews, saying that “Russian Propaganda” is a way to influence the public with a variety of confusing propositions in order to make the public unconsciously acts in accordance with the wishes and interests of the propagandist. The Soviet Union launched the “Russian Propaganda” method during the cold war and was then modified by Russia when it annexed the Crimea peninsula in 2014. This propaganda is known as “the firehose of falsehood” with two important things: First, the number of channels (media) and messages is unstoppable, and second, the lies are displayed vulgarly without cover. In the contemporary era, this propaganda has four characteristics: 1). High-volume and multichannel, 2). Rapid, continuous, and repetitive, 3). Lacks commitment to objective reality, 4). Lacks commitment to consistency

Apart from the truth of the allegations, this paper argues that Jokowi’s accusation to his opponents about using “Russian Propaganda” is a political strategy to form a nationalistic and patriotic image of his existence in the 2019 election. Jokowi wanted to be portrayed as a true nationalist while fighting the ‘foreign stooge’ issue, which was often addressed to him while accompanying opinions that the opposing party was in the opposite position. As for a reason behind the Russian government’s indecisive responses to Jokowi’s accusation, this paper argues that Russia still considers Indonesia

influential in Asia-Pacific region. Mainly when referring to Russia’s relations with the West and some EU countries, which are unstable after the Crimea case. Consequently, Russia needs to maintain harmony with the Asia-Pacific countries, particularly Indonesia.

Despite the impact of relations between Indonesia and Russia, the use of “Russian propaganda” in Indonesian elections has caused extreme cleavage, dividing the electorate groups in Indonesia between nationalist and conservative Muslim voters. Emergence of many intolerant groups in Indonesia are contributed by this phenomenon. Indeed, “Russian Propaganda” is a phenomenon commonly encountered since the 2014 presidential election and continues in the 2017 elections in Jakarta. Nationalist voters include moderate Muslims, ethnic Chinese, and followers of minority religions, while conservative Muslims are filled with hardliners, anti-tolerance, and some of them are against the Pancasila. This is certainly hazardous for Indonesian democracy survival in the future. Albeit Indonesia has succeeded in going through periods of political transition towards democratic consolidation, the situation is still tinged with explosions of political, ethnic, and religious sentiments, which are very worrying. This situation remained the same as before when the democratic tap opened in 1998. The rise of hate speech spread in the community, the threats to minorities, and the efforts to delegitimize democratic institutions by certain groups are the effects of “Russian Propaganda”, and those problems have become the stake of Indonesian democracy in the future.

References

- Ariefana, P. and Dwi B. R. (11 April 2018). Pasca Hina Putin, Ini Suasana Diskusi Tsamara dan Kedubes Rusia (After mocking Putin, this is the discussion atmosphere between Tsamara and the Russian Embassy). *Suara.com*. <https://www.suara.com/news/2018/04/11/124937/pasca-hina-putin-ini-suasana-diskusi-tsamara-dan-kedubes-rusia>, accessed on 05 May 2019.
- Astuti, N. A. R. (4 May 2019). Petugas KPPS yang Meninggal Jadi 440 Orang (Poll Officers Who Died to Become 440 People). *Detik News*. <https://news.detik.com/berita/d-4536109/petugas-kpps-yang-meninggal-jadi-440-orang>, accessed 05 May 2019.
- Berita Moneter. (24 April 2019). DPD: Rusia Siap Kucurkan Investasi US\$25 Miliar (Regional Representative Council: Russia Ready to Disburse Investment of US \$ 25 Billion). <https://www.beritamometer.com/dpd-rusia-siap-kucurkan-investasi-us25-miliar/>, accessed 05 May 2019.
- Bhaskara, I. (6 February 2019). Rumor Propaganda Rusia di Pilpres AS 2016: Berulang di Indonesia? (Russian Propaganda Rumors at the 2016 US Presidential Election: Repeating in Indonesia?). *Tirto*. <https://tirto.id/rumor-propaganda-rusia-di-pilpres-as-2016-berulang-di-indonesia-dfSw>, accessed 05 May 2019.
- Biswas, S. (2 May 2014). Why does India's election take so long?. *BBC*. <https://www.bbc.com/news/world-asia-india-27233843>, accessed 15 October 2019.
- Buszynski, L. (August 2006). Russia and Southeast Asia: A New Relationship. *Contemporary Southeast Asia*, 28(2).
- CNN Indonesia. (17 April 2019). Pemantau Pemilu Asing Indonesia Seharusnya Bangga (Election Observer: Indonesia Should Be Proud). <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190417231601-20-387462/pemantau-pemilu-asing-indonesia-seharusnya-bangga>, accessed 05 May 2019.
- CNN Indonesia. (5 February 2019). Jokowi Klaim 'Propaganda Rusia' Dikutip dari RAND Corporation (Jokowi Claims 'Russian Propaganda' Quoted from RAND Corporation). <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190205230458-32-366666/jokowi-klaim-propaganda-rusia-dikutip-dari-rand-corporation>, accessed 05 May 2019.
- Corstange, D. and Nikolay Marinov. (July 2012). Taking Sides in Other People's Elections: The Polarizing Effect of Foreign Intervention. *American Journal of Political Science*, 56(3), 655-670.
- Danudoro, D. (26 October 2016). Russia and Indonesia: Renewal of Defense Cooperation. *Leksika*. <http://www.leksika.org/tacticalanalysis/2016/10/26/russia-and-indonesia-renewal-of-defense-cooperation>, accessed 05 May 2019.
- Detik News. (8 October 2013). Seberapa Dekat Hubungan SBY dan Putin? (How close are SBY and Putin's relations?). <https://news.detik.com/berita/d-2381591/seberapa-dekat-hubungan-sby-dan-putin>, accessed 05 May 2019.
- Dzaki, F. (12 April 2018). Yang Tak Dibicarakan Dari Perseteruan Tsamara Dengan RBTH Indonesia (What is not discussed from Tamara's feud with RBTH Indonesia). *Remotivi*. <http://www.remotivi.or.id/amatan/455/Yang-Tak-Dibicarakan-dari-Perseteruan-Tsamara-dengan-RBTH-Indonesia>, accessed 05 May 2019.
- Erdianto, K. (20 September 2017). November, Indonesia dan Rusia Tanda Tangani Kontrak Pembelian 11 Sukhoi (November, Indonesia and Russia Sign 11 Sukhoi Purchase Contracts). *Kompas*. <https://nasional.kompas.com/read/2017/09/20/17444121/november-indonesia-dan-rusia-tanda-tangani-kontrak-pembelian-11-sukhoi?page=all>, accessed 05 May 2019.
- Faridz, D., et al. (29 April 2019). More than 300 workers dead after Indonesian election. *CNN*. <https://www.cnn.com/2019/04/28/asia/indonesia-election-death-intl/index.html>, accessed 07 May, 2019.
- Farras, B. (14 November 2018). Temui Putin, Jokowi Minta Rusia Dukung CPO dan Buah Tropis RI (Meet with Putin, Jokowi Asks Russia to Support CPO and Indonesia Tropical Fruits). *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbciindonesia.com/news/20181114204117-4-42219/temui-putin-jokowi-minta-rusia-dukung-cpo-dan-buah-tropis-ri>, accessed 05 May 2019.
- Franciska, C. (5 December 2016). Tujuh juta atau 500.000? Ketika media sosial berdebat soal jumlah peserta aksi 212 di Monas (Seven million or 500,000? When social media

- debated about the number of participants in 212 protest at Monas). *BBC*. <https://www.bbc.com/indonesia/trensosial-38204802>, accessed 05 May 2019.
- Garadian, E. A. (2017). Book Review Membaca Populisme Islam Model Baru (Vedi Hadiz) (Reading the New Model of Islamic Populism). *Studia Islamika: Indonesian Journal For Islamic Studies*, 24(2), 379-393.
- Hartanto, A. D. (17 August 2016). Jalan Terjal Menuju NKRI (Steep Road Towards the Republic of Indonesia unitary state). *Tirto*. <https://tirto.id/jalan-terjal-menuju-nkri-bBfX>, accessed 05 May 2019.
- Haryadi, M. (2 May 2017). Indonesia dalam Sejarah: Merangkul Uni Soviet Demi Mengakhiri Kekuasaan Belanda di Tanah Papua (Indonesia in History: Embracing the Soviet Union to End Dutch Power in the Land of Papua). *Tribun News*. <http://www.tribunnews.com/sains/2017/05/02/indonesia-dalam-sejarah-merangkul-uni-soviet-demi-mengakhiri-kekuasaan-belanda-di-tanah-papua?page=all>, accessed 05 May 2019.
- Heriyanto, D. (20 October 2017). Q&A: Was China behind the Sept. 30 1965 failed coup?. *The Jakarta Post*. <https://www.thejakartapost.com/academia/2017/10/20/qa-was-china-behind-the-sept-30-1965-failed-coup.html>, accessed 05 May 2019.
- Ibrahim, G. M. (16 October 2018). Prabowo Jelaskan 'Make Indonesia Great Again': Sudah Saya Tulis di 2 Buku (Prabowo Explains 'Make Indonesia Great Again': I Have Written in 2 Books). *Detik News*. <https://news.detik.com/berita/d-4258676/prabowo-jelaskan-make-indonesia-great-again-sudah-saya-tulis-di-2-buku>, accessed 05 May 2019.
- Indopos. (14 February 2019). Isu Propaganda Tak Ganggu Hubungan Indonesia-Rusia (Propaganda Issue Does Not Interrupt Indonesia-Russia Relations). , <https://indopos.co.id/read/2019/02/14/165368/isu-propaganda-tak-ganggu-hubungan-indonesia-rusia>, accessed 05 May 2019.
- Irwinsyah, F. et al. (11 April 2018). Tsamara usai Bertemu Perwakilan Dubes Rusia: Ini Bukan PSI vs Rusia (Tsamara after Meeting with Russian Ambassador Representative: This Is Not PSI vs. Russia). *Kumparan*. <https://kumparan.com/@kumparannews/tsamara-usai-bertemu-perwakilan-dubes-rusia-ini-bukan-psi-vs-rusia>, accessed 05 May 2019.
- Isnaeni, H. F. (3 June 2010). Perjanjian Diplomatik yang Dilupakan (Forgotten Diplomatic Agreement). *Historia*. <https://historia.id/politik/articles/perjanjian-diplomatik-yang-dilupakan-Dr7xv>, accessed 05 May 2019.
- Jaramaya, R. (13 February 2019). Dubes Rusia: Istilah Propaganda Rusia adalah Keliru (Russian Ambassador: The term of Russian Propaganda is False). *Republika*. <https://www.republika.co.id/berita/internasional/asia/19/02/13/pmuywt377-dubes-rusia-istilah-propaganda-rusia-adalah-keliru>, accessed 05 May 2019.
- Jaramaya, R. (13 February 2019). Dubes: Isu Propaganda Rusia tak Ganggu Hubungan Bilateral (Ambassador: Issue of Russian Propaganda does not Interrupt Bilateral Relations). *Republika*. <https://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/19/02/13/pmuto8409-dubes-isu-propaganda-rusia-tak-ganggu-hubungan-bilateral>, accessed 05 May 2019.
- Jawa Pos. (15 December 2018). Prabowo Pakai Jasa Konsultan Politik Bekas Timnya Donald Trump? (Prabowo Use Donald Trump's Former Political Consultant Services?). <https://www.jawapos.com/nasional/pemilihan/15/12/2018/prabowo-pakai-jasa-konsultan-politik-bekas-timnya-donald-trump/>, accessed 05 May 2019.
- Jawa Pos. (8 April 2018). Gerindra: Komentar Tsamara Bisa Picu Keretakan Indonesia-Rusia (Gerindra political party: Tsamara's comments could trigger Indonesia-Russia cracks). <https://www.jawapos.com/nasional/politik/08/04/2018/gerindra-komentar-tsamara-bisa-picu-keretakan-indonesia-rusia/>, accessed 05 May 2019.
- Jordan, R. (5 February 2019). Soal Propaganda Ala Rusia, Jokowi: Hubungan dengan Putin Sangat Baik (Russian Propaganda Issue, Jokowi: Relationship with Putin is Very Good). *Detik News*. <https://news.detik.com/berita/d-4415307/soal-propaganda-ala-rusia-jokowi-hubungan-dengan-putin-sangat-baik>, accessed 05 May 2019.
- Levin, D. H. (April 2019). A Vote for Freedom? The Effects of Partisan Electoral Interventions on Regime Type. *Journal of Conflict Resolution*, 63 (4), 839-868. <https://doi.org/10.1177/0022002718770507>.

- Levin, D. H. (June 2016). When the Great Power Gets a Vote: The Effects of Great Power Electoral Interventions on Election Results. *International Studies Quarterly*, 60(2), 189–202. <https://doi.org/10.1093/isq/sqv016>.
- Lin, G., and Nicole Espinoza. (2007). *Florida Congressional Elections: November 2006*. Stanford University. https://cs.stanford.edu/people/eroberts/cs181/projects/2006-07/electronic-voting/index_files/page0004.html, accessed 15 October 2019.
- Mankoff, J. (January 2015). Russia's Asia Pivot: Confrontation or Cooperation?. *Asia Policy*, 19.
- Mantolas, S. (10 October 2016). Panas-Dingin Hubungan Indonesia-Rusia (Hot-Cold Indonesia-Russia relations). *Tirto*. <https://tirto.id/panas-dingin-hubungan-indonesia-rusia-bSPS>, accessed 05 May 2019.
- Maulana, V. (28 February March 2019). Hendak Kunjungi Indonesia, Putin Ingin Balas Kunjungan Jokowi (Wanting to Visit Indonesia, Putin Wants to Respond to Jokowi's Visit). *Sindo News*. <https://international.sindonews.com/read/1382814/40/hendak-kunjungi-indonesia-putin-ingin-balas-kunjungan-jokowi-1551343956>, accessed 05 May 2019.
- Maulida, F. M. (18 March 2018). Kemesraan Jakarta-Moskow dalam Kunjungan Khrushchev ke Indonesia (The Jakarta-Moscow intimacy during Khrushchev's visit to Indonesia). *Tirto*. <https://tirto.id/kemesraan-jakarta-moskow-dalam-kunjungan-khrushchev-ke-indonesia-cFVo>, accessed 05 May 2019.
- Nurita, D. (4 February 2019). Duta Besar Rusia Bantah Jokowi Soal Propaganda Rusia (Russian Ambassador Denies Jokowi on Russian Propaganda). *Tempo*. <https://nasional.tempo.co/read/1172055/duta-besar-rusia-bantah-jokowi-soal-propaganda-rusia/full&view=ok>, accessed 05 May 2019.
- Paul, C., and Miriam Matthews. (2016). *The Russian 'Firehose of Falsehood' Propaganda Model Why It Might Work and Options to Counter It*. RAND Corporation.
- Perkins, J. (2005). *Confessions of an Economic Hit Man. Pengakuan Seorang Ekonom Perusak (Confession of a Destructive Economist)*. Raja Grafindo Persada.
- Pratama, A. N. (23 August 2018). Hari ini dalam sejarah: Dimulainya Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda (Today in History: The Start of The Round Table Conference in Den Haag, Netherlands). *Kompas*. <https://nasional.kompas.com/read/2018/08/23/18190031/hari-ini-dalam-sejarah--dimulainya-konferensi-meja-bundar-di-den-haag?page=all>, accessed 05 November 2019.
- Putra, I. P. (21 March 2019). Survei: Masyarakat Tak Percaya Isu Negatif Terhadap Jokowi (Survey: People Do Not Believe Negative Issues Against Jokowi). *Medcom*. <https://www.medcom.id/pemilu/news-pemilu/8N0MPVrb-survei-masyarakat-tak-percaya-isu-negatif-terhadap-jokowi>, accessed 05 May 2019.
- Putranto, A. (6 April 2018). Diundang Dubes Rusia Buat Klarifikasi, Tsamara Tak Bisa Hadir (Invited by the Russian Ambassador for clarification, Tsamara could not be present). *CNN Indonesia*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180406133918-32-288803/diundang-dubes-rusia-buat-klarifikasi-tsamara-tak-bisa-hadir>, accessed 05 May 2019.
- PwC. (February 2017). PwC: Indonesia Akan Menjadi Negara Dengan Perekonomian Terbesar ke-4 di 2050 (Indonesia Will Become the 4th Largest Economy in 2050). *Databoks*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/10/22/proyeksi-pwc-ekonomi-indonesia-terbesar-ke-4-dunia-pada-2050>, accessed 05 May 2019.
- Retaduari, E. A. (5 February 2019). BPN Prabowo Tuntut Kubu Jokowi Minta Maaf soal Tuduhan Propaganda ala Rusia (Prabowo Winning Team Demand Jokowi Apology about Russian-style Propaganda Allegations). *Detik News*. <https://news.detik.com/berita/d-4414922/bpn-prabowo-tuntut-kubu-jokowi-minta-maaf-soal-tuduhan-propaganda-ala-rusia>, accessed 05 May 2019.
- Retaduari, E. A. (6 February 2019). TKN Jokowi Tudung Prabowo Gunakan Konsultan Donald Trump dan Rusia (Jokowi Winning Team Accuse Prabowo Using Consultants of Donald Trump and Russia). *Detik News*. <https://news.detik.com/berita/d-4416044/tnk-jokowi-tudung-prabowo-gunakan-konsultan->

- donald-trump-dan-rusia, accessed 05 May 2019.
- Rochmanudin. (5 April 2018). Tsamara Amany ‘Sentil’ Fadli Zon soal Kepemimpinan Vladimir Putin (Tsamara Amany Criticizes Fadli Zon on the Leadership of Vladimir Putin). *IDN Times*. <https://www.idntimes.com/news/indonesia/rochmanudin-wijaya/tsamara-amany-sentil-fadli-zon-soal-kepemimpinan-vladimir-putin-1/full>, accessed 05 May 2019.
- Sandi, T. (17 October 2014). Sejarah Hubungan Rusia-Indonesia (The History of Russian-Indonesian relations). *Jakarta Greater*. <https://jakartagreater.com/sejarah-hubungan-rusia-indonesia/>, accessed 05 May 2019.
- Sofwan, R. (25 January 2018). Beli Sukhoi, Indonesia Disebut Terancam Embargo AS Maret Ini (Buy Sukhoi, Indonesia Called Threatened US Embargo This March). *CNN Indonesia*. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20180125165419-106-271574/beli-sukhoi-indonesia-disebut-terancam-embargo-as-maret-ini>, accessed 05 May 2019.
- Storey, I. (2015). What Russia’s ‘Turn to the East’ Means for Southeast Asia. *ISEAS Yusof Ishak Institute*, 67.
- Tanjung, B. H. (27 March 2019). Jokowi Curhat 4 Fitnah yang Kerap Menyasar Dirinya (Jokowi Confide 4 Slander that Often Targets Himself). *Okezone*. <https://news.okezone.com/read/2019/03/27/605/2035393/jokowi-curhat-4-fitnah-yang-kerap-menyasar-dirinya>, accessed 05 May 2019.
- Taufiqqurahman, M. (29 September 2017). Survei SMRC: 5,1% Percaya Jokowi Terkait PKI, 75,1% Tak Percaya (SMRC Survey: 5.1% Believe in Jokowi Relationship With PKI, 75.1% Not Believe). *Detik News*. <https://news.detik.com/berita/d-3664138/survei-smrc-51-percaya-jokowi-terkait-pki-751-tak-percaya>, accessed 05 May 2019.
- Tomz, M., and Jessica L. P. (2018). *Public Opinion and Foreign Electoral Intervention*. [Paper Presentation]. The Annual Meeting of the American Political Science Association, Boston, MA.
- Tsvetov, A. (2016). After Crimea: Southeast Asia in Russia’s Foreign Policy Narrative. *ISEAS–Yusof Ishak Institute: Contemporary Southeast Asia: A Journal of International and Strategic Affairs*, 38 (1).
- Wise, A. (28 October 2016). Most Republicans believe Russia is meddling in U.S. election: Reuters/Ipsos poll. *Reuters*. <https://www.reuters.com/article/us-usa-election-russia-poll-idUSKCN12S13Q>, accessed 05 May 2019.
- Yudhistira, A. S., et al. (3 Februari 2019). Jokowi soal Fitnah Anti-ulama: Bagai Propaganda Rusia, Semburkan Dusta. *Kumparan*. <https://kumparan.com/@kumparannews/jokowi-soal-fitnah-antiulama-bagai-propaganda-rusia-semburkan-dusta-1549179996944305969>, accessed on 5 May 2019.
- Yustiningrum, E. (2011). *Enam Dekade Dinamika Persahabatan Indonesia-Rusia (Six Decades of Indonesian-Russian Friendship Dynamics)*. Pusat Penelitian Politik LIPI. <http://www.politik.lipi.go.id/index.php/in/kolom/eropa/392-enam-dekade-dinamika-persahabatan-indonesia-rusia->, accessed 05 May 2019.

REVIEW BUKU
DEMOKRASI, HAK ASASI MANUSIA, DAN RETORIKA
DI ASIA TENGGARA

BOOK REVIEW
DEMOCRACY, RIGHTS AND RHETORIC IN SOUTHEAST ASIA

Pandu Prayoga

Pusat Riset Politik – Badan Riset dan Inovasi Nasional
Jl. Jendral Gatot Subroto Kav. 10, Jakarta Selatan
E-mail: panduprayoga.p2p@gmail.com

Diterima: 1 Oktober 2021; direvisi 14 November 2021; disetujui 27 November 2021

Judul Buku : *Democracy, Rights, and Rhetoric in Southeast Asia*
Penulis : Avery Poole
Penerbit : Palgrave Macmillan
Tahun Terbit : 2019
Tebal : 83+xi

Abstract

Democracy and human rights in ASEAN have many faces due to different interpretations and lack of implementations. Various definitions of democracy and human rights are generated from several political systems in the Southeast Asia. International community is concerning how ASEAN member states could take responsibility in implementing and respecting human rights. This review shows the difference between upholding human rights agreement in the regional level and violating it in the domestic level. Such condition is driven by external regional legitimacy and defined by ASEAN's leaders. However, the challenges of democracy and human rights norms in ASEAN are to serve people's interests not just as a rhetoric.

Keywords: ASEAN, democracy, legitimacy, rhetoric, rights

Abstrak

Demokrasi dan hak asasi manusia (HAM) di ASEAN memiliki banyak wajah karena adanya perbedaan penafsiran dan lemahnya penerapan di lapangan. Beragamnya penafsiran mengenai demokrasi dan HAM disebabkan oleh beragamnya sistem politik pemerintahan di Asia Tenggara. Penegakan dan penghormatan terhadap HAM menjadi pekerjaan rumah yang terus mendapat sorotan internasional, baik di negara anggota yang demokratis maupun tidak. Tulisan ini menyoroti perbedaan antara kesepakatan di tingkat ASEAN yang mendorong demokrasi dan HAM serta pelanggaran di level domestik yang masih terjadi. Penulis buku berpendapat bahwa pengakuan atau legitimasi dari komunitas internasional penting agar ASEAN dapat menjadi bagian dari komunitas global. Selain itu, pemimpin kawasan memiliki kekuasaan dalam mendefinisikan nilai-nilai demokrasi dan ham menurut versinya. Bagaimanapun, tantangan ke depan bagi ASEAN yaitu bagaimana demokrasi dan HAM dapat fokus pada rakyat, dan bukan hanya sekedar retorika.

Kata kunci: ASEAN, demokrasi, legitimasi, retorika, hak

Pendahuluan

Pengambilalihan paksa kekuasaan oleh militer dan pelanggaran HAM di Myanmar pada awal tahun 2021 membuka kembali diskusi tentang paradoks demokrasi yang dipromosikan oleh ASEAN. Paradoks yang selalu mengundang kritik, baik dari masyarakat internal dan maupun internasional. Di tingkat regional, negara-negara anggota memiliki komitmen dalam promosi dan penghormatan nilai-nilai demokratis yang tecermin di dalam Piagam ASEAN. Sayangnya pada politik di tingkat domestik belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai Piagam tersebut. Mengapa paradoks ini terjadi?

Hubungan Internasional menawarkan beberapa perspektif dalam menjawab fenomena tersebut. Realisme memandang bahwa dengan basis anarki dan *power*, negara berusaha untuk bertahan hidup dan menjaga kedaulatan di lingkungan internasional yang anarkis. Dengan mengadopsi prinsip-prinsip demokrasi, keberadaan ASEAN dapat diterima oleh dunia internasional sekalipun anggotanya masih dalam proses atau bukan negara demokratis. Perspektif liberalisme memandang pengakuan norma demokrasi dan penghormatan HAM oleh ASEAN menandakan kemajuan proses regionalisme. Selain itu, konflik internal negara anggota ASEAN akan mengurangi tensi, jika seluruh negara menghormati demokrasi. *English School* mengambil jalan tengah dengan mengakui lingkungan anarki sekaligus membangun komunitas regional berdasarkan norma dan perilaku bersama. Sementara konstruktivisme melihat kepentingan bersama kawasan dibentuk dari identitas diri dan persepsi dunia internasional terhadap ASEAN.

Salah satu sarjana Hubungan Internasional yang menggunakan pendekatan institusionalis dan konstruktivisme sekaligus dalam melihat paradoks tersebut adalah Avery Poole. Dalam bukunya berjudul "*Democracy, Rights and Legitimacy in Southeast Asia*", Poole memotret para pemimpin ASEAN yang sedang membangun retorika norma yang dilembagakan dalam Piagam ASEAN. Poole berargumen bahwa ASEAN berupaya memproyeksikan dirinya sebagai sebuah institusi yang relevan

kepada dunia internasional dengan mengadopsi norma yang secara dominan berlaku, yaitu demokrasi dan penghormatan HAM. Perbedaan tingkat ekonomi dan jenis sistem politik pemerintahan tidak serta merta membendung ASEAN menjadi bagian dari komunitas internasional yang menjunjung norma-norma demokrasi dan HAM. Justru dengan ASEAN mengadopsi prinsip norma ini akan lebih mengeratkan hubungan bilateral maupun multilateral dengan pihak eksternal.

Internalisasi nilai-nilai demokrasi dan HAM bukan tanpa halangan dan rintangan di tengah sejarah panjang kepemimpinan diktator di Asia Tenggara. Apalagi demokrasi dan HAM dianggap oleh beberapa pemimpin di ASEAN sebagai bentuk hegemoni dan pelebaran pengaruh negara-negara besar. Sebagaimana yang dikemukakan Mahatir Muhammad tidak ingin didikte oleh seperangkat aturan dan kumpulan nilai yang diekspor dari Barat karena telah memiliki "Asian Values" (T.N. Harper, 1997). Terlepas dari kondisi ini, Indonesia yang pernah mengalami periode otoritarianisme terus mengupayakan prinsip demokrasi dan HAM menjadi acuan perilaku normatif dan aplikatif bagi negara anggota ASEAN. Perilaku negara-negara ASEAN akan terbentuk dari interaksi terus-menerus yang dilandasi oleh komitmen bersama. Tentunya hasil yang diharapkan adalah prinsip demokrasi dan HAM menjadi standar perilaku yang diterapkan di wilayah yurisdiksi masing-masing negara.

Buku ini mengangkat kasus Myanmar sebagai negara yang masih tertatih dalam mempelajari demokrasi dan penguatan HAM. Tidak semua negara-negara di Asia Tenggara mengadopsi sistem politik yang demokratis dan menghormati HAM, salah satunya seperti kasus yang diangkat dalam buku ini, yaitu Myanmar. Buku yang ditulis Avery Poole ini mengungkap perbedaan demokrasi dan hak asasi manusia sebagai retorika dan sebagai fakta sosial di negara anggota ASEAN. Poole membagi bukunya menjadi 4 bagian dalam menjabarkan argumentasinya. Di bagian pertama membahas konsepsi HAM dan demokrasi di Asia Tenggara. Bagian kedua membahas demokrasi dari sisi retorika dan implementasi di lapangan. Bagian

ketiga dari buku ini menjabarkan persoalan kelembagaan HAM termasuk mengulas Piagam ASEAN. Bagian terakhir menegaskan kembali hubungan dan relevansi antara nilai-nilai HAM dan demokrasi dengan ASEAN.

Dalam mereviw buku tersebut, tulisan ini dibagi dalam tiga pembahasan. Bagian pertama mencoba menggunakan dan menjabarkan kerangka konsep demokrasi ala ASEAN. Bagian kedua mengeksplorasi keragaman sistem politik pemerintahan di Asia Tenggara termasuk klaim demokrasi oleh negara-negara ASEAN. Argumentasi utama bagian kedua yaitu pengadopsian nilai demokrasi dan HAM oleh ASEAN didorong oleh persepsi dunia internasional agar ASEAN menjadi bagian masyarakat internasional. Bagian terakhir menyimpulkan ASEAN mengadopsi nilai-nilai liberalisme berupa demokrasi dan HAM karena dorongan *external regional legitimacy* (ERL).

Konsep Demokrasi ala ASEAN

Poole mengawali bahasannya dengan mengutarakan kasus pelanggaran HAM oleh penguasa di Myanmar terhadap kaum Buddhis pada September 2007. Bukan hanya di Myanmar, kasus pelanggaran HAM terjadi hampir di seluruh negara ASEAN meskipun dengan tingkat yang berbeda (Inayati, 2016). Di sisi lain, pada November 2007 para pemimpin ASEAN menyetujui sebuah aturan dan norma berupa Piagam ASEAN yang dapat mengikat perilaku negara anggota. Terang saja, apa yang terjadi di level domestik bertolak belakang dengan nilai-nilai yang didorong di tingkat ASEAN. Dalam menjawab paradoks ini, Poole mengajukan konsep *external regional legitimacy* (ERL) sebagai penjelasan konstruksi identitas ASEAN.

Dorongan untuk mengadopsi nilai-nilai demokrasi dan HAM bukan karena penerimaan nilai-nilai internasional tetapi lebih pada legitimasi, reputasi, kredibilitas, dan kesan ASEAN di mata dunia. Konsep demokrasi dan HAM ditambah dengan embel-embel berakar dari karakter masyarakat Asia Tenggara agar menjadi berbeda dengan demokrasi ala Barat. Demokrasi dan HAM ala ASEAN didukung

oleh beragamnya identitas yang dimiliki oleh masyarakat Asia Tenggara dengan standar kepatutan perilaku tertentu. Setiap anggota ASEAN memiliki perbedaan dalam aspek politik, ekonomi, dan sejarah. Dengan latar belakang sejarah sebagai negara jajahan (kecuali Thailand), negara-negara ASEAN menolak ikut campur urusan domestik sesama anggota. Ketika terjadi pelanggaran HAM misalnya, tidak ada ketegasan ASEAN untuk menghentikan pelanggaran. Harapan ASEAN memiliki dokumen yang mengikat secara hukum agak sulit tercapai akibat karakteristik “ASEAN Way” yang mengedepankan level kenyamanan bersama, kesabaran, evolusi, informalitas, pragmatisme, dan konsensus (Poole, 2019).

Kesepakatan norma dan nilai ASEAN umumnya dibentuk oleh kaum elit atau pemimpin puncak masing-masing negara. Persepsi dan tafsir para pemimpin ASEAN menjadi sangat dominan dalam menentukan retorika dan realitas lapangan. Buku ini, misalnya, menyorot ucapan Presiden Joko Widodo yang memandang demokrasi di Indonesia sudah kebablasan, tetapi dalam beberapa laporan justru menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia mengalami penurunan. Eksekusi mati tanpa pengadilan dengan dalih pemberantasan narkoba justru dipromosikan oleh Filipina di bawah rezim Duterte. Pasca berlakunya Piagam ASEAN 2007, Myanmar melakukan reformasi di tahun 2010. Sayangnya, pengaruh militer masih sangat kuat termasuk dalam peraturan dan perundang-undangan. Beberapa tahun kemudian, kekerasan tersebut berulang terhadap suku-bangsa Rohingya sekalipun Myanmar berada di bawah pemimpin sipil. Pada awal tahun 2021, dunia internasional dikejutkan dengan kudeta militer dan ratusan orang yang dilaporkan hilang saat melakukan demonstrasi menentang kudeta. Myanmar seolah lupa akan komitmen bersama ASEAN terhadap nilai-nilai demokrasi dan HAM. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap warga negara menjadi subordinat dari perebutan kekuasaan politik. Pesimisme mengenai Piagam ASEAN dalam mempromosikan demokrasi dan menghormati HAM telah disuarakan oleh kelompok swadaya masyarakat yang meluncurkan Piagam tandingan berupa ASEAN

People Charter (Sinaga, 2013).

Norma dan nilai-nilai yang dipromosikan di ASEAN tidak lahir dari ruang hampa, tetapi dipromosikan oleh aktor dan agen, baik dari dalam maupun dari luar ASEAN yang aktif membentuk komunitas sekitar. Dalam buku ini, Poole (2019) memaparkan tujuan ASEAN mempromosikan norma demokrasi dan HAM adalah agar diterima sebagai bagian dari komunitas internasional walaupun sebatas retorika tanpa implementasi nyata. Demokrasi ala ASEAN bermakna bahwa sekalipun para pemimpin kawasan mengadopsi nilai dan norma liberal di tingkat regional, hal ini tidak berarti bahwa adopsi dari nilai dan norma liberal juga berada di level yang sama pada tingkat nasional. Ini menunjukkan bahwa ASEAN masih tidak beranjak pergi dari lingkaran elitisnya dan selalu bermain dengan slogan-slogan retorik. Walaupun akhirnya ini dapat dipandang sebagai sebuah kemajuan dengan harapan nilai dan norma demokrasi dan HAM menjadi standar baku negara anggota.

Demokrasi: Antara Konsep dan Implementasi

Buku ini juga menyoroti satu masalah besar yang dilakukan oleh para pemimpin ASEAN, yaitu minimnya implementasi di tingkat domestik setelah dicapai kesepakatan di tingkat regional. Dokumen Cetak Biru Komunitas Politik Keamanan ASEAN telah mendefinisikan tiga aksi promosi demokrasi berupa: kampanye demokrasi pada generasi muda, diseminasi pandangan dan pengalaman demokrasi dalam bentuk seminar dan pelatihan, serta melakukan penelitian untuk menguatkan prinsip-prinsip demokrasi (Sekretariat ASEAN, 2009). Sayangnya, ketiga aksi tersebut tidak dimaksudkan untuk mendorong negara anggota ASEAN yang sistem politiknya belum demokratis untuk melakukan perubahan. Seperti diketahui secara umum, sistem politik pemerintahan di Asia Tenggara tidak monolitik dan belum sepenuhnya berada di tangan rakyat. Terlebih dengan adanya norma *non-interference* yang menolak adanya campur tangan pihak luar dalam urusan politik domestik apalagi hingga mengganti sistem politik pemerintahan.

Tidak semua negara di Asia Tenggara mengadopsi sistem demokrasi dengan basis suara rakyat, apalagi ketika melihat praktik-praktik demokrasi yang diangkat dalam buku ini. Sebagai contoh, Singapura yang mengklaim diri sebagai negara demokratis dengan sistem multi partai, tetapi menerapkan “*electoral authoritarian*” yang membuat satu partai akan terus menjadi dominan (Poole, 2019). Thailand dengan raja sebagai lambang negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan yang dipilih melalui pemilu juga mengalami beberapa kali penggulingan kekuasaan oleh pihak militer. Menurut Poole (2019), penggunaan retorik demokrasi di level ASEAN diduga untuk meningkatkan legitimasi dunia internasional di tengah praktik-praktik non-demokratis anggotanya.

Lebih lanjut, sistem politik di setiap negara anggota ASEAN berbeda-beda, seperti sistem monarki absolut di Brunei Darussalam, sistem satu partai komunis di Laos dan Vietnam, dan sistem presidensial banyak partai di Filipina dan Indonesia. Beragam laporan mengindikasikan proses demokratisasi di kawasan Asia Tenggara mengalami penurunan. Di Indonesia misalnya, menjelang pemilihan umum 2024, berhembus isu bahwa TNI/Polri akan ditunjuk menjadi pejabat daerah (gubernur, bupati) seperti pada masa Orde baru Soeharto (CNN Indonesia, 2019). Poole sendiri meragukan Indonesia sebagai negara demokratis berdasar kompleksitas definisi demokrasi menurut para ahli (Poole, 2019). Namun uniknya, yang merupakan argumentasi utama buku ini menyatakan bahwa ASEAN memproyeksikan diri sebagai *global citizen* yang menerima nilai-nilai global sekalipun berbeda dengan kondisi domestik. ASEAN sangat memperhatikan bagaimana persepsi dunia terhadap dirinya.

Proses internalisasi nilai-nilai demokrasi yang telah diadopsi di tingkat ASEAN belum sepenuhnya terjadi di level domestik negara-negara anggota. Terbukti dengan masih dilanggarnya prinsip demokrasi yang sedang dalam proses penemuan model ideal, sebagaimana kudeta militer yang terjadi di Myanmar pada awal tahun 2021. Kekerasan yang diterima oleh para demonstran bukan

saja mencederai demokrasi itu sendiri, tetapi juga telah merobek hak paling dasar manusia, yaitu rasa aman. Pemerintah yang diharapkan memberikan rasa aman justru menjadi sumber ancaman. Dilaporkan juga bahwa kekerasan aparat telah melenyapkan ratusan nyawa demonstran yang mendukung proses demokratisasi sejak bulan Februari 2021 (Human Rights Watch, 2021). Hasil pemilihan umum Myanmar 2020 dengan kemenangan Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) menggambarkan bahwa mayoritas masyarakat Myanmar membutuhkan perubahan.

Gap antara praktik dan realitas demokrasi di kawasan disebabkan salah satunya karena adanya perbedaan definisi menggepai demokrasi yang dimiliki oleh para pemimpin negara-negara ASEAN. Di Indonesia, ada demokrasi terpimpin ala Soekarno dan demokrasi Pancasila versi Soeharto. Presiden Soekarno menjabat selama 21 tahun dan sempat diajukan sebagai presiden seumur hidup, sedangkan Presiden Soeharto menjabat selama 32 tahun. Secara sekilas, para pemimpin ini menjunjung nilai-nilai demokrasi dan memimpin atas nama demokrasi, tetapi pada praktiknya banyak yang mengkritik kebijakan ini, dan tren seperti ini sering juga ditemukan di negara-negara Asia Tenggara lainnya. Dengan beragamnya praktik demokrasi yang terjadi, Poole menyatakan bahwa term demokrasi sebagai norma kawasan menjadi bermasalah (Poole, 2019).

Sebaiknya ditambahkan satu paragraf sebagai penutup/wrap up bagian ini. Paparan di atas mayoritas adalah isi dari buku, bagaimana pandangan penulis review ini terhadap isi buku? Paragraf terakhir di bagian ini masih menggantung.

Hak Asasi Manusia dan Organisasi Kawasan

Selain melihat kasus demokratisasi di negara anggota ASEAN, Poole juga menyajikan studi kasus. Penulis buku sadar bahwa negara-negara non-demokratis yang juga banyak melakukan pelanggaran HAM menyepakati norma demokrasi dan HAM hanya sebagai legitimasi. Hal ini pun disadari oleh ASEAN, yang

kemudian mendorong lahirnya Piagam ASEAN yang diharapkan dapat mengikat perilaku para negara anggota.

ASEAN mencoba untuk mengadopsi norma-norma liberal semenjak terjadinya krisis ekonomi di akhir tahun 90an di kawasan Asia Tenggara. Penyerapan nilai-nilai demokrasi dan HAM menjadi sebuah tiket untuk dapat diterima dalam pergaulan internasional. Apalagi, negara anggota ASEAN sangat membutuhkan investasi dari luar. Ide ini bukan tanpa perlawanan dari negara anggota lainnya, termasuk Vietnam, Kamboja, Laos dan Brunei. Untuk merealisasikan ide ini dibutuhkan waktu beberapa bulan untuk negosiasi. Syarat-syarat yang disepakati dari hasil negosiasi tersebut berupa dibentuknya organisasi HAM ASEAN melalui penunjukan pemerintah, tidak saling menyalahkan negara lain, dan berkarakteristik Asia Tenggara. Tentu saja badan HAM kawasan, yaitu *ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights* (AICHR) memiliki mandat terbatas, serta tidak leluasa menjalankan fungsi dan tugasnya.

Masih dalam kerangka konseptual external regional legitimacy (ERL), dalam buku ini, Poole (2019) berargumen bahwa ASEAN akan selalu mendorong dirinya bekerja atau penggunaan kata-kata diplomatis agar terhindar dari sorotan internasional. ASEAN tidak dapat berdiam diri karena akan mempertaruhkan kredibilitas dan relevansi ASEAN. Dalam kasus kudeta Myanmar misalnya, Indonesia mendorong *ASEAN Summit Meeting* untuk mengeluarkan keputusan demi memecahkan persoalan. Sayangnya, ASEAN dituding mendukung pemerintah militer karena lambat bergerak dan kurang tegas terhadap Myanmar, seolah mengulang kegagalan ASEAN dalam merespons kasus demonstrasi umat Buddha dan kekerasan terhadap suku muslim Rohingya sebelumnya. Respons yang dilakukan oleh ASEAN patut diapresiasi apabila keputusan yang sudah dibuat segera dieksekusi dan tidak menunggu waktu lama. Lambatnya (keengganan) Junta Militer dalam menerima *special envoy* dalam kasus Myanmar menandakan turunnya kredibilitas ASEAN bagi anggotanya sendiri.

Myanmar telah beberapa kali menjadi batu sandungan diplomasi internasional ASEAN. ASEAN, misalnya diminta Uni Eropa untuk mengeluarkan Myanmar dari pertemuan negosiasi perdagangan akibat pelanggaran HAM yang terjadi di negara tersebut. Saat Myanmar belum menjadi anggota, ASEAN cenderung dapat menyelesaikan persoalan domestik seperti persoalan-persoalan yang terjadi antara lima negara pendiri ASEAN. Tatkala menjadi anggota ASEAN, Myanmar menggunakan norma *non-interference* yang berlaku dan seolah melupakan nilai dan norma ASEAN lainnya seperti demokrasi dan HAM. Padahal norma-norma itu tercantum dalam Piagam ASEAN yang seharusnya diakui Myanmar. Seharusnya *non-interference* memiliki keterbatasan yakni tidak melanggar hak asasi manusia yang disepakati bersama negara anggota.

Kebebasan berpendapat juga menjadi sorotan di kawasan Asia Tenggara. Oposisi di Singapura dan Malaysia selalu mendapat tekanan dari penguasa. Untuk kasus Indonesia sendiri, kebebasan berpendapat sering mengalami hambatan dengan adanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dapat menafsirkan kritik seolah penghinaan. Dalam beberapa kasus, masyarakat takut mengutarakan pendapat dan kritiknya karena akan diancam hukuman penjara (Tempo, 2014).

Norma dan Kelembagaan

Jika tidak ada perubahan, ASEAN akan dipandang tidak relevan karena norma hanya dijadikan tameng agar tidak menjadi sorotan sekaligus sebagai tiket masuk dalam pergaulan internasional. Peran ASEAN seharusnya mendorong nilai-nilai demokrasi dan HAM berlaku di kawasan dengan kemauan rakyat sebagai sumber. Jika tidak dibenahi, akan selalu ada pertentangan antara penegakan demokrasi dan HAM dengan kedaulatan dan tidak adanya campur tangan urusan domestik. ASEAN secara perlahan berproses dalam menyerap nilai-nilai dan norma kebebasan (Dosch, 2008). Proses yang dilakukan oleh ASEAN bukan sekadar dipengaruhi aktivisme prodemokrasi, tetapi juga harus mendapat dorongan dari pemimpin

anggota ASEAN (Dosch, 2008). Dalam hal ini, proses pengakuan atas nilai-nilai liberal menjadi satu kemajuan yang perlu didorong lebih lanjut dan tidak berhenti pada pembentukan dokumen semata. Dengan demikian, ASEAN tidak hanya penting untuk para pemimpin atau bersifat elitis, tetapi juga dibutuhkan oleh masyarakatnya, dan dapat berfungsi sebagai media aspirasi yang efektif.

Ada beberapa catatan sebagai hasil bacaan buku ini. *Pertama*, narasi pertentangan individual versus bersama dan nilai Asia versus nilai Barat diakui penulis tidak dieksplorasi mendalam dalam buku ini. Sepanjang penjelasan, buku ini menggunakan ERL sebagai pendekatan dalam menjelaskan perilaku paradoks ASEAN. Sayangnya, buku ini belum menjelaskan mengapa Presiden Filipina Duterte berulang kali menantang komunitas internasional yang mengkritik kebijakannya dalam menumpas perdagangan narkoba. Seolah tidak terlalu mementingkan persepsi dunia internasional terhadap imaji Filipina sebagai negara demokratis. Untuk kasus Myanmar sendiri, negara ini pernah mengalami kudeta militer sebelum tahun 2021 yaitu di tahun 1962 dan memiliki sejarah panjang pelanggaran HAM. Supermasi militer atas sipil yang bersifat ototritter di negara ini menjadi penghalang proses demokratisasi yang telah diusahakan dalam beberapa tahun belakang.

Selebihnya, kekuatan buku ini terletak pada kekayaan referensi yang dikutip, baik berupa laporan, dokumen resmi, pidato, dan berita. Poole juga mewawancarai tokoh-tokoh kunci di kementerian luar negeri, diplomat, dan para peneliti di lembaga riset dan universitas di negara-negara ASEAN. Dalam mendalami beragam referensi tersebut, Poole menyoroti bagaimana norma di ASEAN dibangun dan secara hati-hati melihat kasus per kasus di negara anggota. Buku ini mendiskusikan perdebatan mengenai posisi ASEAN sebagai variabel bebas atau sebagai variabel terikat yang saling membentuk. Poole memandang ASEAN dalam kasus demokrasi dan HAM masih menjadi variabel terikat dengan asumsi bahwa tatanan politik domestik memengaruhi keputusan kawasan. Buku ini layak dibaca

oleh para pemangku kebijakan, peneliti dan mahasiswa yang mendalami kajian mengenai regionalisme dan ASEAN.

Daftar Pustaka

- ASEAN, Sekretariat. (2009) Cetak Biru Komunitas Politik Keamanan ASEAN. Jakarta: ASEAN Secretariat.
- CNN Indonesia. (2021) Pakar Ungkap Celah Aturan TNI-Polri Jadi Gubernur 2022-2024. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210928145049-32-700509/pakar-ungkap-celah-aturan-tni-polri-jadi-gubernur-2022-2024> pada tanggal 01 Oktober 2021.
- Dosch, Jorn. "ASEAN's Reluctant Liberal Turn and the Thorny Road to Democracy Promotion". *The Pacific Review*, Vol. 21 No. 4 December 2008: 527–545. DOI: [10.1080/09512740802294655](https://doi.org/10.1080/09512740802294655)
- Harper, T.N. (1997) 'Asian Values' and Southeast Asian Histories. *The Historical Journal* Vol. 40, No. 2 (Jun, 1997), pp. 507-517
- Human Rights Watch. (2021) Myanmar: Hundreds Forcibly Disappeared. Diakses dari <https://www.hrw.org/news/2021/04/02/myanmar-hundreds-forcibly-disappeared> pada tanggal 01 Oktober 2021.
- Idhom, Addi Mawahibun. (2014) UU ITE Dinilai Membuat Narasumber Kritis Takut. Diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/622174/uu-ite-dinilai-membuat-narasumber-kritis-takut/full&view=ok> pada tanggal 25 Januari 2022.
- Inayati, Ratna Shofi (Ed). (2016) Demokrasi dan HAM di ASEAN. Tangerang: Mahara Publishing.
- Poole, Avery. (2019) *Democracy, Rights, and Rhetoric in Southeast Asia*. Cham: Palgrave Macmillan. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-15522-3>
- Simon, Sheldon W. (1995). *Realism and neoliberalism: International relations theory and Southeast Asian security*. *The Pacific Review*, 8(1), 5–24. doi:10.1080/09512749508719123
- Sinaga. Lidya Christin (Ed). (2013) Pelaksanaan Demokrasi dan HAM di ASEAN. Jakarta: LIPI Press.

TENTANG PENULIS

Damar Kristal

Penulis merupakan lulusan S1 prodi Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (UIN Jakarta). Minat kajiannya berfokus pada isu-isu demokrasi, perbandingan politik, perilaku politik, dan ekonomi politik. Penulis dapat dihubungi melalui email: damar.kristal002@gmail.com

M. Fajar Shodiq Ramadhan

Penulis merupakan pengajar pada Program Studi Ilmu Politik, FISIP, Universitas Brawijaya. Menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Politik di Universitas Airlangga (2011) dan S2 Ilmu Politik di Universitas Airlangga (2013). Beberapa karya tulisnya tentang pemilu, partai politik, dan demokrasi telah dimuat dalam berbagai jurnal. Penulis dapat dihubungi melalui email: fajarramadhan@ub.ac.id.

Romel Masykuri

Penulis saat ini merupakan Dosen Luar Biasa (DLB) pada Program Studi Ilmu Politik, FISIP, UIN Sunan Ampel Surabaya. Menyelesaikan pendidikan S1 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan S2 di Universitas Airlangga Surabaya. Minat kajiannya antara lain politik Islam, gerakan sosial, dan politik lokal. Penulis dapat dihubungi melalui surel romel.masykuri@dlb.uinsby.ac.id.

Samir

Penulis merupakan Sekretaris Asisten Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden. Ia menyelesaikan Pendidikan S1 jurusan Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Adab dan Humaniora di UIN Jakarta pada tahun 2018. Dia meraih gelar Magister pada tahun 2021 dari Universitas Indonesia, peminatan Politik

dan Hubungan Internasional di Timur Tengah, Program Studi Kajian Wilayah Timur Tengah dan Islam, Sekolah Kajian Strategik dan Global (SKSG). Penulis memiliki ketertarikan pada minat kajian seputar isu kontemporer di Timur Tengah, Kajian Islam, demokrasi, politik Islam, dan geopolitik. Penulis dapat dihubungi melalui email: samir.muhammad17@gmail.com.

M. Hamdan Basyar

Penulis merupakan Peneliti Ahli Utama pada Pusat Riset Politik, Badan Riset dan Inovasi Nasional (PRP-BRIN). Kajian utamanya adalah Agama dan Politik, Dunia Islam, dan Masalah Timur Tengah. Dia juga Dosen Pasca Sarjana Program Studi Kajian Timur Tengah dan Islam, Universitas Indonesia (2002-sekarang). Dia pernah meneliti berbagai masalah sosial, budaya, dan politik di berbagai tempat di Indonesia, hampir semua wilayah: dari Aceh sampai Papua. Selain itu, dia juga pernah meneliti/seminar di luar negeri, yaitu: di Yordania (1995), Mesir (1995), Turki (1996), Belanda (1996), Inggris (1996), Singapore (2004), Malaysia (2004, 2014), Australia (2005), Iran (2008), Lebanon (2016), Arab Saudi (2017), Tunisia (2018), dan Qatar (2019). Penulis dapat dihubungi melalui email: hbasyar@gmail.com

Dini Suryani

Telah bergabung di Pusat Riset Politik BRIN sejak 2011. Ia lulus sarjana dari Departemen Ilmu Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta pada tahun 2010. Melalui beasiswa Australia Awards, ia mendapatkan gelar master dari College of Asia and The Pacific di The Australian National University (ANU), Canberra, di tahun 2015. Topik riset yang ia tekuni saat ini di antaranya adalah politik lokal, masyarakat sipil, dan tata kelola sumber daya alam. Beberapa publikasi terbarunya adalah “Aktor Di Balik Tuntutan Otonomi Khusus” (Penerbit Obor, 2020) dan

“Peran Masyarakat Sipil dalam Menghadapi COVID-19 di Indonesia” (Penerbit Obor, 2020). Penulis dapat dihubungi melalui email: dini012@brin.go.id

Fathimah Fildzah Izzati

Bekerja di Pusat Penelitian Politik LIPI sejak 2015. Pada 2018, dia memperoleh MSc dalam bidang Labour, Social Movements and Development dari SOAS, University of London dengan beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Disertasi masternya membahas informalitas dan kerja perempuan dalam bisnis toko daring berbasis media sosial di Indonesia. Pada 2014, ia mempublikasikan sebuah buku yang diangkat dari skripsinya, yang dinilai sebagai salah satu skripsi terbaik oleh Departemen Ilmu Politik UI, berjudul “Politik Serikat Buruh dan Kaum Precariat: Pengalaman Tangerang dan Karawang.” Tulisan-tulisannya baik dalam Bahasa Indonesia maupun Inggris (serta ada yang diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa lainnya) dapat dijumpai di berbagai jurnal ilmiah, bagian dari buku, serta jurnal-jurnal dan media daring baik nasional maupun internasional. Penulis dapat dihubungi melalui email: fath006@brin.go.id

Imam Syafi’i

Penulis telah bekerja di Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI sejak 2014 (saat ini menjadi Pusat Riset Politik BRIN) dan tergabung dalam kelompok penelitian bidang politik lokal. Pada 2014, penulis bersama tim konflik SDA P2P-LIPI melakukan riset tentang konflik tambang di Bima, konflik perkebunan sawit (2015), dan konflik air di Banten dan Bali (2016), dan Konflik Nelayan di Perairan Belawan (2017). Pada tahun 2018-2019, bersama tim SDA P2P LIPI mulai menyusun Instrumen Indeks Penilaian Kapasitas dalam Pengelolaan SDA. Sejak tahun 2020, penulis tergabung dalam tim penelitian Masyarakat Sipil Pusat Riset Politik BRIN. Penulis menyelesaikan studi S1 di Jurusan Sejarah di Universitas Negeri Malang tahun 2011 dan studi S2 di Jurusan Sejarah Universitas Diponegoro Semarang tahun 2013. Beberapa publikasi terbarunya adalah “Potret

Kapasitas Pemda dalam Pengelolaan SDA: Penyusunan Model dan Ujicoba Instrumen Indeks di Kabupaten Klungkung, Kabupaten Banyuwangi, dan Kabupaten Boalemo (Kanisius, 2021) dan “Refleksi Penanganan Covid-19: Kolonialisme dan Wabah di Negeri Jajahan (Penerbit Obor, 2020). Memiliki ketertarikan pada kajian sejarah maritim dan politik lokal. Penulis dapat dihubungi melalui email: imamsyafii.sej07@gmail.com

Pandu Yuhsina Adaba

Lahir di Bantul tanggal 25 Maret 1987. Bergabung dengan Pusat Penelitian Politik LIPI sejak 2010 (Saat ini menjadi Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional atau PRP-BRIN). Aktif menekuni kajian pengelolaan sumber daya alam, reforma agraria, dan dinamika pedesaan. Selain di PRP BRIN, juga beraktivitas sebagai peneliti di Yayasan Dignity Indonesia Berdikari. Publikasi terbarunya adalah “Potret Kapasitas Pemda dalam Pengelolaan SDA: Penyusunan Model dan Ujicoba Instrumen Indeks di Kabupaten Klungkung, Kabupaten Banyuwangi, dan Kabupaten Boalemo (Kanisius, 2021). Penulis dapat dihubungi melalui email: pandu.yuhsina81@gmail.com.

Septi Satriani

Memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari Universitas Gadjah Mada tahun 1999 dan gelar master pada Ilmu Antropologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada pada tahun 2015. Sejak tahun 2005 hingga sekarang bekerja sebagai peneliti pada Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (sekarang menjadi Pusat Riset Politik BRIN). Saat ini, ia sedang menempuh studi doktoral di Departemen Politik Universitas Indonesia. Septi telah menghasilkan beberapa buku seperti “Kekerasan Komunal: Anatomi dan Resolusi Konflik di Indonesia” (Pustaka Pelajar, 2006); “Konflik Kalbar dan Kalteng Jalan Panjang Meretas Perdamaian” (Pustaka Pelajar, 2007); “Runtuhnya Gampong di Aceh: Studi Masyarakat Desa yang Bergejolak” (Pustaka

Pelajar, 2008); “Dinamika Kelembagaan Mukim Era Otonomi Khusus Aceh” (LIPI Press, 2008); Pergeseran Peran Toan Guru di Lombok Timur” (LIPI Press, 2009); ” Dinamika Peran Elite Lokal Pasca Orde Baru: Studi Kasus di Sumbawa” (Mahara Publishing, 2016); “Dinamika Peran Elite Lokal Pada Pilkada Bima 2010” (Andi Publishing, 2014); “Strategi dan Negosiasi dalam Konflik Air di Bali dan Banten”, (LIPI Press, 2019); “Mosaik Cendrawasih: Pembangunan dan Kesejahteraan di Tanah Papua” (Yayasan Obor Indonesia, 2020); dan “Masalah Pendidikan dan Kesehatan di Papua: Kebijakan, Tata Kelola Anggaran dan Infrastruktur”, (Yayasan Obor Indonesia, 2020). Selain itu juga melakukan publikasi di Jurnal Nasional maupun tulisan di media on line serta ikut berkontribusi menyusun policy brief dengan judul “Dialog Nasional Membangun Papua Damai”, policy brief “Menuju Papua yang Stabil dan Sejahtera” serta report hasil kerja sama dengan The Asia Foundation dengan judul “Road for Communities: Building Road Connectivity Infrastructure for The Livelihood of Indigenous Papuans and The Environment”. Untuk lebih lanjut, Septi bisa dihubungi melalui septisatriani@gmail.com.

Ahmad Nurcholis

Penulis menyelesaikan studi S-1 Ilmu Politik di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2016. Ia pernah bekerja sebagai Asisten Peneliti di Indonesian Parliamentary Center dan Staf Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten sebelum akhirnya melanjutkan studi S-2 di Shandong University China dengan jurusan Hubungan Internasional pada 2018. Lulus magister pada 2020 dan kini berkarier sebagai Dosen Hubungan Internasional di UIN Raden Intan Lampung. Beberapa tulisannya terkait isu politik, kepemiluan, dan isu-isu internasional dimuat di beberapa media nasional. Penulis dapat dihubungi melalui ahmad.nurcholis68@gmail.com.

Pandu Prayoga

Peneliti pada Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2 Politik LIPI). Menamatkan pendidikan S1 di Universitas Hasanuddin, Makassar tahun 2011 dan Pendidikan S2 di Coventry University, the United Kingdom tahun 2019 pada jurusan yang sama. Tergabung pada Tim Kajian ASEAN P2 Politik LIPI pada tahun 2014 dengan konsentrasi Regionalisme dan Regionalisasi ASEAN, Ekonomi Politik Maritim, dan Politik Internasional. Penulis dapat dihubungi melalui: panduprayoga.p2p@gmail.com

**PANDUAN PENULISAN ARTIKEL JURNAL PENELITIAN POLITIK
PUSAT PENELITIAN POLITIK LIPI¹**

***GUIDELINES FOR WRITING ARTICLES IN JURNAL PENELITIAN POLITIK
RESEARCH CENTER FOR POLITIK-LIPI***

Nama Penulis (tanpa gelar)

Nama Instansi

Alamat lengkap institusi penulis

E-mail: penulis@mail.com

Abstract

*This template file provides essential information on how to prepare and submit a full paper to the Jurnal Penelitian Politik. The full paper should be submitted as **Microsoft Office Word (.doc)** file. The title is in bold capital letters and centered at the top of the first page. It must be followed by the author(s) name(s), institution(s). Leave one blank line between the title and the name of the author(s). **Type a summary of your abstract in less than 250 words both in English and Bahasa Indonesia, followed by the keywords up to 5 words.***

Keywords: use 11 pt; lower case; italic; Times New Roman; write alphabetically up to 5 words.

Abstrak

Dokumen template ini menyediakan informasi penting tentang bagaimana mempersiapkan dan mengirimkan artikel untuk Jurnal Penelitian Politik. Artikel lengkap harus dikirimkan dalam format **Microsoft Office Word (.doc)**. Judul artikel harus ditulis dalam format *bold* dan *center* di bagian atas halaman pertama. Setelah itu diikuti oleh nama penulis, nama institusi, dan alamat lengkap institusi penulis. Berikan jarak satu baris antara judul artikel dan nama penulis. Tuliskan abstrak dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, masing-masing kurang dari 250 kata, dan diikuti dengan kata kunci yang terdiri dari 4-5 kata atau frasa.

Kata kunci: ukuran 11 pt, Times New Roman, ditulis alfabetis, maksimal 5 kata/frasa.

¹ Apabila penulis lebih dari satu, bagian ini dapat disebutkan siapa yang menjadi kontributor utama dan siapa yang merupakan kontributor anggota, atau bila semua penulis adalah kontributor utama dapat juga diberi keterangan pada bagian ini.

Pendahuluan

Tulisan yang dikirimkan harus merupakan kajian ilmiah atas isu dan peristiwa yang berkaitan dengan politik dalam negeri dan internasional, baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Tulisan merupakan karya sendiri, bukan saduran atau terjemahan dan belum pernah dipublikasikan dalam bentuk dan bahasa apapun. Selain itu tulisan diharapkan mengandung data atau pemikiran yang baru dan orisinal. Naskah yang dimuat sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi penulis yang bersangkutan.

Naskah lengkap yang dikirim ditulis dengan menggunakan format yang disediakan oleh *template* ini. Ubah semua bagian dalam *template* ini dengan menggunakan isi paper/artikel Anda tanpa mengganti format dan *layout* (ukuran dan tipe font, spasi, margin teks, dll) yang sudah disediakan. Anda dapat menyalin naskah Anda dan menempelkannya dalam format *template* ini tanpa menambahkan *Header* ataupun *Footer*.

Sistematika artikel hasil pemikiran atau telaah adalah: judul; nama penulis (tanpa gelar akademik); nama dan alamat institusi; alamat e-mail penulis; abstrak (maksimal 250 kata dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris); kata kunci (4-5 kata/frasa); pendahuluan, pembahasan (dapat dibagi dalam beberapa sub-judul); penutup; dan referensi.

Pendahuluan harus memaparkan dengan jelas apa masalah yang diangkat dalam tulisan, literatur yang relevan dengan subjek penelitian, metode penelitian, ataupun pendekatan yang digunakan. Gunakan bahasa resmi yang jelas, ilmiah, sesuai dengan Ejaan yang Disempurnakan (EYD), dan dapat dimengerti oleh pembaca dari lintas disiplin ilmu pengetahuan.

Pembahasan

Bagian pembahasan ini merupakan isi pokok dari analisis atau telaah yang dilakukan. **Judul bagian ini dapat disesuaikan atau diubah dengan sub-judul – sub-judul yang sesuai dengan pembahasan.** Bagian ini dapat pula dibagi menjadi beberapa bagian yang disesuaikan dengan sub-judul.

Naskah ditulis dengan format menggunakan ukuran kertas A4 (210 mm x 297 mm) dengan margin kanan 2 cm, margin kiri 3 cm, margin atas dan bawah 2.5 cm. Panjang naskah untuk artikel adalah 20-25 halaman. Naskah ditulis dengan menggunakan format font Times New roman ukuran 12 pt, dan spasi 1,5. Penulisan rujukan sumber pada Jurnal Penelitian Politik menggunakan format *in-text* dengan mengacu pada American Psychological Association (APA) <https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/examples> Ketentuan penulisan rujukan secara lengkap dapat dilihat pada lampiran tentang Format Penulisan Kutipan dan Daftar Pustaka.

Penutup

Bagian penutup dapat berisi kesimpulan hasil pemikiran/analisis ataupun rekomendasi.

Daftar Pustaka

Daftar pustaka memuat semua sumber yang diacu dalam naskah, dapat berasal dari buku, artikel jurnal, laporan hasil penelitian, majalah, surat kabar, dan sumber-sumber internet. Daftar Pustaka dituliskan dengan urutan abjad nama belakang (*family name*). Format penulisan secara lengkap lihat lampiran Format Penulisan Kutipan dan Daftar Pustaka.

**PANDUAN PENULISAN REVIEW BUKU JURNAL PENELITIAN POLITIK
PUSAT PENELITIAN POLITIK LIPI**

***GUIDELINES FOR WRITING BOOK REVIEW IN JURNAL PENELITIAN POLITIK
RESEARCH CENTER FOR POLITIK-LIPI***

Nama Penulis (tanpa gelar)

Nama Instansi
Alamat lengkap institusi penulis

E-mail: penulis@mail.com

Judul Buku : Judul Buku yang Direview
Pengarang : Nama Penulis Buku
Penerbit : Nama Penerbit Buku
Tahun Terbit : Tahun buku terbit
Tebal : 150 + xxii

Abstract

*This template file provides essential information on how to prepare and submit a full paper to the Jurnal Penelitian Politik. The full paper should be submitted as **Microsoft Office Word (.doc)** file. The title is in bold capital letters and centered at the top of the first page. It must be followed by the author(s) name(s), institution(s). Leave one blank line between the title and the name of the author(s). **Type a summary of your abstract in less than 250 words both in English and Bahasa Indonesia, followed by the keywords up to 5 words.***

Keywords: use 11 pt; lower case; italic; Times New Roman; write alphabetically up to 5 words.

Abstrak

Dokumen template ini menyediakan informasi penting tentang bagaimana mempersiapkan dan mengirimkan artikel untuk Jurnal Penelitian Politik. Artikel lengkap harus dikirimkan dalam format **Microsoft Office Word (.doc)**. Judul artikel harus ditulis dalam format *bold* dan *center* di bagian atas halaman pertama. Setelah itu diikuti oleh nama penulis, nama institusi, dan alamat lengkap institusi penulis. Berikan jarak satu baris antara judul artikel dan nama penulis. Tuliskan abstrak dalam bahasa Indonesia dan bahasan Inggris, masing-masing kurang dari 250 kata, dan diikuti dengan kata kunci yang terdiri dari 4-5 kata atau frasa.

Kata kunci: ukuran 11 pt, Times New Roman, ditulis alfabetis, maksimal 5 kata/frasa.

Pendahuluan

Review buku dapat ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Buku yang dapat direview adalah buku dengan tahun terbit paling lama dua tahun sebelum tahun terbit edisi jurnal yang dituju. Buku yang direview merupakan hasil kajian ilmiah atas isu dan peristiwa yang berkaitan dengan politik dalam negeri dan internasional, baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Review buku yang dibuat belum pernah dipublikasikan dalam bentuk dan bahasa apapun. Selain itu tulisan diharapkan mengandung data atau pemikiran yang baru dan orisinal. Naskah yang dimuat sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi penulis yang bersangkutan.

Naskah lengkap yang dikirim ditulis dengan menggunakan format yang disediakan oleh *template* ini. Ubah semua bagian dalam *template* ini dengan menggunakan isi paper/artikel Anda tanpa mengganti format dan *layout* (ukuran dan tipe font, spasi, margin teks, dll) yang sudah disediakan. Anda dapat menyalin naskah Anda dan menempelkannya dalam format *template* ini tanpa menambahkan *Header* ataupun *Footer*.

Sistematikan naskah review buku adalah: judul; nama penulis (tanpa gelar akademik); nama dan alamat institusi; alamat e-mail penulis; keterangan buku yang direview (judul buku, pengarang, penerbit, cetakan, tebal) ; abstrak (maksimal 250 kata dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris); kata kunci (4-5 kata/frasa); pendahuluan, pembahasan (dapat pula dibagi dalam beberapa sub-judul); penutup; dan referensi.

Pendahuluan dapat berupa pemaparan tentang tema buku yang direview, menceritakan tentang latar belakang penulis buku yang direview, siapa target pembaca dari buku tersebut, dan sebagainya. Gunakan bahasa resmi yang jelas, ilmiah, sesuai dengan Ejaan yang Disempurnakan (EYD), dan dapat dimengerti oleh pembaca dari lintas disiplin ilmu pengetahuan.

Pembahasan

Bagian pembahasan ini merupakan isi pokok dari analisis atau telaah yang dilakukan. **Judul bagian ini dapat disesuaikan atau diubah dengan sub-judul – sub-judul yang sesuai dengan pembahasan.** Bagian ini dapat pula dibagi menjadi beberapa bagian yang disesuaikan dengan sub-judul.

Naskah diformat dengan menggunakan ukuran kertas A4 (210 mm x 297 mm) dengan margin kanan 3 cm, margin kiri 2 cm, margin atas dan bawah 2.5 cm. Panjang naskah untuk review buku adalah 10-15 halaman. Naskah ditulis dengan menggunakan format font Times New roman ukuran 12 pt, dan spasi 1,5. Penulisan rujukan sumber pada Jurnal Penelitian Politik menggunakan format *in-text* dengan mengacu pada American Psychological Association (APA) <https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/examples> Ketentuan penulisan rujukan secara lengkap dapat dilihat pada lampiran tentang Format Penulisan Kutipan dan Daftar Pustaka.

Penutup

Bagian penutup dapat berisi kesimpulan, rekomendasi, dan memberikan alasan mengapa buku ini layak atau perlu dibaca.

Daftar Pustaka

Daftar pustaka memuat semua sumber yang diacu dalam naskah, dapat berasal dari buku, artikel jurnal, laporan hasil penelitian, majalah, surat kabar, dan sumber-sumber internet. Daftar Pustaka dituliskan dengan urutan abjad nama belakang (*family name*). Format penulisan secara lengkap lihat lampiran Format Penulisan Kutipan dan Daftar Pustaka.

Format Tabel dan Gambar

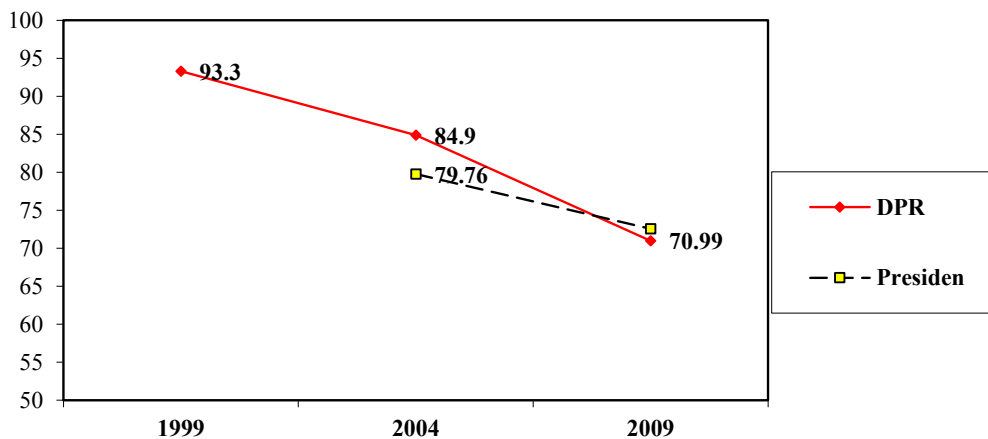
- Tabel dan gambar, untuk tabel dan gambar (grafik) di dalam naskah harus diberi nomor urut.
 - a. Tabel atau gambar harus disertai judul. Judul tabel diletakkan di atas tabel sedangkan judul gambar diletakkan di bawah gambar.
 - b. Penempatan tabel dan gambar harus berdekatan dengan teks yang mengacunya.
 - c. Sumber acuan tabel atau gambar dicantumkan di bawah tabel atau gambar.
 - d. Garis tabel yang dimunculkan hanya pada bagian header dan garis paling bawah tabel, sedangkan untuk garis vertikal pemisah kolom tidak dimunculkan.

Contoh penyajian Tabel:

Tabel 1. Agenda-agenda Besar Konsolidasi

Domain	Vertikal	Horizontal
Internal	<ul style="list-style-type: none"> • Pemantapan kepengurusan partai hingga level terendah • Sosialisasi agenda politik 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemantapan soliditas elite partai pada level DPP • Pemantapan agenda politik menyambut pemilu
Eksternal	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan, pemeliharaan dan pemantapan dukungan masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Penjajagan koalisi dengan partai-partai lain dan kalangan institusi-institusi nonpolitik

Contoh penyajian Gambar/Grafik:



Grafik 2. Tren Partisipasi dalam Pemilu

Sumber: Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Format Penulisan Kutipan dan Daftar Pustaka

- Penulisan kutipan menggunakan format *in-text* dengan ketentuan:

Satu sumber kutipan: (nama penulis, tahun terbit) contoh: (Aspinall, 2010)

Lebih dari satu sumber kutipan: (nama penulis 1, tahun terbit 1; nama penulis

2, tahun terbit 2; dst), contoh: (Jackson, 2019; Svendsen & Lober, 2020; Torino et al., 2019)

- Penulisan sumber daftar pustaka dituliskan dengan urutan abjad nama belakang (*family name*).
- Format penulisan daftar pustaka secara rinci mengikuti aturan sebagai berikut:

Sumber Rujukan	Ketentuan	Contoh
Buku dengan satu pengarang	nama penulis. (tahun terbit). <i>judul buku</i> . nama penerbit.	Budiardjo, M. (2008). <i>Dasar-Dasar Ilmu Politik</i> . Gramedia. Jackson, L. M. (2019). <i>The psychology of prejudice: From attitudes to social action</i> (2nd ed.). American Psychological Association. https://doi.org/10.1037/0000168-000
Buku dengan dua pengarang	nama penulis (dua orang). (tahun terbit). <i>judul buku</i> . nama penerbit.	Aspinall, E., dan M. Mietzner (Eds.). (2010). <i>Problems of Democratisation in Indonesia: Elections, Institutions and Society</i> . ISEAS Publishing.
Buku dengan lebih dari dua pengarang	nama penulis (et al). (tahun terbit). <i>judul buku</i> . nama penerbit.	Ananta, A., et al. (2004). <i>Indonesian Electoral Behaviour: A Statistical Perspective</i> . ISEAS Publishing.
Artikel/tulisan yang menjadi bagian dalam buku (bunga rampai)	nama penulis. (tahun terbit). judul tulisan ditulis tegak. Dalam nama editor (Ed. (jika satu orang)/ Eds. (jika lebih dari satu orang)), <i>judul buku ditulis miring</i> (hlm.xx-xx). nama penerbit.	Morlino, L. (1995). Political Parties and Democratic Consolidation in Southern Europe. Dalam Richard Gunther, P. Nikiforos Diamandouros dan Hans Jurgen Puhle (Eds.), <i>The Politics of Democratic Consolidation: Southern Europe in Comparative Perspective</i> (hlm. 315-388). Johns Hopkins University Press.
Artikel jurnal	nama penulis. (tahun terbit). judul artikel ditulis tegak. <i>nama jurnal, volume jurnal</i> (nomor jurnal), nomor halaman. URL/DOI (jika ada)	Randall, V., dan Lars Svasand. (2002). Party Institutionalization in New Democracies. <i>Party Politics</i> , 8(1), 5–29. Verma, R. (2020). China's Mask Diplomacy to Change Covid-19 Narrative in Europe. <i>Asia Europe Journal</i> , 18(2), 205–209. https://doi.org/10.1007/s10308-020-00576-1 .
Laporan	nama penulis. (tahun). judul laporan. nama penerbit. URL (jika ada)	Mainwaring, S. (1998). <i>Rethinking Party Systems Theory In The Third Wave Of Democratization: The Importance of Party System Institutionalization</i> . (Working Paper #260). Kellogg Institute. National Cancer Institute. (2019). <i>Taking time: Support for people with cancer</i> (NIH Publication No. 18-2059). U.S. Department of Health and Human Services, National Institutes of Health. https://www.cancer.gov/publications/patient-education/takingtime.pdf

Makalah seminar/konferensi	nama penulis. (waktu pelaksanaan kegiatan seminar/ konferensi). <i>judul makalah ditulis miring</i> [Makalah Seminar/ Makalah Konferensi/ deskripsi jenis kegiatan lainnya]. nama kegiatan seminar, tempat kegiatan seminar. URL (jika ada)	Ceron, A., dan Alessandra Caterina Cremonesi. (10-11 Mei 2013). <i>Politicians Go Social: Estimating Intra-Party Heterogeneity (and its Effect) through the Analysis of Social Media</i> [Makalah konferensi]. NYU La Pietra Dialogues on Social Media and Political Participation, Florence. Evans, A. C., et al. (8-11 Agustus 2019). <i>Gun violence: An event on the power of community</i> [Presentasi dalam konferensi]. APA 2019 Convention, Chicago, IL, United States. https://convention.apa.org/2019-video
Tesis/Disertasi	nama penulis. (tahun). <i>judul ditulis miring</i> [Tesis/Disertasi]. nama universitas.	Harris, L. (2014). <i>Instructional leadership perceptions and practices of elementary school leaders</i> [Disertasi]. University of Virginia.
Media Massa	nama penulis. (tanggal berita dimuat), judul artikel ditulis tegak. <i>sumber media</i> , halaman.	Santikarma, D. (1 Agustus 2003). Monumen, Dokumen dan Kekerasan Massal. <i>Kompas</i> , hlm. 12.
Media Online	nama penulis. (tanggal berita dimuat), judul artikel ditulis tegak. <i>sumber media</i> , URL, tanggal akses.	Carey, B. (22 Maret 2019). Can we get better at forgetting? <i>The New York Times</i> . https://www.nytimes.com/2019/03/22/health/memory-forgetting-psychology.html , diakses pada 15 April 2019.

